



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu misi pemerintahan Indonesia yang juga sejalan dengan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan upaya konkrit adalah mendorong dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi setiap pengelola keuangan daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan misi tersebut, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan.

Dalam Kerangka Manajemen Pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berujung pada tahapan evaluasi dan pelaporan yang dalam konteks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Laporan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Beberapa ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memberikan penjelasan secara teknis dan normatif atas Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya mengamanatkan bahwa “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).” Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sejalan dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Secara teknis normatif Standar Akuntansi Berbasis Akrual telah di-*breakdown* melalui Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa Penyajian laporan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berpijak pada landasan hukum tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Manggarai berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada beberapa ketentuan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan standar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, dengan demikian setiap entitas laporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antargenerasi dengan pengertian sebagai berikut

- a. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan secara periodik;
- b. Manajemen adalah membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Kesinambungan antargenerasi (*intergenerational equity*) adalah membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

1.1.2. Tujuan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi.

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Arus Kas;
- i. Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
- j. Perubahan Ekuitas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU;

- g. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- l. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- m. PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- p. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
- q. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- r. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- s. Perpres Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2024;
- t. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- u. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v. Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- w. Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- x. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- y. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor: 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- aa. PMK Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor : 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
- bb. PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
- cc. PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah;
- dd. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal BUMD;
- ee. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ff. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 065);
- gg. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
- hh. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 s.d. 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 03);
- ii. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- jj. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- kk. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4);
- ll. Peraturan Bupati (Perbup) Manggarai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2023 Nomor 70 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 070);
- mm. Perbup Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;
- nn. Perbup Manggarai Nomor 73 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai;
- oo. Perbup Manggarai Nomor 74 Tahun 2023 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- pp. Perbup Manggarai Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 Nomor 224 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 224).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Pengungkapan atas Informasi – Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah adalah salah satu bentuk meningkatnya indikator makro ekonomi dengan kata lain salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 sebesar 19,01%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,17%;
- c. *Gini Ratio* Tahun 2024 sebesar 0,274%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,35%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,93%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,19%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku (PDRB) Tahun 2024 senilai Rp5.943,80 miliar rupiah; dan
- h. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRBADHK) Tahun 2024 senilai Rp3.398,36 miliar rupiah.

Gini Ratio dan Inflasi tidak dapat diuraikan sebagai bagian dari kinerja Ekonomi Makro Kabupaten Manggarai dengan pertimbangan:

- a. Kota-kota di dalam Wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi atau objek survei Inflasi adalah Kota Kupang, Kota Maumere dan Kota Waingapu. Inflasi NTT 2024 di Bawah Target Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menekan angka inflasi lebih rendah dari inflasi secara nasional pada 2023. Inflasi di NTT mencapai 1,19 % pada Desember 2024, sedangkan secara nasional mencapai 1,57 %; dan
- b. Indikator *Gini Ratio* tidak tersedia dalam data BPS Kabupaten Manggarai, sedangkan data BPS Provinsi NTT dan BPS Nasional hanya menyediakan data terbatas untuk Indikator *Gini Ratio* Provinsi NTT dan *Gini Ratio* Nasional.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil persentase penduduk miskin (P-0). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun
1	Kabupaten Manggarai (%)	19,69%	19,01%	0,68
2	Kabupaten Manggarai (ribu jiwa)	70,00	68,39	1,61
3	Provinsi NTT (%)	19,96%	19,02%	0,94
4	Nasional (%)	9,36%	9,03%	0,33
5	Peringkat Provinsi	14	19	5
6	Peringkat Nasional	434	434	0

Sumber Dokumen: Provinsi NTT dalam Angka dan Manggarai dalam Angka, 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai pada Tahun 2023 mencapai 19,69% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 70,00 (ribu jiwa). Angka ini pada Tahun 2024 menurun menjadi sebesar 19,01% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 68,39 (ribu jiwa) sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yakni sebesar 18,88%, maka capaian Tahun 2024 ini berada di atas target RPJMD. Persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ini lebih baik dari keadaan Provinsi NTT namun masih di atas angka Nasional, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang harus tetap menjadi prioritas dan memastikan agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat kegiatan agar persentase/angka kemiskinan ini dapat terus ditekan hingga mencapai persentase/angka yang minimal.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Manggarai (%)	4,63	2,88	1,75



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT (%)	3,33	3,41	(0,08)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (%)	1,53	1,36	0,17
4	Peringkat Provinsi	14	11	3
5	Peringkat Nasional	39	39	0

Sumber Dokumen: Provinsi NTT dalam Angka dan Manggarai dalam Angka,2025

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Manggarai

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Manggarai (%)	1,48	0,66	0,82
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT (%)	0,80	0,85	(0,05)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional (%)	0,23	0,35	(0,12)
4	Peringkat Provinsi	17	17	0
5	Peringkat Nasional	4	4	0

Sumber Dokumen: Provinsi NTT dalam Angka dan Manggarai dalam Angka,2025

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka, terdiri dari : (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Manggarai (%)	2,44	1,17	1,27
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,14	3,02	0,12
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,32	4,91	0,41
4	Peringkat Provinsi	17	21	(4)
5	Peringkat Nasional	254	254	0

Sumber Dokumen: Provinsi NTT dalam Angka dan Manggarai dalam Angka,2025

TPT di Kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebesar 1,17%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Tahun 2024 lebih rendah dari TPT Provinsi NTT (3,02%), walaupun masih lebih rendah dibanding TPT Nasional (4,91%).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.1.3 Gini Ratio

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah senilai 0,74 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Tingkat *Gini Ratio* Kabupaten Manggarai

No.	<i>Gini Ratio</i>	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Tingkat Kab/Kota	0,29	0,29	0,274	0,016
2	Tingkat Provinsi	0,34	0,325 (per semester 1)	0,315 (per Triw 3)	0,01
3	Tingkat Nasional	0,34	0,388 (per semester 1)	0,381 (per Triw 3)	0,007
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-
5	Peringkat Nasional	19	15	-	-

Sumber Dokumen: Provinsi NTT dalam Angka dan Manggarai dalam Angka, 2025

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia/IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia/IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai Tahun 2023 mencapai 68,48 poin dengan kategori



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sedang sementara di tahun 2024 naik mencapai 69,35 sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun
1	Kabupaten/Kota	68,48	69,35	(0,87)
2	Provinsi	68,40	69,14	(0,74)
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	(0,63)
4	Peringkat Provinsi	8	8	0
5	Peringkat Nasional	494	494	0

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai (Susenas)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan sebesar (0,87) poin pada tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Manggarai pada tahun 2024 mencapai 67,89 tahun lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2024 mencapai 67,63 tahun. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,91 tahun dengan harapan lama sekolah 13,73 tahun.

IPM Kabupaten Manggarai pada saat ini berada pada urutan 8 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada urutan 494 di tingkat nasional dari 548 Kab/Kota yang ada di Indonesia pada tahun 2024.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	2.391,36	2.391,36	2.391,36
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,85	3,79	3,93
3	Peringkat Provinsi	13	13	13
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nasional, BPS NTT dan BPS Kabupaten Manggarai (Susenas)

Selama kurun waktu 2020-2021, perekonomian Kabupaten Manggarai mengalami penurunan sangat signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

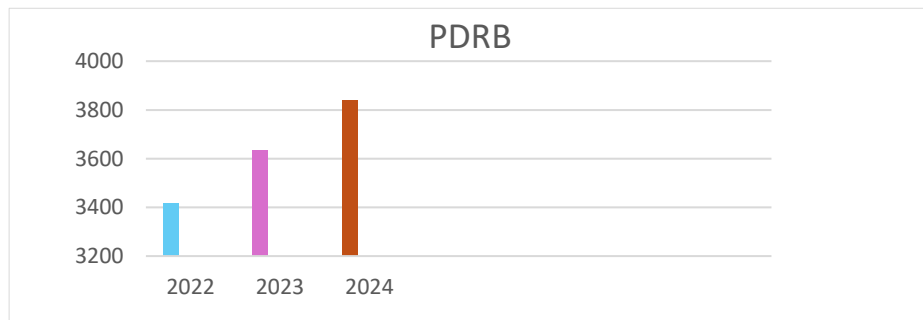
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pandemi Covid-19, namun mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,21% pada tahun 2022. Pada kurun waktu yang sama, Pertumbuhan Ekonomi Nasional bahkan menjadi minus sebesar (2,07%) dan meningkat sebesar 3,69% di tahun 2021. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,83% bertumbuh menjadi sebesar 2,51% pada tahun 2021. Sementara, Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Manggarai Tingkat Inflasi Kabupaten Manggarai Tahun 2024 adalah sebesar 1,19%. Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam satu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Manggarai

No	Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.414,36	3.632,49	3.836,91
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	226,45	250,67	284,11
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.291,77	1.352,24	1.412,68
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.237,62	2.419,42	2.518,24
5	Perubahan Investasi	58,30	56,28	61,71
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.130,78	-2.210,92	-2.169,85
	PDRB	5.097,72	5.500,18	5.943,80

Sumber Dokumen : Kabupaten Manggarai dalam Angka 2025

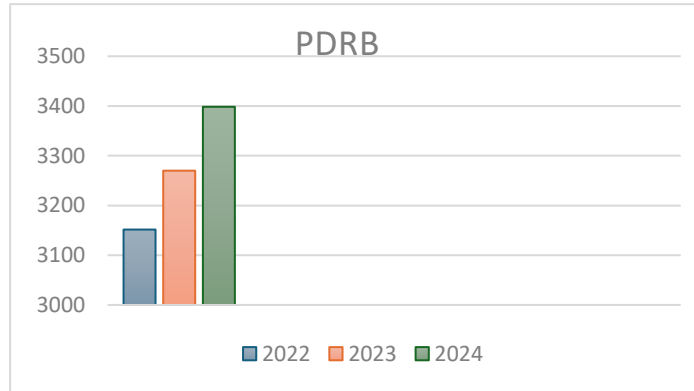


PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 mengalami peningkatan Tahun 2022 senilai Rp5.097,72 pada Tahun 2023 meningkat senilai Rp5.500,18 dan Tahun 2024 naik senilai Rp5.943,80.

PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Rincian Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Manggarai

No	Jenis Pengeluaran	PDRB Kabupaten Manggarai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.296,69	2.368,47	2.438,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	142,05	151,25	166,98
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	764,76	776,85	804,95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.356,14	1.440,62	1.480,16
5	Perubahan Investasi	41,49	40,02	42,87
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.449,60	-1.507,27	-1.535,38
	PDRB	3.151,54	3.269,94	3.398,36

Sumber Dokumen : Kabupaten Manggarai dalam Angka 2025

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2022 senilai Rp3.151,54 miliar pada Tahun 2023 meningkat senilai Rp3.269,94 miliar dan Tahun 2024 naik senilai Rp3.398,36 miliar.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Manggarai

Struktur perekonomian Kabupaten Manggarai dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

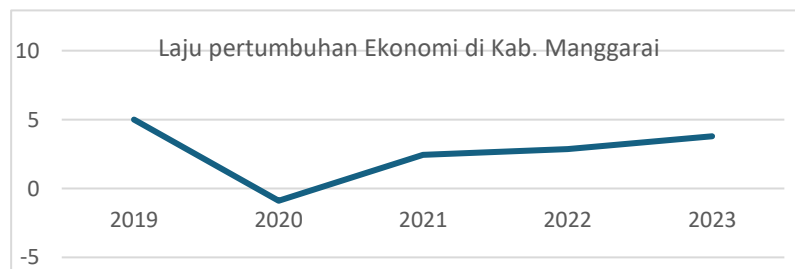
Tabel 2.10 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	A-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.139.346,20	121.1042,40	1.273,10
2	B-Pertambangan dan Penggalian	127.668,20	138.488,00	146,62
3	C-Industri Pengolahan	18.564,30	21.513,40	25,65
4	D-Pengadaan Listrik dan Gas	6.117,80	7.091,20	8,05
5	E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.801,50	6.295,90	6,89
6	F-Konstruksi	715.719,70	799.970,70	821,49
7	G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	495.871,80	571.493,80	636,62
8	H-Transportasi dan Pergudangan	175.025,30	197.790,20	231,10
9	I-Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.821,80	23.908,80	28,10
10	J-Informasi dan Komunikasi	526.954,20	554.363,40	608,77
11	K-Jasa Keuangan dan Asuransi	381.902,80	392.894,40	409,21
12	L-Real Estate	107.526,50	115.847,00	121,72
13	M,N-Jasa Perusahaan	6.761,00	7.308,50	8,00
14	O-Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	728.248,40	759.590,80	894,86
15	P-Jasa Pendidikan	374.382,20	405.742,90	410,24
16	Q-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.002,40	114.915,10	126,15
17	R,S,T,U-Jasa Lainnya	164.554,50	173.938,00	187,26
18	Produk Domestik Regional Bruto	5.097.268,80	5.502.194,50	5.943,80
19	Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00
20	PDRB Provinsi	72.695.280,00	72.695.280,00	0,00
21	PDRB Nasional	11.710.397.800,00	11.710.397.800,00	0,00
22	Peringkat Provinsi	13,00	13,00	0,00
23	Peringkat Nasional	0,00	0,00	0,00

2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 5,00%, Tahun 2020 turun sebesar -0,89%, pada Tahun 2021 naik sebesar 2,43%, pada Tahun 2022 naik sebesar 2,85% dan Tahun 2023 meningkat sebesar 3,79%.

Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Manggarai (%)

No.	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,39	4,48	1,72	0,95
2	Pertambangan dan Penggalian	1,88	2,28	5,31	7,08
3	Industri Pengolahan	-3,73	4,84	6,18	8,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,50	9,08	11,28	15,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,55	1,42	7,75	6,17
6	Konstruksi	6,34	-0,05	7,84	1,34
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	8,76	7,20	9,62
8	Transportasi dan Pergudangan	1,70	3,34	4,72	5,52
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	11,62	19,03	14,86	14,35
10	Informasi dan Komunikasi	3,51	5,00	4,01	2,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,21	0,68	3,45
12	Real Estate	1,20	3,49	4,09	3,64
13	Jasa Perusahaan	-13,79	4,63	4,68	7,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,67	0,10	0,52	7,95
15	Jasa Pendidikan	-0,03	-0,15	4,69	3,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,26	3,02	5,14	3,32
17	Jasa Lainnya	-0,07	0,91	2,97	1,60
	PDRB	2,43	2,85	3,76	3,93

Sumber: Kabupaten Manggarai dalam Angka, 2025

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD TA 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada beberapa prinsip antara lain partisipasi atau melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, disiplin anggaran dan keadilan anggaran, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran. Di samping itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga memperhatikan berbagai temuan aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal sebagai referensi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2.2.1 Pendapatan Daerah

Penetapan Pendapatan Daerah dilakukan melalui perkiraan pendapatan yang dapat dicapai, terukur dan rasional dengan mempertimbangkan potensi Kabupaten Manggarai dan realisasi penerimaan tahun 2024. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan PAD Tahun 2024, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Manggarai.
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.
- 4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Bank telah memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.
- 6) Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, telah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- 7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer dianggarkan sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Perpres tersebut mengatur tentang penganggaran dana Perimbangan sebagai berikut:

- 1) Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2024;
- 2) Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum TA 2024;
- 3) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024;
- 4) Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2024;
- 5) Rincian Alokasi Dana Alokasi Insentif Daerah TA 2024; dan
- 6) Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan TA 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 PP Nomor 12 tahun 2019. Uraian penganggaran atas Lain-Lain pendapatan Daerah Yang sah adalah sebagai berikut :

- 1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran penerimaan hibah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 bersumber dari Hibah IPDM-IP, Hibah PHJD yang bersumber dari APBN yang telah didasari pada Perjanjian.
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang selanjutnya terdistribusi pada beberapa SKPD. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

a. Belanja Operasi

Penganggaran Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- d) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD Kabupaten Manggarai sejalan dengan Ketentuan pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memedomani PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru dianggarkan setelah dipastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi dana Tunjangan profesi dan Tambahan Penghasilan Guru dan tunjangan khusus guru dari APBN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09).

b. Belanja Modal

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Manggarai memperhatikan hal-hal yaitu Alokasi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Manggarai digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah terdistribusi pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Penganggaran Belanja Transfer berpedoman pada PP Nomor 37 tahun 2023, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2) Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Manggarai menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta beberapa PP antara lain PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan anggaran untuk dana Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari dana Transfer setelah dikurangi dana DAK, serta mengalokasikan dana transfer Desa dari APBN sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dimana Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk : 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, 2) penyertaan modal daerah, 3) pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Capaian Target Pendapatan Daerah

Dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan setelah APBD TA 2024 senilai Rp1.301.729.903.517,00 dan terealisasi sebesar 99,03% atau senilai Rp1.289.104.308.257,38 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.301.729.903.517,00	1.289.104.308.257,38	99,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.689.251.998,00	109.307.352.589,08	84,94
Pendapatan Pajak Daerah	35.252.649.534,00	21.270.967.323,00	60,34



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	14.029.871.334,00	7.155.915.070,00	51,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.829.142.453,00	3.579.443.275,00	126,52
Lain-lain PAD yang sah	76.577.588.677,00	77.301.026.921,08	100,94
PENDAPATAN TRANSFER	1.155.171.782.954,00	1.163.065.281.980,00	100,68
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.109.904.136.988,00	1.124.743.136.037,00	101,34
Dana Perimbangan	984.334.697.988,00	995.681.227.037,00	101,15
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	125.569.439.000,00	129.061.909.000,00	102,78
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66
Pendapatan Bagi Hasil	45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan	17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64

2.3.2 Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 mengalokasikan dana untuk Belanja dan Transfer Daerah senilai Rp1.270.562.591.312,00 sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2024 terealisasi 97,34% atau senilai Rp1.236.705.881.370,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja dan Transfer	1.270.562.591.312,00	1.236.705.881.370,13	97,34
Belanja Operasi	907.362.482.322,00	874.604.336.520,03	96,39
Belanja Pegawai	498.276.468.827,00	491.977.680.014,10	98,74
Belanja Barang dan Jasa	324.912.060.694,00	299.480.727.145,13	92,17
Belanja Bunga	2.514.451.646,00	2.504.451.584,80	99,60
Belanja Hibah	72.978.498.481,00	72.645.506.776,00	99,54
Belanja Bantuan Sosial	8.681.002.674,00	7.995.971.000,00	92,11
Belanja Modal	163.254.079.131,00	159.732.790.450,10	97,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.912.285.022,00	40.880.603.233,10	97,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.618.766.156,00	39.089.157.311,00	96,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.279.493.810,00	75.324.159.743,00	98,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.443.534.143,00	4.438.870.163,00	99,90
Belanja Tidak Terduga	1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42
Belanja Tak Terduga	1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42
Belanja Transfer	198.208.954.380,00	201.701.424.200,00	101,76
Belanja Bagi Hasil	4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan	-31.167.312.205,00	-31.184.555.774,33	100,06
Penerimaan	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran	58.391.304.348,00	58.391.304.347,99	100,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	57.391.304.348,00	57.391.304.347,99	100,00

2.4 Mandatory Spending dalam Penyusunan APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam postur APBD seperti diantaranya persentase belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, pengawasan, perlindungan Sosial dampak pandemi, kenaikan inflasi dan kenaikan BBM serta penjelasan atas capaiannya. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai meliputi hal-hal sebagai berikut :

2.4.1 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah senilai 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp437.610.560.608,00 dari Nilai Belanja Daerah senilai Rp1.253.957.473.467,00 atau sebesar 34,90%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp436.069.387.465,00 dan nilai belanja daerah senilai Rp1.270.562.591.312,00 atau sebesar 34,32%, Rincian Alokasi Anggaran Belanja lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1. BELANJA		
a. Belanja Pada Dinas Pendidikan	434.085.993.792,00	436.069.387.465,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1. BELANJA		
1) Belanja Operasi	397.510.901.342,00	395.552.554.809,00
a) Belanja Pegawai	288.417.957.750,00	286.424.972.216,00
b) Belanja barang dan jasa	25.438.843.592,00	24.440.413.674,00
c) Belanja Hibah	82.524.100.000,00	83.568.668.919,00
d) Belanja Bantuan Sosial	1.130.000.000,00	1.220.000.000,00
2) Belanja Modal	36.575.092.450,00	40.516.832.656,00
b. Belanja Di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pelaksanaan Fungsi Pendidikan	3.524.566.816,00	0,00
2. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	437.610.560.608,00	436.069.387.465,00
3. Total Belanja Daerah	1.253.957.473.467,00	1.270.562.591.312,00
4. Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	34,90%	34,32%

2.4.2 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai adalah adanya perubahan pembangunan jalan ruas kabupaten yang bersumber dari DAK, pembangunan jaringan irigasi kabupaten dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp358.866.916.580,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.253.957.473.467,00 atau sebesar 28,62%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp314.325.760.477,00 dan nilai belanja daerah senilai Rp1.270.562.591.312,00 atau sebesar 24,74%, Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai TA 2024

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1) Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Daerah	358.866.916.580,00	314.325.760.477,00
a. Belanja Modal:	147.658.671.323,00	163.254.079.131,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1) Tanah;	0,00	0,00
2) Peralatan Dan Mesin;	33.237.955.263,00	41.912.285.022,00
3) Bangunan Dan Gedung;	40.814.424.084,00	40.618.765.157,00
4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	73.438.791.976,00	76.252.805.928,00
5) Aset Tetap Lainnya;	167.500.000,00	4.443.534.143,00
b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan publik (Availability Payment)	72.479.379.709,00	67.567.629.490,00
c. Belanja Pemeliharaan	1.968.827.314,00	1.844.550.701,00
d. Belanja Hibah	122.590.037.560,00	72.978.498.481,00
e. Belanja Bantuan Sosial	14.170.000.674,00	8.681.002.674,00
2) Total Anggaran Belanja Daerah	1.253.957.473.467,00	1.270.562.591.312,00
Persentase Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur terhadap Belanja Daerah	28,62%	24,74%

2.3.3 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp67.018.742.000,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp670.187.420.000,00 atau sebesar 10,00%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp67.686.727.800,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK senilai Rp676.867.278.000,00 sebesar 10,00%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Manggarai TA 2024

No	Komponen Perhitungan	APBD	APBD-Perubahan
1	Alokasi Dana Desa	67.018.742.000,00	67.686.727.800,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	670.187.420.000,00	676.867.278.000,00
3	Persentase Alokasi ADD	10%	10%

2.3.4 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 disebutkan bahwa alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD di atas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp3.104.995.179,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp1.253.957.473.467,00 atau sebesar 0,25%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Manggarai dialokasikan senilai Rp3.340.944.850,00 dan nilai belanja daerah senilai Rp1.270.562.591.312,00 atau sebesar 0,26%, Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2024 Kabupaten Manggarai

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.611.080.179,00	2.840.814.850,00
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.692.100,00	7.672.100,00
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.234.295.179,00	2.444.214.850,00
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.156.000,00	77.320.000,00
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.924.900,00	172.695.900,00
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.512.000,00	59.412.000,00
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000,00	58.500.000,00
2) Program Penyelenggaraan Pengawasan	493.915.000,00	500.130.000,00
a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	411.515.000,00	417.330.000,00
b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	82.400.000,00	82.800.000,00
3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisten	0,00	0,00
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	0,00	0,00
4) Total Alokasi Pengawasan	3.104.995.179,00	3.340.944.850,00
5) Total Belanja Daerah	1.253.957.473.467,00	1.270.562.591.312,00
6) Persentase Alokasi Pengawasan	0,25%	0,26%



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bagian ini akan menjelaskan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan Pemerintahan Daerah. Kabupaten Manggarai mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan predikat Nilai B. Penghargaan tersebut diberikan melalui Surat Nomor B/358/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dimana nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Manggarai sebesar 64,81 atau bertambah 0,43 nilai dari tahun 2023 sebesar 64,38 dengan kategori B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan hasil yang baik.

Hasil evaluasi tahun 2024 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

3.1.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai sebagai penerjemahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manggarai sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010. RPJP ini menjadi kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabupaten Manggarai yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi, Kabupaten Manggarai menghadapi isu strategis dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Isu strategis tersebut disusun dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah di berbagai urusan pemerintahan dan dinamika isu strategis di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian isu strategis Kabupaten Manggarai sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Masih Rendahnya Kesejahteraan Sosial;
- b. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan;
- c. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- e. Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan; dan
- f. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

3.1.2. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2024 yang juga merupakan pelaporan kinerja ketiga periode RPJMD 2021-2026, menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mendorong ketaatan setiap perangkat daerah dalam mengumpulkan data kinerja dalam aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Manggarai. Selain itu, juga telah disusun rencana aksi seluruh perangkat daerah sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau progres realisasi atas target yang diperjanjikan oleh setiap perangkat daerah, Namun demikian masih terdapat masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengukuran kinerja belum dilakukan dengan aplikasi SAKIP Kabupaten Manggarai. Aplikasi masih digunakan untuk pengumpulan data kinerja dan dokumen SAKIP saja;
- b. Rencana aksi yang disusun sudah mulai digunakan untuk menjadi dasar monitoring dan evaluasi, namun monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran sehingga hasil pelaksanaannya belum diketahui tingkat ketercapaian dan kualitasnya;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penentuan strategi, aktivitas, penyesuaian antara kinerja dan anggaran jangka pendek, serta pemberian *reward and punishment* baik kepada individu maupun perangkat daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3.1.3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh perangkat daerah dengan melakukan penguatan informasi yang perlu disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah maupun laporan kinerja seluruh perangkat daerah. Selain itu, dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengunggah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan kinerja seluruh perangkat daerah pada *website* Pemerintah Kabupaten Manggarai. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Laporan kinerja belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan belum menginformasikan secara lengkap terkait hasil analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja, data *benchmark* kinerja atas indikator kinerja yang diukur baik oleh Provinsi NTT maupun nasional, serta upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala untuk mencapai kinerja; dan
- b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

3.1.4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2024.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

- a. Efektif apabila target kinerja sasaran tercapai; dan
- b. Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan efisien dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan tidak efisien.

3.1.5. Realisasi Pendapatan

Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Manggarai TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	1.301.729.903.517,00	1.289.104.308.257,38	99,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.689.251.998,00	109.307.352.589,08	84,94



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	35.252.649.534,00	21.270.967.323,00	60,34
Pendapatan Retribusi Daerah	14.029.871.334,00	7.155.915.070,00	51,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.829.142.453,00	3.579.443.275,00	126,52
Lain-lain PAD yang sah	76.577.588.677,00	77.301.026.921,08	100,94
PENDAPATAN TRANSFER	1.155.171.782.954,00	1.163.065.281.980,00	100,68
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.109.904.136.988,00	1.124.743.136.037,00	101,34
Dana Perimbangan	984.334.697.988,00	995.681.227.037,00	101,15
Dana Desa	125.569.439.000,00	129.061.909.000,00	102,78
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66
Pendapatan Bagi Hasil	45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 direncanakan senilai Rp1.301.729.903.517,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp128.689.251.998,00, Pendapatan Transfer senilai Rp1.155.171.782.954,00, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp17.868.868.565,00. Realisasi pendapatan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 adalah senilai Rp1.289.104.308.257,38 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp109.307.352,589,08, Pendapatan Transfer senilai Rp1.163.065.281.980,00, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp16.731.673.688,30.

3.1.6. Realisasi Belanja

Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah pada tabel berikut untuk melihat pencapaian kinerja keuangan untuk belanja.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah TA 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja dan Transfer	1.270.562.591.312,00	1.236.705.881.370,13	97,34
Belanja Operasi	907.362.482.322,00	874.604.336.520,03	96,39
Belanja Pegawai	498.276.468.827,00	491.977.680.014,10	98,74
Belanja Barang dan Jasa	324.912.060.694,00	299.480.727.145,13	92,17
Belanja Bunga	2.514.451.646,00	2.504.451.584,80	99,60
Belanja Hibah	72.978.498.481,00	72.645.506.776,00	99,54
Belanja Bantuan Sosial	8.681.002.674,00	7.995.971.000,00	92,11
Belanja Modal	163.254.079.131,00	159.732.790.450,10	97,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.912.285.022,00	40.880.603.233,10	97,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.618.766.156,00	39.089.157.311,00	96,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.279.493.810,00	75.324.159.743,00	98,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.443.534.143,00	4.438.870.163,00	99,90
Belanja Tak Terduga	1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42
Belanja Tak Terduga	1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42
Belanja Transfer	198.208.954.380,00	201.701.424.200,00	101,76



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bagi Hasil	4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81
Pembiayaan	(31.167.312.205,00)	(31.184.555.774,33)	100,06
Penerimaan	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran	58.391.304.348,00	58.391.304.347,99	100,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	57.391.304.348,00	57.391.304.347,99	100,00

Anggaran Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 direncanakan senilai Rp1.270.562.591.312,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp907.362.482.322,00, Belanja Modal senilai Rp163.254.079.131,00, Belanja Tidak terduga senilai Rp1.737.075.479,00, Belanja Transfer senilai Rp198.208.954.380,00 dan Anggaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 senilai (Rp31.167.312.205,00) yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp27.223.992.143,00 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp58.391.304.348,00.

Realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 senilai Rp1.236.705.881.370,13, yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp874.604.336.520,03, Belanja Modal senilai Rp159.732.790.450,10, Belanja Tidak Terduga senilai Rp667.330.200,00, Belanja Transfer senilai Rp201.701.424.200,00, dan Realisasi Pembiayaan senilai (Rp31.184.555.774,33) yang terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp27.206.748.573,66, dikurangi realisasi Pengeluaran senilai Rp58.391.304.347,99.

3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

3.2.1 Pendapatan Daerah

Secara umum penyerapan pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Manggarai yaitu sebesar 99,03%. Namun bila dilihat dari realisasi per komponen pendapatan daerah maka terdapat beberapa komponen pendapatan daerah yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan antara lain sebagai berikut :

- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak yang sifatnya *self assessment*;
- Belum diterapkan sepenuhnya sistem pembayaran pajak dan retribusi *online*;
- Adanya penghapusan Perda untuk tarif retribusi seperti Retribusi Terminal dan Retribusi Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- d. Kurang optimalnya pengawasan pengelolaan penerimaan dari hasil retribusi daerah, dalam rangka meminimalisir penyimpangan atas hasil penerimaan retribusi tersebut.

3.2.2 Belanja Daerah dan Transfer

Penyerapan belanja dan transfer daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 adalah sebesar 97,34%. Sisa Belanja Daerah yang tidak terserap disebabkan antara lain:

- a. Tidak terealisasinya beberapa kegiatan pembangunan dengan sumber dananya adalah Dana Alokasi Khusus;
- b. Kurang adanya konsistensi pada kalender kerja daerah; dan
- c. Kurang cermat dalam proses perencanaan kegiatan.

3.3.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang lebih besar dari penerimaan itu disebabkan karena adanya pengembalian pinjaman daerah. Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah khususnya penerimaan kembali investasi Non Permanen Lainnya sangat rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam pengembalian oleh peminjam.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna diantaranya adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Manggarai, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai, tidak termasuk perusahaan daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah SKPD Kabupaten Manggarai yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat sebanyak 43 SKPD yang terdiri dari 21 Dinas, 5 Badan, 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 1 Sekretariat, 12 Kecamatan, dan 1 Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No.	SKPD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD. Ben Mboi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Peternakan
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
24	Sekretariat Daerah
25	Sekretariat Dewan
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah
28	Badan Pendapatan Daerah
29	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
30	Inspektorat Daerah
31	Kecamatan Langke Rembong
32	Kecamatan Ruteng
33	Kecamatan Satar Mese
34	Kecamatan Reok
35	Kecamatan Cibal
36	Kecamatan Wae Ri'i
37	Kecamatan Satar Mese Barat
38	Kecamatan Rahong Utara
39	Kecamatan Lelak
40	Kecamatan Reok Barat
41	Kecamatan Cibal Barat
42	Kecamatan Satar Mese Utara
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Struktur SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai di Tahun 2023 mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Perangkat daerah yang mengalami perubahan yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Secara umum pengakuan aset dilakukan (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Setara Kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Pengeluaran kas menjadi Investasi Jangka Pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi Jangka Pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Untuk Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban Dibayar Dimuka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran barang persediaan. Pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In, First Out/FIFO*).

6) **Aset untuk Dikonsolidasikan**

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu Rekening Koran SKPD (R/K SKPD). Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen dapat berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah, dan Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka Panjang apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa dividen tunai; dan/atau dividen saham.

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Manggarai harus mencatat aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Tabel 4.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	5.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan	100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
6	Aset Tetap Lainnya- Bahan bercorak Kesenian/Kebudayaan	500.000,00
7	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah masa manfaat, dan/atau bertambah kapasitas, dan/atau bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau bertambah volume, serta (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (*residu*). Periode penghitungan penyusutan dilakukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a) Tanah;
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c) Aset Tetap Lainnya selain Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan;
- d) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;

Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yaitu (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya, serta Informasi penyusutan, meliputi Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

Karena sifat pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukkan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukkan yang lain. Peruntukkan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukkan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukkan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

diungkapkan dalam CaLK. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Masa manfaat aset lainnya ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Masa Manfaat Aset Lainnya

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	<i>Software Komputer</i>	10
2	Lisensi	10
3	<i>Franhise</i>	10
4	Paten Biasa	10
5	Merek	10
6	<i>Detailed Engineering Design</i>	10

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang kepada Masyarakat (Obligasi). Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP 9 tentang Kewajiban disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Sesuai Paragraf 32 PSAP 9 tentang Kewajiban, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

- Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- Pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja (Satker)/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA, Dana Darurat-LRA, dan Pendapatan Lainnya-LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- c. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- d. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- e. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah provinsi, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- f. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- g. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
- h. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah; dan

- i. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum;
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
- e. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam CaLK.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di RKUD. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari

transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Surplus/Defisit – LRA, Pembiayaan Neto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan), dan Perubahan SAL.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dan Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas.

- a. Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan; dan
- b. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diklasifikasikan menjadi: Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga.

- a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial;
- b. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- c. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. Beban Tak Terduga adalah beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban diukur sesuai dengan (1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; (2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi; dan (3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain pengeluaran beban tahun berkenaan, pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan-misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan: (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
<u>Rp1.301.729.903.517,00</u>	<u>Rp1.289.104.308.257,38</u>	<u>Rp1.216.213.398.172,35</u>

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	128.689.251.998,00	109.307.352.589,08	84,94	124.626.655.943,35
2	Pendapatan Transfer	1.155.171.782.954,00	1.163.065.281.980,00	100,68	1.087.761.742.229,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	17.868.868.565,00	16.731.673.688,30	93,64	3.825.000.000,00
	Jumlah	1.301.729.903.517,00	1.289.104.308.257,38	99,03	1.216.213.398.172,35

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 senilai Rp1.289.104.308.257,38 atau sebesar 99,03% dari anggaran senilai Rp1.301.729.903.517,00. Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
<u>Rp128.689.251.998,00</u>	<u>Rp109.307.352.589,08</u>	<u>Rp124.626.655.943,35</u>

Realisasi PAD TA 2024 senilai Rp109.307.352.589,08 atau sebesar 84,94% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD yaitu senilai Rp128.689.251.998,00. Penjelasan atas masing – masing pos PAD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	35.252.649.534,00	21.270.967.323,00	60,34	23.729.337.459,76
2	Retribusi Daerah	14.029.871.334,00	7.155.915.070,00	51,00	9.001.027.062,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.829.142.453,00	3.579.443.275,00	126,52	5.567.584.252,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	76.577.588.677,00	77.301.026.921,08	100,94	86.328.707.169,17
	Jumlah	128.689.251.998,00	109.307.352.589,08	84,94	124.626.655.943,35

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
<u>Rp35.252.649.534,00</u>	<u>Rp21.270.967.323,00</u>	<u>Rp23.729.337.459,76</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Manggarai selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	682.899.184,00	754.750.053,00	110,52	671.848.918,00
2	Pajak Restoran	3.218.496.930,00	2.559.530.061,00	79,53	2.394.095.962,00
3	Pajak Hiburan	97.968.200,00	0,00	0,00	7.838.000,00
4	Pajak Reklame	198.379.800,00	229.977.181,00	115,93	138.215.750,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.200.000.000,00	6.926.709.317,00	96,20	5.691.999.322,59
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.746.247.677,00	5.010.318.955,00	31,82	8.964.219.356,00
7	Pajak Air Tanah	126.621.918,00	248.838.358,00	196,52	41.903.377,00
8	PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.504.502.187,00	4.670.822.047,00	84,85	4.232.201.285,17
9	Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.477.533.638,00	870.021.351,00	35,12	1.587.015.489,00
Jumlah		35.252.649.534,00	21.270.967.323,00	60,34	23.729.337.459,76

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp21.270.967.323,00 atau sebesar 60,34% dari anggaran senilai Rp35.252.649.534,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp2.458.370.136,76 jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2023.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp14.029.871.334,00	Rp7.155.915.070,00	Rp9.001.027.062,42

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan realisasi selama TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	827.555.000,00	449.318.950,00	54,29	3.433.523.420,42
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00	485.126.000,00	60,64	597.468.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	284.398.000,00	75,72	185.453.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	255.611.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	8.146.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	351.021.447,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.394.612.659,00	1.291.509.500,00	29,39	793.379.860,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.176.947.950,00	3.167.517.435,00	99,70	2.051.694.980,00
10	Retribusi Tempat Pelelangan	24.120.000,00	4.620.000,00	19,15	21.330.000,00
11	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	106.759.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	165.000.000,00	257.240.000,00	155,90	165.440.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475,00	5.678.420,00	40,13	9.055.980,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	389.391.950,00	330.719.000,00	84,93	220.258.000,00
15	Retribusi Produksi Usaha Daerah	3.662.500.000,00	823.537.500,00	22,49	533.980.000,00
16	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	910.000,00
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	56.250.265,00	28,13	265.895.875,00
Jumlah		14.029.871.334,00	7.155.915.070,00	51,00	9.001.027.062,42

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 senilai Rp7.155.915.070,00 atau sebesar 51,00% dari anggaran senilai Rp14.029.871.334,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp1.845.111.992,42 jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah TA 2023.

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah menurut SKPD Pengelola TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
1	Dinas Kesehatan	827.555.000,00	449.318.950,00	54,29	3.182.038.420,42
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	827.555.000,00	449.318.950,00	54,29	3.182.038.420,42
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.300.000.000,00	382.096.265,00	29,39	600.415.035,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.000.000,00	325.846.000,00	29,62	334.519.160,00
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	19.632.128,00	0,00	265.895.875,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	36.618.137,00	18,31	0,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Dinas Perhubungan	389.743.775,00	290.076.420,00	74,43	558.688.980,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300,00	284.398.000,00	75,72	185.453.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	256.511.000,00
	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	106.759.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475,00	5.678.420,00	40,13	9.055.980,00
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	910.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.895.000,00	108,95	341.211.447,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	332.251.447,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	10.895.000,00	108,95	8.960.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	350.000.000,00	329.299.000,00	94,09	219.828.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000,00	329.299.000,00	94,09	219.828.000,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	300.000.000,00	181.587.500,00	60,53	289.980.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	5.000.000,00	41,67	5.000.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	288.000.000,00	176.587.500,00	61,32	284.980.000,00
8	Dinas Peternakan	2.739.500.000,00	553.390.000,00	20,20	597.925.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	251.485.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	165.000.000,00	257.240.000,00	155,90	165.440.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.574.500.000,00	296.150.000,00	11,50	181.000.000,00
9	Dinas Perikanan	863.511.950,00	356.840.000,00	41,32	108.530.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	24.120.000,00	4.620.000,00	19,15	21.330.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	39.391.950,00	1.420.000,00	3,60	17.600.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	800.000.000,00	350.800.000,00	43,85	69.600.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00	485.126.000,00	60,64	597.468.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,00	485.126.000,00	60,64	597.468.000,00
11	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	8.146.500,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	8.146.500,00
12	Badan Pendapatan Daerah	6.449.560.609,00	4.117.285.935,00	63,84	2.495.695.680,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.272.612.659,00	949.768.500,00	29,02	444.900.700,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.176.947.950,00	3.167.517.435,00	99,70	2.050.794.980,00
	Jumlah	14.029.871.334,00	7.155.915.070,00	51,00	9.001.027.062,42



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp2.829.142.453,00	Rp3.579.443.275,00	Rp5.567.584.252,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah/Deviden atas penyertaan modal dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) TA 2024. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 senilai Rp3.579.443.275,00 atau sebesar 126,52% dari anggaran senilai Rp2.829.142.453,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp1.988.140.977,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp76.577.588.677,00	Rp77.301.026.921,08	Rp86.328.707.169,17

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun rutin, dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Lain – Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro	1.404.200.337,00	731.050.640,60	52,06	3.488.280.627,39
3	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	265.523.889,00	17,70	788.023,59
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	289.276.567,00	648.205.077,07	224,08	827.833.169,84
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	753.000.000,00	893.564.289,00	118,67	27.388.696,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	3.621.111.773,00	870.689.407,72	24,04	1.010.955.883,51
7	Pendapatan BLUD	69.000.000.000,00	73.891.993.617,69	107,09	65.208.938.848,84
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	15.764.521.920,00
Jumlah		76.577.588.677,00	77.301.026.921,08	100,94	86.328.707.169,17

Pendapatan BLUD pada BLUD RSUD Ruteng Tahun 2024 senilai Rp73.891.993.617,69 atau sebesar 107,09% dari anggaran senilai Rp69.000.000.000,00 yang merupakan pendapatan jasa layanan, pendapatan hasil kerjasama dan Pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan BLUD dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan BLUD TA 2024

No	Jenis Pendapatan	Pendapatan TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan	73.380.065.790,00
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	371.272.306,00
3	Pendapatan BLUD yang Sah	140.655.521,69
Jumlah		73.891.993.617,69

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp1.155.171.782.954,00	Rp1.163.065.281.980,00	Rp1.087.761.742.229,00

Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan realisasi untuk TA 2024 adalah sebagai berikut :

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp984.334.697.988,00	Rp995.681.227.037,00	Rp918.579.367.217,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi untuk TA 2024 sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp4.335.095.000,00	Rp5.824.669.000,00	Rp6.438.985.829,00

Realisasi DBH Pajak pada TA 2024 senilai Rp5.824.669.000,00 dari anggaran senilai Rp4.335.095.000,00 atau sebesar 134,36% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.347.269.000,00	2.778.028.000,00	206,20	2.667.194.059,00
2	DBH PPh Pasal 21	2.742.770.000,00	2.742.770.000,00	100,00	3.336.217.400,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	245.056.000,00	303.871.000,00	124,00	435.574.370,00
Jumlah		4.335.095.000,00	5.824.669.000,00	134,36	6.438.985.829,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp2.589.819.000,00	Rp2.589.809.000,00	Rp3.061.632.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2024 senilai Rp2.589.809.000,00 dari anggaran senilai Rp2.589.819.000,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	960.863.000,00	960.853.000,00	100,00	1.850.317.600,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	23.265.000,00	23.265.000,00	100,00	35.199.200,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.605.691.000,00	1.605.691.000,00	100,00	1.176.115.200,00
Jumlah		2.589.819.000,00	2.589.809.000,00	100,00	3.061.632.000,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp670.187.420.000,00</u>	<u>Rp677.515.472.202,00</u>	<u>Rp596.218.538.347,00</u>

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 direalisasikan senilai Rp677.515.472.202,00 atau sebesar 101,09% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp670.187.420.000,00. Realisasi DAU dibagi menjadi dua kategori yaitu Dana *Specific Grant* (DAU yang ditentukan penggunaannya) dan Dana *Block Grant* (DAU yang tidak ditentukan penggunaannya) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
A	DAU <i>Specific Grant</i>	166.756.807.202,00	166.756.807.202,00	100,00	200.031.491.000,00
1	Bidang Pekerjaan Umum	23.072.664.000,00	23.072.664.000,00	100,00	30.805.463.000,00
2	Bidang Kesehatan	42.694.287.000,00	42.694.287.000,00	100,00	48.466.336.000,00
3	Bidang Pendidikan	72.472.296.000,00	72.472.296.000,00	100,00	73.065.550.000,00
4	Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	5.200.000.000,00
5	Penggajian Formasi PPPK	11.243.644.202,00	11.243.644.202,00	100,00	42.494.142.000,00
6	Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke Tiga Belas Bagi Guru ASN Daerah	12.073.916.000,00	12.073.916.000,00	100,00	0,00
B	DAU <i>Block Grant</i>	503.430.612.798,00	510.758.665.000,00	101,46	396.187.047.347,00
1	DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	503.430.612.798,00	510.758.665.000,00	101,46	396.187.047.347,00
Total A+B		670.187.420.000,00	677.515.472.202,00	101,09	596.218.538.347,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp307.222.363.988,00</u>	<u>Rp309.751.276.835,00</u>	<u>Rp312.860.211.041,00</u>

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp309.751.276.835,00 atau sebesar 100,82% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp307.222.363.988,00. Realisasi DAK dengan rincian sebagai berikut:

1. DAK Fisik

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp114.943.952.421,00</u>	<u>Rp114.943.944.920,00</u>	<u>Rp131.686.954.206,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi DAK Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp114.943.944.920,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp114.943.952.421,00. Realisasi DAK Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan	19.847.536.159,00	19.847.536.159,00	100,00	25.508.466.683,00
2	DAK Fisik-Bidang Pertanian	12.779.433.000,00	12.779.433.000,00	100,00	9.288.099.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Jalan	38.192.213.994,00	38.192.213.993,00	100,00	46.168.730.280,00
4	DAK Fisik-Bidang Air Minum	3.399.821.558,00	3.399.814.058,00	100,00	5.922.214.429,00
5	DAK Fisik-Bidang Sanitasi	9.774.105.000,00	9.774.105.000,00	100,00	7.906.965.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Irigasi	6.199.949.850,00	6.199.949.850,00	100,00	5.815.287.318,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB	19.977.028.110,00	19.977.028.110,00	100,00	31.077.191.496,00
8	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah	4.480.925.400,00	4.480.925.400,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Pariwisata	292.939.350,00	292.939.350,00	0,00	0,00
Jumlah		114.943.952.421,00	114.943.944.920,00	100,00	131.686.954.206,00

2. DAK Non Fisik

Anggaran TA 2024

Rp192.278.411.567,00

Realisasi TA 2024

Rp194.807.331.915,00

Realisasi TA 2023

Rp181.173.256.835,00

Realisasi DAK Non Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp194.807.331.915,00 atau sebesar 101,32% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp192.278.411.567,00. Realisasi DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	69.870.100.000,00	69.785.662.348,00	99,88	71.815.757.971,00
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	100,00	1.505.000.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	67.320.726.000,00	68.999.158.000,00	102,49	48.451.223.000,00
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.918.500.000,00	3.996.250.000,00	136,93	1.413.500.000,00
5.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.687.301.000,00	6.711.732.000,00	100,37	18.180.952.000,00
6.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.163.770.000,00	6.108.975.000,00	99,11	6.356.138.550,00
7.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.734.240.000,00	1.621.780.000,00	93,52	1.962.990.000,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	27.345.915.016,00	27.696.746.016,00	101,28	25.659.700.708,00
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	350.831.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.120.818.117,00	4.120.818.117,00	100,00	4.020.869.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	783.701.000,00	783.701.000,00	100,00	0,00
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	DAK Non Fisik-PK2UMK	995.775.934,00	995.775.934,00	100,00	857.400.406,00
14.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	842.731.500,00	842.731.500,00	100,00	949.725.000,00
15.	DAK Non Fisik-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	1.719.002.000,00	100,00	0,00
Jumlah		192.278.411.567,00	194.807.331.915,00	101,32	181.173.256.835,00

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp125.569.439.000,00</u>	<u>Rp129.061.909.000,00</u>	<u>Rp133.791.606.000,00</u>

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp129.061.909.000,00 dan senilai Rp133.791.606.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	5.809.126.000,00
2	Dana Desa	125.569.439.000,00	129.061.909.000,00	102,78	127.982.480.000,00
Jumlah		125.569.439.000,00	129.061.909.000,00	102,78	133.791.606.000,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat Lainnya meliputi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dengan realisasi untuk TA 2024 adalah sebagai berikut :

5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID)

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp5.809.126.000,00</u>

Realisasi DID TA 2024 senilai Rp0,00 dari anggaran senilai Rp0,00 atau 0%. Pada TA 2023, realisasi DID senilai Rp5.809.126.000,00.

5.1.1.2.2.2. Dana Desa

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp125.569.439.000,00</u>	<u>Rp129.061.909.000,00</u>	<u>Rp127.982.480.000,00</u>

Realisasi Dana Desa untuk TA 2024 senilai Rp129.061.909.000,00 atau sebesar 102,78% dari anggaran senilai Rp125.569.439.000,00 untuk 145 Desa yang ada di Kabupaten Manggarai. Realisasi Transfer Dana Desa tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp1.079.429.000,00 dibandingkan dengan realisasi Transfer Dana Desa Tahun 2023 senilai Rp127.982.480.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Terdapat perbedaan nilai anggaran dan realisasi Dana Desa pada TA 2024 senilai Rp3.492.470.000,00 (Rp129.061.909.000,00-Rp125.569.439.000,00) dikarenakan terdapat tambahan alokasi kinerja dana desa untuk 29 Desa yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing Desa yang belum dianggarkan dalam APBD TA 2024.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp45.267.645.966,00	Rp38.322.145.943,00	Rp35.390.769.012,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi NTT dengan realisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp38.322.145.943,00 dan senilai Rp35.390.769.012,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp45.267.645.966,00	Rp38.322.145.943,00	Rp35.390.769.012,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk TA 2024 senilai Rp38.322.145.943,00 atau sebesar 84,66% dari anggaran senilai Rp45.267.645.966,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.587.220.268,00	6.827.758.929,00	71,22	3.929.193.338,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.163.196.700,00	3.242.548.236,00	77,89	3.556.679.576,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.766.659.161,00	11.344.476.488,00	82,41	11.921.598.755,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.946.175,00	32.670.113,00	83,89	44.801.082,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.711.623.662,00	16.874.692.177,00	95,27	15.938.496.261,00
Jumlah		45.267.645.966,00	38.322.145.943,00	84,66	35.390.769.012,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp17.868.868.565,00	Rp16.731.673.688,30	Rp3.825.000.000,00

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk TA 2024 senilai Rp16.731.673.688,30 atau sebesar 93,64% dari anggaran senilai Rp17.868.868.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp0,00	Rp0,00	Rp3.825.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Hibah di Kabupaten Manggarai TA 2024 tidak dianggarkan dan direalisasikan. Sedangkan realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 senilai Rp3.825.000.000,00 merupakan hibah air minum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hibah Air Minum	0,00	0,00	0,00	3.825.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	3.825.000.000,00

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp17.868.868.565,00	Rp16.731.673.688,30	Rp0,00

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk TA 2024 senilai Rp16.731.673.688,30 atau sebesar 93,64% dari anggaran senilai Rp17.868.868.565,00. Realisasi tersebut merupakan pendapatan Dana Kapitasi pada 24 Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang ada di Kabupaten Manggarai senilai Rp14.048.679.888,30, pendapatan prolanis pada tujuh puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai senilai Rp356.604.600,00, dan pendapatan non kapitasi pada 24 puskesmas senilai Rp2.326.389.200,00. Realisasi tersebut dapat dijelaskan pada rincian berikut:

a. Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP TA 2024

Pendapatan Dana Kapitasi pada 24 Puskesmas dan satu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama yang ada di Kabupaten Manggarai senilai Rp14.048.679.888,30 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP TA 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2024	Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK	Jumlah
1	Anam	277.774.733,00	6.325.181,59	284.099.914,59
2	Bangka Kenda	520.090.264,00	22.160.521,72	542.250.785,72
3	Bea Mese	478.151.656,00	6.188.723,20	484.340.379,20
4	Cancar	910.269.957,00	106.529.852,41	1.016.799.809,41
5	Dintor	333.217.132,00	10.729.863,75	343.946.995,75
6	Iteng	483.449.885,00	13.232.144,52	496.682.029,52
7	Ketang	515.950.452,00	16.716.798,05	532.667.250,05
8	Kota	1.592.198.303,00	74.681.123,05	1.666.879.426,05
9	Langke Majok	479.425.778,00	61.651.834,59	541.077.612,59
10	La'o	1.008.638.148,00	80.201.382,89	1.088.839.530,89
11	Loce	321.252.528,00	42.841.332,50	364.093.860,50
12	Nanu	502.337.938,00	48.435.653,92	550.773.591,92
13	Narang	335.213.960,00	4.246.408,02	339.460.368,02
14	Pagal	888.814.085,00	21.331.573,75	910.145.658,75
15	Ponggeok	611.818.626,00	59.304.977,13	671.123.603,13
16	Reo	810.686.961,00	46.696.470,67	857.383.431,67



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Puskesmas	Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2024	Pengembalian Temuan Pemeriksaan BPK	Jumlah
17	Timung	485.096.191,00	52.460.960,94	537.557.151,94
18	Todo	285.988.862,00	3.830.323,96	289.819.185,96
19	Wae Codi	483.358.776,00	44.495.963,26	527.854.739,26
20	Wae Kajong	312.111.615,00	21.920.408,27	334.032.023,27
21	Wae Mbeleng	664.735.530,00	48.358.998,43	713.094.528,43
22	Wangko	442.644.166,00	48.167.595,51	490.811.761,51
23	Watu Alo	314.457.454,00	264.547,17	314.722.001,17
24	RS Pratama Reo	106.450.498,00	0,00	106.450.498,00
25	Langgo	43.773.751,00	0,00	43.773.751,00
Jumlah		13.207.907.249,00	840.772.639,30	14.048.679.888,30

b. Pendapatan Prolanis pada FKTP TA 2024

Pendapatan prolanis pada tujuh puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai senilai Rp356.604.600,00 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Pendapatan Prolanis pada FKTP TA 2024

No	Nama Puskesmas	Pendapatan Dana Prolanis 2024 (Rp)
1	Cancar	87.941.800,00
2	Kota	27.273.900,00
3	Pagal	71.704.600,00
4	Reo	1.904.100,00
5	Timung	8.972.200,00
6	Wae Mbeleng	68.083.000,00
7	Wangko	90.725.000,00
Jumlah		356.604.600,00

c. Pendapatan Non Kapitasi pada FKTP TA 2024

Pendapatan non kapitasi pada 24 puskesmas senilai Rp2.326.389.200,00 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Pendapatan Non Kapitasi pada FKTP TA 2024

No	Nama Puskesmas	Pendapatan Non Kapitasi (Rp)
1	Anam	76.726.000,00
2	Bangka Kenda	52.000.000,00
3	Bea Mese	69.177.200,00
4	Cancar	80.285.000,00
5	Dintor	42.158.000,00
6	Iteng	87.060.100,00
7	Ketang	85.094.600,00
8	Kota	67.945.000,00
9	La'o	175.855.000,00
10	Langke Majok	84.242.600,00
11	Loce	45.619.100,00
12	Nanu	96.822.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Puskesmas	Pendapatan Non Kapitasi (Rp)
13	Narang	38.139.000,00
14	Pagal	240.693.600,00
15	Ponggeok	155.266.200,00
16	Reo	226.128.000,00
17	Timung	77.480.000,00
18	Todo	25.365.000,00
19	Wae Codi	101.691.100,00
20	Wae Kajong	49.796.900,00
21	Wae Mbeleng	99.253.900,00
22	Wangko	37.185.000,00
23	Watu Alo	69.260.000,00
24	Langgo	22.350.000,00
25	RS Pratama Reo	220.891.200,00
	Admin Transfer Bank pada 25 Puskesmas	(95.700,00)
TOTAL		2.326.389.200,00

5.1.2. Belanja Daerah

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp1.270.562.591.312,00	Rp1.236.705.881.370,13	Rp1.275.854.681.732,48

Pada TA 2024, terdapat sebanyak 43 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan pengguna anggaran. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2024 senilai Rp1.236.705.881.370,13 atau sebesar 97,34% dari anggaran senilai Rp1.270.562.591.312,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	907.362.482.322,00	874.604.336.520,03	96,39	788.068.796.446,48
2	Belanja Modal	163.254.079.131,00	159.732.790.450,10	97,84	290.872.850.601,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.737.075.479,00	667.330.200,00	38,42	3.604.625.600,00
4	Belanja Transfer	198.208.954.380,00	201.701.424.200,00	101,76	193.308.409.085,00
Jumlah		1.270.562.591.312,00	1.236.705.881.370,13	97,34	1.275.854.681.732,48

5.1.2.1. Belanja Operasi

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp907.362.482.322,00	Rp874.604.336.520,03	Rp788.068.796.446,48

Belanja Operasi Kabupaten Manggarai meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi pada TA 2024. Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Manggarai TA 2024 senilai Rp874.604.336.520,03 atau sebesar 96,39% dari yang dianggarkan pada APBD-P senilai Rp907.362.482.322,00. Secara umum Rencana Belanja Operasi tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua.

Realisasi Belanja Operasi senilai Rp874.604.336.520,03 atau sebesar 96,39% dari anggaran senilai Rp907.362.482.322,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	498.276.468.827,00	491.977.680.014,10	98,74	429.160.625.973,00
2	Belanja Barang dan Jasa	324.912.060.694,00	299.480.727.145,13	92,17	302.918.207.257,43
3	Belanja Bunga	2.514.451.646,00	2.504.451.584,80	99,60	5.799.999.999,99
4	Belanja Hibah	72.978.498.481,00	72.645.506.776,00	99,54	37.194.158.116,06
5	Belanja Bantuan Sosial	8.681.002.674,00	7.995.971.000,00	92,11	12.995.805.100,00
Jumlah		907.362.482.322,00	874.604.336.520,03	96,39	788.068.796.446,48

Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran TA 2024

Rp498.276.468.827,00

Realisasi TA 2024

Rp491.977.680.014,10

Realisasi TA 2023

Rp429.160.625.973,00

Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp491.977.680.014,10 atau sebesar 98,74% dari anggaran senilai Rp498.276.468.827,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	390.209.843.106,00	385.672.046.730,00	98,84	332.296.664.957,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.689.243.024,00	6.345.620.500,00	94,86	9.835.868.900,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.553.537.500,00	82.545.356.610,10	98,79	69.522.019.986,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.038.842.786,00	16.691.988.164,00	97,96	16.686.970.458,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.962.051,00	173.087.198,00	99,50	173.021.672,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	560.290.360,00	500.630.812,00	89,35	559.680.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	50.750.000,00	48.950.000,00	96,45	86.400.000,00
Jumlah		498.276.468.827,00	491.977.680.014,10	98,74	429.160.625.973,00

Adapun rincian Belanja Pegawai masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	284.834.017.968,00
2	Dinas Kesehatan	95.303.237.531,10
3	RSUD Ruteng	91.450.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.871.570.105,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.543.392.148,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.988.420.373,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.606.259.662,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
8	Dinas Sosial	1.887.527.606,00
9	Dinas Koperasi	1.490.885.547,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.655.956.884,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.975.709.609,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.689.768.197,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.929.064.960,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.684.210.514,00
15	Dinas Perhubungan	2.979.105.777,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.662.759.753,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.184.881.930,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.435.398.649,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.323.133.922,00
20	Dinas Perikanan	1.950.622.302,00
21	Dinas Peternakan	2.468.591.520,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8.547.882.758,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.058.483.975,00
24	Sekretariat Daerah	7.651.554.982,00
25	Sekretariat DPRD	18.481.159.936,00
26	Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah	2.709.501.701,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.095.430.563,00
28	Badan Pendapatan Daerah	2.350.837.513,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2.070.144.475,00
30	Inspektorat	2.401.024.913,00
31	Kec. Langke Rembong	8.565.017.988,00
32	Kec. Ruteng	1.368.941.649,00
33	Kec. Satar Mese	1.320.103.143,00
34	Kec. Reok	2.354.410.252,00
35	Kec. Cibai	1.798.038.189,00
36	Kec. Wae Rii	1.401.938.803,00
37	Kec. Satar Mese Barat	771.470.095,00
38	Kec. Rahong Utara	679.154.219,00
39	Kec. Lelak	783.414.017,00
40	Kec. Reok Barat	860.397.846,00
41	Kec. Cibai Barat	799.463.941,00
42	Kec. Satar Mese Utara	978.803.042,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.374.541.057,00
Jumlah		491.977.680.014,10

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp324.912.060.694,00	Rp299.480.727.145,13	Rp302.918.207.257,43

Realisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp299.480.727.145,13 atau sebesar 92,17% dari anggaran senilai Rp324.912.060.694,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	50.156.913.553,00	46.266.500.961,50	92,24	97.349.476.844,09
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	26.347.600,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	870.639.350,00	823.808.180,00	94,62	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	62.600.057.347,00	57.215.976.980,54	91,40	88.923.366.034,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5	Belanja Jaminan/Asuransi	6.555.429.458,00	6.176.196.924,00	94,21	432.101.549,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	416.947.952,00	285.342.547,00	68,44	564.056.300,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	815.300.000,00	718.220.454,00	88,09	630.300.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	5.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	241.073.952,00	106.850.000,00	44,32	0,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	93.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.750.571.000,00	1.643.671.000,00	93,89	336.211.100,00
12	Biaya Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.127.901.674,00	945.054.500,00	83,79	1.511.883.321,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	686.649.027,00	626.496.954,00	91,24	941.291.190,36
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	13.810.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	401.003.800,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.698.544.550,00	33.746.965.462,00	82,92	35.593.577.118,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.486.420.000,00	13.142.100.000,00	97,45	9.276.899.000,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.338.893.750,00	1.809.234.152,00	77,35	1.169.319.531,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.691.559.936,00	79.322.941.989,00	100,80	65.635.563.869,98
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.636.278.826,00	41.229.654.618,19	99,02	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	438.199.000,00	436.139.000,00	99,53	0,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	202.585.600,00	202.585.600,00	100,00	0,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	71.818.000,00	71.818.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.004.477.719,00	14.589.369.822,90	66,30	0,00
	Jumlah	324.912.060.694,00	299.480.727.145,13	92,17	302.918.207.257,43

Rincian belanja barang dan jasa masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.24 Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	62.716.249.330,19
2	Dinas Kesehatan	58.152.494.633,94
3	RSUD Ruteng	80.019.185.604,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.782.850.034,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.175.344.102,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.550.995.747,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	543.361.236,00
8	Dinas Sosial	722.896.488,00
9	Dinas Koperasi	1.645.552.810,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	477.238.899,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.940.255.665,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.374.776.794,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.123.067.074,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.165.366.116,00
15	Dinas Perhubungan	1.591.988.388,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	874.190.112,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	839.900.246,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.057.843.224,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.046.233.911,00
20	Dinas Perikanan	1.118.405.821,00
21	Dinas Peternakan	2.688.017.363,00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.627.804.122,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.101.074.523,00
24	Sekretariat Daerah	10.191.982.751,00
25	Sekretariat DPRD	13.080.246.440,00
26	Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah	1.604.614.787,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.266.245.673,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.971.969.222,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.181.506.004,00
30	Inspektorat	785.320.496,00
31	Kec. Langke Rembong	2.160.881.750,00
32	Kec. Ruteng	143.637.250,00
33	Kec. Satar Mese	222.730.000,00
34	Kec. Reok	602.946.575,00
35	Kec. Cibal	279.074.299,00
36	Kec. Wae Rii	133.943.325,00
37	Kec. Satar Mese Barat	213.800.000,00
38	Kec. Rahong Utara	240.950.500,00
39	Kec. Lelak	224.642.500,00
40	Kec. Reok Barat	217.796.000,00
41	Kec. Cibal Barat	203.312.000,00
42	Kec. Satar Mese Utara	210.549.000,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.209.486.330,00
Jumlah		299.480.727.145,13



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp62.716.249.330,19 termasuk di dalamnya belanja yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebanyak 247 Satuan Pendidikan Negeri (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP) senilai Rp41.229.654.618,19. Pada Dinas Kesehatan senilai Rp58.152.494.633,94 termasuk belanja yang bersumber Dana JKN dan BOK sebanyak 24 FKTP Puskesmas senilai masing-masing Rp14.045.345.780,04 dan Rp15.955.952.593,00, serta realisasi belanja RSUD Kelas D Pratama Reo senilai Rp64.209.494,00.

Secara umum Rencana Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp2.514.451.646,00	Rp2.504.451.584,80	Rp5.799.999.999,99

Realisasi Belanja Bunga senilai Rp2.504.451.584,80 atau sebesar 99,60% dari anggaran senilai Rp2.514.451.646,00 merupakan pelunasan pembayaran Bunga Dana Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) pada Bank NTT. Realisasi Belanja Bunga TA 2024 mengalami penurunan dibanding dengan Realisasi Belanja Bunga TA 2023 yakni senilai Rp3.295.548.415,19. Rincian pembayaran Bunga Dana Pinjaman Daerah dari Bank NTT dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25 Rincian Belanja Bunga TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Desember 2023	172.929.845,81
2	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Januari 2024	358.695.652,02
3	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Februari 2024	328.804.347,83
4	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Maret 2024	298.913.043,48
5	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah April 2024	269.021.739,13
6	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Mei 2024	239.130.434,78
7	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Juni 2024	209.239.130,44
8	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Juli 2024	179.347.826,09
9	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Agustus 2024	149.456.521,74
10	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah September 2024	119.565.217,39
11	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Oktober 2024	89.673.913,04
12	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah November 2024	59.782.608,70
13	Pembayaran Angsuran Bunga Pinjaman Daerah Desember 2024	29.891.304,35
Jumlah		2.504.451.584,80

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp72.978.498.481,00	Rp72.645.506.776,00	Rp37.194.158.116,06



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp72.645.506.776,00 atau sebesar 99,54% dari anggaran senilai Rp72.978.498.481,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	38.700.000.000,00	38.700.000.000,00	100,00	300.000.000,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.933.491,00	3.210.791.398,00	99,07	3.932.485.812,06
3	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	590.000.000,00	590.000.000,00	100,00	475.000.000,00
4	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	320.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	232.000.000,00	132.000.000,00	56,90	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOS	21.893.430.000,00	21.700.198.982,00	99,12	31.602.392.984,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	620.988.373,00	611.369.779,00	98,45	564.279.320,00
8	Belanja Hibah Dana BOSP	7.601.146.617,00	7.601.146.617,00	100,00	0,00
Jumlah		72.978.498.481,00	72.645.506.776,00	99,54	37.194.158.116,06

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat untuk TA 2024 senilai Rp38.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai	25.700.000.000,00
2	Hibah Pilkada kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai	9.000.000.000,00
3	Hibah Pilkada kepada Polres Kabupaten Manggarai	3.000.000.000,00
4	Hibah Pilkada kepada Kodim Kabupaten Manggarai	1.000.000.000,00
Jumlah		38.700.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk TA 2024 senilai Rp3.210.791.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Dekranasda Kabupaten Manggarai	300.000.000,00
2	Hibah kepada KONI	398.368.700,00
3	Hibah DAU SG kepada KPAD Kabupaten Manggarai	75.000.000,00
4	Hibah Kepada Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Manggarai	130.000.000,00
5	Hibah kepada KPAD Kabupaten Manggarai	75.000.000,00
6	Hibah kepada SDK Liang Bua	247.733.885,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
7	Hibah kepada TK Bhayangkari	420.213.703,00
8	Hibah kepada PAUD	10.920.180,00
9	Hibah kepada SDK Manong	199.992.700,00
10	Hibah kepada SMPK St. Stefanus	194.986.130,00
11	Hibah kepada SD Swasta	999.950.000,00
12	Hibah kepada SDK Todo	139.074.100,00
13	Hibah kepada SDK Denge	19.552.000,00
Jumlah		3.210.791.398,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk TA 2024 senilai Rp590.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah Kepada IGTKI PGRI	50.000.000,00
2	Hibah kepada GOPTKI	100.000.000,00
3	Hibah kepada Bunda PAUD	200.000.000,00
4	Hibah kepada HIMPAUDI	50.000.000,00
5	Hibah kepada PMI	150.000.000,00
6	Hibah kepada Lembaga Komunitas Taman Baca Masyarakat Literasi	40.000.000,00
Jumlah		590.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk TA 2024 senilai Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Manggarai	100.000.000,00
Jumlah		100.000.000,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia untuk TA 2024 senilai Rp132.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah untuk pasien ODGJ	132.000.000,00
Jumlah		132.000.000,00

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas dan Satdikmen Swasta untuk TA 2024 senilai Rp21.700.198.982,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Belanja Dana BOS TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah BOS untuk sekolah swasta	21.700.198.982,00
Jumlah		21.700.198.982,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk TA 2024 senilai Rp611.369.779,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah kepada Partai Golkar	74.699.720,00
2	Hibah kepada Partai PKB	73.211.027,00
3	Hibah kepada Partai PDIP	94.705.066,00
4	Hibah kepada Partai Nasdem	74.628.307,00
5	Hibah kepada Partai Hanura	66.218.245,00
6	Hibah kepada Partai PAN	78.219.574,00
7	Hibah kepada Partai Demokrat	69.163.813,00
8	Hibah kepada Partai Perindo	13.660.547,00
9	Hibah kepada Partai Gerindra	66.863.480,00
Jumlah		611.369.779,00

Belanja Hibah Dana BOSP yang Diterima oleh Sekolah PAUD dan Kesetaraan Swasta untuk TA 2024 senilai Rp7.601.146.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Belanja Hibah Dana BOSP TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP	7.601.146.617,00
Jumlah		7.601.146.617,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp8.681.002.674,00</u>	<u>Rp7.995.971.000,00</u>	<u>Rp12.995.805.100,00</u>

Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp7.995.971.000,00 atau sebesar 92,11% merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan TA 2024 dari anggaran senilai Rp8.681.002.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.170.000.674,00	1.085.000.000,00	92,73	442.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.311.002.000,00	6.713.502.000,00	91,83	12.523.805.100
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	197.469.000,00	98,73	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Jumlah		8.681.002.674,00	7.995.971.000,00	92,11	12.995.805.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp163.254.079.131,00	Rp159.732.790.450,10	Rp290.872.850.601,00

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk TA 2024. Realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp159.732.790.450,10 atau sebesar 97,84% dari Anggaran senilai Rp163.254.079.131,00. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.912.285.022,00	40.880.603.233,10	97,54	50.726.852.239,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.618.766.156,00	39.089.157.311,00	96,23	62.631.878.165,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.279.493.810,00	75.324.159.743,00	98,75	175.128.999.197,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.443.534.143,00	4.438.870.163,00	99,90	2.385.121.000,00
Jumlah		163.254.079.131,00	159.732.790.450,10	97,84	290.872.850.601,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2024 dan 2023.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp41.912.285.022,00	Rp40.880.603.233,10	Rp50.726.852.239,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp40.880.603.233,10 atau sebesar 97,54% dari anggaran senilai Rp41.912.285.022,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	6.259.000,00	6.259.000,00	100,00	6.908.500,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.286.250.000,00	9.276.450.000,00	99,89	1.242.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	64.307.000,00	62.467.000,00	97,14	200.000,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.806.425.000,00	2.806.425.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor	1.047.874.870,00	996.608.891,00	95,11	1.958.191.675,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.414.874.700,00	3.330.892.900,00	97,54	6.268.815.407,00
7	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	357.850.000,00	337.625.000,00	94,35	205.443.025,00
8	Belanja Modal Alat Studio	460.422.826,00	460.205.126,00	99,95	197.762.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
9	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.223.700,00	13.223.700,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.309.623.381,00	1.274.629.822,00	97,33	18.764.202.476,00
11	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.410.484.510,00	1.022.917.578,00	72,52	12.517.194.444,00
12	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	26.958.200,00	26.958.200,00	100,00	124.200.000,00
13	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	93.187.800,00	90.010.214,00	96,59	37.411.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>	7.513.162.500,00	7.446.082.500,00	99,11	191.756.850,00
15	Belanja Modal Komputer Unit	2.161.995.114,00	1.966.819.220,00	90,97	1.295.807.422,00
16	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.675.616.711,00	5.643.495.881,00	99,43	7.857.257.680,00
17	Belanja Modal Sumur	230.140.300,00	230.140.300,00	100,00	6.402.000,00
18	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	934.227.100,00	934.227.100,00	100,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	19.492.000,00	19.492.000,00	100,00	4.400.000,00
21	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	545.793.310,00	545.516.027,10	99,95	6.000.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga	278.315.400,00	228.315.398,00	82,03	42.899.410,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.225.801.600,00	2.131.842.376,00	95,78	0,00
Jumlah		41.912.285.022,00	40.880.603.233,10	97,54	50.726.852.239,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.38 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11.330.711.509,00
2	Dinas Kesehatan	21.448.067.590,00
3	RSUD Ruteng	3.391.176.986,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.454.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.625.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	859.860.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.900.000,00
8	Dinas Perhubungan	545.516.027,10
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.700.000,00
10	Dinas Perikanan	8.569.200,00
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	941.227.100,00
12	Sekretariat Daerah	694.480.800,00
13	Sekretariat DPRD	777.873.000,00
14	Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah	52.155.000,00
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.200.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	31.456.000,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	45.306.021,00
18	Inspektorat	57.200.000,00
19	Kec. Langke Rembong	309.025.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
20	Kec. Ruteng	27.000.000,00
21	Kec. Satar Mese Barat	26.100.000,00
Jumlah		40.880.603.233,10

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2024

Rp40.618.766.156,00

Realisasi TA 2024

Rp39.089.157.311,00

Realisasi TA 2023

Rp62.631.878.165,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp39.089.157.311,00 atau sebesar 96,23% dari anggaran senilai Rp40.618.766.156,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	46.000.000,00	92,00	1.772.745.243,00
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	298.414.700,00	298.397.956,00	99,99	3.985.529.835,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	33.049.104.748,00	32.684.374.768,00	98,90	46.470.999.771,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	101.630.900,00	101.622.000,00	99,99	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Terbuka	3.550.000.000,00	2.420.340.267,00	68,18	3.579.926.660,00
6	Belanja Modal Bangunan Industri	3.321.900.600,00	3.321.900.600,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	162.050.508,00	138.000.000,00	85,16	3.327.791.845,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	1.726.255.200,00
10	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	960.000.000,00
11	Belanja Modal Taman	35.664.700,00	28.531.760,00	80,00	0,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	521.629.611,00
13	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	287.000.000,00
14	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	50.000.000,00	49.989.960,00	99,98	0,00
Jumlah		40.618.766.156,00	39.089.157.311,00	96,23	62.631.878.165,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.40 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	32.684.374.768,00
2	Dinas Kesehatan	156.779.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.470.330.227,00
4	Dinas Perhubungan	101.622.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	28.531.760,00
6	Dinas Peternakan	138.000.000,00
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.321.900.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
8	Kec. Reok	141.618.156,00
9	Kec. Lelak	46.000.000,00
Jumlah		39.089.157.311,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp76.279.493.810,00</u>	<u>Rp75.324.159.743,00</u>	<u>Rp175.128.999.197,00</u>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp75.324.159.743,00 atau sebesar 98,75% dari anggaran senilai Rp76.279.493.810,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	59.655.375.544,00	58.957.655.022,00	98,83	152.144.638.466,00
2	Bangunan Air	12.566.558.826,00	12.320.243.499,00	98,04	10.194.662.062,00
3	Instalasi	3.854.535.558,00	3.854.218.196,00	99,99	12.694.251.769,00
4	Jaringan	22.023.882,00	22.023.882,00	100,00	95.446.900,00
5	Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	181.000.000,00	170.019.144,00	93,93	0,00
Jumlah		76.279.493.810,00	75.324.159.743,00	98,75	175.128.999.197,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD TA 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.42 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD TA 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	29.887.882,00
2	Dinas Kesehatan	1.800.000,00
3	RSUD Ruteng	170.019.144,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.122.335.223,00
5	Kec. Langke Rembong	2.340.200.000,00
6	Kec. Ruteng	200.000.000,00
7	Kec. Reok	259.917.494,00
8	Kec. Cibal	200.000.000,00
Jumlah		75.324.159.743,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp4.443.534.143,00</u>	<u>Rp4.438.870.163,00</u>	<u>Rp2.385.121.000,00</u>

Belanja Aset Modal Tetap Lainnya TA 2024 direalisasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp4.429.287.343,00, serta pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp9.582.820,00. Belanja Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.415.896.950,00	3.411.232.970,00	99,86	2.385.121.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	77.513.768,00	77.513.768,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	140.056.850,00	140.056.850,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	24.940.500,00	24.940.500,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	785.126.075,00	785.126.075,00	100,00	0,00
Jumlah		4.443.534.143,00	4.438.870.163,00	99,90	2.385.121.000,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.429.287.343,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.582.820,00
Jumlah		4.438.870.163,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp1.737.075.479,00</u>	<u>Rp667.330.200,00</u>	<u>Rp3.604.625.600,00</u>

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan pada APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam longsor, banjir dan angin kencang di Kabupaten Manggarai dan pelaksanaan kewenangan daerah lainnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 adalah Rp667.330.200,00 atau sebesar 38,42% dari Anggaran senilai Rp1.737.075.479,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp2.937.295.400,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp3.604.625.600,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp198.208.954.380,00</u>	<u>Rp201.701.424.200,00</u>	<u>Rp193.308.409.085,00</u>

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 adalah Rp201.701.424.200,00 atau 101,76% dari Anggaran senilai Rp198.208.954.380,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00	4.951.164.585,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81	188.357.244.500,00
Jumlah		198.208.954.380,00	201.701.424.200,00	101,76	193.308.409.085,00

5.1.2.4.1. Transfer/Bagi Hasil ke Desa

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp4.952.787.580,00</u>	<u>Rp4.952.787.580,00</u>	<u>Rp4.951.164.585,00</u>

Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa berupa Bagi Hasil Pajak senilai Rp4.952.787.580,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp4.952.787.580,00. Realisasi 2024 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

kenaikan senilai Rp1.622.995,00 dari Tahun 2023. Rincian Transfer/Bagi Hasil ke Desa dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.4.1.1. Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp4.952.787.580,00	Rp4.952.787.580,00	Rp4.951.164.585,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak senilai Rp4.952.787.580,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp4.952.787.580,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00	4.951.164.585,00
Jumlah		4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	100,00	4.951.164.585,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 senilai Rp4.952.787.580,00 merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dianggarkan pada Bagi Hasil Pajak dikarenakan SIPD belum bisa menampung pembagian Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada saat proses penganggaran APBD TA 2024.

Rincian Bagi Hasil Pajak TA 2024 disajikan pada **Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp193.256.166.800,00	Rp196.748.636.620,00	Rp188.357.244.500,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa senilai Rp196.748.636.620,00 atau sebesar 101,81% dari anggaran senilai Rp193.256.166.800,00. Realisasi 2024 mengalami kenaikan senilai Rp8.391.392.120,00 dari Tahun 2023. Rincian Transfer Bantuan Keuangan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.4.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp193.256.166.800,00	Rp196.748.636.620,00	Rp188.357.244.500,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 senilai Rp196.748.636.620,00 atau sebesar 101,81% dari anggaran senilai Rp193.256.166.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	188.357.244.500,00
2	Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81	0,00
Jumlah		193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	101,81	188.357.244.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Bantuan Keuangan kepada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direalisasikan/disalurkan kepada 145 Desa di Kabupaten Manggarai senilai Rp196.748.636.620,00 atau sebesar 101,81% dari anggaran senilai Rp193.256.166.800,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2024 merupakan Dana Desa senilai Rp129.061.909.000,00 dan ADD senilai Rp67.686.727.620,00. Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa senilai (Rp3.492.469.820,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Selisih
1	Dana Desa	125.569.439.000	129.061.909.000,00	(3.492.470.000,00)
2	Alokasi Dana Desa	67.686.727.800	67.686.727.620,00	180,00
Jumlah		193.256.166.800,00	196.748.636.620,00	(3.492.469.820,00)

Selisih Anggaran dan Realisasi Dana Desa senilai (Rp3.492.470.000,00) dikarenakan terdapat penambahan Alokasi Kinerja Dana Desa untuk 29 Desa yang disalurkan secara langsung pada rekening kas masing-masing Desa yang belum dianggarkan pada APBD 2024.

Adapun selisih Anggaran dan Realisasi ADD merupakan Kekurangan Transfer ADD kepada Desa Watu Baur senilai Rp180,00 dikarenakan kesalahan proses CMS pada saat pencairan SP2D.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 disajikan pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.1.3. Surplus/Defisit

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp31.167.312.205,00</u>	<u>Rp52.398.426.887,25</u>	<u>(Rp59.641.283.560,13)</u>

Realisasi Surplus/Defisit senilai Rp52.398.426.887,25 atau sebesar 168,12% dari Anggaran senilai Rp31.167.312.205,00. Realisasi Surplus/Defisit TA 2023 senilai (Rp59.641.283.560,13).

5.1.4. Pembiayaan

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>(Rp31.167.312.205,00)</u>	<u>(Rp31.184.555.774,33)</u>	<u>Rp86.863.820.548,20</u>

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2024 senilai (Rp31.184.555.774,33). Rincian Pembiayaan dapat disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94	144.297.516.200,20
2	Pengeluaran Pembiayaan	58.391.304.348,00	58.391.304.347,99	100,00	57.433.695.652,00
	Pembiayaan Neto	(31.167.312.205,00)	(31.184.555.774,33)	100,06	86.863.820.548,20

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp27.223.992.143,00</u>	<u>Rp27.206.748.573,66</u>	<u>Rp144.297.516.200,20</u>

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Manggarai TA 2024 senilai Rp27.206.748.573,66 atau sebesar 99,94% dari yang dianggarkan pada APBD TA 2024 senilai Rp27.223.992.143,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94	40.548.233.754,20
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	103.749.282.446,00
	Jumlah	27.223.992.143,00	27.206.748.573,66	99,94	144.297.516.200,20

Jumlah senilai Rp27.206.748.573,66 merupakan realisasi penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang digunakan di TA 2024.

5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp27.223.992.143,00</u>	<u>Rp27.206.748.573,66</u>	<u>Rp40.548.233.754,20</u>

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terealisasi senilai Rp27.206.748.573,66 atau sebesar 99,94% dari Anggaran senilai Rp27.223.992.143,00.

5.1.4.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp103.749.282.446,00</u>

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2024, sedangkan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2023 merupakan penerimaan pinjaman daerah BPD NTT senilai Rp103.749.282.446,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
<u>Rp58.391.304.348,00</u>	<u>Rp58.391.304.347,99</u>	<u>Rp57.433.695.652,00</u>

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Manggarai TA 2024 senilai Rp58.391.304.347,99 atau sebesar 100,00% yang dianggarkan senilai Rp58.391.304.348,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	4.825.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	57.391.304.348,00	57.391.304.347,99	100,00	52.608.695.652,00
Jumlah		58.391.304.348,00	58.391.304.347,99	100,00	57.433.695.652,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp58.391.304.347,99 pada Tahun 2024 diperuntukkan sebagai penyertaan modal pada BPD NTT senilai Rp1.000.000.000,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank merupakan pelunasan pembayaran pokok pinjaman kepada BPD NTT pada Tahun 2024 senilai Rp57.391.304.347,99.

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp4.825.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 senilai Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari Anggaran senilai Rp1.000.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 merupakan Penyertaan Modal pada BPD NTT.

5.1.4.2.2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

<u>Anggaran TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2024</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
Rp57.391.304.348,00	Rp57.391.304.347,99	Rp52.608.695.652,00

Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank senilai Rp57.391.304.347,99 atau sebesar 100,00% dari Anggaran senilai Rp57.391.304.348,00. Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank TA 2024 merupakan pelunasan Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank NTT. Terdapat selisih Anggaran dan Realisasi senilai Rp0,01 (Rp57.391.304.348,00-Rp57.391.304.347,99) dikarenakan terjadi kekurangan bayar senilai Rp0,01 pada BPD NTT atas SP2D pada bulan Desember 2024 karena Aplikasi SIPD yang mengalami gangguan penginputan nilai saat penerbitan SP2D.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92. Terdapat penurunan SiLPA senilai Rp6.008.665.875,15 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp27.222.536.988,07.

SiLPA Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit	Rp52.398.426.887,25
- Pembiayaan Neto	<u>(Rp31.184.555.774,33)</u> +
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>Rp21.213.871.112,92</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pada Tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

SAL Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL Awal Tahun 2024 senilai Rp27.222.536.988,07. Terdapat Penurunan SAL senilai Rp13.397.592.394,73 jika dibandingkan dengan SAL Awal Tahun 2023 senilai Rp40.620.129.382,80.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp27.206.748.573,66.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan SiLPA Tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92. Terdapat penurunan SiLPA senilai Rp6.008.665.875,15 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2023 senilai Rp27.222.536.988,07.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Surplus/Defisit Anggaran	Rp52.398.426.887,25
Pembiayaan Netto	(Rp31.184.555.774,33) +
SiLPA Tahun berjalan	<u>Rp21.213.871.112,92</u>

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun 2024 terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya senilai (Rp15.788.414,41) dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi tambah atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2022 senilai Rp1,00;
2. Koreksi tambah atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 senilai Rp326.389,00;
3. Koreksi tambah atas Kas di Bendahara BOSP BOP PAUD Tahun 2023 senilai Rp11.140,70;
4. Koreksi tambah atas Kas Lainnya atau Setara Kas (penerimaan jasa giro bank) yang belum tercatat dalam rekening titipan Bank NTT pada SKPD senilai Rp1.153.649,74;
5. Koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOSP SD Tahun 2023 senilai Rp11.166.639,85;
6. Koreksi kurang atas Kas Lainnya (Jasa Giro) BOS SMP Tahun 2023 senilai Rp271.000,00; dan
7. Koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOSP SMP Tahun 2023 senilai Rp5.841.955,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 senilai Rp21.213.871.112,92 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 senilai Rp27.222.536.988,07.

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 terdiri dari :

1	Kas di Kas Daerah	Rp6.056.991.447,91	
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp1.009.694,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp112.086.032,00	
4	Kas di Bendahara FKTP	Rp2.408.785.857,26	
5	Kas di Bendahara BOSP	Rp367.824.044,11	
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	Rp7.880.621.407,00	
7	Kas di Bendahara BLUD	Rp4.367.351.645,52	
8	Kas Lainnya	Rp151.622.291,29	+
9	Jumlah (1 s/d 8)		Rp21.346.292.419,09
10	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		(Rp132.421.306,17)
11	Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 (9-10)		Rp21.213.871.112,92

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp2.058.948.671.872,87	Rp2.001.684.987.727,65

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2.058.948.671.872,87 dan senilai Rp2.001.684.987.727,65. Kenaikan Aset TA 2024 senilai Rp57.263.684.145,22 atau sebesar 2,86% dari jumlah aset TA 2023. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.52 Aset per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Aset Lancar	58.563.353.811,97	59.608.598.879,21
2	Investasi Jangka Panjang	156.450.628.582,45	154.940.907.674,51
3	Aset Tetap	1.750.096.233.285,34	1.692.250.188.868,14
4	Properti Investasi	77.939.583.069,04	79.304.968.243,63
5	Aset Lainnya	15.898.873.124,07	15.580.324.062,16
Jumlah		2.058.948.671.872,87	2.001.684.987.727,65



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1. Aset Lancar

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp58.563.353.811,97	Rp59.608.598.879,21

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOK Puskesmas, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp58.563.353.811,97 dan senilai Rp59.608.598.879,21. Penurunan Aset Lancar TA 2024 senilai Rp1.045.245.067,24 atau sebesar 1,75% dibandingkan jumlah Aset Lancar TA 2023. Rincian Aset Lancar Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.53 Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas dan setara kas	21.346.292.419,09	27.223.992.145,07
2	Piutang	30.794.316.034,77	32.435.071.451,64
3	Penyisihan Piutang	(14.598.910.740,11)	(12.501.345.721,30)
4	Beban Dibayar Dimuka	5.697.103.257,59	0,00
5	Persediaan	15.324.552.840,63	12.450.881.003,80
Jumlah		58.563.353.811,97	59.608.598.879,21

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.54 Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	6.056.991.447,91	8.968.913.818,11
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.009.694,00	110.111.657,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	112.086.032,00	759.262.410,00
4	Kas di Bendahara FKTP	2.408.785.857,26	2.405.451.749,00
5	Kas di Bendahara BOSP	367.824.044,11	1.144.625.287,48
6	Kas di Bendahara BOK Puskesmas	7.880.621.407,00	1.664.461.786,00
7	Kas di Bendahara BLUD	4.367.351.645,52	12.149.111.536,83
8	Kas Lainnya	151.622.291,29	22.053.900,65
Jumlah		21.346.292.419,09	27.223.992.145,07



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024

Rp6.056.991.447,91

31 Desember 2023

Rp8.968.913.818,11

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2024 pada PT Bank NTT Cabang Ruteng, PT Bank Mandiri Cabang Ruteng, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ruteng dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pembantu Ruteng. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp6.056.991.447,91 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.968.913.818,11. Rincian Kas Daerah di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 pada lima Rekening BUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per Rekening per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian		31 Desember 2024	31 Desember 2023
A.	Saldo Menurut Rekening Koran			
1	Rekening pada Bank NTT		6.051.968.022,28	8.966.669.921,70
1.1	006.01.04000001-0	Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Manggarai	5.363.586.730,46	8.940.634.558,17
1.2	006.01.04000135-0	Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai)	688.381.291,82	26.035.363,53
2	Rekening pada Bank Mandiri		4.982.458,63	2.202.924,41
2.1	1810002215151	Rekening Penerima Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	4.977.348,52	2.197.814,30
2.2	1610000110804	Rekening yang digunakan untuk Deposito	5.110,11	5.110,11
3	Rekening pada Bank BNI		40.967,00	40.967,00
3.1	54730749	Rekening yang digunakan untuk Deposito	40.967,00	40.967,00
Total Saldo Menurut Rekening Koran			6.056.991.447,91	8.968.913.813,11
B.	Rekonsiliasi Bank			
1	Tambah			
	Koreksi Saldo Kas RKUD Tahun 2022 disebabkan karena pada Tahun 2022 Bank NTT kurang mendebet SP2D Nomor 6110/LS/2022		0,00	5,00
Saldo Kas di Kas Daerah Setelah Rekonsiliasi			6.056.991.447,91	8.968.913.818,11

Saldo Kas di Kas Daerah tersimpan pada Rekening Bank yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/9/2024 tentang Penetapan Rekening Giro Milik Pemerintah Daerah/Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Keputusan Bupati Nomor 331 Tahun 2024. Rincian Rekening Bank Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

- a. Pada PT Bank NTT Cabang Ruteng, terdapat dua Rekening BUD, yaitu:
 - 1) Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Nomor Rekening: 006.01.04000001-0 merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat serta pengeluaran atas belanja daerah. Saldo Akhir Bank pada Nomor Rekening 006.01.04000001-0 per 31 Desember 2024 senilai Rp5.363.586.730,46; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 2) Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Manggarai) dengan Nomor Rekening: 006.01.04000135-0, merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan dana Pemerintah Kabupaten Manggarai, yang meliputi transaksi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Provinsi, transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai termasuk untuk menampung pendapatan jasa giro yang di-*autodebet*-kan dari Rekening Kas Umum Daerah dan dari seluruh Rekening Giro Bendahara Pengeluaran SKPD. Saldo Akhir Bank pada Nomor Rekening 006.01.04000135-0 per 31 Desember 2024 senilai Rp688.381.291,82;
- b. Pada Bank Mandiri, terdapat dua Rekening BUD, yaitu:
- 1) Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1810002215151 merupakan Rekening Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan saldo akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp4.977.348,52; dan
 - 2) Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1610000110804 merupakan rekening yang digunakan untuk deposito Pemerintah Kabupaten Manggarai. Saldo akhir Nomor Rekening 1610000110804 per 31 Desember 2024 senilai Rp5.110,11.
- c. Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 54730749 merupakan rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Deposito Pemerintah Kabupaten Manggarai. Saldo akhir pada Nomor Rekening 54730749 per 31 Desember 2024 senilai Rp40.967,00.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.009.694,00	Rp110.111.657,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp1.009.694,00 merupakan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada tiga SKPD yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 antara lain Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Sekretariat Daerah. Sisa Kas tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2025.

Tabel 5.56 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Sekretariat DPRD	1.000.000,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	9.693,00	47.658.357,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	61.503.300,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	550.000,00
6	Kecamatan Lelak	0,00	400.000,00
Jumlah		1.009.694,00	110.111.657,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp112.086.032,00	759.262.410,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp112.086.032,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp14.436.000,00 disetor pada bulan Januari 2025;
2. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah merupakan setoran pendapatan pajak yang masih ada di rekening penampung milik Bank NTT. Atas uang senilai Rp95.703.532,00 tersebut Bank NTT melakukan pemindahbukuan ke RKUD pada bulan Januari 2025; dan
3. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan merupakan penerimaan jasa pelayanan kesehatan pada Sembilan Puskesmas di Kabupaten Manggarai senilai Rp1.946.500,00 dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Bulan Februari Tahun 2025.

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara FKTP

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp2.408.785.857,26	Rp2.405.451.749,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 senilai Rp2.408.785.857,26 merupakan jumlah seluruh saldo rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdapat di 25 (dua puluh lima) Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Manggarai. Rincian kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Anam	47.353.718,59	29.806.054,00
2	Bangka Kenda	58.416.604,72	95.638.096,00
3	Bea Mese	65.563.546,20	84.667.164,00
4	Cancar	206.753.517,41	222.209.007,00
5	Dintor	35.971.194,86	59.053.600,00
6	Iteng	52.407.197,52	97.065.166,00
7	Ketang	46.880.328,05	82.338.497,00
8	Kota	282.338.831,34	236.497.002,00
9	La'o	119.385.927,59	174.694.489,00
10	Langke Majok	256.579.229,89	90.637.878,00
11	Loce	86.124.807,50	67.630.317,00
12	Nanu	97.213.070,92	68.239.317,00
13	Narang	41.135.350,22	85.667.401,00
14	Pagal	50.396.848,75	92.358.246,00
15	Ponggeok	146.481.329,13	130.024.722,00
16	Reo	117.598.108,51	189.917.305,00
17	Timung	132.917.910,94	71.187.175,00
18	Todo	28.352.186,53	45.761.494,00
19	Wae Codi	161.909.267,31	155.439.230,00
20	Wae Kajong	50.628.389,17	33.742.271,00
21	Wae Mbeleng	150.639.317,43	114.142.452,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
22	Wangko	102.554.856,51	125.790.582,00
23	Watu Alo	23.754.180,17	52.944.284,00
24	RS Pratama Reo	42.241.004,00	0,00
25	Langgo	5.189.134,00	0,00
Jumlah		2.408.785.857,26	2.405.451.749,00

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas/FKTP diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepada SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD selaku BUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap Puskesmas/FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan belanja setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD.

Penetapan rekening bank Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 138 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama (Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Kelas D Pratama Reo), yang terdiri dari 25 rekening.

Seluruh rekening JKN tersebut telah dilaporkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada masing – masing FKTP dan diakui sebagai pendapatan. Pendapatan Dana Kapitasi JKN digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOSP

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Rp367.824.044,11</u>	<u>Rp1.144.625.287,48</u>

Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 senilai Rp367.824.044,11. Saldo tersebut mengalami penurunan senilai Rp776.801.243,37 atau sebesar 67,87% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.144.625.287,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas BOS Sekolah Dasar Negeri	237.798.393,02	784.577.157,31
2	Kas BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri	129.831.489,49	359.821.512,94
3	Kas BOP PAUD	161.161,60	194.765,85
4	Kas BOP Kesetaraan	33.000,00	31.851,38
Jumlah		367.824.044,11	1.144.625.287,48

Adapun jumlah Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Manggarai yang menerima dan mengelola Dana BOSP pada Tahun 2024 sebanyak 247 Sekolah dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.59 Rincian Satuan Pendidikan Negeri yang Menerima dan Mengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

No	Status Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Keterangan
1	Sekolah Menengah Pertama Negeri	69	Dana BOS
2	Sekolah Dasar Negeri	165	Dana BOS
3	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	12	Dana BOP PAUD
4	Sekolah Kesetaraan	1	Dana BOP Kesetaraan
Jumlah		247	

Rincian Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOK Puskesmas

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp7.880.621.407,00	Rp1.664.461.786,00

Saldo Kas di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp7.880.621.407,00 merupakan saldo akhir kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terdapat di Puskesmas Kabupaten Manggarai. Dana BOK ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan APBN dari Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat di puskesmas.

Adapun jumlah Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Manggarai yang menerima dan mengelola Dana BOK pada Tahun 2024 sebanyak 24 Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas BOK per Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Puskesmas	31 Desember 2023	Pendapatan	Belanja	31 Desember 2024
1	Anam	0,00	682.809.000,00	390.154.172,00	292.654.828,00
2	Bangka Kenda	38.105.182,00	949.180.818,00	583.752.528,00	403.533.472,00
3	Bea Mese	36.784.594,00	767.630.406,00	437.286.394,00	367.128.606,00
4	Cancar	3.145.002,00	1.067.040.998,00	725.044.466,00	345.141.534,00
5	Dintor	1.777.883,00	1.127.754.117,00	793.011.495,00	336.520.505,00
6	Iteng	8.453.496,00	826.553.504,00	489.350.760,00	345.656.240,00
7	Ketang	64.779,00	1.235.442.221,00	838.654.689,00	396.852.311,00
8	Kota	187.428.066,00	1.047.325.934,00	825.002.445,00	409.751.555,00
9	La'o	69.183.204,00	895.032.796,00	640.113.771,00	324.102.229,00
10	Langke Majok	272.793.784,00	878.414.216,00	712.425.891,00	438.782.109,00
11	Loce	2.044.299,00	1.229.351.701,00	791.599.219,00	439.796.781,00
12	Nanu	17.079,00	878.554.921,00	577.070.327,00	301.501.673,00
13	Narang	84.815.371,00	632.315.629,00	512.551.300,00	204.579.700,00
14	Pagal	281.384.890,00	944.365.110,00	1.158.596.514,00	67.153.486,00
15	Ponggeok	19.024.235,00	1.205.657.765,00	799.088.815,00	425.593.185,00
16	Reo	603.211,00	1.227.507.789,00	927.572.373,00	300.538.627,00
17	Timung	24.619.744,00	655.789.256,00	574.648.914,00	105.760.086,00
18	Todo	0,00	790.298.000,00	581.541.284,00	208.756.716,00
19	Wae Codi	180.181.002,00	1.152.994.998,00	778.518.903,00	554.657.097,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Puskesmas	31 Desember 2023	Pendapatan	Belanja	31 Desember 2024
20	Wae Kajong	135.459.896,00	946.221.104,00	591.798.508,00	489.882.492,00
21.	Wae Mbeleng	414.660,00	947.938.340,00	598.571.947,00	349.781.053,00
22.	Wangko	172.949.381,00	726.283.619,00	653.577.533,00	245.655.467,00
23	Watu Alo	145.212.028,00	577.069.972,00	510.136.943,00	212.145.057,00
24	Langgo	0,00	780.580.000,00	465.883.402,00	314.696.598,00
Jumlah		1.664.461.786,00	22.172.112.214,00	15.955.952.593,00	7.880.621.407,00

5.3.1.1.7. Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2024

Rp4.367.351.645,52

31 Desember 2023

Rp12.149.111.536,83

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp4.367.351.645,52 merupakan saldo yang terdapat di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Penjelasan mutasi saldo kas di BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal 01 Januari 2024	12.149.111.536,83
2	Koreksi Saldo Awal	
	Tambah	0,00
	Kurang	0,00
3	Saldo Awal setelah koreksi (1-2)	12.149.111.534,83
4	Pendapatan	73.891.993.617,69
5	Belanja	81.673.753.509,00
	Pegawai	48.950.000,00
	Barang dan Jasa	79.322.941.989,00
	Modal	2.301.861.520,00
6	Saldo Akhir 31 Desember 2024 (3+4-5)	4.367.351.643,52

Laporan Keuangan BLUD RSUD Ruteng *Audited* Tahun 2024 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik (KAP) disajikan pada **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.1.8. Kas Lainnya

31 Desember 2024

Rp151.622.291,29

31 Desember 2023

Rp22.053.900,65

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp151.622.291,29 terdiri dari:

1. Jasa Giro BOS yang belum disetor senilai Rp232.073,49;
2. Utang PFK pada bendahara yang belum disetor antara lain PFK BOSP senilai Rp39.032.372,00, PFK dari Dana BOK Puskesmas Rp11.025.243,00, PFK Dana Kapitasi Puskesmas (FKTP) senilai Rp2.334.519,17, PFK Prolanis senilai Rp192.544,00, dan PFK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp64.529.382,00;
3. Sisa Kas di Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) senilai Rp11.047.873,68;
4. Jasa Giro Bank yang tersimpan dalam rekening titipan Bank NTT pada sebelas SKPD senilai Rp10.791.682,95; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5. Utang PFK pada BUD yang tersimpan pada rekening titipan CMS BUD Bank NTT senilai Rp12.436.601,00 yang telah disetorkan pada tahun 2025.

5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp18.320.010.209,64	Rp17.298.879.801,64

Piutang Pajak merupakan Saldo Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh wajib pajak. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 senilai Rp18.320.010.209,64 mengalami kenaikan mencapai Rp1.021.130.408,00 dari Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 senilai Rp17.298.879.801,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	Koreksi		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
			Tambah	Kurang			
1	Piutang Pajak Hotel	59.526.399,00	4.330.500,00	0,00	2.335.000,00	4.330.500,00	61.861.399,00
2	Piutang Pajak Restoran	86.557.516,00	9.453.826,00	0,00	3.975.000,00	16.803.826,00	83.182.516,00
3	Piutang Pajak Hiburan	820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
4	Piutang Pajak Reklame	132.193.250,00	1.700.000,00	0,00	2.700.000,00	5.535.000,00	131.058.250,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	478.069.957,00	0,00	0,00	616.291.161,00	478.069.957,00	616.291.161,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	56.912.591,00	0,00	0,00	7.588.251,00	21.608.781,00	42.892.061,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.632.053,40	73.078.181,00	0,00	59.160.974,00	92.297.009,00	740.574.199,40
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.784.167.535,24	0,00	0,00	1.325.891.127,00	466.728.539,00	16.643.330.123,24
JUMLAH		17.298.879.801,64	88.562.507,00	0,00	2.017.941.513,00	1.085.373.612,00	18.320.010.209,64

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Pajak sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 senilai Rp61.861.399,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp59.526.399,00 ditambah dengan koreksi saldo awal senilai Rp4.330.500,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp2.335.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Hotel senilai Rp4.330.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Hotel Tahun 2023 senilai Rp4.330.500,00; dan
- b. Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2024 senilai Rp2.335.000,00.

2) Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 senilai Rp83.182.516,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp86.557.516,00 ditambah dengan koreksi saldo awal senilai Rp9.453.826,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp3.975.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Pajak Hotel senilai Rp16.803.826,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Restoran Tahun 2023 senilai Rp16.803.826,00; dan
- b. Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 senilai Rp3.975.000,00.

2. Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 senilai Rp820.500,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp820.500,00. Pada Tahun 2024 tidak ada penyetoran piutang Pajak Hiburan.

3. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 senilai Rp131.058.250,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp132.193.250,00 ditambah dengan koreksi saldo awal senilai Rp1.700.000,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp2.700.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran Piutang Pajak Reklame senilai Rp5.535.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Reklame Tahun 2023 senilai Rp5.535.000,00; dan
- b. Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 senilai Rp2.700.000,00.

4. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 senilai Rp616.291.161,00 merupakan saldo awal senilai Rp478.069.957,00 ditambah piutang atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan tahun berjalan senilai Rp616.291.161,00 dan pengurangan piutang senilai Rp478.069.957,00.

5. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp42.892.061,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp56.912.591,00 ditambah penambahan piutang tahun 2024 senilai Rp7.588.251,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp21.608.781,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan atas Piutang Air Tanah Tahun 2023 senilai Rp21.608.781,00; dan
- b. Penambahan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp7.588.251,00.

6. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 senilai Rp740.574.199,40 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp700.632.053,40



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

ditambah dengan koreksi saldo awal senilai Rp73.078.181,00 akibat terdapat piutang yang belum tercatat ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp59.160.974,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp92.297.009,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 senilai Rp92.297.009,00; dan
- b. Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 senilai Rp59.160.974,00.

7. Piutang PBB-P2

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 senilai Rp16.643.330.123,24 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp15.784.167.535,24 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp1.325.891.127,00 dikurangi total cicilan pelunasan/penyetoran Piutang Tahun 2024 senilai Rp466.728.539,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB-P2 tahun 2014 senilai Rp7.881.500,00;
- b. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB-P2 tahun 2015 senilai Rp18.682.646,00;
- c. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB-P2 tahun 2016 senilai Rp52.064.397,00;
- d. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB-P2 tahun 2017 senilai Rp16.494.039,00;
- e. Pelunasan/penyetoran atas Piutang PBB-P2 tahun 2018 senilai Rp11.635.437,00;
- f. Pelunasan/penyetoran piutang PBB-P2 Tahun 2019 senilai Rp18.176.656,00;
- g. Pelunasan/penyetoran piutang PBB-P2 Tahun 2020 senilai Rp35.262.441,00;
- h. Pelunasan/penyetoran piutang PBB-P2 Tahun 2021 senilai Rp55.680.285,00;
- i. Pelunasan/penyetoran piutang PBB-P2 Tahun 2022 senilai Rp43.381.475,00; dan
- j. Pelunasan/penyetoran piutang PBB-P2 Tahun 2023 senilai Rp207.469.663,00.

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp3.157.516.873,00	Rp2.707.233.953,00

Saldo Piutang Retribusi merupakan Saldo Piutang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2024 senilai Rp3.157.516.873,00. Piutang Retribusi TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp450.282.920,00 atau sebesar 16,63% dari saldo Piutang Retribusi TA 2023 senilai Rp2.707.233.953,00.

Tabel 5.63 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
1	Retribusi Shopping Center	25.221.375,00	2.728.125,00	20.541.000,00	18.748.875,00	29.741.625,00
2	Retribusi Ruko	158.301.000,00	0,00	99.495.000,00	101.460.000,00	156.336.000,00
3	Retribusi Pasar Rakyat	35.987.500,00	8.625.000,00	30.900.000,00	28.925.000,00	46.587.500,00
4	Retribusi Rumah Dinas	256.273.950,00	45.243.900,00	39.879.900,00	97.676.900,00	243.720.850,00
5	Retribusi Pasar	2.231.450.128,00	7.472.400,00	740.775.480,00	298.567.110,00	2.681.130.898,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	31 Desember 2023	Koreksi Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
6	Retribusi Sewa Gedung	0,00	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	0,00
7	Sewa Tanah	0,00	6.646.000,00	0,00	6.646.000,00	0,00
Jumlah		2.707.233.953,00	99.915.425,00	931.591.380,00	581.223.885,00	3.157.516.873,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Retribusi sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Piutang Retribusi *Shopping Center*

Saldo Piutang Retribusi *Shopping Center* per 31 Desember 2024 senilai Rp29.741.625,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp25.221.375,00 ditambah dengan koreksi saldo awal senilai Rp2.728.125,00 karena terdapat pelunasan piutang tahun 2023 yang tidak tercatat pada daftar piutang yang diakui tahun 2023 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp20.541.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi *Shopping Center* senilai Rp18.748.875,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi *Shopping Center* Tahun 2023 senilai Rp17.839.500,00 dan Tahun 2022 senilai Rp909.375,00; dan
- b. Penambahan Piutang Retribusi *Shopping Center* Tahun 2024 senilai Rp20.541.000,00.

2) Piutang Retribusi Ruko

Saldo Piutang Retribusi Ruko per 31 Desember 2024 senilai Rp156.336.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp158.301.000,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp99.495.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Ruko senilai Rp101.460.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Ruko tahun 2023 senilai Rp96.222.000,00 dan tahun 2022 senilai Rp5.238.000,00; dan
- b. Penambahan Piutang Retribusi Ruko Tahun 2024 senilai Rp99.495.000,00.

3) Piutang Retribusi Pasar Rakyat

Saldo Piutang Retribusi Pasar Rakyat per 31 Desember 2024 senilai Rp46.587.500,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp35.987.500,00 ditambah koreksi saldo awal akibat kurang catat atas piutang tahun 2023 senilai Rp8.625.000,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Pasar Rakyat senilai Rp28.925.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Pasar Rakyat Tahun 2023 senilai Rp20.300.000,00 pelunasan tahun 2022 senilai Rp7.500.000,00, pelunasan tahun 2021 Rp562.500,00 dan pelunasan tahun 2020 senilai Rp562.500,00; dan
- b. Penambahan piutang baru Retribusi Pasar Rakyat TA 2024 senilai Rp30.900.000,00.

4) Piutang Retribusi Rumah Dinas

Saldo Piutang Retribusi Rumah Dinas per 31 Desember 2024 senilai Rp243.720.850,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp256.273.950,00 ditambah koreksi saldo awal akibat kurang catat piutang Tahun 2023 senilai Rp45.243.900,00 ditambah penambahan piutang Tahun berjalan senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp39.879.900,00 dikurangi cicilan pelunasan/penyetoran piutang Retribusi Rumah Dinas senilai Rp97.676.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelunasan Piutang Retribusi Rumah Dinas Tahun 2023 senilai Rp49.893.900,00, Tahun 2022 senilai Rp14.359.500,00, Tahun 2021 senilai Rp13.666.700,00, Tahun 2020 senilai Rp6.090.000,00, Tahun 2019 senilai Rp6.090.000,00, Tahun 2018 senilai Rp1.440.000,00, Tahun 2017 senilai Rp3.048.000,00 dan Tahun 2013 senilai Rp3.088.800,00; dan
 - b. Penambahan Piutang baru Retribusi Rumah Dinas Tahun 2024 senilai Rp39.879.900,00.
- 5) Piutang Retribusi Pasar
 Saldo Piutang Retribusi Pasar per 31 Desember 2024 senilai Rp2.681.130.898,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp2.231.450.128,00 ditambah koreksi saldo awal akibat kurang catat piutang tahun 2023 senilai Rp7.472.400,00 ditambah dengan penambahan piutang baru di tahun berjalan senilai Rp740.775.480,00 dan dikurangi dengan pelunasan piutang di tahun 2024 senilai Rp298.567.110,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pelunasan Piutang Retribusi Pasar Tahun 2023 senilai Rp244.671.990,00, tahun 2022 senilai Rp39.589.860,00, Tahun 2021 senilai Rp10.168.710,00, Tahun 2020 senilai Rp1.974.150,00, Tahun 2019 senilai Rp1.380.000,00, Tahun 2018 senilai Rp512.400,00 dan Tahun 2017 senilai Rp270.000,00; dan
 - b. Penambahan piutang baru Retribusi Pasar Tahun 2024 senilai Rp740.775.480,00.
- 6) Piutang Sewa Gedung
 Pada tahun 2024 tidak terdapat saldo awal piutang sewa gedung, namun terdapat penambahan koreksi saldo awal akibat kurang catat piutang pada Tahun 2023 senilai Rp29.200.000,00, kemudian atas piutang tersebut terdapat pelunasan senilai Rp29.200.000,00.
- 7) Piutang Sewa Tanah
 Pada tahun 2024 tidak terdapat saldo awal piutang sewa tanah, namun terdapat penambahan koreksi saldo awal akibat kurang catat piutang pada Tahun 2023 senilai Rp6.646.000,00, kemudian atas piutang tersebut terdapat pelunasan senilai Rp6.646.000,00.

5.3.1.1.9.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp8.151.304.478,13	Rp4.745.969.654,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Bagian Umum, Badan Pendapatan Daerah dan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2024 senilai Rp8.151.304.478,13 mengalami kenaikan senilai Rp3.405.334.824,13 atau sebesar 71,75% dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp4.745.969.654,00.

Tabel 5.64 Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	Dana Bergulir	298.565.913,00	0,00	0,00	298.565.913,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
	Menengah dan Tenaga Kerja					
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dana Bergulir	155.403.920,00	0,00	0,00	155.403.920,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dana Bergulir	200.950.297,00	0,00	0,00	200.950.297,00
4	Dinas Perikanan	Dana Bergulir	14.883.552,00	0,00	0,00	14.883.552,00
5	Bagian Umum	Dana Bergulir	21.244.273,00	0,00	0,00	21.244.273,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Bunga Deposito TA 2012 dan TA 2013	5.515.068,00	0,00	0,00	5.515.068,00
7	Badan Pendapatan Daerah	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	57.078.410,00	0,00	0,00	57.078.410,00
8	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	339.494.500,00	0,00	0,00	339.494.500,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	40.451.665,00	189.264.623,04	1.261.252,00	228.455.036,04
10	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Selisih Perhitungan PTKP	429.790.348,00	0,00	339.765.050,00	90.025.298,00
11	RSUD Ruteng	Piutang BLUD	3.182.591.708,00	5.476.559.560,00	2.947.548.020,00	5.711.603.248,00
12	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan dari pengembalian	0,00	1.028.082.513,09	0,00	1.028.082.513,09
13	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Jumlah			4.745.969.654,00	6.693.909.146,13	3.288.574.322,00	8.151.304.478,13

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum Penyisihan Piutang. Mutasi pada saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Saldo Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp228.455.036,04 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp40.451.665,00 dengan temuan BPK dalam pemeriksaan BPK LKPD TA 2024 senilai Rp189.264.623,04 dikurangi dengan pelunasan piutang senilai Rp1.261.252,00;
- 2) Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Selisih Perhitungan PTKP



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh Psl 21 atas Selisih Perhitungan PTKP pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp90.025.298,00 merupakan saldo awal senilai Rp429.790.348,00 dikurangi dengan Pengurangan Piutang atas Kompensasi Kelebihan Penyetoran PPh Psl 21 yang telah direstitusi senilai Rp339.765.050,00;

3) Piutang BLUD

Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp5.711.603.248,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp3.182.591.708,00 ditambah dengan piutang baru di tahun berjalan senilai Rp5.476.559.560,00 yang terdiri dari piutang pasien umum senilai Rp7.309.660,00, piutang BPJS senilai Rp1.822.345.300,00 dan piutang jasa pelayanan senilai Rp3.646.904.600,00 serta pengurangan piutang senilai Rp2.947.548.020,00 dengan rincian pelunasan piutang pihak ketiga senilai Rp4.708.620,00 dan piutang BPJS senilai Rp2.942.839.400,00;

4) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 senilai Rp1.028.082.513,09 merupakan temuan kekurangan volume tahun 2024 berdasarkan Temuan BPK pada LKPD TA 2024; dan

5) Piutang Pendapatan Bunga

Saldo Piutang Pendapatan Bunga TA 2024 senilai Rp2.450,00 merupakan Piutang Pendapatan Bunga atas Pengakuan Remunerasi TDF Bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan ke Pemerintah Daerah.

5.3.1.1.9.4 Piutang Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp754.935.274,00	Rp7.682.988.043,00

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 senilai Rp754.935.274,00 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi NTT 2024. Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2023 senilai Rp7.682.988.043,00 yang merupakan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang telah masuk ke RKUD pada tanggal 4 Januari 2024. Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi NTT, sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	13.534.262,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.432.739.234,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(574.284.286,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(117.053.936,00)
	Total	754.935.274,00

5.3.1.1.9.5 Piutang Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp410.549.200,00	Rp0,00

Saldo Piutang Lainnya TA 2024 senilai Rp410.549.200,00 merupakan Piutang Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan pada 25 Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama atas klaim bulan November dan Desember TA 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025 berdasarkan Konfirmasi BPJS. Rincian Piutang Dana Non Kapitasi TA 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.66 Daftar Piutang Dana Non Kapitasi per 31 Desember 2024

No	Nama Puskesmas / RS	Nilai (Rp)
1	Anam	18.800.000,00
2	Bangka Kenda	4.000.000,00
3	Bea Mese	10.440.000,00
4	Cancar	25.621.000,00
5	Dintor	2.378.000,00
6	Iteng	8.635.000,00
7	Ketang Manggarai	9.197.200,00
8	Kota Ruteng	21.000.000,00
9	Langgo	1.915.000,00
10	Langke Majok	13.709.000,00
11	La'o	19.705.000,00
12	Loce	8.026.000,00
13	Nanu	19.390.000,00
14	Narang	5.865.000,00
15	Pagal	59.846.400,00
16	Ponggeok	23.648.200,00
17	Reo	32.315.000,00
18	Timung	15.010.000,00
19	Todo	7.200.000,00
20	Wae Codi	10.446.600,00
21	Wae Kajong	3.330.100,00
22	Wae Mbeleng	23.227.000,00
23	Wangko	16.605.000,00
24	Watu Alo	10.715.000,00
25	RUMAH SAKIT PRATAMA REO	39.524.700,00
	Total	410.549.200,00

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
(Rp14.598.910.740,11)	(Rp12.501.345.721,30)

Penyisihan piutang yang dilakukan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 senilai (Rp14.598.910.740,11) dan per 31 Desember 2023 senilai (Rp12.501.345.721,30), disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak	(10.677.454.517,01)	(9.246.867.615,39)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.557.160.191,00)	(2.135.213.634,50)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.358.468.609,73)	(1.119.264.471,41)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4	Penyisihan Piutang Transfer	(3.774.676,37)	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.052.746,00)	0,00
Jumlah		(14.598.910.740,11)	(12.501.345.721,30)

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2024 senilai (Rp10.677.454.517,01) dan tahun 2023 senilai (Rp9.246.867.615,39) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Hotel	(22.184.474,50)	(10.315.154,90)
2	Piutang Pajak Restoran	(21.289.326,60)	(10.869.135,08)
3	Piutang Hiburan	(410.250,00)	(410.250,00)
4	Piutang Pajak Reklame	(83.705.050,00)	(69.661.525,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	(3.081.455,81)	0,00
6	Piutang Pajak Air Tanah	(3.568.322,26)	(284.562,96)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(533.740.640,47)	(525.671.036,04)
8	Piutang PBB-P2	(10.009.474.997,37)	(8.629.655.951,41)
Jumlah		(10.677.454.517,01)	(9.246.867.615,39)

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024 senilai (Rp2.557.160.191,00) dan Tahun 2023 senilai (Rp2.135.213.634,50) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Retribusi Rumah Dinas	(223.780.900,00)	(256.273.950,00)
2	Piutang Retribusi Shopping Center	(11.254.725,00)	(16.574.437,50)
3	Piutang Retribusi Pasar	(2.210.373.766,00)	(1.771.623.297,00)
4	Piutang Retribusi Ruko	(86.253.300,00)	(79.693.200,00)
5	Piutang Retribusi Pasar Rakyat	(25.497.500,00)	(11.048.750,00)
Jumlah		(2.557.160.191,00)	(2.135.213.634,50)

Selanjutnya, rincian penyisihan Piutang Retribusi berdasarkan umur pokok piutang (*aging schedule*) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.70 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Berdasarkan Umur Pokok Piutang

No	Umur Piutang (Penetapan)	Pokok Piutang per 31 Desember 2024 (Rp)	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan Pokok Piutang (Rp)	Nilai Bersih Pokok Piutang (Rp)
1	<1 bulan	0,00	0,01	(0,00)	0,00
2	1 - 3 bulan	336.402.480,00	0,10	(33.640.248,00)	302.762.232,00
3	3 - 12 bulan	595.188.900,00	0,50	(297.594.450,00)	297.594.450,00
4	>12 bulan	2.225.925.493,00	1,00	(2.225.925.493,00)	0,00
Jumlah		3.157.516.873,00		(2.557.160.191,00)	600.356.682,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 senilai (Rp1.335.846.164,04) dan Tahun 2023 senilai (Rp1.119.264.471,41) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Dana Bergulir	(298.565.913,00)	(298.565.913,00)
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dana Bergulir	(155.403.920,00)	(155.403.920,00)
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dana Bergulir	(200.950.297,00)	(200.950.297,00)
4	Dinas Perikanan	Dana Bergulir	(14.883.552,00)	(14.883.552,00)
5	Bagian Umum	Dana Bergulir	(21.244.273,00)	(21.244.273,00)
6	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Bunga Deposito TA 2012 dan TA 2013	(5.515.068,00)	(5.515.068,00)
7	Badan Pendapatan Daerah	Piutang dari Penjualan Kendaraan Dinas	(57.078.410,00)	(57.078.410,00)
8	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Sisa Hasil Likuidasi PD Komodo Jaya	(339.494.500,00)	(339.494.500,00)
9	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(4.865.364,42)	(202.258,33)
10	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	(5.140.412,57)	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Atas Kelebihan Pembayaran PPh 21 atas Selisih Perhitungan PTKP	(450.126,49)	(2.148.951,74)
12	RSUD Ruteng	Piutang BLUD	(254.876.761,00)	(23.777.328,34)
13	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pendapatan Bunga	(12,25)	0,00
Jumlah			(1.358.468.609,73)	1.119.264.471,41)

4. Penyisihan Piutang Transfer

Penyisihan Piutang Transfer Tahun 2024 senilai (Rp3.774.676,37) dan Tahun 2023 senilai (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(67.671,31)	0,00
2	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(7.163.696,17)	0,00
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.871.421,43	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	585.269,68	0,00
Jumlah		(3.774.676,37)	0,00

5. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2024 senilai (Rp2.052.746,00) dan Tahun senilai Rp0,00. Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2024 berupa Piutang Klaim BPJS Dana Non Kapitasi Puskesmas dengan kategori lancar.

5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp5.697.103.257,59	Rp0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp5.697.103.257,59 dan senilai Rp0,00. Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.73 Tabel Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Hibah Dibayar Dimuka	5.694.941.657,59	0,00
2	Jasa Dibayar Dimuka	2.161.600,00	0,00
Jumlah		5.697.103.257,59	0,00

Beban Dibayar Dimuka TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hibah Dibayar Dimuka

Hibah Dibayar Dimuka merupakan pengembalian Belanja Hibah Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 yaitu KPU dan Bawaslu yang baru disetor tanggal 09 April 2025.

2. Jasa Dibayar Dimuka

Jasa Dibayar Dimuka merupakan kelebihan pembayaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp2.161.600,00 berdasarkan hasil konfirmasi BPJS yang melakukan hitung ulang sebagai Tindak Lanjut PMK 51 Tahun 2024, yang akan dikompensasikan oleh BPJS pada tagihan tahun selanjutnya.

5.3.1.1.12 Persediaan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp15.324.552.840,63	Rp12.450.881.003,80

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp15.324.552.840,63 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp12.450.881.003,80 merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada SKPD. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bahan Kimia	86.523.000,00	117.243.750,00
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.400.000,00	34.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
3	Bahan Lainnya	255.081.046,43	124.635.700,00
4	Alat Tulis Kantor	3.215.000,00	3.092.000,00
5	Kertas dan Cover	5.076.000,00	483.000,00
6	Bahan Cetak	391.725.500,00	444.151.450,00
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.552.764.296,36	7.622.307.983,00
8	Obat	6.475.395.492,84	3.191.775.332,00
9	Obat-obatan Lainnya	234.767.505,00	387.517.571,00
10	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	107.300.000,00	463.743.750,00
11	Pakan	211.305.000,00	61.880.467,80
Jumlah		15.324.552.840,63	12.450.881.003,80

Rincian saldo persediaan per SKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Persediaan per SKPD per 31 Desember 2024

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	42.057.000,00
2	Dinas Kesehatan	8.834.061.662,20
3	RSUD Ruteng	5.183.641.041,50
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	286.000,00
5	Dinas Perikanan	19.900.000,00
6	Dinas Peternakan	467.763.918,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86.523.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.420.500,00
9	Dinas Perhubungan	37.375.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.135.000,00
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	39.080.000,00
12	Badan Pendapatan Daerah	63.850.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	295.459.718,93
Jumlah		15.324.552.840,63

Selanjutnya, penjelasan atas saldo Persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persediaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp42.057.000,00 terdiri dari:
 - a. Persediaan bahan lainnya yang terdapat di lembaga UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Randong senilai Rp37.187.000,00; dan
 - b. Persediaan kertas dan cover senilai Rp4.870.000,00.
2. Persediaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp8.834.061.662,20 terdiri dari:
 - a. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp4.547.575.523,36; dan
 - b. Persediaan Obat senilai Rp4.286.486.138,84.
3. Persediaan pada RSUD Ruteng senilai Rp5.183.641.041,50 terdiri dari:
 - a. Persediaan Alat Kesehatan senilai Rp1.337.215.419,00;
 - b. Persediaan Barang Habis Pakai senilai Rp1.590.254.221,50;
 - c. Persediaan Obat senilai Rp2.169.245.989,00; dan
 - d. Persediaan Obat Lainnya berupa obat covid senilai Rp86.925.412,00.
4. Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp286.000,00 terdiri dari:
 - a. Persediaan Alat Tulis Kantor senilai Rp80.000,00; dan
 - b. Persediaan Kertas dan Cover senilai Rp206.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5. Persediaan pada Dinas Perikanan senilai Rp19.900.000,00 terdiri dari;
 - a. Persediaan Benih Ikan senilai Rp1.400.000,00; dan
 - b. Persediaan Induk Ikan senilai Rp18.500.000,00.
6. Persediaan pada Dinas Peternakan senilai Rp467.763.918,00 terdiri dari:
 - a. Persediaan Obat-obatan senilai Rp19.816.825,00;
 - b. Persediaan Obat-obatan Lainnya senilai Rp147.842.093,00;
 - c. Persediaan Anak Babi senilai Rp88.800.888,00; dan
 - d. Persediaan Pakan senilai Rp211.305.000,00.
7. Persediaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp86.523.000,00 merupakan persediaan bahan kimia.
8. Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp251.420.500,00 merupakan persediaan bahan cetak.
9. Persediaan pada Dinas Perhubungan senilai Rp37.375.000,00 merupakan persediaan buku cetak bukti lulus uji.
10. Persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp3.135.000,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor.
11. Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp39.080.000,00 merupakan persediaan bahan cetakan.
12. Persediaan pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp63.850.000,00 merupakan persediaan bahan cetak PBB dan BPHTB.
13. Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp295.459.718,93 merupakan persediaan Alat Kontrasepsi.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp156.450.628.582,45	Rp154.940.907.674,51

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp156.450.628.582,45 dan senilai Rp154.940.907.674,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir)	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00
2.	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(3.320.516.449,00)	(3.320.516.449,00)
3.	Investasi Jangka Panjang Permanen	156.450.628.582,45	154.940.907.674,51
Jumlah		156.450.628.582,45	154.940.907.674,51

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 senilai Rp3.320.516.449,00 dan Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 senilai Rp3.320.516.449,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Investasi 2023	Pengembalian Pokok TA 2024	Total Investasi TA 2024	Kualitas Macet (100%)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00	1.797.835.956,00
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	594.558.725,00	0,00	594.558.725,00	594.558.725,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	813.617.168,00	0,00	813.617.168,00	813.617.168,00
4	Dinas Perikanan	114.504.600,00	0,00	114.504.600,00	114.504.600,00
Jumlah		3.320.516.449,00	0,00	3.320.516.449,00	3.320.516.449,00

Penyisihan Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp3.320.516.449,00 dan nilai sisa investasi senilai Rp0,00 sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp1.797.835.956,00 dan Rp1.797.835.956,00. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja mengelola dana bergulir dengan mekanisme menggulirkan pengembalian pokok dana bergulir dan menyetorkan ke Kas Daerah atas pengembalian bunga dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Pengembalian	31 Desember 2023
1	Dana bergulir pada Bidang UKM	1.009.316.343,00	0,00	1.009.316.343,00
2	Dana bergulir KSP-USP- UBSP	522.694.613,00	0,00	522.694.613,00
3	Dana bergulir Binkop dan Penyangga Pangan	265.825.000,00		265.825.000,00
Jumlah		1.797.835.956,00	0,00	1.797.835.956,00

2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Investasi Non Permanen pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah senilai Rp594.558.725,00 terdiri dari Dana Bergulir Penanggulangan masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil. Dana bergulir berasal dari pengeluaran pemerintah TA 2001. Khusus untuk Dana Bergulir Pembinaan Industri Kecil telah digulirkan kembali pada tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.79 Rincian Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	Pengembalian	31 Desember 2023
1	Dana bergulir penanggungan masalah GAKY	188.016.125,00	0,00	188.016.125,00
2	Dana bergulir pembinaan industri kecil (dana segar)	406.542.600,00	0,00	406.542.600,00
JUMLAH		594.558.725,00	0,00	594.558.725,00

Dalam usaha melakukan perbaikan penatausahaan dana bergulir, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah telah melakukan pendataan domisili para peminjam dana bergulir termasuk mengidentifikasi para penerima dana bergulir yang tinggal di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Investasi Non Permanen pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp813.617.168,00 dan senilai Rp813.617.168,00, dana tersebut merupakan pinjaman modal agribisnis padi sawah yang disalurkan dari tahun 2001 s.d. 2008. Pinjaman modal tersebut bukan merupakan dana bergulir sehingga pengembalian pokok dan bunga disetorkan ke Kas Daerah. Rincian data penyaluran dan saldo pinjaman 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Dana Bergulir pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Tahun	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
2001	20.409.374	11.898.563	32.307.937	20.409.374	11.898.563	32.307.937
2002	146.249.025	25.977.840	172.226.865	146.249.025	25.977.840	172.226.865
2003	78.249.955	25.953.273	104.203.228	78.249.955	25.953.273	104.203.228
2004	57.016.500	12.438.625	69.455.125	57.016.500	12.438.625	69.455.125
2005	94.179.910	21.397.988	115.577.898	94.179.910	21.397.988	115.577.898
2006	32.001.598	4.545.648	36.547.246	32.001.598	4.545.648	36.547.246
2007	23.420.250	5.336.538	28.756.788	23.420.250	5.336.538	28.756.788
2008	362.090.556	93.401.822	455.492.378	362.090.556	93.401.822	455.492.378
Jumlah	813.617.168	200.950.297	1.014.567.465	813.617.168	200.950.297	1.014.567.465

4. Dinas Perikanan

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan 31 Desember 2024 senilai Rp114.504.600,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.81 Rincian Dana Bergulir pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Kegiatan	Kelompok penerima	Kecamatan	Sisa per 31 Desember 2024			Sisa per 31 Desember 2023		
				Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1.	Peng. Budidaya Rumput Laut	1. Sbr. Laut	Satar Mese	59.000.000	7.560.000	66.560.000	59.000.000	7.560.000	66.560.000
		2. Br Muncul	Satar Mese	25.675.000	3.600.000	29.275.000	25.675.000	3.600.000	29.275.000
2	Peng. Budidaya Ikan Air Tawar	1. K. Mekar	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		2. K. Lao	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		3. Raci Koe	L. Rembong	5.171.600	620.592	5.792.192	5.171.600	620.592	5.792.192
		4. W. Sosor	L. Rembong	4.671.600	620.592	5.292.192	4.671.600	620.592	5.292.192
		5. Ibunda I	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
		6. Ibunda II	L. Rembong	4.821.600	620.592	5.442.192	4.821.600	620.592	5.442.192
Jumlah				114.504.600	14.883.552	129.388.152	114.504.600	14.883.552	129.388.152

Investasi Non Permanen pada Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari kegiatan pengeluaran pembiayaan TA 2005 berupa pinjaman modal untuk budi daya rumput laut dan ikan air tawar dengan total senilai Rp248.059.200,00. Dari jumlah tersebut senilai Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai dan senilai Rp124.029.600,00 disalurkan kepada kelompok usaha di Kabupaten Manggarai Timur (pada tahun 2005 masih termasuk wilayah Kabupaten Manggarai). Saldo pinjaman modal yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 hanya mencakup sisa pinjaman kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu senilai Rp114.504.600,00. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi pengembalian pinjaman baik pada tahun 2014 maupun tahun 2015. Saldo pinjaman modal tersebut merupakan saldo pokok pinjaman kepada dua kelompok usaha budi daya rumput laut dan enam kelompok usaha budi daya ikan air tawar sedangkan sisa piutang bunga senilai Rp14.883.552,00 (disajikan dalam akun piutang lainnya). Menurut laporan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kegiatan usaha budi daya rumput laut dan budi daya ikan air tawar tidak berjalan lagi antara lain karena bencana alam. Laporan tersebut didukung dengan pernyataan masing-masing kelompok mengenai kondisi usaha mereka.

Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Inspektorat Kabupaten telah melakukan inventarisasi atas Dana Bergulir dan Penguatan Modal Kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan namun hasilnya belum digunakan untuk membuat analisis umur piutang (*aging schedule*) serta menetapkan status atas dana bergulir yang macet (tidak tertagih).

Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai (Rp3.320.516.449,00) dan senilai (Rp3.320.516.449,00).



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2023 senilai (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.1.2. Penyisihan Investasi

Jumlah Penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2024 dan adalah senilai (Rp3.320.516.449,00) dan senilai (Rp3.320.516.449,00).

Investasi Non Permanen dari total Investasi per 31 Desember 2024 senilai (Rp3.320.516.449,00) sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp156.450.628.582,45 dan Rp154.940.907.674,51. Kenaikan Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.509.720.907,94 atau sebesar 0,97%. Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2024 senilai Rp156.450.628.582,45 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp154.940.907.674,51 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

5.3.1.2.3.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp156.450.628.582,45</u>	<u>Rp154.940.907.674,51</u>

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp156.450.628.582,45 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp154.940.907.674,51 merupakan saldo dana Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2024. Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Manggarai terdapat di Bank NTT, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Komodo dan PT Multi Manggarai Investasi.

Tabel 5.82 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	Investasi 2024	Surplus/defisit	31 Desember 2024
1	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo Jaya	86.076.037.047,00	0,00	2.202.107.393,00	88.278.144.440,00
2	Penyertaan Modal pada PT Bank NTT	60.408.118.953,00	1.000.000.000,00	0,00	61.408.118.953,00
3	Penyertaan Modal pada PT MMI	8.456.751.674,51	0,00	-1.692.386.485,06	6.764.365.189,45
Jumlah		154.940.907.674,51	1.000.000.000,00	509.720.907,94	156.450.628.582,45

Jumlah investasi permanen senilai Rp156.450.628.582,45 per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Komodo

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Komodo senilai Rp88.278.144.443,00 merupakan kekayaan Pemda yang tercatat dalam Neraca Komparatif PDAM Tirta Komodo dan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Penyertaan Modal disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan kepemilikan 100% menggunakan metode ekuitas (*equity*). Laporan keuangan PDAM Tirta Komodo yang telah diaudit terlampir.

Tabel 5.83 Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai pada PDAM Tirta Komodo TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saldo Awal	86.076.037.047,00	80.237.042.878,00
Pengurangan :			
2	Deviden Tahun Berjalan	-	-
Penambah:			
3	Modal disetor	0,00	3.825.000.000,00
4	Laba	2.202.107.393,00	2.013.994.169,00
Saldo Akhir		88.278.144.440,00	86.076.037.047,00

Laporan Keuangan PDAM Tirta Komodo TA 2024 yang telah diaudit KAP disajikan pada **Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

2. Bank NTT

Pada PT Bank NTT penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai senilai Rp61.408.118.953,00 dan nilai penyertaan modal pada PT Bank NTT dengan kepemilikan kurang dari 20 menggunakan metode biaya (*cost*).

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT per 31 Desember 2024 merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak Tahun 2001 s.d. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Daftar Kepemilikan Saham Pemerintah Kab. Manggarai pada Bank NTT

No	Tahun	NILAI (Rp)	No Sertifikat	Tanggal
1	2001	136.750.000,00	A/II/11/13675	31/03/2004
2	2002	365.740.000,00	A/II/11/36574	31/03/2004
3	2003	863.250.000,00	A/II/11/86325	31/03/2004
4	2004	200.000.000,00	A/II/11/20000	10/01/2005
5	2005	250.000.000,00	A/II/11/25000	01/05/2006
6	2006	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	15/05/2006
7	2007	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	05/07/2007
8	2008	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	26/03/2008
9	2009	1.000.000.000,00	A/II/11/100000	07/04/2009
10	2010	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	13/12/2010
11	2011	3.000.000.000,00	A/II/11/300000	29/12/2011
12	2012	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	24/10/2012
13	2013	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	08/07/2013
14	2014	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	15/07/2014
15	2015	4.000.000.000,00	A/II/11/400000	31/08/2015
16	2016	0,00	-	-
17	2017	0,00	-	-
18	2018	10.000.000.000,00	A/II/11/100000	
19	2019	0,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Tahun	NILAI (Rp)	No Sertifikat	Tanggal
20	2020	2.957.438.953,00	-	-
21	2020	2.634.940.000,00	-	-
22	2021	5.000.000.000,00	-	-
23	2022	10.000.000.000,00	-	-
24	2023	1.000.000.000,00	-	-
25	2024	1.000.000.000,00		
		61.408.118.953,00		

3. PT MMI

Pada PT Manggarai Multi Investasi (MMI), nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai Per 31 Desember Tahun 2024 menurun senilai Rp1.692.386.485,06 menjadi senilai Rp6.764.365.189,45 dari saldo awal Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Manggarai pada PT MMI per 31 Desember Tahun 2023 senilai Rp8.456.751.674,51 dengan kepemilikan modal lebih dari 98,04% menggunakan metode ekuitas (*equity*). Laporan keuangan PT MMI yang telah diaudit terlampir.

Tabel 5.85 Penyesuaian Nilai Ekuitas PT MMI TA 2022 s.d. 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun		
		2024	2023	2022
1	Saldo Awal	8.456.751.674,51	10.599.096.597,57	10.578.204.360,66
	Pengurangan :			
2	Deviden Tahun Berjalan	(1.692.386.485,06)	(2.142.344.923,06)	(163.020.503,00)
	Penambah :			
3	Modal disetor			
4	Laba Prosentase Laba 98,04%			183.912.739,91
	Jumlah	6.764.365.189,45	8.456.751.674,51	10.599.096.597,57

Laporan Keuangan PT MMI Tahun 2024 yang telah diperiksa KAP disajikan pada **Lampiran 7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan ini.

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2024

Rp1.750.096.233.285,34

31 Desember 2023

Rp1.692.250.188.868,14

Aset Tetap per 31 Desember 2024 senilai Rp1.750.096.233.285,34 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.692.250.188.868,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	257.675.756.562,67	0,00	257.675.756.562,67
2	Peralatan dan Mesin	501.051.753.981,13	(409.480.368.639,28)	91.571.385.341,85
3	Gedung dan Bangunan	920.427.550.164,70	(212.167.412.524,96)	708.260.137.639,74



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2024		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.147.104.890.863,89	(1.543.937.934.392,20)	603.166.956.471,69
5	Aset Tetap Lainnya	71.857.448.438,68	(466.070.200,00)	71.391.378.238,68
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.030.619.030,71	0,00	18.030.619.030,71
Jumlah		3.916.148.019.041,78	(2.166.051.785.756,44)	1.750.096.233.285,34

Terhadap saldo Aset Tetap telah dilakukan *mapping* Kode Barang atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sehingga dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.87 Daftar Aset Intrakomptabel

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo Awal Intrakomptabel 1 Januari 2024	Penyesuaian		Saldo Akhir Intrakomptabel Per 31 Desember 2024
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	257.651.230.062,67	24.526.500,00	0,00	257.675.756.562,67
2	Peralatan dan Mesin	469.626.745.618,31	42.212.000.512,20	10.786.992.149,38	501.051.753.981,13
3	Gedung dan Bangunan	884.048.022.297,51	44.299.669.748,39	7.920.141.881,20	920.427.550.164,70
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.066.383.520.696,44	84.916.302.929,48	4.194.932.762,03	2.147.104.890.863,89
5	Aset Tetap Lainnya	70.597.146.237,00	4.526.624.563,00	3.266.322.361,32	71.857.448.438,68
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.501.597.410,99	4.509.510.746,46	4.980.489.126,74	18.030.619.030,71
7	Akumulasi Penyusutan	(2.074.558.073.454,78)	(100.857.980.974,67)	(9.364.268.673,01)	(2.166.051.785.756,44)
Jumlah		1.692.250.188.868,14	79.630.654.024,86	21.784.609.607,66	1.750.096.233.285,34

Rincian aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1. Tanah

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp257.675.756.562,67	Rp257.651.230.062,67

Saldo aset tetap tanah pada Tahun 2024 senilai Rp257.675.756.562,67. Kenaikan/Penurunan Aset Tanah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.88 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	257.651.230.062,67
1	Saldo Awal Aset Tanah Tahun 2024	257.651.230.062,67
B	Mutasi Tambah	24.526.500,00
1	Belanja Modal 2024 (LRA)	0,00
2	Aset Tetap yang dimutasikan dari SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	0,00
3	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
4	Koreksi Nilai	24.526.500,00
5	Kurang Pencatatan (Sebab Lain)	0,00
6	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap)	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Aset Tetap yang dimutasikan ke SKPD Lain (Mutasi antar SKPD)	0,00
2	Aset Tetap yang D hibah	0,00
3	Aset Tetap yang menjadi Properti Investasi – Tanah	0,00
D	Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)	257.675.756.562,67

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah:

Pada Tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap tiga bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tercatat dengan nilai Rp1,00 pada KIB Tanah, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.89 Daftar Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah antar SKPD TA 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Kesehatan	11.143.500,00	0,00
2	Dinas Pariwisata	13.383.000,00	0,00
Jumlah		24.526.500,00	0,00

Rincian Aset Tanah SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 8** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp501.051.753.981,13	Rp469.626.745.618,31

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp501.051.753.981,13. Kenaikan/Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	469.626.745.618,31
1	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	469.626.745.618,31
B	Mutasi Tambah	42.212.000.512,20
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2024 (LRA)	40.880.603.233,10
2	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	67.240.000,09
3	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	134.776.421,01
4	Reklasifikasi Masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	170.019.144,00
5	Aset Tetap yang Berasal dari Hibah	959.361.714,00
C	Mutasi Kurang	10.786.992.149,38
1	Belanja Modal 2024 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	1.383.726.640,37
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	9.370.968.601,01
3	Belanja Modal 2024 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	32.296.908,00
D	Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)	501.051.753.981,13

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sesuai LRA senilai Rp40.880.603.233,10;
2. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja pegawai berupa honorarium pengadaan barang/jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap senilai Rp67.240.000,09;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

3. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa akibat kesalahan penganggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp124.776.421,01 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp10.000.000,00;
4. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp170.019.144,00; dan
5. Penambahan Aset Tetap yang bersumber dari hibah Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai baru mencatat aset yang diperoleh melalui hibah Tahun 2021 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa peralatan dan mesin kendaraan bermotor roda 4 dan roda dua dengan total nilai senilai Rp959.361.714,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

1. Pada Tahun 2024, terdapat penambahan aset Peralatan dan Mesin yang nilainya dibawah batasan minimal kapitalisasi senilai Rp500.000,00 (ekstrakomptabel). Jumlah aset Peralatan dan Mesin ekstrakomptabel dari pengadaan TA 2024 adalah senilai Rp1.383.726.640,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Aset Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.925.000,00
2	UPTD Puskesmas La'o	6.250.000,00
3	Bagian Umum	782.800,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.367.768.840,37
Jumlah		1.383.726.640,37

2. Terdapat reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat ke Aset Lainnya senilai Rp9.370.968.601,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Daftar Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya TA 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Bagian Administrasi Pembangunan	16	309.029.004
2	Bagian Administrasi Pemerintahan	21	319.433.500
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	33	123.121.630
4	Dinas Kesehatan	5	590.910.120
5	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	4	42.636.418,00
6	Dinas Perhubungan	10	551.400.000
7	Dinas Pertanian	45	893.028.117
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5	105.300.000
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	13	198.800.000
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	1	341.505.725
11	Dinas Sosial	20	104.975.000
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	21.933.333
13	Badan Pendapatan Daerah	22	137.962.435
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	13	48.753.700
15	Bagian Perekonomian dan SDA	4	13.699.902
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	42	534.812.216
17	Bagian Umum	7	1.152.050.000
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18	31.480.364
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19	269.024.742
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16	149.909.032
21	Dinas Peternakan	3	50.700.000
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	111.833.178



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
23	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM	2	28.562.500
24	Dinas Lingkungan Hidup	4	820.400.000
25	Kecamatan Cibal Barat	14	101.068.345
26	Dinas Perdagangan	18	412.319.000
27	Sekretariat DPRD	210	911.412.307,01
28	Bapperida	20	229.233.033
29	Dinas Perikanan	4	765.675.000
Jumlah		611	9.370.968.601,01

3. Terdapat Belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin TA 2024 yang merupakan pelunasan utang dan nilai aset tetap sudah tercatat pada TA 2023 senilai Rp32.296.908,00.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD Per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 9** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp920.427.550.164,70	Rp884.048.022.297,51

Saldo aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2024 senilai Rp920.427.550.164,70. Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.93 Daftar Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	884.048.022.297,51
1	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024	884.048.022.297,51
B	Mutasi Tambah	44.299.669.748,39
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2024 (LRA)	39.089.157.311,00
2	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	142.110.000,00
3	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	149.554.700,00
4	Aset Tetap yang Berasal dari Penambahan Utang	61.520.350,00
5	Reklasifikasi Masuk dari KDP	4.857.327.387,39
C	Mutasi Kurang	7.920.141.881,20
1	Belanja Modal 2024 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang)	776.725.756,00
2	Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.274.166.211,99
3	Reklasifikasi Keluar ke KDP	2.799.755.237,02
4	Temuan Kekurangan Volume	920.647.667,33
5	Temuan Jasa Konsultasi	148.847.008,86
D	Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)	920.427.550.164,70

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sesuai LRA senilai Rp39.089.157.311,00;
2. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja pegawai berupa honorarium pengadaan barang/jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap senilai Rp142.110.000,00, rincian lebih lanjut dapat disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.94 Rincian Atribusi Honorarium menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	3.400.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.260.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.950.000,00
4	Dinas Kesehatan	2.700.000,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	99.800.000,00
Jumlah		142.110.000,00

3. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa berupa jasa konsultan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp149.554.700,00;
4. Penambahan Aset Tetap yang berasal dari penambahan utang pengadaan aset tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp61.520.350,00, rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.95 Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembangunan Ruang Guru beserta Perabotnya SDI RAI Kec. Ruteng (DAU SG) utang 5%	11.400.584,00
2	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya SDN Madona Kec. Cibai Barat (DAU SG)	11.404.800,00
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) SDI Lando Kec. Cibai (DAU SG)	9.999.920,00
4	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat kerusakan Minimal sedang SDI Lenteng Kec. Rahong Utara (DAU SG)	3.746.246,00
5	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat kerusakan Minimal sedang SDN Bea Denger Kec. Cibai Barat(DAU SG)	4.995.000,00
6	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat kerusakan Minimal sedang SDI Lando Kec. Cibai Barat (DAU SG)	4.995.000,00
7	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat kerusakan Minimal sedang SDI Lenda Kec. Cibai Barat (DAU SG)	4.999.500,00
8	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat kerusakan Minimal sedang SDI Nimbong Kec. Cibai (DAU SG)	4.995.000,00
9	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat kerusakan Minimal sedang SDI Cekok Kec. Cibai Barat (DAU SG)	4.984.300,00
Jumlah		61.520.350,00

5. Terdapat Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp4.857.327.387,39, rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.96 Rincian Penambahan Aset Tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Peternakan	2.001.050.510,00
2	Dinas Kesehatan	332.726.900,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.523.549.977,39
Jumlah		4.857.327.387,39

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Terdapat pelunasan utang pengadaan aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp776.725.756,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Terdapat reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp3.274.166.211,99 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Terdapat reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.799.755.237,02. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.97 Rincian Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	28.531.760,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.433.090.267,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	338.133.210,02
Jumlah		2.799.755.237,02

4. Terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan TA 2024 senilai Rp920.647.667,33; dan
5. Terdapat temuan jasa konsultasi TA 2024 senilai Rp148.847.008,86.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 10** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.147.104.890.863,89	Rp2.066.383.520.696,44

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.147.104.890.863,89. Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.98 Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	2.066.383.520.696,44
1	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024	2.066.383.520.696,44
B	Mutasi Tambah	84.916.302.929,48
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2024 (LRA)	75.324.159.743,00
2	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	329.727.257,49
3	Belanja non Modal (Aset tetap yang berasal dari belanja Pegawai/Barang Jasa)	5.000.000,00
4	Aset Tetap yang Berasal dari Penambahan Utang	54.796.000,00
5	Aset Tetap yang Berasal dari Hibah	5.928.453.717,00
6	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.274.166.211,99
C	Mutasi Kurang	4.194.932.762,03
1	Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	170.019.144,00
2	Reklasifikasi Keluar ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.707.432.766,94
3	Reklasifikasi Keluar ke Aset Tidak Berwujud	557.692.286,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	12.980.506,00
5	Belanja Modal 2024 tidak menjadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	31.687.882,00
6	Temuan Kekurangan Volume	1.680.713.252,63
7	Temuan Jasa Konsultasi	34.406.924,46
D	Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)	2.147.104.890.863,89

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada LRA TA 2024 senilai Rp75.324.159.743,00;
2. Terdapat belanja pegawai berupa honorarium pengadaan barang/jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap senilai Rp329.727.257,49. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.99 Rincian Honorarium menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Langke Rembong	6.900.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	303.149.999,99
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.677.257,50
Jumlah		329.727.257,49

3. Terdapat penambahan aset dari belanja barang dan jasa akibat kesalahan penganggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp5.000.000,00;
4. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang bersumber dari utang pengadaan aset tetap senilai Rp54.796.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Laston Lapis Pondasi (HRS-Base) untuk ruas jalan Dintor-Denge-Wae Lom senilai Rp5.928.453.717,00; dan
6. Terdapat reklasifikasi masuk dari aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp3.274.166.211,99 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan:

1. Terdapat reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin pada RSUD Ruteng berupa belanja modal *upgrade* jaringan SIMRS senilai Rp170.019.144,00 yang salah di anggarkan pada aset tetap jalan, jaringan dan irigasi;
2. Terdapat reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp1.707.432.766,94 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Terdapat reklasifikasi ke aset tidak berwujud senilai Rp557.692.286,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.100 Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tidak Berwujud TA 2024

Uraian	Kode Barang	Nilai Perolehan
Perencanaan Data Teknis Jalan DAK 2025	Kajian	279.501.507,99
<i>Update</i> Data Base Jalan 2024	Kajian	151.113.971,14
Perencanaan Data Teknis Jembatan DAK 2025	Kajian	50.782.296,78
<i>Update</i> Data Base Jembatan 2024	Kajian	76.294.510,09
Jumlah		557.692.286,00

4. Terdapat reklasifikasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi rusak berat ke aset lain-lain senilai Rp12.980.506,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Terdapat belanja modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 yang nilainya di bawah kapitalisasi (ekstrakomptabel) pada Puskesmas Pagal senilai Rp1.800.000,00 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp29.887.882,00
6. Terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan berdasarkan LHP BPK pada LKPD TA 2024 senilai Rp557.120.778,94 dan LHP DTT Belanja TA 2023 s.d. Triwulan III 2024 senilai Rp1.123.592.473,69; dan
7. Terdapat temuan jasa konsultasi berdasarkan LHP BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 senilai Rp34.406.924,46.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 11** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp71.857.448.438,68	Rp70.597.146.237,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp71.857.448.438,68 merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.101 Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap	70.597.146.237,00
1	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2024	70.597.146.237,00
B	Mutasi Tambah	4.526.624.563,00
1	Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 (LRA)	4.438.870.163,00
2	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa	79.954.400,00
3	Aset Tetap Lainnya berasal dari Beban Barang	7.800.000,00
C	Mutasi Kurang	3.266.322.361,32
1	Belanja Modal 2024 tidak Jadi Aset Tetap (Dibawah Nilai Kapitalisasi)	2.481.196.286,32
2	Belanja Modal 2024 tidak Jadi Aset Tetap (Pelunasan Utang atas ATL)	785.126.075,00
D	Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)	71.857.448.438,68

Penjelasan Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya:

1. Terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) pada tahun 2024 senilai Rp4.438.870.163,00;
2. Terdapat penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp79.954.400,00 akibat kesalahan penganggaran; dan
3. Terdapat penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari beban barang akibat dari kesalahan pencatatan senilai Rp7.800.000,00.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya :

1. Terdapat Belanja Modal 2024 tidak Jadi Aset Tetap (di bawah nilai kapitalisasi) yang merupakan barang ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.476.437.466,32 dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp44.758.820,00; dan
2. Terdapat pelunasan utang aset tetap lainnya yang bersumber dari BOS senilai Rp785.126.075,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya pada SKPD Per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 12** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp18.030.619.030,71	Rp18.501.597.410,99



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp18.030.619.030,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Perjalanan TA 2024

No.	Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal Aset Tetap 1 Januari 2024	18.501.597.410,99
1	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 2024	18.501.597.410,99
B	Mutasi Tambah	4.524.930.762,46
1	Belanja non Modal (Belanja Pegawai/Barang & Jasa yang diatribusikan menjadi aset tetap)	2.322.743,50
2	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.799.755.237,02
3	Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.707.432.766,94
4	Penambahan KDP dari Utang	15.420.015,00
C	Mutasi Kurang	4.995.909.142,74
1	Reklasifikasi Keluar ke GB	4.857.327.387,39
2	Temuan Kekurangan Volume	103.601.755,35
3	Temuan Jasa Konsultasi	34.980.000,00
D	Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)	18.030.619.030,71

Penjelasan Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan:

1. Terdapat penambahan konstruksi dalam pengerjaan yang berasal dari belanja pegawai berupa honorarium pengadaan barang/jasa senilai Rp2.322.743,50. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.103 Daftar Belanja Pegawai Menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	500.000,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.822.743,50
Jumlah		2.322.743,50

2. Terdapat reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp28.531.760,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.433.090.267,00 dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp338.133.210,02;
3. Terdapat reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp1.707.432.766,94 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
4. Terdapat penambahan konstruksi dalam pengerjaan yang bersumber dari utang pengadaan aset tetap pada Dinas Kesehatan senilai Rp15.420.015,00.

Penjelasan Mutasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan :

1. Terdapat reklasifikasi keluar ke aset tetap gedung dan bangunan yang sudah menjadi aset tetap pada Dinas Peternakan senilai Rp2.001.050.510,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp332.726.900,00 dan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp2.523.549.977,39;
2. Terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan TA 2024 senilai Rp103.601.755,35; dan
3. Terdapat temuan jasa konsultasi TA 2024 senilai Rp34.980.000,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 13** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp2.166.051.785.756,44)	(Rp2.074.558.073.454,78)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.166.051.785.756,44) dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 5.104 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Aset	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	Koreksi	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
				Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin	(375.540.317.511,67)	(959.361.792,94)	(42.338.467.754,68)	9.357.778.420,01	(409.480.368.639,28)
2	Gedung dan Bangunan	(193.953.620.216,83)	0,00	(20.674.711.158,25)	2.460.918.850,12	(212.167.412.524,96)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.504.600.748.859,62)	938.512.137,17	(69.997.769.262,75)	29.722.071.593,00	(1.543.937.934.392,20)
4	Aset Tetap Lainnya	(463.386.866,66)	0,00	(2.683.333,34)	0,00	(466.070.200,00)
Jumlah		(2.074.558.073.454,78)	(20.849.655,77)	(133.013.631.509,02)	41.540.768.863,13	(2.166.051.785.756,44)

Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai tanggal 29 Desember 2023 telah mengubah metode penghitungan penyusutan Aset Tetap. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar perhitungan tahunan dengan mengakomodir tanggal dan bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Metode penyusutan yang digunakan adalah menganut metode garis lurus.

5.3.1.4. Properti Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp77.939.583.069,04	Rp79.304.968.243,63

Mulai Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai menyajikan Properti Investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Manggarai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pemerintah Manggarai menyajikan Properti Investasi atas Aset Tetap Tanah dan Gedung untuk menghasilkan sewa yaitu Tanah dan Gedung Rumah Toko seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.105 Daftar Aset Tetap Properti Investasi per 31 Desember 2024

NO	Perangkat Daerah	Nama Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
Tanah				
1	Badan Pendapatan Daerah	Tanah Bangunan Pasar	14	25.318.643.005,00
		Tanah bangunan pertokoan/rumah toko/koperasi	1	1.850.000.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		4	90.849.900,00
3	Bagian Umum	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	36.730.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Perangkat Daerah	Nama Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
		Tanah Bangunan Gudang	1	587.925.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		1	27.900.000,00
Jumlah Tanah			22	27.912.047.905,00
Bangunan Gedung				
1	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan gedung tertutup permanen	1	314.950.623
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	15	15.059.867.524
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1.797.032.000
		Gedung Pertokoan/koperasi/pasar permanen	21	43.923.718.491
		Gedung Pertokoan/koperasi/pasar semi permanen	5	3.927.392.050
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	913.696.000
		Bangunan gedung pertokoan lain-lain	1	184.460.000
Jumlah Bangunan gedung			45	66.121.116.688,00
Jumlah Tanah dan Bangunan Gedung			67	94.033.164.593,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung				(16.093.581.523,96)
Jumlah Properti Investasi				77.939.583.069,04

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tanah atas Gedung dan Bangunan Ruko yang dicatat sebagai Properti Investasi merupakan Tanah dibawah Gedung dan Bangunan Ruko yang selama ini dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme sewa, atas Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2003 – 2022 senilai Rp27.912.047.905,00;
2. Gedung dan Bangunan Ruko yang dicatat sebagai Properti Investasi merupakan Gedung dan Bangunan Ruko yang selama ini dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dengan mekanisme sewa, atas Gedung dan Bangunan tersebut dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2003 – 2022 senilai Rp66.121.116.688,00; dan
3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan senilai Rp16.093.581.523,96.

5.3.1.4.1. Properti Investasi Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp27.912.047.905,00</u>	<u>Rp27.912.047.905,00</u>

Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp27.912.047.905,00 dan senilai Rp27.912.047.905,00, tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan Properti Investasi Tanah. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.106 Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024

No	Perangkat Daerah	Nama Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Tanah Bangunan Pasar	14	25.318.643.005,00
		Tanah bangunan pertokoan/rumah toko/koperasi	1	1.850.000.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		4	90.849.900,00
3	Bagian Umum	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	36.730.000,00
		Tanah Bangunan Gudang	1	587.925.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		1	27.900.000,00
Jumlah			22	27.912.047.905,00

5.3.1.4.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp66.121.116.688,00	Rp66.121.116.688,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp66.121.116.688,00 dan senilai Rp66.121.116.688,00, tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan Properti Investasi Bangunan dan Gedung. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.107 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No	Perangkat Daerah	Nama Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Bangunan gedung tertutup permanen	1	314.950.623
		Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	15	15.059.867.524
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1.797.032.000
		Gedung Pertokoan/koperasi/pasar permanen	21	43.923.718.491
		Gedung Pertokoan/koperasi/pasar semi permanen	5	3.927.392.050
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	913.696.000
		Bangunan gedung pertokoan lain-lain	1	184.460.000
Jumlah			45	66.121.116.688,00

5.3.1.4.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
(Rp16.093.581.523,96)	(Rp14.728.196.349,37)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai (Rp16.093.581.523,96) dan senilai (Rp14.728.196.349,37). Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi TA 2024 senilai (Rp16.093.581.523,96) merupakan penyusutan atas Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang ada di Kabupaten Manggarai. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.108 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(10.532.878.156,08)
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	(120.883.200,00)
3	Badan Pendapatan Daerah	(5.439.820.167,88)
Jumlah		(16.093.581.523,96)

5.3.1.5. Aset Lainnya

31 Desember 2024

Rp15.898.873.124,07

31 Desember 2023

Rp15.580.324.062,16

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp15.898.873.124,07 dan senilai Rp15.580.324.062,16.

Tabel 5.109 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Tagihan Jangka Panjang	218.499.532,00	0,00	4.500.000,00	213.999.532,00
2	Aset Tak Berwujud	2.531.261.200,00	557.692.286,00	0,00	3.088.953.486,00
3	Aset Lain-lain	39.355.276.904,44	11.858.882.927,30	2.397.064.601,78	48.817.095.229,96
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.208.024.052,00)	(332.192.876,60)	0,00	(2.540.216.928,60)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(24.316.689.522,28)	(9.364.268.673,01)	0,00	(33.680.958.195,29)
Jumlah		15.580.324.062,16	2.720.113.663,69	2.401.564.601,78	15.898.873.124,07

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2024

Rp213.999.532,00

31 Desember 2023

Rp218.499.532,00

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp218.499.532,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.110 Rincian Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	TGR BOS	112.624.032,00	0,00	4.500.000,00	108.124.032,00
2	TGR SKTJM	105.875.500,00	0,00	0,00	105.875.500,00
Jumlah		218.499.532,00	0,00	4.500.000,00	213.999.532,00

Terdapat mutasi kurang atas TGR BOS senilai Rp4.500.000,00 yang merupakan setoran pengembalian dari SDI Rakas pada Juni 2024.

5.3.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024

Rp3.088.953.486,00

31 Desember 2023

Rp2.531.261.200,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.088.953.486,00 dan Rp2.531.261.200,00 mengalami kenaikan senilai Rp557.692.286,00 atau sebesar 22,03% dibandingkan dengan nilai Aset Tidak Berwujud senilai Rp2.531.261.200,00. Rincian lebih lanjut atas saldo Aset Tidak Berwujud TA 2024 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.111 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024

No	Unit Pengguna Barang	Jenis	Nilai (Rp)
1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Software	49.995.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Software	169.400.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan	Kajian	852.881.600,00
4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Lisensi dan Franchise	390.500.600,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.153.851.286,00
6	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Kajian	472.325.000,00
Jumlah			3.088.953.486,00

Adapun rincian mutasi Aset Tetap Tak Berwujud Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.112 Daftar Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Akun	Saldo Awal 01 Januari 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Lisensi dan Franchise	390.500.600,00	0,00	0,00	390.500.600,00
2	Software	209.920.000,00	0,00	0,00	209.920.000,00
3	Kajian	1.233.894.600,00	0,00	0,00	1.233.894.600,00
4	ATB Lainnya	696.946.000,00	557.692.286,00	0,00	1.254.638.286,00
Jumlah		2.531.261.200,00	557.692.286,00	0,00	3.088.953.486,00

Mutasi tambah aset tidak berwujud senilai Rp557.692.286,00 merupakan penambahan aset tidak berwujud yang berasal dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 14** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.3. Aset Lain-lain

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp48.817.095.229,96

Rp39.355.276.904,44

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp48.817.095.229,96 merupakan nilai perolehan Aset Lain-lain pada beberapa Perangkat Daerah Tahun 2024. Nilai buku Aset Lain-lain setelah akumulasi penyusutan dan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113 Daftar Aset Lain – Lain per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2024
I	Aset Lain-lain dari Aset Tetap				
1	Peralatan dan Mesin	17.599.689.473,50	9.370.968.601,01	0,00	26.970.658.074,51
2	Gedung dan Bangunan	7.073.151.722,00	0,00	0,00	7.073.151.722,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.684.878.748,00	12.980.506,00	0,00	1.697.859.254,00
4	Aset Tidak Berwujud	1.752.557.000,00	0,00	0,00	1.752.557.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.693.996.670,00	0,00	0,00	1.693.996.670,00
Jumlah I		29.804.273.613,50	9.383.949.107,01	0,00	39.188.222.720,51



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2024
II	Aset Tetap yang Akan Dihibahkan				
1	Gedung dan Bangunan	7.030.166.346,00	0,00	0,00	7.030.166.346,00
2	Peralatan dan Mesin	53.132.908,00	0,00	0,00	53.132.908,00
	Jumlah III	7.083.299.254,00	0,00	0,00	7.083.299.254,00
III	Aset Lain-lain Lainnya				
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	1.430.759.000,00	18.526.000,00	1.430.759.000,00	18.526.000,00
2	Temuan Kekurangan Volume:	1.036.945.036,94	1.676.880.162,22	966.305.601,78	1.747.519.597,38
3	Temuan Kelebihan Bayar Belanja Barang dan Jasa	0,00	754.910.790,07	0,00	754.910.790,07
4	Temuan Kelebihan Bayar Belanja Pegawai	0,00	24.616.868,00	0,00	24.616.868,00
	Jumlah III	2.467.704.036,94	2.474.933.820,29	2.397.064.601,78	2.545.573.255,45
	Jumlah I+II+III	39.355.276.904,44	11.858.882.927,30	2.397.064.601,78	48.817.095.229,96

Penjelasan atas mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

1. Mutasi tambah Aset lain-lain dari aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp9.370.968.601,01 merupakan aset tetap peralatan dan mesin rusak berat/usang. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rusak Berat/Usang TA 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	28.562.500,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	123.121.630,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.480.364,00
4	Badan Pendapatan Daerah	137.962.435,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	229.233.033,00
6	Bagian Administrasi Pembangunan	309.029.004,00
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	21.933.333,00
8	Bagian Pemerintahan	319.433.500,00
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	48.753.700,00
10	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	13.699.902,00
11	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	534.812.216,00
12	Bagian Umum	1.152.050.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	269.024.742,00
14	Dinas Kesehatan	590.910.120,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	111.833.178,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	42.636.418,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	820.400.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	149.909.032,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	198.800.000,00
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	412.319.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Nilai (Rp)
21	Dinas Perhubungan	551.400.000,00
22	Dinas Perikanan	765.675.000,00
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	893.028.117,00
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	105.300.000,00
25	Dinas Peternakan	50.700.000,00
26	Dinas Sosial	104.975.000,00
27	Kecamatan Cibal Barat	101.068.345,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	341.505.725,00
29	Sekretariat DPRD	911.412.307,01
Jumlah		9.370.968.601,01

2. Mutasi tambah Aset lain-lain dari aset tetap jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp12.980.506,00 merupakan aset tetap rusak berat/usang pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Mutasi tambah *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp18.526.000,00 merupakan pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Non Tunai melalui TDF Tahun 2024 berdasarkan KMK 44 Tahun 2024 yang belum dicairkan ke Pemerintah Daerah;
4. Mutasi kurang *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp1.430.759.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil TDF TA 2023 yang diterima pada TA 2024;
5. Mutasi tambah temuan kekurangan volume senilai Rp1.676.880.162,22 merupakan temuan kekurangan volume atas pekerjaan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp553.287.688,53 dan pekerjaan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.123.592.473,69;
6. Mutasi kurang temuan kekurangan volume senilai Rp966.305.601,78 temuan kekurangan volume TA 2023 yang sudah terbayar pada TA 2024;
7. Mutasi tambah Temuan Kelebihan Bayar Belanja Barang dan Jasa senilai Rp754.910.790,07 merupakan temuan atas kelebihan bayar belanja listrik senilai Rp143.164.500,00, kelebihan bayar belanja honorarium senilai Rp96.166.750,00, kelebihan bayar belanja jasa pelayanan JKN senilai Rp48.203.037,65, kelebihan bayar jasa konsultasi senilai Rp218.233.933,32, kelebihan bayar belanja BBM senilai Rp75.602.030,00 dan kelebihan bayar belanja perjalanan dinas senilai Rp173.540.539,10; dan
8. Mutasi tambah Temuan Kelebihan Bayar Belanja Pegawai senilai Rp24.616.868,00 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp15.286.538,00 dan kelebihan pembayaran TPG yang tidak sesuai gaji pokok guru penerima tunjangan senilai Rp9.330.330,00.

5.3.1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>(Rp2.540.216.928,60)</u>	<u>(Rp2.208.024.052,00)</u>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.540.216.928,60) merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud Lisensi dan *Franchise, Software, Kajian* dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai (Rp2.540.216.928,60) dan (Rp2.208.024.052,00) atau bertambah senilai Rp332.192.876,60 yang merupakan saldo amortisasi atas Aset Tak Berwujud Lainnya. Rincian lebih lanjut atas saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.115 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Unit Pengguna Barang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(44.995.500,00)	(34.996.500,00)
2	Badan Pendapatan Daerah	(169.400.000,00)	(152.460.000,00)
3	Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	(852.881.600,00)	(841.411.600,00)
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(390.500.600,00)	(159.454.952,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(610.114.228,60)	(547.376.000,00)
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(472.325.000,00)	(472.325.000,00)
Jumlah		(2.540.216.928,60)	(2.208.024.052,00)

Adapun mutasi Penyisihan Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Daftar Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Akun	Saldo Awal 2024	Koreksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2024
1	Lisensi dan Franchise	390.500.600,00	0,00	0,00	0,00	390.500.600,00
2	Software	209.920.000,00	0,00	0,00	0,00	209.920.000,00
3	Kajian	1.233.894.600,00	0,00	0,00	0,00	1.233.894.600,00
4	ATB Lainnya	696.946.000,00	0,00	557.692.286,00	0,00	1.254.638.286,00
Jumlah		2.531.261.200,00	0,00	557.692.286,00	0,00	3.088.953.486,00
1	Akumulasi Amortisasi	(2.208.024.052,00)	264.455.148,00	67.737.728,60	0,00	(2.540.216.928,60)
Jumlah Aset Tidak Berwujud		323.237.148,00	264.455.148,00	625.430.014,60	0,00	548.736.557,40

5.3.1.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2024

(Rp33.680.958.195,29)

31 Desember 2023

(Rp24.316.689.522,28)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai (Rp33.680.958.195,29) dan senilai (Rp24.316.689.522,28).

Tabel 5.117 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2024
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(24.316.689.522,28)	(9.364.268.673,01)	0,00	(33.680.958.195,29)
Jumlah		(24.316.689.522,28)	(9.364.268.673,01)	0,00	(33.680.958.195,29)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp9.364.268.673,01 bersumber dari Akumulasi Penyusutan aset rusak berat/usang yang direklasifikasi ke aset lainnya yang terdiri dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin rusak berat pada 23 SKPD senilai Rp9.357.778.420,01 dan dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi rusak berat pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp6.490.253,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp3.805.907.176,68</u>	<u>Rp66.817.773.575,11</u>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.805.907.176,68 dan senilai Rp66.817.773.575,11. Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp3.805.907.176,68</u>	<u>Rp66.817.773.575,11</u>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.805.907.176,68 dan senilai Rp66.817.773.575,11, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 2024
1	Utang PFK	1.455.157,00	132.421.306,17	1.455.157,00	132.421.306,17
2	Utang Bunga	172.929.845,66	0,00	172.929.845,66	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	57.391.304.348,00	0,00	57.391.304.348,00	0,00
4	Utang Belanja	8.370.644.657,45	3.316.435.485,26	8.202.327.525,20	3.484.752.617,51
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	881.439.567,00	116.316.350,00	809.022.664,00	188.733.253,00
TOTAL		66.817.773.575,11	3.565.173.141,43	66.577.039.539,86	3.805.907.176,68

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp132.421.306,17</u>	<u>Rp1.455.157,00</u>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp132.421.306,17 terdiri dari Utang PFK BUD senilai Rp15.307.246,00, Utang PFK Dana BOSP senilai Rp39.032.372,00, utang PFK pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp64.529.382,00, Utang PFK pada Bendahara FKTP senilai Rp2.334.519,17, Utang PFK Prolanis senilai Rp192.544,00 dan Utang PFK Dana BOK senilai Rp11.025.243,00.

Saldo Rincian saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.119 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
A	PFK pada Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Utang PPN	12.615.692,00	0,00
	Utang PPh Pasal 22	820.075,00	1.000.000,00
	Utang PPh Ps 4 (2)	1.871.479,00	0,00
B	PFK pada Bendahara BOSP SD dan SMP		
	Utang PPh Pasal 21	1.018.000,00	0,00
	Utang PPh Pasal 23	5.552.064,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Utang PPN	32.462.308,00	252.157,00
C	PFK pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
	Utang PPh Pasal 21	37.240.000,00	0,00
	Utang PPN	21.215.264,00	0,00
	Utang PPh Pasal 22	4.014.383,00	0,00
	Utang PPh Pasal 23	2.059.735,00	0,00
D	PFK pada Bendahara FKTP		
	Utang PPN	2.177.677,17	0,00
	Utang PPh Pasal 22	139.709,00	0,00
	Utang PPH Pasal 21	17.133,00	0,00
E	PFK pada Dana Prolanis		0,00
	Utang PPh Pasal 23	192.544,00	0,00
F	PFK pada Bendahara BOK Puskesmas		
	Utang PPN	4.845.295,00	0,00
	Utang PPh Pasal 21	4.395.762,00	0,00
	Utang PPh Pasal 22	1.132.586,00	0,00
	Utang PPh Pasal 23	651.600,00	0,00
G	PFK pada Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup		
	Utang PPh Pasal 21	0,00	203.000,00
	Total	132.421.306,17	1.455.157,00

5.3.2.1.2. Utang Bunga

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp0,00	Rp172.929.845,66

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan pada 31 Desember 2023 senilai Rp172.929.845,66 merupakan Utang Bunga pada BPD NTT yang telah terbayar pada 2024.

5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp0,00	Rp57.391.304.348,00

Jumlah bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp57.391.304.348,00 merupakan utang atas pinjaman Bank NTT yang telah terbayar pada Tahun 2024.

5.3.2.1.4. Utang Belanja

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp3.484.752.617,51	Rp8.370.644.657,45

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp3.462.571.921,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.356.808.461,51	8.252.567.727,45
	Utang Belanja Barang	55.793.171,25	55.793.171,25
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	55.793.171,25	55.793.171,25



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	785.126.075,00
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	785.126.075,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.278.834.594,02	7.411.648.481,20
	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	3.278.834.594,02	7.411.648.481,20
	Utang Belanja Jasa	22.180.696,24	0,00
	Dinas Kesehatan	22.180.696,24	0,00
2	Utang Belanja Hibah	0,00	5.552.969,00
	Utang Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	5.552.969,00
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	5.552.969,00
3	Utang Belanja Modal	127.943.976,00	112.523.961,00
	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	111.627.925,00	96.207.910,00
	Dinas Penanaman Modal	96.207.910,00	96.207.910,00
	Dinas Kesehatan	15.420.015,00	0,00
	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.316.051,00	16.316.051,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.750.000,00	4.750.000,00
	Kecamatan Ruteng	11.566.051,00	11.566.051,00
4	Utang Bantuan Keuangan	180,00	0,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	180,00	0,00
	Jumlah	3.484.752.617,51	8.370.644.657,45

Rincian Utang Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 senilai Rp3.356.808.461,51 merupakan Utang Belanja Barang berupa sisa Utang PD Komodo Jaya yang sudah likuidasi senilai Rp55.793.171,25 yang terdiri dari pengakuan saldo awal tahun 2015 senilai Rp164.300.144,25 dan sudah terbayar tahun 2016 senilai Rp108.506.973,00. Utang Belanja BLUD RSUD per 31 Desember 2024 senilai Rp3.278.834.594,02, dan Utang Belanja Jasa pada Dinas Kesehatan senilai Rp22.180.696,24.

2. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp127.943.976,00 merupakan Utang Belanja Modal - Aset Tetap Gedung & Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp96.207.910,00 dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp15.420.015,00. Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp16.316.051,00 yang terdiri dari Utang belanja Tahun 2021 pada Dinas PUPR senilai Rp4.750.000,00 dan Kecamatan Ruteng senilai Rp11.566.051,00.

3. Utang Bantuan Keuangan

Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2024 senilai Rp180,00 merupakan Kekurangan Transfer Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Desa Watu Baur Kecamatan Reok pada Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp188.733.253,00	Rp881.439.567,00

Utang jangka pendek lainnya tahun 2024 merupakan utang pengadaan bangunan dan gedung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp162.426.253,00 dan sisa utang pengadaan aset tetap pada Dinas Kesehatan senilai Rp26.307.000,00

Tabel 5.121 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo	Mutasi		Saldo
		1 Januari 2024	Tambah	Kurang	31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	855.132.567,00	116.316.350,00	809.022.664,00	162.426.253,00
2	Dinas Kesehatan	26.307.000,00	0,00	0,00	26.307.000,00
Jumlah		881.439.567,00	116.316.350,00	809.022.664,00	188.733.253,00

Rincian mutasi pada utang Jangka pendek Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Mutasi tambah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan utang pengadaan Aset Tetap Bangunan dan Gedung pada Tahun 2024 senilai Rp116.316.350,00;
2. Mutasi kurang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan pelunasan Utang Pengadaan Aset Bangunan dan Gedung yang telah diterima pada Tahun 2024 senilai Rp809.022.664,00; dan
3. Saldo utang pada Dinas Kesehatan senilai Rp26.307.000,00 merupakan utang pengadaan aset tetap.

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.055.142.764.696,19	Rp1.934.867.214.152,54

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp2.055.142.764.696,19 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.934.867.214.152,54, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Ekuitas per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	1.934.867.214.152,54
Surplus/Defisit-LO	86.554.403.341,32
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	33.721.147.202,33
Koreksi Ekuitas – Kas	(15.788.414,41)
Koreksi Ekuitas – Piutang	201.616.364,72
Koreksi Ekuitas – Persediaan	1.742.390.596,33
Koreksi Ekuitas - Investasi Permanen	497.312.174,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Tanah	24.526.500,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	959.361.714,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	30.408.419.767,15
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(42.962.840,84)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(53.728.658,62)
Ekuitas Akhir	2.055.142.764.696,19



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1. Pendapatan-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.163.726.926.866,26	Rp1.089.974.958.345,93

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Manggarai yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan LO TA 2024 senilai Rp1.163.726.926.866,26 atau mengalami kenaikan senilai Rp73.751.968.520,33 atau sebesar 6,77% dari Tahun 2023. Realisasi Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.123 Pendapatan LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	114.935.289.261,26	124.746.950.084,35	(9.811.660.823,09)	-7,87
2	Pendapatan Transfer - LO	1.025.663.087.211,00	956.840.907.318,58	68.822.179.892,42	7,19
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	23.128.550.394	8.387.100.943,00	14.741.449.451,00	175,76
Jumlah		1.163.726.926.866,26	1.089.974.958.345,93	73.751.968.520,33	6,77

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp114.935.289.261,26	Rp124.746.950.084,35

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode TA 2024 senilai Rp114.935.289.261,26 yang mengalami penurunan senilai Rp9.811.660.823,09 atau sebesar (7,87%) dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124 Rincian Pendapatan Asli Daerah LO TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah-LO	22.203.028.224,00	25.758.446.934,76	(3.555.418.710,76)	(13,80)
2	Retribusi Daerah-LO	7.506.282.565,00	9.596.299.547,42	(2.090.016.982,42)	(21,78)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.284.238.494,00	5.567.584.252,00	(283.345.758,00)	(5,09)
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	79.941.739.978,26	83.824.619.350,17	(3.882.879.371,91)	(4,63)
Jumlah		114.935.289.261,26	124.746.950.084,35	(9.811.660.823,09)	(7,87)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp22.203.028.224,00	Rp25.758.446.934,76

Realisasi Pendapatan Pajak-LO Tahun 2024 senilai Rp22.203.028.224,00 mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya senilai Rp3.555.418.710,76 atau sebesar (13,80%). Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.125 Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Nilai 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	752.754.553,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.546.506.235,00
3	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	227.142.181,00
4	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	7.064.930.521,00
5	Pajak Air Tanah-LO	234.817.828,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	4.976.870.920,00
7	PBBP2-LO	5.529.984.635,00
8	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	870.021.351,00
Jumlah		22.203.028.224,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.126 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pendapatan Pajak Daerah	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Pajak Hotel	754.750.053,00	752.754.553,00	1.995.500,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.559.530.061,00	2.546.506.235,00	13.023.826,00
3	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	229.977.181,00	227.142.181,00	2.835.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.926.709.317,00	7.064.930.521,00	(138.221.204,00)
5	Pajak Air Tanah	248.838.358,00	234.817.828,00	14.020.530,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.010.318.955,00	4.976.870.920,00	33.448.035,00
7	PBBP2	4.670.822.047,00	5.529.984.635,00	(859.162.588,00)
8	BPHTB-Pemindahan Hak	870.021.351,00	870.021.351,00	0,00
Jumlah		21.270.967.323,00	22.203.028.224,00	(932.060.901,00)

Selisih Pendapatan Pajak Daerah LRA dan Pendapatan Pajak Daerah LO senilai (Rp932.060.901,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Pendapatan Pajak Hotel LRA dan LO senilai Rp1.995.500,00 merupakan piutang baru pajak hotel di tahun berjalan senilai Rp2.335.000,00 dan pelunasan piutang pajak hotel pada tahun 2024 senilai Rp4.330.500,00;
2. Selisih Pendapatan Pajak Restoran LRA dan LO senilai Rp13.023.826,00 merupakan piutang baru pajak restoran di tahun berjalan senilai Rp3.975.000,00, pelunasan



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- piutang pajak restoran senilai Rp16.803.826,00 dan terdapat pembayaran atas piutang pendapatan Pajak Restoran senilai Rp195.000,00;
3. Selisih Pendapatan Pajak Reklame senilai Rp2.835.000,00 merupakan piutang baru pajak reklame di tahun berjalan senilai Rp2.700.000,00 dan pelunasan piutang pajak reklame senilai Rp5.535.000,00;
 4. Selisih Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA dan LO senilai (Rp138.221.204,00) merupakan piutang baru senilai Rp616.291.161,00 dan pelunasan piutang senilai Rp478.069.957,00;
 5. Selisih Pendapatan Pajak Air Tanah LRA dan LO senilai Rp14.020.530,00 merupakan piutang baru pajak Air Tanah di tahun berjalan senilai Rp7.588.251,00 dan pelunasan piutang pajak air tanah senilai Rp21.608.781,00;
 6. Selisih Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya LRA dan LO senilai Rp33.448.035,00 merupakan piutang baru pajak mineral bukan logam batuan senilai Rp59.160.974,00, pelunasan piutang senilai Rp92.297.009,00 dan terdapat reklasifikasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tercatat di pendapatan lain-lain PAD yang Sah senilai Rp312.000,00; dan
 7. Selisih Piutang PBB-P2 LRA dan LO senilai (Rp859.162.588,00) merupakan piutang baru PBB-P2 di tahun berjalan senilai Rp1.325.891.127,00, pelunasan piutang PBB-P2 senilai Rp466.728.539,00 dan terdapat koreksi kesalahan kelebihan pengakuan piutang PBB TA 2024.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp7.506.282.565,00	Rp9.596.299.547,42

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024 senilai Rp7.506.282.565,00 mengalami penurunan senilai Rp2.090.016.982,42 atau sebesar (21,78%) dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.127 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024

No	Uraian Pendapatan Retribusi-LO	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	449.318.950,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	485.126.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	284.398.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.197.866.500,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	3.611.527.930,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	4.620.000,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	257.240.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	5.678.420,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	330.719.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	823.537.500,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	56.250.265,00
Jumlah		7.506.282.565,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.128 Perbandingan Pendapatan Retribusi LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan Retribusi	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	449.318.950,00	449.318.950,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Pendapatan Retribusi	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	485.126.000,00	485.126.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	284.398.000,00	284.398.000,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.291.509.500,00	1.197.866.500,00	93.643.000,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.167.517.435,00	3.611.527.930,00	(444.010.495,00)
6	Retribusi Tempat Pelelangan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	257.240.000,00	257.240.000,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.678.420,00	5.678.420,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	330.719.000,00	330.719.000,00	0,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	823.537.500,00	823.537.500,00	0,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	56.250.265,00	56.250.265,00	0,00
Jumlah		7.155.915.070,00	7.506.282.565,00	(350.367.495,00)

Selisih pendapatan retribusi LRA dan LO senilai (Rp350.367.495,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp93.643.000,00 merupakan selisih akibat terdapat pelunasan piutang retribusi rumah dinas senilai Rp97.676.900,00, pelunasan retribusi sewa gedung senilai Rp29.200.000,00 dan pelunasan retribusi sewa tanah senilai Rp6.646.000,00 serta terdapat penambahan piutang baru retribusi rumah dinas senilai Rp39.879.900,00;
2. Selisih Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan senilai (Rp444.010.495,00) terdiri dari pelunasan piutang retribusi *shopping center* senilai Rp18.748.875,00, pelunasan piutang retribusi ruko senilai Rp101.460.000,00, pelunasan piutang retribusi pasar rakyat senilai Rp28.925.000,00 dan pelunasan piutang retribusi pasar senilai Rp298.567.110,00 serta terdapat penambahan piutang baru retribusi *shopping center* senilai Rp20.541.000,00, piutang retribusi ruko senilai Rp99.495.000,00, piutang retribusi pasar rakyat Rp30.900.000,00 dan piutang retribusi pasar senilai Rp740.775.480,00.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp5.284.238.494,00	Rp5.567.584.252,00

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp5.284.238.494,00 dan senilai Rp5.567.584.252,00, yang merupakan saldo pendapatan berupa pembagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO mengalami penurunan senilai Rp283.345.758,00 atau sebesar (5,09%) dari tahun sebelumnya. Adapun Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.129 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank NTT	2.829.142.453,00
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT MMI	150.300.822,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT Perumda Tirta Komodo	2.304.795.219,00
Jumlah		5.284.238.494,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.130 Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank NTT	2.829.142.453,00	2.829.142.453,00	0,00
2	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT MMI	150.300.822,00	150.300.822,00	0,00
3	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT Perumda Tirta Komodo Jaya	600.000.000,00	2.304.795.219,00	(1.704.795.219,00)
Jumlah		3.579.443.275,00	5.284.238.494,00	(1.704.795.219,00)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Laba PDAM Tirta Komodo Jaya Tahun 2024 senilai Rp1.704.795.219,00.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp79.941.739.978,26	Rp83.824.619.350,17

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO Tahun 2024 senilai Rp79.941.739.978,26 yang mengalami penurunan senilai Rp3.882.879.371,91 atau sebesar (4,63%) dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.131 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00
2	Jasa Giro-LO	731.050.640,60
3	Pendapatan Bunga-LO	265.526.339,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	637.539.495,48
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.020.428.937,77
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	866.189.407,72
7	Pendapatan dari BLUD-LO	76.421.005.157,69
Jumlah		79.941.739.978,26

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah LO yang disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.132 Perbandingan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro	731.050.640,60	731.050.640,60	0,00
3	Pendapatan Bunga	265.523.889,00	265.526.339,00	(2.450,00)
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	648.205.077,07	637.539.495,48	10.665.581,59
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	893.564.289,00	1.020.428.937,77	(126.864.648,77)
6	Pendapatan dari Pengembalian	870.689.407,72	866.189.407,72	4.500.000,00
7	Pendapatan dari BLUD	73.891.993.617,69	76.421.005.157,69	(2.529.011.540,00)
	Jumlah	77.301.026.921,08	79.941.739.978,26	(2.640.713.057,18)

Selisih Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA dan LO senilai (Rp2.640.713.057,18) pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Pendapatan Bunga LRA dan LO senilai (Rp2.450,00) merupakan pengakuan Remunerasi TDF Bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan ke Pemerintah Daerah;
2. Selisih Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah senilai Rp10.665.581,59 merupakan pendapatan temuan atas belanja jasa pelayanan pada 23 puskesmas di Kabupaten Manggarai pada tahun 2023 senilai Rp840.772.639,30 dan pengurangan aset lain-lain atas temuan kekurangan volume pekerjaan TA 2022 dan 2023 senilai Rp851.438.220,89;
3. Selisih Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai (Rp126.864.648,77) merupakan pelunasan piutang denda keterlambatan pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang disetorkan ke rekening kas daerah pada tanggal 5 Januari 2024 senilai Rp1.261.252,00, terdapat reklasifikasi ke Aset Lainnya atas temuan kekurangan volume yang pada LHP LKPD BPK TA 2022 dan 2023 yang telah disetorkan ke rekening kas daerah pada Tahun 2023 dan 2024 senilai Rp61.138.722,27 dan terdapat koreksi Piutang Denda Keterlambatan yang telah ditetapkan oleh PPK berdasarkan temuan BPK pada LKPD TA 2024 senilai Rp189.264.623,04;
4. Selisih Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp4.500.000,00 merupakan koreksi Tagihan Jangka Panjang yang telah disetorkan ke rekening kas daerah oleh SDI Rakas pada Juni 2024; dan
5. Selisih Pendapatan dari BLUD senilai (Rp2.529.011.540,00) terdiri dari pelunasan piutang BLUD pada tahun 2024 senilai Rp2.947.548.020,00, terdapat piutang baru BLUD di tahun berjalan senilai Rp1.829.654.960,00 dan terdapat koreksi piutang BLUD RSUD Ruteng atas jasa pelayanan 2024 yang telah dibayar tahun 2025 senilai Rp3.646.904.600,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2. Pendapatan Transfer –LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp1.025.663.087.211,00	Rp956.840.907.318,58

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk TA 2024 senilai Rp1.025.663.087.211,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp68.822.179.892,42 atau sebesar 7,19% dari tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2024

No	Uraian Pendapatan Transfer-LO	Nilai LO (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	994.228.079.037,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	6.961.330.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	677.515.472.202,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	114.943.944.920,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	194.807.331.915,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00
	Dana Penyesuaian – LO	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	31.435.008.174,00
	Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	31.435.008.174,00
Jumlah		1.025.663.087.211,00

Rincian Pendapatan Transfer dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp994.228.079.037,00	Rp918.582.500.520,58

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2024 senilai Rp994.228.079.037,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp75.645.578.516,42 atau sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.134 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO TA 2024

No	Uraian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	Nilai (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO	4.371.521.000,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO	2.589.809.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	677.515.472.202,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	309.751.276.835,00
Jumlah		994.228.079.037,00

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO sebagai berikut:

5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp4.371.521.000,00	Rp6.438.985.829,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2024 senilai Rp4.371.521.000,00 yang mengalami penurunan senilai Rp2.067.464.829,00 atau sebesar (32,11%) dari tahun sebelumnya Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.135 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2024

No.	Uraian	Nilai LO (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.778.028.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	1.330.537.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	262.956.000,00
Jumlah		4.371.521.000,00

Terdapat perbedaan antara nilai Dana Bagi Hasil Pajak antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.136 Perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.778.028.000,00	2.778.028.000,00	0,00
2	DBH PPh Pasal 21	2.742.770.000,00	1.330.537.000,00	1.412.233.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	303.871.000,00	262.956.000,00	40.915.000,00
Jumlah		5.824.669.000,00	4.371.521.000,00	1.453.148.000,00

Selisih Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA dan LO senilai Rp1.453.148.000,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Selisih DBH PPh Pasal 21 senilai Rp1.412.233.000,00 merupakan *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 senilai Rp1.430.759.000,00 yang diterima 2024 dan TDF Tahun 2024 senilai Rp18.526.000,00 yang diterima pada Tahun 2025; dan
- 2) Selisih DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp40.915.000,00 merupakan pendapatan DBH CHT yang diterima pada tahun 2024.

5.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp2.589.809.000,00

Rp3.064.765.303,58

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO Tahun 2024 senilai Rp2.589.809.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp3.064.765.303,58. Realisasi TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp474.956.303,58 atau sebesar (15,50%) dari tahun sebelumnya. Rincian Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.137 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO TA 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	960.853.000,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	23.265.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.605.691.000,00
Jumlah		2.589.809.000,00

Tidak terdapat perbedaan antara nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.138 Perbandingan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA dan LO TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	960.853.000,00	960.853.000,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	23.265.000,00	23.265.000,00	0,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.605.691.000,00	1.605.691.000,00	0,00
Jumlah		2.589.809.000,00	2.589.809.000,00	0,00

5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp677.515.472.202,00

Rp596.218.538.347,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) – LO Tahun 2024 senilai Rp677.515.472.202,00 dan Tahun 2023 senilai Rp596.218.538.347,00. Realisasi DAU-LO mengalami kenaikan senilai Rp81.296.933.855,00 atau sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) – LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.139 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) – LO TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Alokasi Umum – SG Bidang Pekerjaan Umum	23.072.664.000,00
2	Dana Alokasi Umum – SG Bidang Kesehatan	42.694.287.000,00
3	Dana Alokasi Umum – SG Bidang Pendidikan	72.472.296.000,00
4	Dana Alokasi Umum – SG Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00
5	Dana Alokasi Umum – SG Penggajian Formasi PPPK	11.243.644.202,00
6	Dana Alokasi Umum – SG Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke Tiga Belas Bagi Guru ASN Daerah	12.073.916.000,00
7	Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	510.758.665.000,00
Jumlah		677.515.472.202,00

Tidak terdapat perbedaan antara nilai Dana Alokasi Umum (DAU) dalam LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.140 Perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Dana Alokasi Umum – SG Bidang Pekerjaan Umum	23.072.664.000,00	23.072.664.000,00	0,00
2	Dana Alokasi Umum – SG Bidang Kesehatan	42.694.287.000,00	42.694.287.000,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum – SG Bidang Pendidikan	72.472.296.000,00	72.472.296.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum – SG Pendanaan Kelurahan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum – SG Penggajian Formasi PPPK	11.243.644.202,00	11.243.644.202,00	0,00
6	Dana Alokasi Umum – SG Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke Tiga Belas Bagi Guru ASN Daerah	12.073.916.000,00	12.073.916.000,00	0,00
7	Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	510.758.665.000,00	510.758.665.000,00	0,00
Jumlah		677.515.472.202,00	677.515.472.202,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp309.751.276.835,00	Rp312.860.211.041,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO Tahun 2024 senilai Rp309.751.276.835,00 yang mengalami penurunan senilai Rp3.108.934.206,00 atau sebesar (0,99%) dari tahun sebelumnya. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.141 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	DAK Fisik	114.943.944.920,00
2	DAK Non Fisik	194.807.331.915,00
Jumlah		309.751.276.835,00

Tidak terdapat perbedaan antara nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.142 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	DAK Fisik	114.943.944.920,00	114.943.944.920,00	0,00
2	DAK Non Fisik	194.807.331.915,00	194.807.331.915,00	0,00
Jumlah		309.751.276.835,00	309.751.276.835,00	0,00

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp0,00	Rp5.809.126.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 senilai Rp0,00, sedangkan pada tahun 2023 terdapat realisasi senilai Rp5.809.126.000,00 berupa Dana Insetif Daerah. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp5.809.126.000,00 atau sebesar (100,00%) dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah – LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp0,00	Rp5.809.126.000,00

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp5.809.126.000,00. Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp5.809.126.000,00 atau sebesar (100,00%) dari tahun sebelumnya.

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp31.435.008.174,00	Rp32.449.280.798,00

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO untuk periode Tahun 2024 senilai Rp31.435.008.174,00 dan Tahun 2023 senilai Rp32.449.280.798,00. Pendapatan Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Pemerintah Daerah Lainnya - LO mengalami penurunan senilai Rp1.014.272.624,00 atau sebesar (3,13%) dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp31.435.008.174,00	Rp32.449.280.798,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak –LO Tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp31.435.008.174,00 dan senilai Rp32.449.280.798,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak –LO Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp1.014.272.624,00 atau sebesar (3,13%). Adapun Pendapatan Bagi Hasil Pajak –LO Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.143 Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak-LO TA 2024

No	Uraian Transfer Pendapatan Pemerintah Provinsi LO	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.597.586.537,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	2.073.864.826,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	8.856.502.186,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	32.362.448,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	16.874.692.177,00
Jumlah		31.435.008.174,00

Terdapat perbedaan antara nilai Transfer Pemerintah Provinsi antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.144 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA dan LO TA 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian Transfer Pendapatan Pemerintah Provinsi LO	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.827.758.929,00	3.597.586.537,00	3.230.172.392,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.242.548.236,00	2.073.864.826,00	1.168.683.410,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.344.476.488,00	8.856.502.186,00	2.487.974.302,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	32.670.113,00	32.362.448,00	307.665,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.874.692.177,00	16.874.692.177,00	0,00
Jumlah		38.322.145.943,00	31.435.008.174,00	6.887.137.769,00

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA dan LO senilai Rp6.887.137.769,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp3.230.172.392,00 merupakan pelunasan piutang transfer pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor tahun 2023 dari Provinsi NTT senilai Rp2.655.888.106,00 dan terdapat koreksi piutang pendapatan dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi TA 2024 senilai Rp574.284.286,00 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah tentang Hutang Bagi Hasil Pajak TA 2024;
2. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp1.168.683.410,00 merupakan pelunasan piutang transfer pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2023 dari Provinsi NTT senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Rp1.051.629.474,00 dan terdapat koreksi piutang Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi TA 2024 senilai Rp117.053.936,00 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah tentang Hutang Bagi Hasil Pajak TA 2024;
3. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp2.487.974.302,00 merupakan pelunasan piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2023 dari Provinsi NTT senilai Rp3.920.713.536,00 dan terdapat koreksi piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi TA 2024 senilai Rp1.432.739.234,00 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah tentang Hutang Bagi Hasil Pajak TA 2024; dan
 4. Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp307.665,00 merupakan pelunasan piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2023 dari Provinsi NTT senilai Rp13.841.927,00 dan terdapat koreksi piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Provinsi TA 2024 senilai Rp13.534.262,00 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah tentang Hutang Bagi Hasil Pajak TA 2024.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp23.128.550.394,00	Rp8.387.100.943,00

Pos ini menggambarkan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2024 senilai Rp23.128.550.394,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp14.741.449.451,00 atau sebesar 175,76 % dari tahun sebelumnya. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.145 Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO TA 2024

No	Uraian Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah LO	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi-LO	6.827.100.145,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	16.301.450.249,00
Jumlah		23.128.550.394,00

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp6.827.100.145,00	Rp8.387.100.943,00

Saldo Pendapatan Hibah LO TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp6.827.100.145,00 dan senilai Rp6.827.100.145,00. Pendapatan Hibah LO Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp1.560.000.798,00 atau sebesar (18,60%). Pendapatan Hibah LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.146 Pendapatan Hibah LO TA 2024

No	Uraian Pendapatan Hibah	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	6.827.100.145,00
Jumlah		6.827.100.145,00

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan Hibah antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.147 Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi	0,00	6.827.100.145,00	(6.827.100.145,00)
Jumlah		0,00	6.827.100.145,00	(6.827.100.145,00)

Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi LRA dan LO senilai (Rp6.827.100.145,00) merupakan hibah jalan daerah Dintor, Denge dan Wae Lomba pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Provinsi NTT senilai Rp5.928.453.717,00, hibah buku dari Kementerian Pendidikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp298.919.638,00 dan hibah alat kontrasepsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp599.726.790,00.

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Rp16.301.450.249,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Saldo Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp16.301.450.249,00 dan senilai Rp0,00. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp16.301.450.249,00 atau sebesar 100,00%. Rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.148 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO TA 2024

No	Uraian Lain-lain Pendapatan yang Sah	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.301.450.249,00
Jumlah		16.301.450.249,00

Terdapat selisih Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LRA dan LO yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.149 Perbedaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Lain-lain Pendapatan yang Sah	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.731.673.688,30	16.301.450.249,00	430.223.439,30
Jumlah		16.731.673.688,30	16.301.450.249,00	430.223.439,30

Selisih Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP LO dan LRA senilai Rp430.223.439,30 merupakan pendapatan dari temuan jasa pelayanan pada 24 Puskesmas TA 2023 di Kabupaten Manggarai senilai Rp840.772.639,30 dan adanya Koreksi Klaim BPJS (Dana Non Kapitasi) pada 25 Puskesmas atas Jasa Pelayanan bulan November dan Desember 2024 yang telah disetujui dibayar oleh BPJS pada tahun 2025 senilai Rp410.549.200,00.

5.4.2. Beban

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Rp1.074.814.306.839,74</u>	<u>Rp1.029.008.382.009,60</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban TA 2024 senilai Rp1.074.814.306.839,74 yang mengalami kenaikan senilai Rp45.805.924.830,14 atau sebesar 4,45% dari tahun sebelumnya. Rincian Beban LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.150 Rincian Beban LO TA 2024

No	Uraian Beban	Nilai (Rp)
1	Beban Pegawai	491.751.428.195,02
2	Beban Barang dan Jasa	298.118.145.972,62
3	Beban Bunga	2.331.521.738,99
4	Beban Hibah	66.945.012.149,41
5	Beban Bantuan Sosial	7.997.471.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	2.110.196.451,53
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	132.921.015.952,17
8	Beban Transfer	72.639.515.380,00
Jumlah		1.074.814.306.839,74

5.4.2.1. Beban Pegawai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp491.751.428.195,02</u>	<u>Rp428.737.940.982,31</u>

Beban Pegawai Kabupaten Manggarai adalah Beban Pegawai TA 2024 senilai Rp491.751.428.195,02 yang mengalami kenaikan senilai Rp63.013.487.212,71 atau sebesar 14,70%. Rincian Beban Pegawai TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.151 Rincian Beban Pegawai LO TA 2024

No	Uraian Beban Pegawai	Nilai (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	386.011.811.780,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.321.003.632,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.003.956.609,02
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.691.988.164,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.087.198,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	500.630.812,00
7	Beban Pegawai BLUD	48.950.000,00
Jumlah		491.751.428.195,02

Terdapat perbedaan antara nilai Belanja Pegawai antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.152 Perbedaan Belanja Pegawai LRA dan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Pegawai	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	385.672.046.730,00	386.011.811.780,00	(339.765.050,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.345.620.500,00	6.321.003.632,00	24.616.868,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Pegawai	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.545.356.610,10	82.003.956.609,02	541.400.001,08
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.691.988.164,00	16.691.988.164,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.087.198,00	173.087.198,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	500.630.812,00	500.630.812,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	48.950.000,00	48.950.000,00	0,00
Jumlah		491.977.680.014,10	491.751.428.195,02	226.251.819,08

Selisih Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LRA senilai Rp226.251.819,08 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Beban Gaji dan Tunjangan ASN senilai (Rp339.765.050,00) disebabkan karena adanya pengurangan piutang atas kompensasi kelebihan Penyetoran PPh 21 yang telah direstitusi Tahun 2024;
2. Selisih Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Beban Tambahan Penghasilan ASN senilai Rp24.616.868,00 terjadi akibat adanya koreksi kelebihan bayar belanja pegawai atas temuan pemeriksaan BPK dalam LKPD TA 2024 senilai Rp15.286.538,00 dan koreksi Pengakuan kelebihan bayar temuan belanja pegawai pada LHP DTT Belanja TA 2024 senilai Rp9.330.330,00; dan
3. Selisih Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN senilai Rp541.400.001,08 disebabkan karena adanya beban pegawai berupa honorarium pengadaan barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap.

5.4.2.2. Beban Persediaan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp109.417.517.773,93	Rp134.548.073.119,33

Saldo Beban Persediaan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp109.417.517.773,93 dan senilai Rp134.548.073.119,33 yang merupakan konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban Persediaan LO TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp25.130.555.345,40 atau sebesar (18,68%) dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Persediaan LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Beban Persediaan LO TA 2024

No	Uraian Beban Persediaan	Nilai (Rp)
1	Beban Persediaan BOS	23.472.833.392,93
2	Beban Persediaan BLUD	36.739.602.316,00
3	Beban Persediaan BOK	2.558.247.846,00
4	Beban Bahan-Bahan Kimia	30.720.750,00
5	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.599.960.369,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	185.102.480,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	164.721.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Persediaan	Nilai (Rp)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	600.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.712.041.020,67
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.290.579.162,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.495.000,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.154.220.106,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	779.731.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.781.987.747,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	157.022.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.893.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	480.037.107,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	248.480.500,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	5.000.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.336.739.142,93
21	Beban Obat-Obatan-Obat	(1.975.442.394,64)
22	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.151.030.556,00
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.783.510.611,00
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.570.000,00
25	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	58.800.000,00
26	Beban Natura dan Pakan-Pakan	679.674.218,04
27	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.984.724.500,00
28	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.331.360.000,00
29	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.917.541.800,00
30	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	141.750.000,00
31	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.000.000,00
32	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.750.000,00
33	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.976.071,00
34	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	85.880.400,00
35	Beban Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00
36	Beban Pakaian Olahraga	37.750.000,00
37	Beban Pakaian Paskibraka	38.400.000,00
38	Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.800.000,00
39	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	149.000.000,00
40	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	10.000.000,00
41	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(716.261.665,00)
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.032.800,00
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.090.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Persediaan	Nilai (Rp)
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	111.300.000,00
45	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	8.925.000,00
46	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.985.080,00
47	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	319.878.400,00
48	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	1.800.000,00
49	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	303.678.458,00
Jumlah		109.417.517.773,93

Terdapat selisih antara Belanja Persediaan LRA dengan Beban Persediaan LO. Selisih tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.154 Perbedaan Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Persediaan	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Persediaan BOS	19.816.270.025,25	23.472.833.392,93	(3.656.563.367,68)
2	Beban Persediaan BLUD	36.626.170.116,00	36.739.602.316,00	(113.432.200,00)
3	Beban Persediaan BOK	2.558.247.846,00	2.558.247.846,00	0,00
4	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	30.720.750,00	(30.720.750,00)
5	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.675.562.399,00	1.599.960.369,00	75.602.030,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	185.102.480,00	185.102.480,00	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	164.721.000,00	164.721.000,00	0,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	600.000,00	(600.000,00)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	7.750.591.474,50	8.712.041.020,67	(961.449.546,17)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.290.579.162,00	1.290.579.162,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.495.000,00	8.495.000,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.154.343.106,00	3.154.220.106,00	123.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	784.324.000,00	779.731.000,00	4.593.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.729.561.797,00	2.781.987.747,00	(52.425.950,00)
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	157.022.000,00	157.022.000,00	0,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.893.000,00	21.893.000,00	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	480.037.107,00	480.037.107,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Persediaan	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	248.480.500,00	248.480.500,00	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	67.383.500,00	1.336.739.142,93	(1.269.355.642,93)
21	Beban Obat-Obatan-Obat	511.583.340,00	(1.975.442.394,64)	2.487.025.734,64
22	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.028.202.714,00	2.151.030.556,00	(122.827.842,00)
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.799.960.611,00	13.783.510.611,00	16.450.000,00
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.570.000,00	133.570.000,00	0,00
25	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00
26	Beban Natura dan Pakan-Pakan	424.155.000,00	679.674.218,04	(255.519.218,04)
27	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.984.724.500,00	5.984.724.500,00	0,00
28	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.331.360.000,00	2.331.360.000,00	0,00
29	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.917.541.800,00	1.917.541.800,00	0,00
30	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	141.750.000,00	141.750.000,00	0,00
31	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
32	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00
33	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	13.976.071,00	13.976.071,00	0,00
34	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	85.880.400,00	85.880.400,00	0,00
35	Beban Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
36	Beban Pakaian Olahraga	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Paskibraka	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
38	Beban Komponen-Komponen Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
39	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00
40	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Persediaan	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
41	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	-716.261.665,00	716.261.665,00
42	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	7.032.800,00	(7.032.800,00)
43	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.090.000,00	28.090.000,00	0,00
44	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	111.300.000,00	111.300.000,00	0,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
46	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya	0,00	8.925.000,00	(8.925.000,00)
47	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.985.080,00	45.985.080,00	0,00
48	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	319.878.400,00	319.878.400,00	0,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	149.554.700,00	0,00	149.554.700,00
50	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
51	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	303.678.458,00	(303.678.458,00)
Jumlah		106.092.797.128,75	109.417.517.773,93	(3.324.720.645,18)

Selisih Belanja Barang dan Beban Barang senilai (Rp3.324.720.645,18) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Belanja Persediaan BOS dan Beban Persediaan BOS senilai (Rp3.656.563.367,68) terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel BOS senilai Rp3.439.032.546,67 dan reklasifikasi beban barang BOS menjadi aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp5.000.000,00, beban barang BOS menjadi aset tetap lainnya senilai Rp79.954.400,00, beban barang BOS menjadi aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp124.776.421,01 dan adanya reklasifikasi Aset Tetap Lainnya (Buku) yang tercatat pada Beban Barang senilai Rp7.800.000,00;
2. Selisih Belanja Persediaan BLUD dan Beban Persediaan BLUD senilai (Rp113.432.200,00) disebabkan karena terdapat pelunasan utang belanja barang berupa Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) pada BLUD senilai Rp71.640.000,00, pelunasan utang penggandaan pada BLUD senilai Rp214.057.800,00, terdapat pencatatan utang baru pengadaan gas medis pada BLUD senilai Rp63.610.000,00 dan pengadaan barang Unit Transfusi Darah PMI pada BLUD senilai Rp335.520.000,00;
 3. Selisih Belanja Bahan-Bahan Kimia dan Beban Bahan-Bahan Kimia senilai (Rp30.720.750,00) disebabkan karena terdapat pengadaan persediaan bahan kimia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2024 senilai Rp177.419.300,00 dan pemakaian persediaan bahan kimia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun berjalan senilai Rp208.140.050,00;
 4. Selisih Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dan Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas senilai Rp75.602.030,00 terjadi akibat adanya koreksi kelebihan bayar belanja BBM atas temuan pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2024;
 5. Selisih Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan dan Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan senilai (Rp600.000,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan bibit ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp349.400.000,00 dan terdapat pengeluaran persediaan bibit ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp350.000.000,00;
 6. Selisih Belanja Bahan-Bahan Lainnya dan Beban Bahan-Bahan Lainnya senilai (Rp961.449.546,17) terjadi akibat terdapat pengadaan persediaan bahan-bahan lainnya pada SKB Randong senilai Rp100.000.000,00 dan terdapat pemakaian persediaan bahan-bahan lainnya pada SKB Randong senilai Rp187.448.700,00, pemakaian persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp796.281.713,67 dan terdapat koreksi lebih catat persediaan kassa hidrofil pada RSUD Ruteng senilai Rp77.719.132,50 ;
 7. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor senilai Rp123.000,00 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan alat tulis kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp10.654.000,00, pengadaan persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp115.799.700,00, pemakaian persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp10.744.000,00, pemakaian persediaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp115.586.700,00;
 8. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan *Cover* senilai Rp4.593.000,00 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan kertas dan *cover* pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp38.000.000,00, pengadaan persediaan kertas dan *cover* pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp591.508.450,00, pengadaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp12.486.500,00, pemakaian persediaan kertas dan *cover* senilai Rp586.638.450,00, pemakaian persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Rp12.631.500,00 dan penggunaan persediaan kertas dan *cover* pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp38.132.000,00;
9. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak senilai (Rp52.425.950,00) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan bahan cetak pada Dinas Perhubungan senilai Rp48.046.000,00, pengadaan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi senilai Rp4.635.000,00, pengadaan persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp333.599.700,00, pemakaian persediaan bahan cetak pada Dinas Perhubungan senilai Rp52.946.000,00, pemakaian persediaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai Rp4.725.000,00 dan pemakaian persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp381.035.650,00;
 10. Selisih Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya senilai (Rp1.269.355.642,93) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.926.580.961,83 dan pemakaian persediaan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.195.936.604,76;
 11. Selisih Belanja Obat-Obatan-Obat dan Beban Obat-Obatan-Obat senilai Rp2.487.025.734,64 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp10.609.029.848,59, pengadaan pada RSUD Ruteng senilai Rp9.915.530.528,00, pengadaan pada Dinas Peternakan senilai Rp48.147.790,00, pemakaian persediaan obat pada Dinas Kesehatan senilai Rp9.518.625.367,95, pemakaian pada RSUD Ruteng senilai Rp8.468.653.435,00, pada Dinas Peternakan senilai Rp53.620.583,00, adanya koreksi kelebihan catat persediaan obat pada Dinas Kesehatan berdasarkan hasil cek fisik persediaan senilai Rp16.220.500,00, adanya koreksi hasil perhitungan ulang mutasi persediaan obat pada Puskesmas berdasarkan hasil cek fisik persediaan senilai Rp28.716.006,00 dan adanya koreksi kurang catat persediaan NaCl pada RSUD Ruteng senilai Rp153.460,00;
 12. Selisih Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya dan Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya senilai (Rp122.827.842,00) terjadi akibat adanya pengadaan obat-obatan lainnya pada Dinas Peternakan senilai Rp44.976.058,00 dan pada RSUD Ruteng senilai Rp77.851.784,00;
 13. Selisih Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp16.450.000,00 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan ternak babi pada Dinas Peternakan senilai Rp178.800.000,00, pengadaan induk ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp3.250.000,00, penjualan ternak babi pada Dinas Peternakan senilai Rp148.800.000,00 dan penjualan induk ikan pada Dinas Perikanan senilai Rp16.800.000,00;
 14. Selisih Belanja Natura dan Pakan-Pakan dan Beban Natura dan Pakan-Pakan senilai (Rp255.519.218,04) terjadi akibat adanya pengadaan persediaan pakan ternak pada Dinas Peternakan senilai Rp424.155.000,00, pengadaan pada Dinas Perikanan senilai Rp43.300.500,00, penggunaan persediaan pakan pada Dinas Peternakan senilai Rp670.387.600,00 dan penggunaan persediaan pakan pada Dinas Perikanan senilai Rp52.587.118,04;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

15. Selisih Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya dan Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya senilai Rp716.261.665,00 terjadi akibat adanya pengadaan persediaan alat Kesehatan pada RSUD Ruteng senilai Rp24.751.935.677,00 dan penggunaan alat Kesehatan pada RSUD Ruteng senilai Rp24.035.674.012,00;
16. Selisih Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel dan Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel senilai (Rp7.032.800,00) terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel pada UPTD Puskesmas Lao senilai Rp6.250.000,00 dan Bagian Umum senilai Rp782.800,00;
17. Selisih Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya dan Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya senilai Rp10.000.000,00 terjadi akibat adanya reklasifikasi Beban Barang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp10.000.000,00;
18. Selisih Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya dan Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya senilai (Rp8.925.000,00) terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp8.925.000,00;
19. Selisih Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri dan Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri senilai Rp149.554.700,00 terjadi akibat adanya reklasifikasi beban konsultan pengawas menjadi aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp149.554.700,00;
20. Selisih Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air dan Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air senilai (Rp1.800.000,00) terjadi akibat adanya beban ekstrakomptabel pada Puskesmas Pagal senilai Rp1.800.000,00; dan
21. Selisih Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum dan Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum senilai (Rp303.678.458,00) terjadi akibat adanya beban barang ekstrakomptabel pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp4.758.820,00 dan koreksi penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp298.919.638,00.

5.4.2.3. Beban Jasa

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Rp148.467.054.892,79</u>	<u>Rp148.775.138.868,00</u>

Saldo Beban Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp148.467.054.892,79 dan senilai Rp148.775.138.868,00 yang merupakan konsumsi atas jasa jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selama TA 2024. Realisasi Beban Jasa TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp308.083.975,21 atau sebesar (0,21%). Rincian lebih lanjut atas Beban Jasa TA 2024 disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.155 Rincian Beban Jasa TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Jasa BOS	18.462.459.392,94
2	Beban Jasa BLUD	37.053.396.656,82
3	Beban Jasa BOK	12.031.121.976,90
4	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.659.780.000,00
5	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.928.893.250,00
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	444.118.800,00
7	Beban Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00
8	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.825.000,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	372.200.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	13.286.097.018,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	20.789.907.278,13
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	151.575.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.090.657.250,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	34.454.750,00
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	511.900.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	547.222.500,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.016.198.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	685.041.500,00
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.377.332.500,00
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	336.996.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Supir	48.642.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	48.642.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	18.000.000,00
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.500.000,00
26	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	11.600,00
27	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	49.500.000,00
28	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	106.278.092,00
29	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	15.024.334.152,00
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	176.500.000,00
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	71.999.533,00
32	Beban Jasa Kalibrasi	52.335.000,00
33	Beban Jasa Pengolahan Sampah	276.000,00
34	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	204.452.000,00
35	Beban Tagihan Telepon	9.435.841,00
36	Beban Tagihan Air	360.458.775,00
37	Beban Tagihan Listrik	682.600.527,00
38	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)
39	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.161.611.681,00
40	Beban Paket/Pengiriman	89.446.870,00
41	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	245.436.160,00
42	Beban Medical Check Up	118.207.364,00
43	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	167.229.500,00
44	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.439.848.400,00
45	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	475.406.442,00
46	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.371.192,00
47	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	113.254.100,00
48	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.675.190,00
49	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1.641.600,00
50	Beban Sewa Excavator	49.907.952,00
51	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	65.000.000,00
52	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.600.000,00
53	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	159.094.595,00
54	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.740.000,00
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	563.820.454,00
57	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.400.000,00
58	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	27.000.000,00
59	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata	106.850.000,00
60	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	63.000.000,00
61	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.143.921.000,00
62	Beban Bimbingan Teknis	499.750.000,00
Jumlah		148.467.054.892,79

Terdapat selisih antara Belanja Jasa LRA dengan Beban Jasa LO dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.156 Perbandingan Belanja Jasa dan Beban Jasa TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Jasa BOS	18.462.459.392,94	18.462.459.392,94	0,00
2	Beban Jasa BLUD	41.299.642.744,00	37.053.396.656,82	4.246.246.087,18
3	Beban Jasa BOK	12.031.121.976,90	12.031.121.976,90	0,00
4	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.659.780.000,00	1.659.780.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.025.060.000,00	2.928.893.250,00	96.166.750,00
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	444.118.800,00	444.118.800,00	0,00
7	Beban Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
8	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	21.825.000,00	21.825.000,00	0,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	372.200.000,00	372.200.000,00	0,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	13.286.097.018,00	13.286.097.018,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	20.818.091.219,54	20.789.907.278,13	28.183.941,41
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	151.575.000,00	151.575.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.090.657.250,00	2.090.657.250,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	34.454.750,00	34.454.750,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	511.900.000,00	511.900.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	547.222.500,00	547.222.500,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.016.198.000,00	7.016.198.000,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	685.041.500,00	685.041.500,00	0,00
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.377.332.500,00	2.377.332.500,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	336.996.000,00	336.996.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Supir	48.642.000,00	48.642.000,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	48.642.000,00	48.642.000,00	0,00
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
26	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	11.600,00	11.600,00	0,00
27	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
28	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	106.278.092,00	106.278.092,00	0,00
29	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	15.024.334.152,00	15.024.334.152,00	0,00
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	71.999.533,00	71.999.533,00	0,00
32	Beban Jasa Kalibrasi	52.335.000,00	52.335.000,00	0,00
33	Beban Jasa Pengolahan Sampah	276.000,00	276.000,00	0,00
34	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	204.452.000,00	204.452.000,00	0,00
35	Beban Tagihan Telepon	9.435.841,00	9.435.841,00	0,00
36	Beban Tagihan Air	360.458.775,00	360.458.775,00	0,00
37	Beban Tagihan Listrik	825.765.027,00	682.600.527,00	143.164.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
38	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	500.000,00	500.000,00	0,00
39	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.161.611.681,00	1.161.611.681,00	0,00
40	Beban Paket/Pengiriman	89.446.870,00	89.446.870,00	0,00
41	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	245.436.160,00	245.436.160,00	0,00
42	Beban Medical Check Up	118.207.364,00	118.207.364,00	0,00
43	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	167.229.500,00	167.229.500,00	0,00
44	Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.439.848.400,00	5.439.848.400,00	0,00
45	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	475.406.442,00	475.406.442,00	0,00
46	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.371.192,00	144.371.192,00	0,00
47	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	113.254.100,00	113.254.100,00	0,00
48	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1.675.190,00	1.675.190,00	0,00
49	Beban luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1.641.600,00	1.641.600,00	0,00
50	Beban Sewa Excavator	49.907.952,00	49.907.952,00	0,00
51	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
52	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
53	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	159.094.595,00	159.094.595,00	0,00
54	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
55	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
56	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	563.820.454,00	563.820.454,00	0,00
57	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
58	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
59	Beban Jasa Konsultasi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultasi Pengelolaan Kepariwisata	106.850.000,00	106.850.000,00	0,00
60	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
61	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.143.921.000,00	1.143.921.000,00	0,00
62	Beban Bimbingan Teknis	499.750.000,00	499.750.000,00	0,00
	Jumlah	152.980.816.171,38	148.467.054.892,79	4.513.761.278,59

Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa senilai Rp4.513.761.278,59 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Belanja Jasa BLUD dan Beban Jasa BLUD senilai Rp4.246.246.087,18 terjadi akibat adanya utang belanja jasa tenaga kesehatan baru BLUD senilai Rp2.780.774.994,02, adanya utang baru jasa hemodialisis (HD) senilai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- Rp98.929.600,00, pelunasan utang hemodialisis (HD) senilai Rp248.207.300,00, pelunasan utang jasa apotek lengkap senilai Rp513.379.367,00, pelunasan utang tagihan air senilai Rp26.259.600 dan pelunasan utang belanja jasa tenaga kesehatan BLUD senilai Rp6.338.104.414,20;
2. Selisih Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp96.166.750,00 terjadi akibat adanya kelebihan pembayaran belanja honorarium senilai Rp96.166.750,00;
 3. Selisih Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Beban Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp28.183.941,41 terjadi akibat adanya koreksi kekurangan pembayaran PBI pada Dinas Kesehatan Bulan Desember 2024 senilai Rp10.669.400,00, adanya koreksi kekurangan bayar Belanja Jaspel Puskesmas atas temuan pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2024 senilai Rp11.511.296,24, koreksi pengakuan kelebihan pembayaran PBPU BPJS senilai Rp2.161.600,00 dan kelebihan pembayaran jasa pelayanan Kapitasi JKN bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Non Kesehatan senilai Rp48.203.037,65; dan
 4. Selisih Belanja Tagihan Listrik dan Beban Tagihan Listrik senilai Rp143.164.500,00 terjadi akibat adanya koreksi kelebihan pembayaran belanja listrik pada sepuluh SKPD berdasarkan Temuan BPK pada LHP LKPD TA 2024 senilai Rp143.164.500,00.

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp3.626.370.648,00</u>	<u>Rp2.867.988.311,36</u>

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.626.370.648,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp758.382.336,64 atau sebesar 26,44% dari tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.157 Rincian Beban Pemeliharaan LO TA 2024

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.775.306.414,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	974.297.334,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	486.314.500,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	390.452.400,00
Jumlah		3.626.370.648,00

Tidak terdapat selisih antara Belanja Pemeliharaan LRA dengan Beban Pemeliharaan LO, rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.158 Perbandingan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Pemeliharaan	Nilai LRA (Rp)	Nilai LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.775.306.414,00	1.775.306.414,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	974.297.334,00	974.297.334,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	486.314.500,00	486.314.500,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	390.452.400,00	390.452.400,00	0,00
Jumlah		3.626.370.648,00	3.626.370.648,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp36.607.202.657,90</u>	<u>Rp35.593.577.118,00</u>

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp36.607.202.657,90 yang mengalami kenaikan senilai Rp1.013.625.539,90 atau sebesar 2,85% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas TA 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.159 Rincian Beban Perjalanan Dinas LO TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.815.636.657,90
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	480.600.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.288.316.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.913.055.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	109.595.000,00
Jumlah		36.607.202.657,90

Terdapat selisih antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.160 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.989.177.197,00	14.815.636.657,90	173.540.539,10
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	480.600.000,00	480.600.000,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.288.316.000,00	19.288.316.000,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.913.055.000,00	1.913.055.000,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	109.595.000,00	109.595.000,00	0,00
Jumlah		36.780.743.197,00	36.607.202.657,90	173.540.539,10

Selisih Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas senilai Rp173.540.539,10 terjadi akibat adanya koreksi kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada LHP BPK pada LKPD TA 2024 senilai Rp139.327.100,00 dan temuan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan pada 17 SKPD pada LHP DTT Belanja TA 2023 s.d. Triwulan III 2024 senilai Rp34.213.439,10.

5.4.2.6. Beban Bunga

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp2.331.521.738,99</u>	<u>Rp5.950.702.293,87</u>

Saldo Beban Bunga LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2.331.521.738,99 dan senilai Rp5.950.702.293,87, yang merupakan alokasi pengeluaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Manggarai. Beban bunga



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

merupakan Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD-Jangka Menengah. Beban Bunga LO TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp3.619.180.554,88 atau sebesar (60,82%) dari tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Bunga TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.161 Rincian Beban Bunga LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Bunga	2024	2023
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	2.331.521.739,14	0,00
2	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah (Bank NTT)	0,00	5.950.702.293,87
Jumlah		2.331.521.739,14	5.950.702.293,87

Terdapat selisih antara Belanja Bunga LRA dengan Beban Bunga LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.162 Perbandingan Belanja Bunga LRA dan Beban Bunga LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Bunga	LRA	LO	Selisih
1	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah (Bank NTT)	2.504.451.584,80	2.331.521.739,14	172.929.845,66
Jumlah		2.504.451.584,80	2.331.521.739,14	172.929.845,66

Selisih Beban Bunga senilai Rp172.929.845,66 merupakan selisih yang timbul akibat adanya pelunasan utang bunga tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2024.

5.4.2.7. Beban Hibah

31 Desember 2024

Rp66.945.012.149,41

31 Desember 2023

Rp35.738.253.274,06

Beban Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp66.945.012.149,41 yang mengalami kenaikan senilai Rp31.206.758.875,35 atau sebesar 87,32% dari tahun sebelumnya. Rincian Beban Hibah LO TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian Beban Hibah LO TA 2024

No	Uraian Beban Hibah	Nilai (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.005.058.342,41
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.027.238.429,00
3	Beban Hibah Dana BOSP	29.301.345.599,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	611.369.779,00
Jumlah		66.945.012.149,41

Terdapat selisih antara Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO TA 2024 yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.164 Perbandingan Belanja Hibah LRA dan Beban Hibah LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Hibah	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	38.700.000.000,00	33.005.058.342,41	5.694.941.657,59
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.032.791.398,00	4.027.238.429,00	5.552.969,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian Beban Hibah	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
3	Beban Hibah Dana BOSP	29.301.345.599,00	29.301.345.599,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	611.369.779,00	611.369.779,00	0,00
Jumlah		72.645.506.776,00	66.945.012.149,41	5.700.494.626,59

Selisih Belanja Hibah dan Beban Hibah senilai Rp5.700.494.626,59 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Selisih Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai Rp5.694.941.657,59 terjadi akibat adanya pengembalian hibah KPUD dan Bawaslu yang telah disetor pada 09 April Tahun 2025; dan
2. Selisih Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp5.552.969,00 timbul akibat adanya pelunasan utang hibah sekolah swasta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atas utang tahun 2023.

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024

Rp7.995.971.000,00

31 Desember 2023

Rp2.300.370.225,00

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp7.995.971.000,00 dan senilai Rp2.300.370.225,00, yang merupakan beban dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp5.697.100.775,00 atau sebesar 247,66% dari tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Sosial TA 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.165 Beban Bantuan Sosial LO TA 2024

No	Uraian Beban Bantuan Sosial	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.283.969.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	6.713.502.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00
Jumlah		7.995.971.000,00

Terdapat selisih antara Belanja Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial TA 2024 yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.166 Perbandingan Belanja Bantuan Sosial LRA dan Beban Bantuan Sosial LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Bantuan Sosial	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.282.469.000,00	1.283.969.000,00	(1.500.000,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	6.713.502.000,00	6.713.502.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.995.971.000,00	7.997.471.000,00	(1.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Selisih antara Belanja Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial senilai Rp1.500.000,00 merupakan Beban Luar Biasa berupa santunan uang uka kepada Individu yang diatribusikan pada Beban Bantuan Sosial.

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp132.921.015.952,17</u>	<u>Rp167.187.847.785,59</u>

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 senilai Rp132.921.015.952,17 atau mengalami penurunan senilai Rp34.266.831.833,42 atau sebesar (20,50%) dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau amortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.167 Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.338.467.754,68
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.222.774.782,50
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.966.930.019,30
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.683.333,34
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.322.422.333,75
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	67.737.728,60
Jumlah		132.921.015.952,17

5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp2.110.196.451,53</u>	<u>Rp1.982.560.947,08</u>

Saldo Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2.110.196.451,53 dan senilai Rp1.982.560.947,08. Beban Penyisihan Piutang LO TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp127.635.504,45 atau sebesar 6,44% dari tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Penyisihan Piutang TA 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.168 Beban Penyisihan Piutang – LO TA 2024

No	Uraian Beban Penyisihan Piutang	Nilai (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.430.846.964,67
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	635.981.272,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	37.540.792,49
4	Beban Penyisihan Transfer Pemerintah Provinsi	3.774.676,37
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.052.746,00
Jumlah		2.110.196.451,53

5.4.2.11. Beban Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp72.639.515.380,00</u>	<u>Rp65.325.929.085,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Beban Transfer LO TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp72.639.515.380,00 dan senilai Rp65.325.929.085,00, merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mencakup Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Beban Transfer Bantuan Keuangan. Beban Transfer LO TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp7.313.586.295,00 atau sebesar 11,20% dari tahun sebelumnya. Rincian lebih lanjut atas Beban Transfer TA 2024 dan 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.169 Beban Transfer LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Transfer	2024	2023
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.952.787.580,00	4.951.164.585,00
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	67.686.727.800,00	60.374.764.500,00
Jumlah		72.639.515.380,00	65.325.929.085,00

1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah

Saldo Beban Bagi Hasil Pajak Daerah – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.952.787.580,00 dan senilai Rp4.951.164.585,00. Rincian lebih lanjut atas Beban Bagi Hasil TA 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.170 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	2024	2023
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.952.787.580,00	4.951.164.585,00
Jumlah		4.952.787.580,00	4.951.164.585,00

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah LRA dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah LO, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 5.171 Perbandingan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah LRA dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah LO TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	0,00
Jumlah		4.952.787.580,00	4.952.787.580,00	0,00

2. Beban Bantuan Keuangan Daerah

Saldo Beban Bantuan Keuangan TA 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp67.686.727.800,00 dan senilai Rp60.374.764.500,00, yang merupakan Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Desa. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Keuangan TA 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.172 Rincian Beban Bantuan Keuangan Daerah LO TA 2024 dan 2023

dalam rupiah

No	Uraian Beban Bantuan Keuangan Daerah	2024	2023
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	67.686.727.800,00	60.374.764.500,00
Jumlah		67.686.727.800,00	60.374.764.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan Daerah dan Beban Bantuan Keuangan Daerah. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan Daerah dan Beban Bantuan Keuangan Daerah tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.173 Perbedaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah dan Beban Bantuan Keuangan Daerah TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian Beban Bantuan Keuangan Daerah	Nilai LRA	Nilai LO	Selisih
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	196.748.636.620,00	67.686.727.800,00	129.061.908.820,00
Jumlah		196.748.636.620,00	67.686.727.800,00	129.061.908.820,00

Selisih antara belanja transfer dan beban transfer adalah senilai Rp129.061.909.000,00 merupakan jumlah transfer dana desa yang tidak dicatat di LO dan senilai (Rp180,00) merupakan kekurangan transfer bantuan keuangan ke Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp88.912.620.026,52	Rp60.966.576.336,33

Surplus/Defisit dari Operasi - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 senilai Rp88.912.620.026,52 atau mengalami kenaikan senilai Rp27.946.043.690,19 atau sebesar 45,84% dari tahun sebelumnya.

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi -LO TA 2024 sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 1.163.726.926.866,26
Beban	<u>(Rp 1.074.814.306.839,74)</u>
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp 88.912.620.026,52

5.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
(Rp1.692.386.485,20)	Rp276.260.646,72

Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai (Rp1.692.386.485,20) dan senilai Rp276.260.646,72. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 senilai (Rp1.692.386.485,20) mengalami penurunan senilai Rp1.968.647.131,92 atau sebesar (712,60%) dari tahun sebelumnya. Rincian Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.174 Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO	0,01
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(1.692.386.485,21)
Jumlah		(1.692.386.485,20)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.4.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,01	Rp2.736.831.082,43

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,01 dan senilai Rp2.736.831.082,43. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 senilai Rp0,01 koreksi penyelesaian utang kepada Bank NTT berdasarkan Surat Konfirmasi Bank NTT Nomor 282/BNTT.KC-1006/V/2025 yang menyatakan saldo utang Pemerintah Kabupaten Manggarai nihil. Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp2.736.831.082,42 atau sebesar (100,00%) dari tahun sebelumnya.

5.4.4.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.692.386.485,21	Rp2.460.570.435,71

Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.692.386.485,21 dan senilai Rp2.460.570.435,71. Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp1.692.386.485,06 merupakan rugi BUMD PT Manggarai Multi Investasi (MMI) yang mengurangi penyertaan modal pemerintah daerah dan senilai Rp0,15 merupakan koreksi kelebihan bayar bunga bank pada Bank NTT. Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp768.183.950,50 atau sebesar (31,22%) dari tahun sebelumnya.

5.4.5. Pos Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp665.830.200,00	Rp1.043.829.200,00

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa TA 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Saldo Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai (Rp665.830.200,00) dan senilai (Rp1.043.829.200,00). Pos Luar Biasa TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp377.999.000,00 atau sebesar (36,21%) dari tahun sebelumnya.

5.4.5.1. Beban Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp665.830.200,00	Rp1.043.829.200,00

Saldo Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp665.830.200,00 dan senilai Rp1.043.829.200,00. Realisasi Beban Luar Biasa TA 2024 senilai Rp667.330.200,00 merupakan Beban Luar Biasa yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga Tahun 2024. Realisasi Beban Luar Biasa TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp377.999.000,00 atau sebesar (36,21%) dari tahun sebelumnya.

Terdapat selisih antara Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa. Rincian lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.175 Perbandingan Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa TA 2024

No	Uraian	Nilai LRA (Rp)	Nilai LO (Rp)	Selisih
1	Beban Luar Biasa	667.330.200,00	665.830.200,00	1.500.000,00
	Jumlah	667.330.200,00	665.830.200,00	1.500.000,00

Selisih antara Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa senilai Rp1.500.000,00 merupakan Atribusi Beban Luar Biasa berupa santunan uang duka kepada individu yang diatribusikan ke Beban Bantuan Sosial.

5.4.6. Surplus/Defisit-LO

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp86.554.403.341,32	Rp60.199.007.783,05

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional TA 31 Desember 2024 senilai Rp86.554.403.341,32 atau mengalami kenaikan senilai Rp26.355.395.558,27 atau sebesar 43,78% dari tahun sebelumnya,

Rincian Surplus/Defisit-LO TA 2024 sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 1.163.726.926.866,26
Beban	(Rp 1.074.814.306.839,74)
Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp 88.912.620.026,52
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(Rp 1.692.386.485,20)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 87.220.233.541,32
Pos Luar Biasa	(Rp 665.830.200,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp 86.554.403.341,32

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah dengan arus kas bersih atau Kenaikan/Penurunan Kas selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 5.176 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Aktivitas Operasi	212.131.217.337,35	231.224.767.040,87
2	Aktivitas Investasi	(160.732.790.450,10)	(295.691.050.601,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
3	Aktivitas Pendanaan	(57.391.304.347,99)	51.140.586.794,00
4	Aktivitas Transitoris	130.966.149,17	(139.662.475,00)
	Jumlah	(5.861.911.311,57)	(13.465.359.241,13)

Aliran Kas dalam Laporan Arus Kas dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1. Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp1.289.104.308.257,38	Rp1.216.206.598.172,35

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk Tahun 2024 senilai Rp1.289.104.308.257,38 dan Tahun 2023 senilai Rp1.216.206.598.172,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.177 Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Pajak Daerah	21.270.967.323,00	23.729.337.459,76
2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.155.915.070,00	8.994.227.062,42
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.579.443.275,00	5.567.584.252,00
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	77.301.026.921,08	86.328.707.169,17
5	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	5.824.669.000,00	6.438.985.829,00
6	Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.589.809.000,00	3.061.632.000,00
7	Pendapatan Dana Alokasi Umum	677.515.472.202,00	596.218.538.347,00
8	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	309.751.276.835,00	312.860.211.041,00
9	Pendapatan Dana Penyesuaian	129.061.909.000,00	133.791.606.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.322.145.943,00	35.390.769.012,00
11	Pendapatan Hibah	0,00	3.825.000.000,00
12	Pendapatan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.731.673.688,30	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	1.289.104.308.257,38	1.216.206.598.172,35

5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Rp1.076.973.090.920,03	Rp984.981.831.131,48

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk Tahun 2024 senilai Rp1.076.973.090.920,03 dan Tahun 2023 senilai Rp984.981.831.131,48 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.178 Realisasi Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Belanja Pegawai	492.021.991.032,10	429.160.625.973,00
2	Belanja Barang dan Jasa	299.436.416.127,13	302.918.207.257,43
3	Belanja Bunga	2.504.451.584,80	5.799.999.999,99
4	Belanja Hibah	72.645.506.776,00	37.194.158.116,06
5	Belanja Bantuan Sosial	7.995.971.000,00	12.995.805.100,00
6	Belanja Tak Terduga	667.330.200,00	3.604.625.600,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak	4.952.787.580,00	4.951.164.585,00
8	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	196.748.636.620,00	188.357.244.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.076.973.090.920,03	984.981.831.131,48

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp212.131.217.337,35

Rp231.224.767.040,87

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.179 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	1.289.104.308.257,38	1.216.206.598.172,35
2	Arus Keluar Kas	(1.076.973.090.920,03)	(984.981.831.131,48)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	212.131.217.337,35	231.224.767.040,87

5.5.2. Aktivitas Investasi

Realisasi arus kas aktivitas Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp6.800.000,00

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp6.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Penjualan atas Aset Tetap	0,00	6.800.000,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	6.800.000,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp160.732.790.450,10

Rp295.697.850.601,00

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk Tahun 2024 senilai Rp160.732.790.450,10 dan Tahun 2023 senilai Rp295.697.850.601,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.181 Arus Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Belanja Modal – Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	40.880.603.233,10	50.726.852.239,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	39.089.157.311,00	62.631.878.165,00
4	Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.324.159.743,00	175.128.999.197,00
5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	4.438.870.163,00	2.385.121.000,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	4.825.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		160.732.790.450,10	295.697.850.601,00

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp160.732.790.450,10)

(Rp295.691.050.601,00)

Aliran kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 5.182 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	0,00	6.800.000,00
2	Arus Keluar Kas	(160.732.790.450,10)	(295.697.850.601,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(160.732.790.450,10)	(295.691.050.601,00)

5.5.3. Aktivitas Pendanaan

Rincian Aliran Masuk Kas dan Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp0,00

Rp103.749.282.446,00

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 senilai Rp103.749.282.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	103.749.282.446,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	103.749.282.446,00

5.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp57.391.304.347,99

Rp52.608.695.652,00

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk Tahun 2024 senilai Rp57.391.304.347,99 dan Tahun 2023 senilai Rp52.608.695.652,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.184 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	57.391.304.347,99	52.608.695.652,00
Jumlah Arus Keluar Kas		57.391.304.347,99	52.608.695.652,00

5.5.3.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>(Rp57.391.304.347,99)</u>	<u>Rp51.140.586.794,00</u>

Aliran kas bersih aktivitas pendanaan merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 5.185 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	0,00	103.749.282.446,00
2	Arus Keluar Kas	(57.391.304.347,99)	(52.608.695.652,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(57.391.304.347,99)	51.140.586.794,00

Pada Tahun 2024 terdapat arus masuk kas dari aktivitas pendanaan senilai Rp0,00. Atas arus keluar senilai Rp57.391.304.347,99 merupakan pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

5.5.4. Aktivitas Transitoris

Realisasi arus kas aktivitas Transitoris yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Rp30.735.894.635,54</u>	<u>Rp77.500.366.227,54</u>

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun 2024 senilai Rp30.735.894.635,54 dan Tahun 2023 senilai Rp77.500.366.227,54 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.186 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.735.894.635,54	77.500.366.227,54
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		30.735.894.635,54	77.500.366.227,54

5.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<u>Rp30.604.928.486,37</u>	<u>Rp77.640.028.702,54</u>

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Tahun 2024 senilai Rp30.604.928.486,37 dan Tahun 2023 senilai Rp77.640.028.702,54 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5.187 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.604.928.486,37	77.640.028.702,54
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		30.604.928.486,37	77.640.028.702,54

5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp130.966.149,17

(Rp139.662.475,00)

Aliran kas bersih aktivitas Transitoris merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas Transitoris yang terdiri dari:

Tabel 5.188 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Arus Masuk Kas	30.735.894.635,54	77.500.366.227,54
2	Arus Keluar Kas	(30.604.928.486,37)	(77.640.028.702,54)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		130.966.149,17	(139.662.475,00)

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2024

31 Desember 2023

(Rp5.861.911.311,57)

(Rp13.465.359.241,13)

Jumlah senilai (Rp5.861.911.311,57) merupakan Kenaikan/Penurunan kas TA 2024 sementara Kenaikan/Penurunan Kas pada TA 2023 senilai (Rp13.465.359.241,13) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.189 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023
1	Aktivitas Operasi	212.131.217.337,35	231.224.767.040,87
2	Aktivitas Investasi	(160.732.790.450,10)	(295.691.050.601,00)
3	Aktivitas Pendanaan	(57.391.304.347,99)	51.140.586.794,00
4	Aktivitas Transitoris	130.966.149,17	(139.662.475,00)
Jumlah		(5.861.911.311,57)	(13.465.359.241,13)

5.5.6. Saldo Awal Kas

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp27.223.992.145,07

Rp40.761.247.014,80

Saldo Awal Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp27.223.992.145,07 merupakan saldo akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOSP, dan Kas Lainnya. Sedangkan saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 senilai Rp40.761.247.014,80.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.7. Koreksi SILPA

31 Desember 2024

(Rp15.788.414,41)

31 Desember 2023

(Rp71.895.628,60)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Pada Tahun 2024 terdapat koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya senilai (Rp15.788.414,41) dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi tambah atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2022 senilai Rp1,00;
2. Koreksi tambah atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada tahun 2023 senilai Rp326.389,00;
3. Koreksi tambah atas Kas di Bendahara BOSP BOP PAUD senilai Rp11.140,70;
4. Koreksi tambah Kas Lainnya atas penerimaan jasa giro bank yang belum tercatat dalam rekening titipan Bank NTT pada SKPD senilai Rp1.153.649,74;
5. Koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOSP SD senilai Rp11.166.639,85;
6. Koreksi kurang atas Kas Lainnya (jasa giro) BOS SMP senilai Rp271.000,00; dan
7. Koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOS SMP senilai Rp5.841.955,00.

5.5.8. Saldo Akhir Kas

31 Desember 2024

Rp21.346.292.419,09

31 Desember 2023

Rp27.223.992.145,07

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 senilai Rp21.346.292.419,09 merupakan saldo akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOSP dan Kas Lainnya. Sedangkan saldo akhir kas per 31 Desember 2023 senilai Rp27.223.992.145,07, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.190 Perhitungan Saldo Akhir Kas per 31 Desember dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Mutasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Saldo Awal Kas	27.223.992.145,07	40.761.247.014,80
2	Kenaikan/Penurunan Kas	(5.861.911.311,57)	(13.465.359.241,13)
3	Koreksi SilPA	(15.788.414,41)	(71.895.628,60)
Saldo Akhir Kas		21.346.292.419,09	27.223.992.145,07

5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2024.

5.6.1. Ekuitas Awal

31 Desember 2024

Rp1.934.867.214.152,54

31 Desember 2023

Rp2.275.649.890.638,16

Ekuitas awal Tahun 2024 senilai Rp1.934.867.214.152,54, merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 pada Neraca *Audited*.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.6.2. Surplus/defisit – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp86.554.403.341,32</u>	<u>Rp60.199.007.783,05</u>

Surplus/defisit–LO TA 2024 senilai Rp86.554.403.341,32 berasal dari Pendapatan–LO senilai Rp1.163.726.926.866,26 dikurangi Beban senilai Rp1.074.814.306.839,74, dikurangi Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp1.692.386.485,20 dan dikurangi Defisit dari Pos Luar Biasa senilai Rp665.830.200,00.

5.6.3. Koreksi Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp33.721.147.202,33</u>	<u>(Rp400.981.684.268,67)</u>

Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp33.721.147.202,33, yang terdiri dari:

- 1) Koreksi kurang atas kas senilai (Rp15.788.414,41) terdiri dari:
 - a. Koreksi tambah atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2022 senilai Rp1,00;
 - b. Koreksi tambah atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada tahun 2023 senilai Rp326.389,00;
 - c. Koreksi tambah atas Kas di Bendahara BOS BOP PAUD senilai Rp11.140,70;
 - d. Koreksi tambah Kas Lainnya atas penerimaan jasa giro bank yang belum tercatat dalam rekening titipan Bank NTT pada sebelas SKPD senilai Rp1.153.649,74;
 - e. Koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOS SD senilai Rp11.166.639,85;
 - f. Koreksi kurang atas Kas Lainnya (jasa giro) BOS SMP senilai Rp271.000,00; dan
 - g. Koreksi kurang atas Kas di Bendahara BOS SMP senilai Rp5.841.955,00;
- 2) Koreksi tambah atas Piutang dan Penyisihan Piutang senilai Rp201.616.364,72 terdiri dari:
 - a. Koreksi tambah Piutang Retribusi Pasar Rakyat pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp8.625.000,00;
 - b. Koreksi tambah Piutang Retribusi Rumah Dinas pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp45.243.900,00;
 - c. Koreksi tambah Piutang Retribusi *Shopping Center* pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp2.728.125,00;
 - d. Koreksi tambah Piutang Retribusi Sewa Gedung pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp29.200.000,00;
 - e. Koreksi tambah Piutang Retribusi Sewa Tanah pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp6.646.000,00;
 - f. Koreksi tambah Piutang Retribusi Pasar pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp7.472.400,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- g. Koreksi tambah Piutang Pajak Galian C pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp73.585.181,00;
 - h. Koreksi tambah Piutang Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp9.453.826,00;
 - i. Koreksi tambah Piutang Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp4.330.500,00;
 - j. Koreksi tambah Piutang Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah akibat kurang catat Piutang pada tahun 2023 senilai Rp1.700.000,00;
 - k. Koreksi tambah penyisihan Piutang Retribusi *Shopping Center*, Retribusi Ruko, Retribusi Pasar Rakyat, Retribusi Rumah Dinas dan Retribusi Pasar akibat adanya pelunasan Piutang di tahun berjalan senilai Rp214.034.715,50;
 - l. Koreksi tambah penyisihan Piutang Pajak akibat adanya pelunasan Piutang pada tahun berjalan senilai Rp260.063,05;
 - m. Koreksi tambah penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah akibat adanya pelunasan Piutang pada tahun berjalan senilai Rp202.258,33;
 - n. Koreksi tambah penyisihan Piutang BLUD akibat adanya pelunasan Piutang di tahun berjalan senilai Rp4.708.620,00; dan
 - o. Koreksi kurang penyisihan Piutang BLUD berdasarkan hasil rekalkulasi ulang senilai Rp206.574.224,16.
- 3) Koreksi tambah atas Persediaan senilai Rp1.742.390.596,33 terdiri dari:
- a. Koreksi tambah saldo awal persediaan obat pada Dinas Kesehatan akibat kurang catat pada tahun 2023 senilai Rp764.401.476,44;
 - b. Koreksi tambah saldo awal persediaan BMHP pada Dinas Kesehatan akibat kurang catat pada tahun 2023 senilai Rp478.917.135,29;
 - c. Koreksi tambah saldo awal persediaan obat pada RSUD Ruteng akibat kurang catat pada tahun 2023 senilai Rp7.056.792,00;
 - d. Koreksi tambah saldo awal persediaan obat pada Dinas Peternakan akibat kesalahan pencatatan Harga Pokok Perolehan (HPP) pada tahun 2023 senilai Rp550,00; dan
 - e. Koreksi tambah saldo awal persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp492.014.642,60.
- 4) Koreksi tambah atas Investasi Permanen senilai Rp497.312.174,00 terdiri dari:
Koreksi tambah koreksi Ekuitas BUMD PDAM Tirta Komodo Jaya sesuai Laporan Keuangan BUMD Tirta Komodo Jaya senilai Rp497.312.177,00.
- 5) Koreksi tambah atas Aset Tetap Tanah senilai Rp24.526.500,00 terdiri dari:
- a. Koreksi tambah Aset Tanah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp13.383.000,00 akibat adanya penambahan penilaian aset pada tahun 2024; dan
 - b. Koreksi tambah Aset Tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp11.143.500,00 akibat adanya penambahan penilaian aset pada tahun 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

- 6) Koreksi tambah atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp959.361.714,00 merupakan koreksi atas Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2012 senilai Rp959.361.714,00;
- 7) Koreksi tambah atas Penyusutan Aset Tetap senilai Rp30.672.874.915,15 terdiri dari:
 - a. Koreksi kurang saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp959.361.792,94;
 - b. Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas temuan kekurangan volume berdasarkan LHP DTT Belanja TA 2023 s.d. Triwulan III 2024 senilai Rp214.981.669,08; dan
 - c. Koreksi tambah saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp31.417.255.039,01.
- 8) Koreksi kurang atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai (Rp264.455.148,00) merupakan koreksi kurang saldo awal amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp264.455.148,00.
- 9) Koreksi kurang atas Akumulasi Penyusutan Properti Investasi senilai (Rp42.962.840,84) merupakan koreksi kurang saldo awal penyusutan aset tetap properti investasi senilai Rp42.962.840,84.
- 10) Koreksi kurang atas Aset Lainnya senilai (Rp53.728.658,62) merupakan koreksi kurang Aset Lain-lain - Aset Lain-lain Lainnya yang telah terbayar pada Tahun 2023 atas temuan kekurangan volume pada LHP LKPD Tahun 2022.

5.6.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Rp2.055.142.764.696,19</u>	<u>Rp1.934.867.214.152,54</u>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2.055.142.764.696,19 dan senilai Rp1.934.867.214.152,54 mengalami kenaikan senilai Rp120.275.550.543,65 atau sebesar 6,22% dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2023 senilai Rp1.934.867.214.152,54.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VI
PENGUNGKAPAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian barat Pulau Flores, Provinsi NTT. UU pembentukan Kabupaten Manggarai sebenarnya tidak ada karena Kabupaten Manggarai sendiri sudah ada sejak tahun 1958 melalui UU Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai adalah kabupaten induk yang telah mengalami dua kali pemekaran wilayah yakni Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Kabupaten Manggarai sebagai salah satu daerah otonom yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimiliki daerah.

Berbagai rencana, kiat dan strategi disusun dan dilaksanakan untuk menghantar dan membebaskan masyarakat dari berbagai ketertinggalan, tersirat dalam Visi Pemerintah Kabupaten Manggarai 2021-2026, yaitu **“Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing.”** Visi tersebut diwujudkan ke dalam 4 (empat) agenda pokok pembangunan Kabupaten Manggarai yaitu :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Manusia;
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Secara geografis Kabupaten Manggarai terletak di antara 8° 14'27, 32” hingga 8°54',17”Lintang Selatan dan 120° 13'41,34 hingga 120° 32' 47,22 Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Manggarai sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 1.343,03 km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan Pulau Mules dengan pusat pemerintahan di Kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Secara umum Kabupaten Manggarai mengalami 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan hasil pertanian dari sawah dan juga perkebunan di samping sayur dan buah-buahan juga terdapat kemiri, kopi, kakao, jambu mete, tembakau, dan vanili.

Kabupaten Manggarai juga terdapat objek wisata dari kampung adat peninggalan sejarah yang merupakan bagian dari adat istiadat di Kabupaten Manggarai yakni Kampung Adat Todo, Kampung Adat Wae Rebo, Kampung Adat Ruteng Pu'u dan juga obyek wisata Liang Bua dan obyek wisata Gunung Ranaka.

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 sebanyak 349.836 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 175.131 jiwa dan perempuan sebanyak 174.705 jiwa yang merupakan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan keberhasilan pembangunan. Namun, dengan kualitas mayoritas



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pendidikan penduduk yang masih rendah dan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas akan menjadi beban bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Angka kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2024 sebanyak 7.654 jiwa dengan angka lahir hidup sebanyak 7.585 jiwa dan angka lahir mati sebanyak 69 jiwa. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di antaranya angka kelahiran dan kematian, walau demikian untuk laju pertumbuhan penduduk tidak selamanya hanya kelahiran tetapi bagaimana kita mengendalikan penduduk dari luar sehingga mereka tidak boleh beramai-ramai datang ke suatu tempat. Karena kalau kelahiran kita kecil tapi banyak migrasi dari luar secara otomatis juga jumlah penduduk bertambah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai pada Tahun 2024 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas (THL). Data SDM yang ditampilkan di sini hanya PNS sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 6.1 Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	28	4	32
2.	Administrator	133	36	169
3.	Pengawas	149	97	246
4.	Fungsional Guru	599	700	1.299
5.	Fungsional Medis	195	818	1.013
6.	Fungsional Teknis	197	146	343
7.	Fungsional Umum	497	293	790
	Jumlah	1.798	2.094	3.892

Sumber Data : Manggarai Dalam Angka, 2025

Tabel 6.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	39	50	89
2.	S1	1.099	1.139	2.238
3.	D IV	31	31	62
4.	D III	192	663	855
5.	D II	37	15	52
6.	D I	2	6	8
7.	SMA	371	186	557
8.	SMP	15	4	19
9.	SD	12	0	12
	Jumlah	1.798	2.094	3.892

Sumber Data : Manggarai Dalam Angka, 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 6.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan I	13	0	13
2.	Golongan II	301	224	525
3.	Golongan III	946	1.359	2.305
4.	Golongan IV	538	511	1.049
	Jumlah	1.798	2.094	3.892

Sumber Data : Manggarai Dalam Angka, 2025

Tabel 6.4 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Manggarai menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S1	862	906	1.768
2.	D IV	52	149	201
3.	D III	2	35	37
4.	SMA	13	1	14
	Jumlah	929	1.091	2.020

Sumber Data : Manggarai Dalam Angka, 2025

Tabel 6.5 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan V	13	1	14
2.	Golongan VII	52	149	201
3.	Golongan IX	837	898	1.735
4.	Golongan X	27	43	70
	Jumlah	929	1.091	2.020

Sumber Data : Manggarai Dalam Angka, 2025

Tabel 6.6 Jumlah Tenaga Kontrak Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Tahun 2024

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S1	7	3	10
2.	Diploma III	3	0	3
3.	Diploma II	0	0	0
4.	Diploma I	1	0	1
5.	SMA	31	11	42
6.	SMP	3	0	3
7.	SD	4	0	4
	Jumlah	49	14	63

Sumber Data : Manggarai Dalam Angka, 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 disajikan dengan berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai untuk periode yang akan datang.

Kiranya apa yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan TA 2024 ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi ketujuh komponen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai yaitu (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


Bupati Manggarai
Herybertus G. L. Nabit, S.E., M.A.

LAMPIRAN

Rincian Bagi Hasil Pajak TA 2024

No.	Nama Desa	Nilai Transfer (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Satar Ngkeling Kecamatan Wae Rii	41.185.000,00
2	Lalong Kecamatan Wae Rii	27.307.000,00
3	Poco Kecamatan Wae Rii	27.129.000,00
4	Wae Mulu Kecamatan Wae Rii	35.402.000,00
5	Ndehes Kecamatan Wae Rii	54.117.000,00
6	Golo Cador Kecamatan Wae Rii	42.189.000,00
7	Longko Kecamatan Wae Rii	32.189.000,00
8	Ranggi Kecamatan Wae Rii	45.195.000,00
9	Compang Ndehes Kecamatan Wae Rii	31.342.000,00
10	Bangka Jong Kecamatan Wae Rii	36.764.000,00
11	Bangka Kenda Kecamatan Wae Rii	50.265.000,00
12	Golo Mendo Kecamatan Wae Rii	27.253.000,00
13	Golo Wuas Kecamatan Wae Rii	32.335.000,00
14	Wae Rii Kecamatan Wae Rii	35.316.000,00
15	Ranaka Kecamatan Wae Rii	32.574.000,00
16	Golo Watu Kecamatan Wae Rii	36.065.000,00
17	Benteng Poco Kecamatan Wae Rii	25.916.000,00
18	Cumbi Kecamatan Ruteng	28.426.000,00
19	Kakor Kecamatan Ruteng	24.291.000,00
20	Pong Murung Kecamatan Ruteng	39.444.000,00
21	Bulan Kecamatan Ruteng	40.252.000,00
22	Pong Lao Kecamatan Ruteng	28.621.000,00
23	Beo Rahong Kecamatan Ruteng	29.092.000,00
24	Golo Worok Kecamatan Ruteng	25.976.000,00
25	Meler Kecamatan Ruteng	26.540.000,00
26	Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng	39.470.000,00
27	Belang Turi Kecamatan Ruteng	52.244.000,00
28	Pong Leko Kecamatan Ruteng	29.372.000,00
29	Rai Kecamatan Ruteng	35.856.000,00
30	Poco Likang Kecamatan Ruteng	32.384.000,00
31	Bangka Lao Kecamatan Ruteng	28.566.000,00
32	Compang Dalo Kecamatan Ruteng	25.858.000,00
33	Bea Kakor Kecamatan Ruteng	27.763.000,00
34	Compang Namut Kecamatan Ruteng	27.110.000,00
35	Pong Lale Kecamatan Ruteng	23.757.000,00
36	Jaong Kecamatan Satar Mese	27.869.000,00
37	Pongkor Kecamatan Satar Mese	42.461.000,00
38	Wae Ajang Kecamatan Satar Mese	28.878.000,00
39	Papang Kecamatan Satar Mese	37.572.000,00
40	Wewo Kecamatan Satar Mese	43.327.000,00
41	Lungar Kecamatan Satar Mese	34.073.000,00
42	Mocok Kecamatan Satar Mese	26.948.000,00
43	Koak Kecamatan Satar Mese	35.926.000,00
44	Langgo Kecamatan Satar Mese	31.958.000,00
45	Legu Kecamatan Satar Mese	37.408.000,00
46	Paka Kecamatan Satar Mese	38.881.000,00
47	Tal Kecamatan Satar Mese	30.992.000,00
48	Golo Lambo Kecamatan Satar Mese	44.860.000,00
49	Ngkaer Kecamatan Satar Mese	33.965.000,00
50	Umung Kecamatan Satar Mese	36.659.000,00
51	Tado Kecamatan Satar Mese	23.944.000,00
52	Gara Kecamatan Satar Mese	34.361.000,00
53	Golo Muntas Kecamatan Satar Mese	41.271.000,00
54	Ponggeok Kecamatan Satar Mese	44.399.000,00
55	Iteng Kecamatan Satar Mese	47.860.000,00
56	Satar Loung Kecamatan Satar Mese	30.381.000,00
57	Lolang Kecamatan Satar Mese	34.547.000,00

Rincian Bagi Hasil Pajak TA 2024

No.	Nama Desa	Nilai Transfer (Rp)
58	Ulu Belang Kecamatan Satar Mese	32.564.000,00
59	Nenu Kecamatan Cibai	56.412.000,00
60	Rado Kecamatan Cibai	30.946.000,00
61	Wudi Kecamatan Cibai	33.842.000,00
62	Welu Kecamatan Cibai	32.936.000,00
63	Golo Kecamatan Cibai	32.731.000,00
64	Barang Kecamatan Cibai	32.085.000,00
65	Perak Kecamatan Cibai	35.929.000,00
66	Bea Mese Kecamatan Cibai	42.890.000,00
67	Langkas Kecamatan Cibai	33.639.000,00
68	Ladur Kecamatan Cibai	43.628.000,00
69	Kentol Kecamatan Cibai	36.147.000,00
70	Riung Kecamatan Cibai	33.316.000,00
71	Pinggang Kecamatan Cibai	31.038.000,00
72	Lando Kecamatan Cibai	24.055.000,00
73	Gapong Kecamatan Cibai	38.701.000,00
74	Golo Ncuang Kecamatan Cibai	25.573.000,00
75	Robek Kecamatan Reok	36.863.000,00
76	Ruis Kecamatan Reok	72.117.000,00
77	Bajak Kecamatan Reok	32.592.000,00
78	Watu Baur Kecamatan Reok	23.920.000,00
79	Salama Kecamatan Reok	56.199.000,00
80	Watu Tango Kecamatan Reok	52.743.000,00
81	Hilhintir Kecamatan Satar Mese Barat	46.642.000,00
82	Bea Kondo Kecamatan Satar Mese Barat	29.712.000,00
83	Golo Ropong Kecamatan Satar Mese Barat	35.487.000,00
84	Terong Kecamatan Satar Mese Barat	28.468.000,00
85	Ceka Luju Kecamatan Satar Mese Barat	36.575.000,00
86	Satar Luju Kecamatan Satar Mese Barat	41.543.000,00
87	Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat	36.402.000,00
88	Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat	26.322.000,00
89	Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat	34.410.000,00
90	Borik Kecamatan Satar Mese Barat	31.198.000,00
91	Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat	27.349.000,00
92	Wongka Kecamatan Satar Mese Barat	27.316.000,00
93	Buar Kecamatan Rahong Utara	31.192.000,00
94	Benteng Tubi Kecamatan Rahong Utara	27.200.000,00
95	Compang Dari Kecamatan Rahong Utara	26.969.000,00
96	Dimpong Kecamatan Rahong Utara	26.929.000,00
97	Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara	29.030.000,00
98	Liang Bua Kecamatan Rahong Utara	27.962.000,00
99	Tengku Lese Kecamatan Rahong Utara	35.053.000,00
100	Golo Langkok Kecamatan Rahong Utara	31.014.000,00
101	Pong Lengor Kecamatan Rahong Utara	26.269.000,00
102	Manong Kecamatan Rahong Utara	28.526.000,00
103	Bangka Ruang Kecamatan Rahong Utara	28.058.000,00
104	Wae Mantang Kecamatan Rahong Utara	29.623.000,00
105	Bangka Lelak Kecamatan Lelak	29.056.000,00
106	Gelong Kecamatan Lelak	23.524.000,00
107	Urang Kecamatan Lelak	27.171.000,00
108	Ketang Kecamatan Lelak	27.864.000,00
109	Pong Umpu Kecamatan Lelak	23.417.000,00
110	Bangka Dese Kecamatan Lelak	23.772.000,00
111	Nati Kecamatan Lelak	22.311.000,00
112	Ndiwar Kecamatan Lelak	27.948.000,00
113	Bangka Tonggur Kecamatan Lelak	23.817.000,00
114	Lentang Kecamatan Lelak	34.618.000,00
115	Kajong Kecamatan Reok Barat	39.047.000,00

Rincian Bagi Hasil Pajak TA 2024

No.	Nama Desa	Nilai Transfer (Rp)
116	Lante Kecamatan Reok Barat	37.784.000,00
117	Toe Kecamatan Reok Barat	53.996.000,00
118	Sambi Kecamatan Reok Barat	35.925.000,00
119	Nggalak Kecamatan Reok Barat	48.345.000,00
120	Loce Kecamatan Reok Barat	34.935.000,00
121	Lemarang Kecamatan Reok Barat	35.043.000,00
122	Torong Koe Kecamatan Reok Barat	32.340.000,00
123	Para Lando Kecamatan Reok Barat	31.191.000,00
124	Rura Kecamatan Reok Barat	29.723.000,00
125	Bere Kecamatan Cibal Barat	32.308.000,00
126	Wae Codi Kecamatan Cibal Barat	49.485.000,00
127	Golo Woi Kecamatan Cibal Barat	30.939.000,00
128	Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat	28.437.000,00
129	Latung Kecamatan Cibal Barat	35.156.000,00
130	Wae Renca Kecamatan Cibal Barat	28.256.000,00
131	Timbu Kecamatan Cibal Barat	37.674.000,00
132	Bangka Ara Kecamatan Cibal Barat	25.237.000,00
133	Compang Cibal Kecamatan Cibal Barat	28.511.000,00
134	Lenda Kecamatan Cibal Barat	44.012.000,00
135	Renda Kecamatan Satar Mese Utara	24.553.000,00
136	Todo Kecamatan Satar Mese Utara	40.734.000,00
137	Gulung Kecamatan Satar Mese Utara	32.904.000,00
138	Popo Kecamatan Satar Mese Utara	31.914.000,00
139	Lia Kecamatan Satar Mese Utara	40.419.000,00
140	Kole Kecamatan Satar Mese Utara	40.482.000,00
141	Ling Kecamatan Satar Mese Utara	35.008.000,00
142	Nao Kecamatan Satar Mese Utara	29.980.000,00
143	Cireng Kecamatan Satar Mese Utara	39.831.000,00
144	Ruang Kecamatan Satar Mese Utara	32.226.000,00
145	Mata Wae Kecamatan Satar Mese Utara	36.674.580,00
JUMLAH		4.952.787.580,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Satar Ngkeling	476.949.000,00	854.119.000,00	1.331.068.000,00
2	Lalong	466.128.000,00	960.525.000,00	1.426.653.000,00
3	Poco	456.825.000,00	671.250.000,00	1.128.075.000,00
4	Wae Mulu	477.481.000,00	855.782.000,00	1.333.263.000,00
5	Ndehes	482.436.000,00	762.449.000,00	1.244.885.000,00
6	Golo Cador	475.796.000,00	789.489.000,00	1.265.285.000,00
7	Longko	449.021.000,00	918.226.000,00	1.367.247.000,00
8	Ranggi	454.729.000,00	791.473.000,00	1.246.202.000,00
9	Compang Ndehes	465.848.000,00	1.067.064.000,00	1.532.912.000,00
10	Bangka Jong	453.764.000,00	810.411.000,00	1.264.175.000,00
11	Bangka Kenda	470.371.000,00	1.035.070.000,00	1.505.441.000,00
12	Golo Mendo	449.432.000,00	1.083.502.000,00	1.532.934.000,00
13	Golo Wuas	453.317.000,00	736.313.000,00	1.189.630.000,00
14	Wae Rii	443.942.000,00	979.434.000,00	1.423.376.000,00
15	Ranaka	468.501.000,00	760.291.000,00	1.228.792.000,00
16	Golo Watu	458.657.000,00	801.432.000,00	1.260.089.000,00
17	Benteng Poco	455.972.000,00	721.513.000,00	1.177.485.000,00
18	Cumbi	480.937.000,00	815.734.000,00	1.296.671.000,00
19	Kakor	474.541.000,00	801.810.000,00	1.276.351.000,00
20	Pong Murung	501.652.000,00	969.468.000,00	1.471.120.000,00
21	Bulan	507.310.000,00	918.463.000,00	1.425.773.000,00
22	Pong Lao	503.919.000,00	953.910.000,00	1.457.829.000,00
23	Beo Rahong	495.771.000,00	914.824.000,00	1.410.595.000,00
24	Golo Worok	451.256.000,00	966.075.000,00	1.417.331.000,00
25	Meler	503.394.000,00	922.977.000,00	1.426.371.000,00
26	Benteng Kuwu	500.514.000,00	1.127.441.000,00	1.627.955.000,00
27	Belang Turi	482.559.000,00	759.673.000,00	1.242.232.000,00
28	Pong Leko	473.682.000,00	830.064.000,00	1.303.746.000,00
29	Rai	480.424.000,00	1.048.875.000,00	1.529.299.000,00
30	Poco Likang	480.909.000,00	829.243.000,00	1.310.152.000,00
31	Bangka Lao	491.685.000,00	989.928.000,00	1.481.613.000,00
32	Compang Dalo	491.799.000,00	908.439.000,00	1.400.238.000,00
33	Bea Kakor	469.821.000,00	868.255.000,00	1.338.076.000,00
34	Compang Namut	468.594.000,00	767.146.000,00	1.235.740.000,00
35	Pong Lale	445.417.000,00	815.667.000,00	1.261.084.000,00
36	Jaong	440.973.000,00	943.535.000,00	1.384.508.000,00
37	Pongkor	452.567.000,00	823.662.000,00	1.276.229.000,00
38	Wae Ajang	475.109.000,00	1.131.302.000,00	1.606.411.000,00
39	Papang	481.706.000,00	1.153.079.000,00	1.634.785.000,00
40	Wewo	459.826.000,00	945.869.000,00	1.405.695.000,00
41	Lungar	459.179.000,00	884.336.000,00	1.343.515.000,00
42	Mocok	465.346.000,00	943.361.000,00	1.408.707.000,00
43	Koak	485.976.000,00	995.266.000,00	1.481.242.000,00
44	Langgo	464.284.000,00	1.061.755.000,00	1.526.039.000,00
45	Legu	453.487.000,00	1.001.867.000,00	1.455.354.000,00
46	Paka	460.703.000,00	884.471.000,00	1.345.174.000,00
47	Tal	459.482.000,00	1.107.139.000,00	1.566.621.000,00
48	Golo Lambo	452.913.000,00	1.006.379.000,00	1.459.292.000,00
49	Ngkaer	468.084.000,00	737.398.000,00	1.205.482.000,00
50	Umung	461.517.000,00	916.398.000,00	1.377.915.000,00
51	Tado	453.369.000,00	902.130.000,00	1.355.499.000,00
52	Gara	453.903.000,00	898.656.000,00	1.352.559.000,00
53	Golo Muntas	464.549.000,00	857.832.000,00	1.322.381.000,00
54	Ponggeok	457.027.000,00	702.131.000,00	1.159.158.000,00
55	Iteng	435.980.000,00	902.005.000,00	1.337.985.000,00
56	Satar Loung	465.784.000,00	1.109.574.000,00	1.575.358.000,00
57	Lolang	441.299.000,00	867.391.000,00	1.308.690.000,00
58	Ulu Belang	450.024.000,00	835.484.000,00	1.285.508.000,00
59	Nenu	469.524.000,00	1.071.850.000,00	1.541.374.000,00
60	Rado	456.828.000,00	805.214.000,00	1.262.042.000,00
61	Wudi	470.559.000,00	776.567.000,00	1.247.126.000,00
62	Welu	478.874.000,00	944.641.000,00	1.423.515.000,00
63	Golo	468.232.000,00	959.425.000,00	1.427.657.000,00
64	Barang	463.976.000,00	773.689.000,00	1.237.665.000,00
65	Perak	445.864.000,00	730.889.000,00	1.176.753.000,00
66	Bea Mese	456.374.000,00	931.320.000,00	1.387.694.000,00
67	Langkas	470.296.000,00	798.050.000,00	1.268.346.000,00
68	Ladur	453.144.000,00	955.729.000,00	1.408.873.000,00
69	Kentol	453.078.000,00	814.140.000,00	1.267.218.000,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah (Rp)
70	Riung	470.654.000,00	794.808.000,00	1.265.462.000,00
71	Pinggang	438.709.000,00	930.975.000,00	1.369.684.000,00
72	Lando	451.933.000,00	721.564.000,00	1.173.497.000,00
73	Gapong	449.764.000,00	1.026.604.000,00	1.476.368.000,00
74	Golo Ncuang	470.036.000,00	898.747.000,00	1.368.783.000,00
75	Robek	453.677.000,00	864.114.000,00	1.317.791.000,00
76	Ruis	500.205.000,00	1.005.162.000,00	1.505.367.000,00
77	Bajak	464.828.000,00	766.878.000,00	1.231.706.000,00
78	Watu Baur	443.179.820,00	746.490.000,00	1.189.669.820,00
79	Salama	446.968.000,00	865.328.000,00	1.312.296.000,00
80	Watu Tango	471.238.000,00	837.395.000,00	1.308.633.000,00
81	Hilihintir	507.603.000,00	1.019.425.000,00	1.527.028.000,00
82	Bea Kondo	491.469.000,00	955.392.000,00	1.446.861.000,00
83	Golo Ropong	469.764.000,00	801.439.000,00	1.271.203.000,00
84	Terong	496.683.000,00	881.684.000,00	1.378.367.000,00
85	Ceka Luju	471.623.000,00	758.658.000,00	1.230.281.000,00
86	Satar Luju	479.071.000,00	792.047.000,00	1.271.118.000,00
87	Satar Lenda	498.367.000,00	898.801.000,00	1.397.168.000,00
88	Satar Ruwuk	483.294.000,00	919.411.000,00	1.402.705.000,00
89	Nuca Molas	459.060.000,00	844.266.000,00	1.303.326.000,00
90	Borik	466.143.000,00	876.682.000,00	1.342.825.000,00
91	Cambir Leca	492.317.000,00	1.022.666.000,00	1.514.983.000,00
92	Wongka	454.713.000,00	802.868.000,00	1.257.581.000,00
93	Buar	450.628.000,00	856.647.000,00	1.307.275.000,00
94	Benteng Tubi	450.130.000,00	958.303.000,00	1.408.433.000,00
95	Compang Dari	458.990.000,00	713.206.000,00	1.172.196.000,00
96	Dimpong	445.938.000,00	804.568.000,00	1.250.506.000,00
97	Bangka Ajang	453.483.000,00	1.120.984.000,00	1.574.467.000,00
98	Liang Bua	469.729.000,00	993.534.000,00	1.463.263.000,00
99	Tengku Lese	460.113.000,00	878.204.000,00	1.338.317.000,00
100	Golo Langkok	438.520.000,00	859.632.000,00	1.298.152.000,00
101	Pong Lengor	477.490.000,00	872.307.000,00	1.349.797.000,00
102	Manong	459.372.000,00	974.835.000,00	1.434.207.000,00
103	Bangka Ruang	447.338.000,00	874.351.000,00	1.321.689.000,00
104	Wae Mantang	472.967.000,00	1.021.523.000,00	1.494.490.000,00
105	Bangka Lelak	466.370.000,00	747.378.000,00	1.213.748.000,00
106	Gelong	460.958.000,00	835.615.000,00	1.296.573.000,00
107	Urang	460.692.000,00	927.339.000,00	1.388.031.000,00
108	Ketang	438.047.000,00	768.314.000,00	1.206.361.000,00
109	Pong Umpu	450.449.000,00	766.373.000,00	1.216.822.000,00
110	Bangka Dese	447.200.000,00	815.852.000,00	1.263.052.000,00
111	Nati	441.229.000,00	729.483.000,00	1.170.712.000,00
112	Ndiwar	450.558.000,00	731.035.000,00	1.181.593.000,00
113	Bangka Tonggur	448.379.000,00	690.585.000,00	1.138.964.000,00
114	Lentang	451.409.000,00	884.699.000,00	1.336.108.000,00
115	Kajong	489.351.000,00	1.108.565.000,00	1.597.916.000,00
116	Lante	485.922.000,00	1.072.303.000,00	1.558.225.000,00
117	Toe	470.654.000,00	1.175.299.000,00	1.645.953.000,00
118	Sambi	484.671.000,00	1.082.889.000,00	1.567.560.000,00
119	Nggalak	506.573.000,00	986.308.000,00	1.492.881.000,00
120	Loce	496.659.000,00	936.705.000,00	1.433.364.000,00
121	Lemarang	469.080.000,00	842.651.000,00	1.311.731.000,00
122	Torong Koe	471.377.000,00	840.134.000,00	1.311.511.000,00
123	Para Lando	470.372.000,00	815.165.000,00	1.285.537.000,00
124	Rura	492.199.000,00	1.245.626.000,00	1.737.825.000,00
125	Bere	485.903.000,00	875.080.000,00	1.360.983.000,00
126	Wae Codi	474.374.000,00	925.292.000,00	1.399.666.000,00
127	Golo Woi	459.919.000,00	693.926.000,00	1.153.845.000,00
128	Golo Lanak	466.883.000,00	750.751.000,00	1.217.634.000,00
129	Latung	458.236.000,00	694.867.000,00	1.153.103.000,00
130	Wae Renca	475.994.000,00	948.596.000,00	1.424.590.000,00
131	Timbu	473.035.000,00	956.822.000,00	1.429.857.000,00
132	Bangka Ara	442.655.000,00	669.983.000,00	1.112.638.000,00
133	Compang Cibal	466.387.000,00	1.039.956.000,00	1.506.343.000,00
134	Lenda	474.190.000,00	1.073.257.000,00	1.547.447.000,00
135	Renda	469.193.000,00	789.970.000,00	1.259.163.000,00
136	Todo	464.255.000,00	714.024.000,00	1.178.279.000,00
137	Gulung	467.024.000,00	842.914.000,00	1.309.938.000,00
138	Popo	472.484.000,00	1.040.210.000,00	1.512.694.000,00
139	Lia	473.515.000,00	984.768.000,00	1.458.283.000,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah (Rp)
140	Kole	464.262.000,00	780.941.000,00	1.245.203.000,00
141	Ling	460.461.000,00	754.894.000,00	1.215.355.000,00
142	Nao	465.544.000,00	1.000.293.000,00	1.465.837.000,00
143	Cireng	468.672.000,00	1.090.055.000,00	1.558.727.000,00
144	Ruang	453.063.000,00	716.443.000,00	1.169.506.000,00
145	Mata Wae	469.343.800,00	778.182.000,00	1.247.525.800,00
JUMLAH		67.686.727.620,00	129.061.909.000,00	196.748.636.620,00



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG
Jl. DR. Soetomo No.1 Ruteng Telp / Fax (0385) 21389 Email :
rs_sim@yahoo.co.id

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI**

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

AUDITED

Laporan Auditor Independen

Nomor: 00036/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/III/2025
Tanggal: 4 Maret 2025





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG
Jl. DR. Soetomo No.1 Ruteng Telp / Fax (0385) 21389 Email :
rs_sim@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Keuangan Pokok

1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
3. Neraca	3
4. Laporan Operasional	4
5. Laporan Perubahan Ekuitas	5
4. Laporan Arus Kas	6

Catatan Atas Laporan Keuangan Pokok

1. UMUM	7
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
3. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN	28
4. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA	46
5. GOING CONCERN	46
6. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN	46

Laporan Auditor Independen

Lampiran : Daftar Aset Tetap dan Penyusutannya



A large rectangular frame with a double-line border, intended for a signature or stamp.

Surat Pernyataan Direksi





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG
Jl. DR. Soetomo No.1 Ruteng Telp / Fax (0385) 21389 Email :
rs_sim@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp. B.
Alamat Kantor : Jln. Dr. Sutomo No. 1, Ruteng
Alamat Rumah : -
Nomor Identitas : -
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai tahun buku 2024;
2. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai tahun buku 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai tahun buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai tahun buku 2024 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung Jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan;
5. Tidak ada lagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk selain Kantor Akuntan Publik anda.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ruteng, 4 Maret 2025

Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng
Kabupaten Manggarai



dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp. B
Direktur

Laporan Keuangan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
	3.1.1				
- Pendapatan Layanan dari Masyarakat		68.453.400.000	73.388.865.790	107,21	64.580.503.244
- Pendapatan Hasil Kerjasama		-	380.972.306	-	428.425.841
- Pendapatan Hibah		-	-	-	-
- Pendapatan Usaha Lainnya		-	122.155.522	-	200.009.764
JUMLAH PENDAPATAN		68.453.400.000	73.891.993.618	107,94	65.208.938.849
BELANJA					
	3.1.2				
BELANJA OPERASI					
- Belanja Pegawai		50.750.000	48.950.000	96,45	86.400.000
- Belanja Barang		38.112.372.274	36.626.170.116	96,10	29.800.864.734
- Belanja Jasa		40.579.187.662	42.696.771.873	105,22	35.834.699.136
JUMLAH BELANJA OPERASI		78.742.309.936	79.371.891.989	100,80	65.721.963.870
BELANJA MODAL					
- Belanja Tanah		-	-	-	-
- Belanja Peralatan dan Mesin		2.406.801.600	2.301.861.520	95,64	298.640.000
- Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
- Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
- Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL		2.406.801.600	2.301.861.520	95,64	298.640.000
JUMLAH BELANJA		81.149.111.536	81.673.753.509	100,65	66.020.603.870
SURPLUS/DEFISIT		(12.695.711.536)	(7.781.759.891)	61,29	(811.665.021)
PEMBIAYAAN					
- Penerimaan		-	-	-	-
- Pengeluaran		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN NETTO		-	-	-	-
JUMLAH SILPA		(12.695.711.536)	(7.781.759.891)	61,29	(811.665.021)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 4 Maret 2025
RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai


dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	12.149.111.537	12.960.776.558
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total (1-2)	12.149.111.537	12.960.776.558
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(7.781.759.891)	(811.665.021)
Sub Total (3+4)	4.367.351.646	12.149.111.537
Pendapatan APBD	-	-
Pemindahbukuan ke R/K Kabupaten Manggarai	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	4.367.351.646	12.149.111.537

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 4 Maret 2025
RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI

NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas dan Setara Kas	3.2.1.1 a)	4.367.351.646	12.149.111.537
- Piutang Pelayanan	3.2.1.1 b)	7.689.907.925	12.562.973.270
- Penyisihan Kerugian Piutang	3.2.1.1 c)	(5.865.106.395)	(5.860.252.965)
- Piutang Lain-Lain	3.2.1.1 d)	78.074.220	82.782.840
- Persediaan	3.2.1.1 e)	5.261.206.714	3.175.919.740
Jumlah Aset Lancar		11.531.434.110	22.110.534.422
ASET TETAP	3.2.1.2		
- Tanah		6.711.250.000	6.711.250.000
- Peralatan dan Mesin		140.986.641.448	135.617.637.590
- Gedung dan Bangunan		119.279.283.719	119.285.271.447
- Jalan,Irigasi dan Jaringan		4.705.352.864	4.705.352.864
- Aset Tetap Lainnya		-	-
- Konstruksi Dalam Pengerjaan		10.467.114.422	10.467.114.422
Jumah aktiva		282.149.642.453	276.786.626.323
- Akumulasi Penyusutan		(122.270.937.313)	(100.268.745.927)
Jumlah Aset Tetap		159.878.705.140	176.517.880.396
ASET LAINNYA	3.2.1.3		
- Aset tetap rusak tidak digunakan		1.255.726.144	1.255.726.144
- Obat kedaluarsa belum dimusnahkan		-	-
- Software		550.416.000	550.416.000
- Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		(1.542.401.144)	(1.487.359.544)
Jumlah Aset Lainnya		263.741.000	318.782.600
JUMLAH ASET		171.673.880.250	198.947.197.418
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.2.2.1		
- Utang Usaha		498.059.600	1.047.284.467
- Beban Yang Masih Harus Dibayar		2.780.774.994	6.364.364.014
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.278.834.594	7.411.648.481
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		3.278.834.594	7.411.648.481
EKUITAS	3.2.3		
- Ekuitas		168.395.045.656	191.535.548.937
Jumlah Ekuitas		168.395.045.656	191.535.548.937
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		171.673.880.250	198.947.197.418

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 4 Maret 2025

RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.

Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	Catatan	2024	2023	Kenaikan /Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
	3.3.1				
- Pendapatan Operasional		69.160.475.945	64.571.811.721	4.588.664.224	7,1
- Pendapatan Hibah		1.801.820.000,00	1.389.000.000	412.820.000	29,7
- Pendapatan Hasil Kerjasama		332.863.686	426.634.461	(93.770.775)	(22,0)
- Pendapatan Operasional Lainnya		174.355.522	336.670.821	(162.315.299)	(48,2)
- Pendapatan APBD		29.007.397.550	46.741.365.803	(17.733.968.253)	(37,9)
JUMLAH PENDAPATAN		100.476.912.703	113.465.482.806	(12.988.570.103)	(11,4)
BEBAN					
	3.3.2				
- Beban Pegawai		27.100.769.325	27.039.162.807	61.606.518	0,2
- Beban Pemakaian Persediaan		34.449.276.542	32.778.136.581	1.671.139.961	5,1
- Beban Jasa		29.854.732.812	37.697.615.054	(7.842.882.242)	(20,8)
- Beban Penyusutan, Penyisihan & Amortisasi		22.062.086.414	20.424.941.268	1.637.145.146	8,0
JUMLAH BEBAN		113.466.865.093	117.939.855.710	(4.472.990.617)	(3,8)
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL		(12.989.952.390)	(4.474.372.904)	(8.515.579.486)	190,3
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
- Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
- (Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
- Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI					
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS					
LUAR BIASA		(12.989.952.390)	(4.474.372.904)	(8.515.579.486)	190,3
POS LUAR BIASA					
- Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
- Beban Luar Biasa		-	-	-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA					
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(12.989.952.390)	(4.474.372.904)	(8.515.579.486)	190,3

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 4 Maret 2025
RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai



dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2024	2023
Ekuitas Awal	191.535.548.937	196.015.909.569
- Surplus/Defisit LO	(12.989.952.392)	(4.474.372.904)
- Koreksi lebih klaim piutang jasa pelayanan ke BPJS	(652.751.700)	
- Koreksi beban tahun 2023 yang dibayar di tahun 2024	(9.497.799.189)	
- Pemusnahan pagar gedung lama	-	(5.987.728)
Ekuitas Akhir	168.395.045.656	191.535.548.937

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 4 Maret 2025
 RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai



dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.
 Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG KABUPATEN MANGGARAI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah penuh, kecuali disajikan lain)

Uraian	2024	2023
Arus Kas dari Aktifitas Operasional		
Arus Kas Masuk		
- Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	73.388.865.790	64.580.503.244
- Pendapatan Kerjasama	380.972.306	428.425.841
- Pendapatan Hibah	-	-
- Pendapatan Lainnya	122.155.522	200.009.764
- Pendapatan APBD	1.998.078.225	46.741.365.803
Jumlah arus Kas Masuk	75.890.071.843	111.950.304.652
Arus Kas Keluar		
- Biaya Pegawai	94.600.000	27.039.162.807
- Biaya Barang	36.627.960.116	29.800.864.734
- Biaya Jasa	43.388.075.488	36.859.099.656
Jumlah Arus Kas Keluar	80.110.635.604	93.699.127.197
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	(4.220.563.761)	18.251.177.455
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
- Perolehan atas Tanah	-	-
- Perolehan Peralatan dan Mesin	3.561.196.130	19.062.842.476
- Perolehan Gedung dan Bangunan	-	-
- Perolehan jalan, irigasi dan jaringan	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	3.561.196.130	19.062.842.476
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	(7.781.759.891)	(811.665.021)
Arus kas dari Aktifitas Pendanaan	-	-
Arus Kas dari Aktifitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
- Pemindahbukuan ke R/K Pemda Nagekeo	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	-	-
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	(7.781.759.891)	(811.665.021)
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	12.149.111.537	12.960.776.558
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	4.367.351.646	12.149.111.537

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Ruteng, 4 Maret 2025
RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

dr. Oktavianus Y. Ampur, Sp.B.

Direktur

Catatan Atas Laporan Keuangan

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1. UMUM

1.1. Sejarah Berdiri dan Tempat Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng Kabupaten Manggarai merupakan institusi kesehatan yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, adalah cikal bakal dari unit pelayanan kesehatan yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1918. Sebelumnya bernama RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai.

RSUD Ruteng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Perubahan Ke-empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 010) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 37 Tanggal 2015 tentang Perubahan Ke-empat Pelaksanaan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 37).

Tempat kedudukan RSUD Ruteng di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.2. Susunan Direksi, Dewan Pengawas, Tim Pembina dan Satuan Pengawas Internal

a. Struktur Direksi

Direksi RSUD Ruteng terdiri dari seorang Direktur.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Tahun 2024 direktur RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai dijabat oleh dr. Oktavianus Yanuarius Ampur, Sp.B., yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/66/2022 tanggal 31 Januari 2022.

Direktur, membawahi staf Kepala Bagian dan Kepala Bidang, yang membawahi Sub Bagian dan Seksi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja RSUD Ruteng, terdiri dari

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Medik
- 3) Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan
- 4) Kepala Bidang Penunjang
- 5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 6) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 7) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 8) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap
- 9) Kepala Seksi Pelayanan Medik Non Rawat Inap
- 10) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Inap
- 11) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Non Rawat Inap
- 12) Kepala Seksi Penunjang Non-Medik
- 13) Kepala Seksi Penunjang Medik

b. Struktur Dewan Pengawas

Sampai dengan saat ini, telah terbentuk Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan manajemen di lingkungan RSUD Ruteng berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/262/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi Periode Tahun 2022-2025. Jabatan dalam Dewan Pengawas RSUD Ruteng terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu:

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan
- Mariati S.Kep, Ns., M.Kep.

c. Satuan Pengawas Internal

RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai memiliki unit yang memhantu manajemen dalam fungsi pengawasan internal berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Ruteng Nomor: RSUD 445.7/167/VII/2024 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Susunan Tim dalam Satuan Pengawas Internal (SPI) terdiri dari :

- Ketua : drg. Helena Silvia Lahur
- Sekretaris : Margaretha B. Banilo, SKM
- Anggota :
- Katarina A. Sinar, Ns. S.Kep
 - Beatriks Julita Dampuk, S.Farm., Apt
 - Eufemia Angelina Piora, SE.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng terurai sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

RSUD Ruteng mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang dan ketatausahaan.

b. Fungsi

RSUD Ruteng dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi :

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- 1) Pengoordinasian penyusunan program/kegiatan RSUD Ruteng;
- 2) Perumusan kebijakan teknis/petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan RSUD Ruteng;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Ruteng;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD Ruteng ;
- 5) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.4. Visi - Misi RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan ideal yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 adalah : "MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING".

a. Visi

Memperhatikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, maka sebagai penyedia layanan kesehatan, visi yang ingin dicapai RSUD Ruteng adalah: "RSUD RUTENG yang MAJU dan BERDAYA SAING".

b. Misi

Untuk melaksanakan visi, maka ditetapkan misi RSUD Ruteng adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas;
- 3) Menyediakan pelayanan yang mengedepankan keselamatan pasien.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1.5. Sumber Daya Manusia di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

Sumberdaya manusia pada RSUD Ruteng per 31 Desember 2024 berjumlah 570 orang, terdiri dari 438 orang PNS/PPPK dan 132 Non PNS.

Berdasarkan Pendidikan : master (S2) 15 orang, sarjana lengkap (SI/D4) 173 Orang, Diploma (D3) 299 orang, Diploma (D1) 2 orang, SLTA 75 orang, dan SLTP 5 orang, dengan rincian:

NO	JABATAN	ASN/PPPK							NON ASN	JUMLAH
		Golongan								
		IV	III	II	I	X	IX	VIII		
I	Pejabat Struktural	6	8	-	-	-	-	-	-	14
1	Direktur	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Kasubag	-	3	-	-	-	-	-	-	3
5	Kasie	1	5	-	-	-	-	-	-	6
II	JFT	19	230	32	-	-	-	-	-	281
1	dr. Spesialis	2	8	-	-	-	-	-	-	10
2	dr. Umum	2	6	-	-	-	-	-	-	8
3	dr. Gigi	3	1	-	-	-	-	-	-	4
4	Perawat	6	110	6	-	-	-	-	-	122
5	Terapis Gigi dan Mulut	-	6	-	-	-	-	-	-	6
6	Kebidanan	3	46	1	-	-	-	-	-	50
7	Kefarmasian Apoteker	3	9	-	-	-	-	-	-	12
8	Kefarmasian Asisten Apoteker	-	6	9	-	-	-	-	-	15
9	Admnistrator Kesehatan	-	3	-	-	-	-	-	-	3
10	Epidemiolog	-	1	-	-	-	-	-	-	1
11	Tenaga Kesehatan Lingkungan	-	3	-	-	-	-	-	-	3
12	Tanaga Gizi	-	8	-	-	-	-	-	-	8
13	Keteknisan Medis - Teknisi Gigi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Keteknisan Medis - Refra Optis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
15	Keteknisan Medis - Teknis Transfusi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
16	Keteknisan Medis - Rekam Medis	-	5	4	-	-	-	-	-	9
17	Teknik Biomedika - Radiografer	-	2	3	-	-	-	-	-	5
18	Teknik Biomedika - Elektromedik	-	1	2	-	-	-	-	-	3
19	Laboratorium	-	10	7	-	-	-	-	-	17
20	Keterapian Fisik - Fisioterapi	-	2	-	-	-	-	-	-	2

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

III	JFU	-	25	47	1	20	3	47	-	143
1	Ekonomi	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2	Manajemen Informatika	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	SMA	-	22	36	-	-	-	-	-	58
4	SMP	-	-	11	1	-	-	-	-	12
5	Perawat	-	-	-	-	19	-	28	-	47
6	Bidan	-	-	-	-	-	1	7	-	8
7	D3 Farmasi	-	-	-	-	-	-	7	-	7
8	Laboratorium	-	-	-	-	-	1	2	-	3
9	Administrator Kesehatan	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10	Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	3	-	3
11	Gizi	-	-	-	-	1	-	-	-	1
IV	NON ASN	-	-	-	-	-	-	-	70	70
1	dr. Spesialis	-	-	-	-	-	-	-	3	3
2	dr. Umum	-	-	-	-	-	-	-	13	13
3	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	16	16
4	Kebidanan	-	-	-	-	-	-	-	6	6
5	Tenaga Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Tenaga Gizi	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Keteknisan Medis-Perekam Medis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Teknik Biomedika - Radiografer	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Teknik Biomedika - Elektromedik	-	-	-	-	-	-	-	2	2
10	Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Keterampilan Fisik - Fisiotherapi	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Akuntansi	-	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Manajemen Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	1	1
14	Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	4	4
15	Manajemen Informatika	-	-	-	-	-	-	-	7	7
16	Penata Anestesi	-	-	-	-	-	-	-	2	2
17	SMA	-	-	-	-	-	-	-	10	10
18	SMK	-	-	-	-	-	-	-	1	1
V	TPPK DINKES	-	-	-	-	-	-	-	62	62
1	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	55	55
2	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	5	5
3	Kefarmasian Asisten Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	JUMLAH	25	263	79	1	20	3	47	132	570

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

1.6. Pelayanan Kesehatan Di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng Kabupaten Manggarai terdiri dari:

- 1) Instalasi Gawat Darurat
- 2) Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - (1) Poli Penyakit Dalam
 - (2) Poli Kebidanan dan kandungan
 - (3) Poli Bedah
 - (4) Poli Anak
 - (5) Poli Umum
 - (6) Poli Saraf
 - (7) Poli Gigi
 - (8) Poli THT
- 3) Instalasi Rawat Inap meliputi:
 - (1) Rawat Inap Umum
 - (2) Rawat Inap Kebidanan dan kandungan
 - (3) Rawat Inap Intensif
 - (4) Rawat Inap Perinatologi
- 4) Instalasi Bedah Central
- 5) Instalasi Persalinan
- 6) Instalasi Rehabilitasi Medik
- 7) Instalasi Laboratorium
- 8) Instalasi Radiologi
- 9) Instalasi Farmasi
- 10) Instalasi Gizi
- 11) Instalasi Rekam Medik
- 12) Unit Pemulasaran jenazah
- 13) Unit Pelayanan Pengelolaan limbah
- 14) Unit Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- 15) Unit Pelayanan Administrasi
- 16) Unit Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah
- 17) Unit CSSD dan Laundry
- 18) Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit
- 19) Unit Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, standar akuntansi BLUD menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, ditegaskan BLU menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13, dan karena itu RSUD Ruteng mulai tahun 2019 praktik akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan telah mengikuti peraturan tersebut, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

- Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas RSUD dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas RSUD.
- Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional.
Aset, kewajiban dan ekuitas, dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan RSUD, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. POSISI KEUANGAN

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

(1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan rumah sakit yang belum disetor ke bank per 31 Desember tahun berjalan yang masih ada di bendahara penerimaan. Mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal neraca.

(2) Kas pada BLUD

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas bendahara BLUD. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara BLUD. Kas di Bendahara BLUD dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (BI) pada tanggal neraca.

(3) **Investasi Jangka Pendek**

Merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam satu periode akuntansi. Investasi jangka pendek ini merupakan investasi non permanen seperti investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Depisoto.

(4) **Piutang Layanan**

Piutang layanan merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari jasa layanan yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan jasa layanan. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari layanan yang belum dilunasi.

(5) **Penyisihan Piutang Layanan**

Penyisihan piutang sangsi (ragu-ragu) ditentukan dengan cara sebagai berikut :

Umur Piutang	Prosentase Penyisihan
>1 bulan	0,5 %
Di atas 1 - 3 bulan	10 %
Di atas 3 - 12 bulan	50%
Di atas 12 bulan	100 %

(6) **Belanja Dibayar Dimuka**

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

penggunaan aktivitya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

(7) Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang telah dibayar.

(8) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

(9) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan antara lain untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

(10) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional BLUD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD. Perkiraan (Akun) aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat angkutan; alat pertanian; alat kantor; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat laboratorium; komputer; alat eksplorasi; pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset BLU pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset BLU pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh BLU serta dikuasai oleh BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset BLU saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset BLU pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

(6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

(7) **Akumulasi Penyusutan**

Depresiasi/penyusutan atas Aktiva Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus setelah mempertimbangkan nilai residu dan masa manfaat aset.

Rumus perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Perolehan} - (10\% \text{ dari NP})}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Umur ekonomis aktiva tetap ditentukan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis
Komputer dan Kendaraan Bermotor	10 Tahun
Peralatan Kantor dan Meubel	5 Tahun
Peralatan / Mesin, dan Peralatan Medis	5 Tahun
Gedung Permanen	25 Tahun
Jalan Irigasi dan Jaringan	10 Tahun

3) ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

(1) **Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset BLU secara angsuran kepada pegawai

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(2) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLU. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

4) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang yang timbul akibat adanya pembelian barang dan atau jasa yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU Rumah Sakit seperti utang untuk pembelian obat-obatan dan bahan alat kesehatan (alkes) habis pakai.

(2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan luran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

(3) **Belanja Yang Masih Harus Dibayar**

Merupakan kewajiban yang timbul dari adanya jasa yang diberikan oleh pihak internal maupun pihak eksternal namun belum dilakukan pembayaran oleh RSUD.

(4) **Pendapatan Diterima Dimuka**

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum merupakan pendapatan karena "*earning process*" nya belum selesai.

(5) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh RSUD, dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5) EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca RSUD, yang menampung selisih antara aset dan kewajiban RSUD pada akhir tahun. Komponen utama dari kenaikan atau penurunan nilai ekuitas adalah surplus/(defisit) operasional Rumah Sakit pada tahun yang bersangkutan.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1) PENDAPATAN

Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan BLUD-RSUD.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA-BLUD-RSUD, tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD, penambah SiLPA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA-BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada BLUD RSUD, merupakan pendapatan Bukan Pajak (BNBP), termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD, adalah:

- (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- (3) Pendapatan hasil kerja sama;
- (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

(5) Pendapatan lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud di atas adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud di atas adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud di atas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud di atas antara lain berupa :

- (1) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- (2) Jasa giro;
- (3) Pendapatan bunga;
- (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD.

Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2) BELANJA

Belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD-RSUD, setelah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD-RSUD, selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD-RSUD, yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas yang diterima disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO pada BLUD-RSUD, diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan;

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD diakui pada saat:

1) timbulnya kewajiban;

2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau

3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 PENDAPATAN LRA

Target anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 68.453.400.000 terealisasi sebesar Rp 73.891.993.618 atau 107,94 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023 <i>Reklas</i>
PENDAPATAN				
Pendapatan				
- Layanan dari Masyarakat	68.453.400.000	73.388.865.790	107,21	64.580.503.244
- Pendapatan Hasil Kerjasama	-	380.972.306	-	428.425.841
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-
- Pendapatan Usaha Lainnya	-	122.155.522	-	200.009.764
JUMLAH PENDAPATAN	68.453.400.000	73.891.993.618	107,94	65.208.938.849

3.1.2 BELANJA LRA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja dengan target anggaran sebesar Rp 81.149.111.536 realisasinya sebesar Rp. 81.673.753.509 atau 100,65%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023 <i>Reklas</i>
BELANJA				
BELANJA OPERASI	78.742.309.936	79.371.891.989	100,80	65.721.963.870
BELANJA MODAL	2.406.801.600	2.301.861.520	95,64	298.640.000
JUMLAH BELANJA	81.149.111.536	81.673.753.509	100,65	66.020.603.870

a) Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp 78.742.309.936 terealisasi sebesar Rp 79.371.891.989 atau 100,80%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023 <i>Reklas</i>
BELANJA OPERASI				
- Belanja Pegawai	50.750.000	48.950.000	96,45	86.400.000
- Belanja Barang	38.112.372.274	36.626.170.116	96,10	29.800.864.734
- Belanja Jasa	40.579.187.662	42.696.771.873	105,22	35.834.699.136
Jumlah Belanja Operasi	78.742.309.936	79.371.891.989	100,80	65.721.963.870

b) Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran sebesar Rp 2.406.801.600 terealisasi sebesar Rp. 2.301.861.520 atau 95,64% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023 <i>Reklas</i>
BELANJA MODAL				
- Belanja Tanah	-	-	-	-
- Belanja Peralatan dan Mesin	2.406.801.600	2.301.861.520	95,64	298.640.000

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
- Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
- Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	2.406.801.600	2.301.861.520	95,64	298.640.000

Realisasi belanja modal tahun 2024 adalah belanja peralatan dan mesin berupa peralatan kedokteran dan kesehatan.

3.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN

3.2.1. ASET

3.2.1.1. ASET LANCAR

a) Kas dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Bank NTT Bank NTT Ruteng Rek. 006.01.05.001094-7 an. BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kab. Manggarai	4.367.351.646	12.149.111.537

Rekening pada Bank NTT Cabang Ruteng sebesar Rp 4.367.351.646 merupakan saldo simpanan disetor oleh bendahara penerimaan ke Bank NTT per 31 Desember 2024 dan 2023.

b) Piutang Pelayanan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Perorangan	164.279.128	156.969.468
Piutang Jaminan Pemda	5.703.283.497	5.703.283.497

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Piutang BPJS	1.822.345.300	6.702.720.305
Jumlah	7.689.907.925	12.562.973.270

Piutang Pelayanan merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien, pada tanggal neraca belum diterima secara kas.

c) Penyisihan Piutang Pelayanan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kategori Lancar 0 s/d 1 bulan (0,5%)	-	-
Kategori Kurang Lancar 1 s/d 3 bulan (10%)	-	-
Kategori Diragukan 3 s/d 12 bulan (50%)	1.656.330	-
Kategori Macet diatas 12 bulan (100%)	5.863.450.065	5.860.252.965
Jumlah Penyisihan Kerugian Piutang	5.865.106.395	5.860.252.965

d) Piutang Lain-Lain

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
PT. Mina Abadi (Listrik dan Air)	29.854.430	29.854.430
PT. Megatama Permai (Listrik dan Air)	37.204.380	37.204.380
PT. Kasih Sejati Perkasa (Listrik)	11.015.410	11.015.410
CV. Banera - Apotek Pelengkap	-	4.708.620
Jumlah PiutangLain-Lain	78.074.220	82.782.840

Jumlah tersebut merupakan piutang atas pemakaian air dan listrik oleh kontraktor pelaksana pembangunan di lingkungan RS dan kerjasama apotek pelengkap, per 31 Desember 2024 dan 2023.

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

e) Persediaan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Persediaan Barang Farmasi		
– Persediaan Obat	2.169.092.529	722.215.436
– Persediaan Alkes dan BMHP	1.337.215.419	1.102.330.049
– Persediaan Alkes/BMHP Covid 19	86.925.412	169.410.352
– Persediaan Reagensia	849.527.140	447.699.104
– Persediaan Radiologi	97.280.400	89.438.250
– Persediaan Alkes Dental	28.647.631	16.754.439
– Persediaan Oksigen	3.500.000	10.788.400
– Persediaan CSSD	199.665.713	143.903.142
2. Persediaan Barang Gizi		
– Persediaan Makan Minum Pasien	260.300	33.009.400
3. Persediaan Barang Rumah Tangga		
– Persediaan ATK dan Penggandaan	9.282.400	4.032.000
– Persediaan Cetakn	48.110.000	46.924.500
– Persediaan Kertas dan Cover	8.567.500	12.780.000
– Persediaan Bahan Kebersihan Rutin	10.059.000	10.697.500
– Persediaan PPI	92.902.750	91.922.250
– Persediaan Pembersih Laundry	229.370.240	97.921.258
– Persediaan CAPD	86.630.280	161.675.160
– Persediaan Alat Rumah Tangga	4.170.000	14.418.500
Jumlah Persediaan	5.261.206.714	3.175.919.740

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Persediaan merupakan barang/bahan berwujud yang akan habis pakai namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai.

3.2.1.2. ASET TETAP

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Tanah	6.711.250.000	6.711.250.000
Peralatan dan Mesin	140.986.641.448	135.617.637.590
Gedung dan Bangunan	119.279.283.719	119.285.271.447
Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.705.352.864	4.705.352.864
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.467.114.422	10.467.114.422
Jumlah Aset Tetap	282.149.642.453	276.786.626.323
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(122.270.937.312)	(100.268.745.927)
Nilai Buku Aset Tetap	159.878.705.141	176.517.880.396

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023.

Rincian peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023, terlihat sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah sebesar Rp 6.711.250.000 adalah nilai tanah lokasi RSUD Ruteng, Jl. Dr. Soetomo No. 1 Ruteng.

2) Peralatan dan Mesin

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Alat Besar	49.000.000	49.000.000
- Alat Angkutan	5.455.809.124	5.068.009.124

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- Alat Bengkel dan Ukur	1.840.000	1.840.000
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.961.998.468	8.205.284.324
- Alat Studio dan Komunikasi	205.294.000	205.294.000
- Alat Kedokteran	125.350.788.846	121.126.299.132
- Alat Laboratorium	688.744.010	688.744.010
- Alat Keamanan	273.167.000	273.167.000
Jumlah Peralatan dan Mesin	140.986.641.448	135.617.637.590

3) Gedung dan Bangunan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Bangunan Gedung	117.990.558.519	117.996.546.247
- Monumen	1.288.725.200	1.288.725.200
Jumlah Gedung dan Bangunan	119.279.283.719	119.285.271.447

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Bangunan Air	199.972.476	199.972.476
- Instalasi	4.505.380.388	4.505.380.388
Jumlah Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.705.352.864	4.705.352.864

5) Konstruksi Dalam Pelaksanaan

Merupakan nilai pekerjaan gedung CSSD dan Laundry yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum selesai 100%, dengan rincian:

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Progres Fisik	9.820.954.422	9.820.954.422
- Konsultan Perencanaan	375.843.000	375.843.000
- Konsultan Pengawasan	270.317.000	270.317.000
Jumlah Konstruksi Dalam Pelaksanaan	10.467.114.422	10.467.114.422

Mutasi aset tetap tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Nilai Perolehan:				
- Tanah	6.711.250.000	-	-	6.711.250.000
- Peralatan dan Mesin	135.617.637.590	5.369.003.858	-	140.986.641.448
- Gedung dan Bangunan	119.285.271.447	-	5.987.728	119.279.283.719
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.705.352.864	-	-	4.705.352.864
- Konstruksi Dim Pelaksanaan	10.467.114.422	-	-	10.467.114.422
Jumlah	276.786.626.323	5.369.003.858	5.987.728	282.149.642.453
Akumulasi Penyusutan:				
- Peralatan dan Mesin	81.634.388.873	18.015.638.150	-	99.650.027.023
- Gedung dan Bangunan	17.430.643.444	3.721.629.142	5.987.728	21.146.284.858
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.203.713.610	270.911.821	-	1.474.625.431
Jumlah	100.268.745.927	22.008.179.113	5.987.728	122.270.937.312
Nilai Buku:				
- Tanah	6.711.250.000	-	-	6.711.250.000

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

– Peralatan dan Mesin	101.848.640.275	-	-	98.132.998.861
– Gedung dan Bangunan	53.989.236.445	-	-	41.336.614.425
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.501.639.254	-	-	3.230.727.433
– Konstruksi Dlm Pelaksanaan	10.467.114.422	-	-	10.467.114.422
Jumlah	176.517.880.396			159.878.705.141

Mutasi aset tetap tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Nilai Perolehan:				
– Tanah	6.711.250.000	-	-	6.711.250.000
– Peralatan dan Mesin	115.171.782.842	20.445.854.748	-	135.617.637.590
– Gedung dan Bangunan	119.285.271.447	-	-	119.285.271.447
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.705.352.864	-	-	4.705.352.864
– Konstruksi Dlm Pelaksanaan	10.467.114.422	-	-	10.467.114.422
Jumlah	256.340.771.575	20.445.854.748	-	276.786.626.323
Akumulasi Penyusutan:				
– Peralatan dan Mesin	65.251.042.516	16.383.346.357	-	81.634.388.873
– Gedung dan Bangunan	13.715.002.030	3.715.641.414	-	17.430.643.444
– Jalan, Irigasi dan Jaringan	932.801.713	270.911.897	-	1.203.713.610
Jumlah	79.898.846.259	20.369.899.668	-	100.268.745.927

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Nilai Buku:				
- Tanah	6.711.250.000	-	-	6.711.250.000
- Peralatan dan Mesin	105.570.269.417	-	-	101.848.640.275
- Gedung dan Bangunan	49.920.740.326	-	-	53.989.236.445
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.772.551.151	-	-	3.501.639.254
- Konstruksi Dlm Pelaksanaan	10.467.114.422	-	-	10.467.114.422
Jumlah	176.441.925.316	-	-	176.517.880.396

3.2.1.3. ASET LAINNYA

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset tetap rusak tidak digunakan	1.255.726.144	1.255.726.144
Software	550.416.000	550.416.000
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(1.542.401.144)	(1.487.359.544)
Jumlah	263.741.000	318.782.600

Jumlah tersebut merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.

3.2.2. KEWAJIBAN

3.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1) Utang Usaha

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Utang Kerjasama Apotik Pelengkap	-	513.379.367
- Utang Kerjasama Hemodialisa	98.929.600	248.207.300

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- Utang Oxygen	63.610.000	-
- Utang Peggandaan	-	214.057.800
- Utang Darah	335.520.000	71.640.000
Jumlah Utang Usaha	498.059.600	1.047.284.467

Merupakan kewajiban kepada para rekanan, namun sampai dengan akhir tahun buku belum dilunaskan.

2) Beban Yang Masih Harus Dibayar

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Jasa Pelayanan Medis Umum	562.568.977	418.740.585
- Jasa Pelayanan Medis BPJS	2.216.514.565	5.917.672.377
- Jasa Jamkesda Kabupaten Manggarai	1.691.452	1.691.452
- Langganan Daya dan Jasa	-	26.259.600
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.780.774.994	6.364.364.014

Merupakan beban tahun berjalan, namun sampai dengan akhir tahun buku belum dilunaskan.

3.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

3.2.3. EKUITAS

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	191.535.548.937	196.015.909.569
- Koreksi piutang atas lebih klaim jasa pelayanan ke BPJS	(652.751.700)	-

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

– Koresi atas beban tahun 2023 yang dibayar tahun 2024	(9.497.799.189)	-
– Koresi atas Pemusnahan Pagar	-	(5.987.728)
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	(12.989.952.392)	(4.474.372.904)
Ekuitas Akhir	168.395.045.656	191.535.548.937

3.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.3.1. PENDAPATAN LO

Pendapatan LO tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pelayanan	69.160.475.945	64.571.811.721
Pendapatan Hibah	1.801.820.000	1.389.000.000
Pendapatan Hasil Kerjasama	332.863.686	426.634.461
Pendapatan Operasional Lainnya	174.355.522	336.670.821
Pendapatan APBD	29.007.397.550	46.741.365.803
Jumlah	100.476.912.703	113.465.482.806

1) Pendapatan Layanan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
– Pendapatan Layanan Pasien Umum	4.028.173.540	4.112.742.314
– Pendapatan Layanan Pasien JKN	65.132.302.405	60.105.762.407
– Pendapatan Dana Covid Ditjen Yankes	-	353.307.000
Jumlah Pendapatan Pelayanan	69.160.475.945	64.571.811.721

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

2) Pendapatan Hibah tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta	1.801.820.000	-
- Hibah dari Dinas PPKB Kabupaten Manggarai	-	1.389.000.000
Jumlah Pendapatan Hibah	1.801.820.000	1.389.000.000

3) Pendapatan Kerjasama tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Kerjasama Pelatihan Diklat	66.700.000	27.900.000
- Hemodialisa (HO) PT. Cipta Husada	216.107.020	297.660.600
- Apotek Pelengkap	50.056.666	42.373.861
- Sewa Sarana Prasarana	-	58.700.000
Jumlah Pendapatan Kerjasama	332.863.686	426.634.461

4) Pendapatan Operasional Lainnya tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
- Pendapatan Jasa Giro	116.539.870	160.444.064
- Bantuan Sosial	-	33.265.700
- Sewa Ruang Pertemuan	57.600.000	6.300.000
- Pendapatan Pemulihan Cadangan Penyisihan Piutang	-	13.6661.057
- Pendapatan Lainnya	215.652	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	174.355.522	336.670.821

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

5) Pendapatan APBD tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
– Pendapatan dari Belanja Pegawai dan Barang & Jasa	27.748.062.940	27.977.163.327
– Pendapatan dari Belanja Modal	1.259.334.610	18.764.202.476
Jumlah Pendapatan APBD	29.007.397.550	46.741.365.803

3.3.2. BEBAN LO

Jumlah beban untuk tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023/Reklas
Beban Pegawai	27.100.769.325	27.039.162.807
Beban Pemakaian Persediaan	34.449.276.542	32.778.136.581
Beban Jasa	29.854.732.813	37.697.615.054
Beban Penyusutan, Penyisihan dan Amortisasi	22.062.086.414	20.424.941.268
Jumlah Beban LO	113.466.865.094	117.939.855.710

1) Beban Pegawai tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023 /reklas
– Beban Gaji dan Tunjangan ASN	23.846.306.825	22.798.864.851
– Beban Honor Bendahara/Pembantu	38.100.000	45.600.000
– Beban Honor PPK	5.000.000	20.400.000
– Beban Honor Pejabat Pengadaan	48.350.000	20.400.000
– Beban Iuran Jaminan Kesehatan	-	899.172.956

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

- Beban Honor dan Tamsil Nakes	3.163.012.500	3.254.725.000
Jumlah Beban Pegawai	27.100.769.325	27.039.162.807

2) Beban Pemakaian Persediaan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023 /reklas
- Beban Obat E-Katalog	4.340.722.168	3.777.908.189
- Beban Obaton Non E-Katalog	4.127.931.267	3.331.886.881
- Beban Bahan/Obat Covid	82.484.940	0
- Beban BBM dan Pelumas Incenerator	169.780.000	86.540.000
- Beban BBM dan Pelumas Genset	17.066.750	27.015.250
- Beban BBM dan Pelumas Kendaraan	177.479.361	192.827.837
- Belanja Isi Ulang APAR	33.620.000	30.420.000
- Belanja Minyak Tanah dan Gas	151.355.000	144.210.000
- Beban Oksigen 6 m ³	9.922.235.200	7.341.891.200
- Beban Oksigen 1 m ³	0	739.840.000
- Beban Alkes&Bahan Medis Habis Pakai E- Kat	2.860.802.764	2.643.613.740
- Beban Alkes&Bahan Medis Habis Pakai Non E-Kat	2.384.554.131	4.802.327.703
- Beban Alat&Bahan Medis Habis Pakai Dental	22.172.876	29.993.810
- Beban Bahan Habis Pakai Laboratorium	2487862315	2.499.053.223
- Beban Bahan Radiologi	490.159.350	461.843.250
- Beban Reagensia PCR	6.863.000	6.057.000
- Beban Penggantian Kebutuhan Darah	1.323.000.000	1.310.400.000

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

– Beban Pengadaan CAPD	75.044.880	295.971.299
– Beban Bahan PPI	599.019.375	599.985.375
– Beban Bahan Pembersih	170.638.500	169.519.500
– Beban Bahan Pembersih Laundry	335.890.846	249.102.565
– Beban Bahan CSSD	153.782.119	209.960.259
– Beban Bahan Peralatan Rumah Tangga	210.245.500	225.000.000
– Beban Bahan Gorden	249.616.955	87.423.600
– Beban Bahan Promosi RS	-	4.974.000
– Beban Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	2.235.749.100	1.918.077.500
– Beban Bahan Makanan Penjaga Malam	262.244.970	250.703.700
– Beban ATK	200.664.475	182.982.700
– Beban Kertas dan Cover	209.210.000	174.943.500
– Beban Penggandaan	306.126.200	291.999.500
– Beban Bahan Cetak	698.810.500	552.625.500
– Beban Makan Minum Kegiatan Audit Keuangan	4.550.000	4.550.000
– Beban Makan Minum Kegiatan Penyegaran Ilmiah	8.400.000	8.425.000
– Beban Makan Minum Dokter Mitra	122.400.000	111.330.000
– Beban Makan Minum Keg. Audit Keperawatan	-	1.800.000
– Beban Makan Minum Rapat	1.565.000	4.515.000
– Beban Perangko dan Meterai	7.229.000	8.419.500
Jumlah Beban Persediaan	34.449.276.542	32.778.136.581

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

3) Beban Jasa tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023 /reklas
– Beban Honor Tim Pelaksana Kegiatan	25.150.000	37.400.000
– Beban Honorarium Tim Pelaksana Keg (SIMDA)	3.150.000	
– Beban Pelayanan Rohani	6.000.000	6.000.000
– Beban Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan	3.988.732.750	3.803.490.250
– Beban Jasa Medis	14.837.696.974	20.423.637.117
– Beban Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	164.950.739	21.360.000
– Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN	8.761.556	60.397.150
– Beban Iuran Jaminan Kematian Non ASN	10.951.980	0
– Beban Gaji Non ASN - Tenaga Administrasi dan PHL	747.465.400	413.457.000
– Beban Jasa Pihak Kebersihan	880.500.000	876.000.000
– Beban Jasa Pihak Keamanan	342.000.000	342.000.000
– Beban Gaji Tenaga Supir	24.321.000	49.614.840
– Beban Gaji Non ASN - Tenaga Mekanik dan Listrik	24.321.000	24.321.000
– Beban Gaji Non ASN - Tenaga Juru Masak	48.642.000	77.016.500
– Beban Jasa Audit Keuangan	49.000.000	49.000.000
– Beban Administrasi Bank	750.000	750.000
– Beban Jasa Kontribusi Pelatihan / Webinar	4.480.000	6.750.000
– Beban Kalibrasi	236.643.590	181.327.824
– Beban Penguburan Limbah B3	1.228.085.000	866.625.760
– Beban Telpon	15.254.595	15.282.161
– Beban Air	276.419.000	327.050.550
– Beban Listrik	895.462.959	1.304.583.600
– Beban Internet	43.867.900	4.5059.342
– Beban Pajak, Bea dan Perijinan	26.177.957	27.984.795
– Beban Pemeliharaan Alat Angkut	84.372.500	93.805.000
– Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan RT	23.977.000	41.252.400

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

- Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Kedokteran	139.168.914	181.212.220
- Beban Pemeliharaan Komputer, Printer, Scanner	25.000.000	37.200.000
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Rumah Dinas	190.838.380	338.964.794
- Beban Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	90.154.000	115.529.000
- Beban Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	270.500.000	198.481.320
- Beban Pemeliharaan Incenerator	-	160.819.020
- Beban Pemeliharaan Instalasi Pembangkit Listrik	68.883.000	72.872.000
- Beban Pemeliharaan Telepon, Internet	9.800.000	13.525.000
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.190.000	10.290.000
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Antar Jenazah	102.036.662	0
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	382.708.673	393.664.224
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	345.736.498	769.735.189
- Beban Sewa	108.174.000	79.500.000
- Beban Kerjasama Hemodialisa	2.229.449.200	3.451.032.000
- Beban Pemeriksaan Air dan Kualitas Udara	31.513.200	32.176.400
- Beban Kerjasama Apotek Pelengkap	1.229.602.776	2.203.045.164
- Beban Kerjasama Dokter PPDS	480.000.000	480.000.000
- Beban Kerjasama Fisikawan Medis	36.924.000	-
- Beban Pengembangan SIMRS	119.325.000	-
- Beban TL Badge	6.899.100	-
- Beban Pemantauan Mutu	4.500.000	-
- Beban Kegiatan e-BLUD	35.801.226	65.403.434
- Belum dapat dijelaskan	(60.605.717)	0
Jumlah Beban Jasa	29.854.732.813	37.697.615.054

4) Beban Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

BLUD RSUD RUTENG KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023 /reklas
- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.655.274.152	16.383.346.357
- Beban Penyusutan Gedung Bangunan	4.076.005.412	3.715.641.414
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	270.911.820	270.911.897
- Beban Penyisihan Piutang	55.041.600	55.041.600
- Beban Amortisasi	4.853.430	-
Jumlah Penyusutan, Amortisasi dan Penyisihan	22.062.086.414	20.424.941.268

4. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

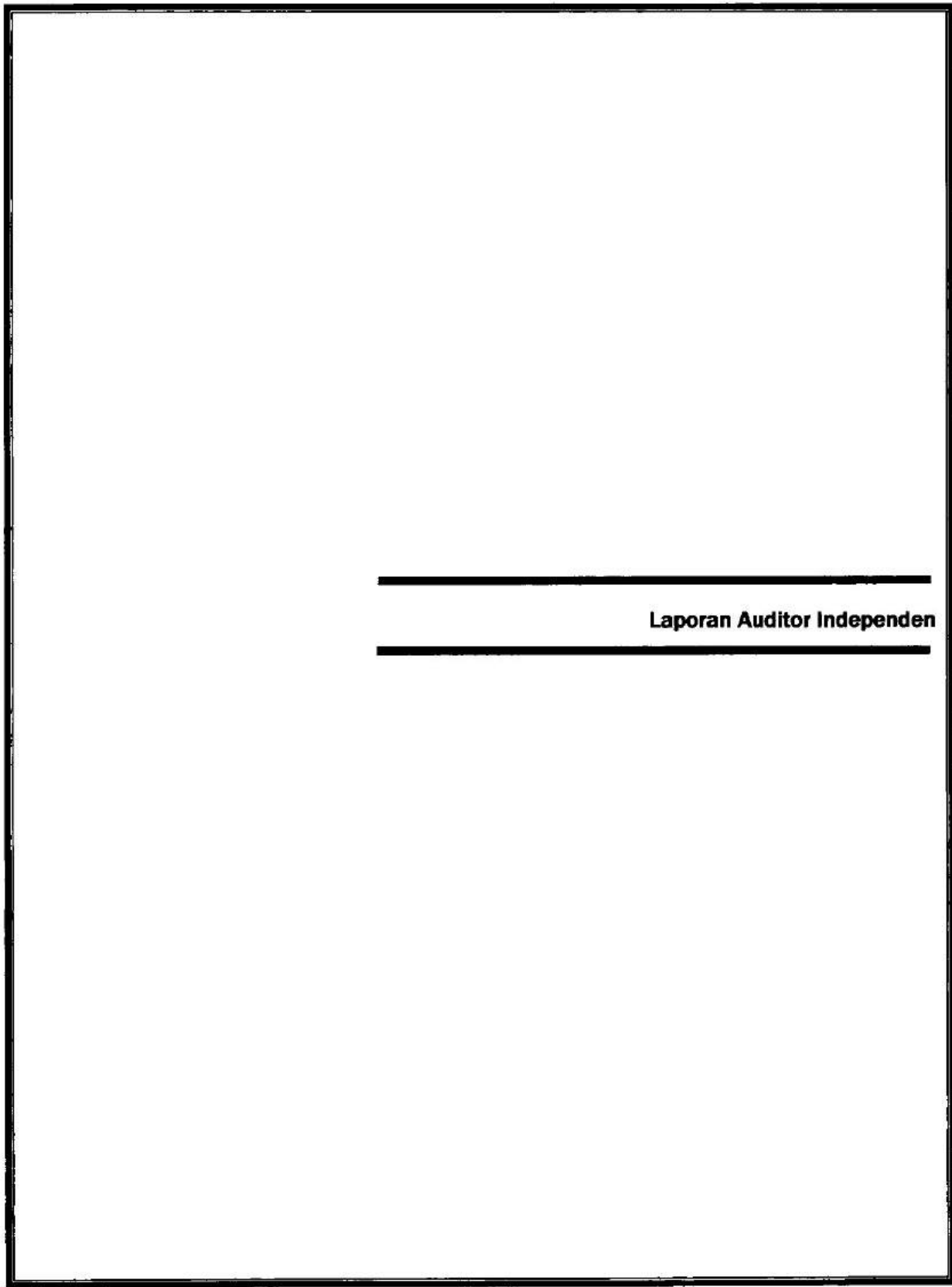
Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca 31 Desember 2024 yang memerlukan penyesuaian atas penyajian angka - angka laporan keuangan tahun 2024.

5. GOING CONCERN

Tidak terdapat indikasi bahwa kelangsungan hidup RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai dimasa yang akan datang diragukan.

6. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit (Perusahaan). Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai bersamaan dengan penerbitan laporan auditor independen tanggal 4 Maret 2025.



Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00036/2.0925/AU.5/11/1881-1/1/III/2025

Kepada Yth,
Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai ("Rumah Sakit"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00063/2.0938/AU.5/11/0789-5/1/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

(Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.


Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Rumah Sakit.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

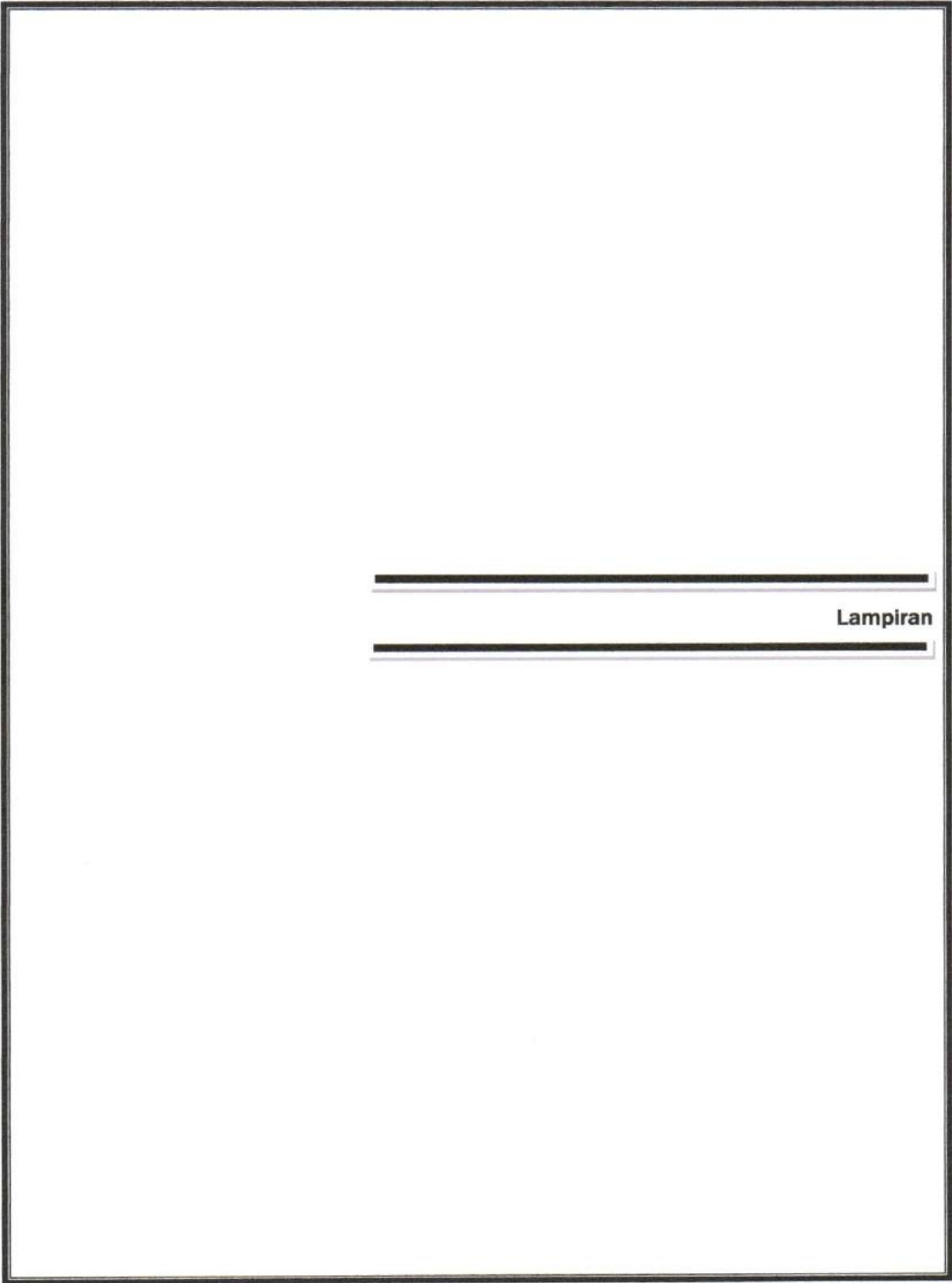
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Tangerang, 04 Maret 2025


KANTOR AKUNTAN PUBLIK
* SUKARDI HASAN & REKAN *

Pande Putu Agus Eka Pertama, Ak. M.Acc. CA, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1881



Lampiran



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG

DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

PER 31 DESEMBER 2024

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2024
		sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	
1	Tanah	6.711.250.000	-	6.711.250.000	-	-	-	6.711.250.000
2	Peralatan dan Mesin	135.623.625.318	5.363.016.130	140.986.641.448	81.634.388.874	18.015.638.150	99.650.027.024	41.336.614.424
2.2	Alat-alat berat	49.000.000	-	49.000.000	8.875.000	4.500.000	13.375.000	35.625.000
2.2.1	Alat-Alat Besar Darat	49.000.000	-	49.000.000	8.875.000	4.500.000	13.375.000	35.625.000
	Mesin Proses	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
	Mesin Pencaca Sampah	45.000.000	-	45.000.000	4.875.000	4.500.000	9.375.000	35.625.000
2.3	Alat-Alat Angkutan	5.068.009.124	387.800.000	5.455.809.124	3.815.157.590	429.317.486	4.244.475.076	1.211.334.048
2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.068.009.124	387.800.000	5.455.809.124	3.815.157.590	429.317.486	4.244.475.076	1.211.334.048
	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.600.065.000	387.800.000	1.987.865.000	1.292.178.095	150.900.000	1.443.078.095	544.786.905
	Kendaraan Bermotor khusus	3.251.814.124	-	3.251.814.124	2.373.246.043	285.047.486	2.638.293.529	613.520.595
	Kendaraan Bermotor beroda Dua	216.130.000	-	216.130.000	149.733.452	13.370.000	163.103.452	53.026.548
2.4	Alat-Alat Bengkel dan Alat ukur	1.840.000	-	1.840.000	1.840.000	-	1.840.000	-
	Alat Ukur	1.840.000	-	1.840.000	1.840.000	-	1.840.000	-
	Alat Timbangan/biora	1.840.000	-	1.840.000	1.840.000	-	1.840.000	-
2.5	Alat-Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
	Nihil	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Alat Kantor da Rumah Tangga	8.205.284.324	756.714.144	8.961.998.468	5.275.011.749	1.402.043.531	6.677.055.280	2.284.943.188
2.6.1	Alat Kantor	581.640.700	65.675.000	647.315.700	443.439.951	60.927.700	504.367.651	142.948.049
	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	217.547.200	-	217.547.200	209.401.366	3.000.000	212.401.366	5.145.834
	Alat kantor lainnya	364.093.500	65.675.000	429.768.500	234.038.585	57.927.700	291.966.285	137.802.215
2.6.2	Alat Rumah Tangga	4.887.652.268	-	4.887.652.268	2.898.628.386	724.178.517	3.622.806.903	1.264.845.365
	Meubeleur	1.491.418.354	-	1.491.418.354	996.585.918	156.904.404	1.153.490.322	337.928.032
	Alat pembersih	2.905.635.000	-	2.905.635.000	1.434.733.667	551.984.000	1.986.717.667	918.917.333
	Alat pendingin	102.779.000	-	102.779.000	102.779.000	-	102.779.000	0

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2024
		sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	
	Alat Dapur	14.430.550	-	14.430.550	14.242.958	187.592	14.430.550	-
	Alat Rumah Tangga lainnya	373.389.364	-	373.389.364	350.286.843	15.102.521	365.389.364	8.000.000
2.6.3	Peralatan Kantor	2.679.156.356	691.039.144	3.370.195.500	1.876.822.351	616.223.374	2.493.045.725	877.149.775
	Personel Komputer	2.050.611.410	521.020.000	2.571.631.410	1.533.950.281	449.712.160	1.983.662.442	587.968.969
	Personal Mini Komputer	67.656.118	-	67.656.118	67.581.565	74.553	67.656.118	(0)
	Peralatan Personal Komputer	560.888.828	170.019.144	730.907.972	275.290.505	166.436.661	441.727.165	289.180.807
2.6.4	Meja dan Kursi kerja/Rapat pejabat	56.835.000	-	56.835.000	56.121.061	713.939	56.835.001	(1)
	Meja Kerja pejabat	56.835.000	-	56.835.000	56.121.061	713.939	56.835.001	(1)
2.7	Alat studio dan komunikasi	205.294.000	-	205.294.000	198.877.333	2.200.000	201.077.333	4.216.667
2.7.1	Alat Studio	25.500.000	-	25.500.000	25.500.000	-	25.500.000	-
	Peralatan studio Visual	25.500.000	-	25.500.000	25.500.000	-	25.500.000	-
2.7.2	Alat komunikasi	179.794.000	-	179.794.000	173.377.333	2.200.000	175.577.333	4.216.667
	Alat intercom	11.000.000	-	11.000.000	4.583.333	2.200.000	6.783.333	4.216.667
	Alat Komunikasi Telephone	168.794.000	-	168.794.000	168.794.000	-	168.794.000	-
2.8	Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan	121.132.286.860	4.218.501.986	125.350.788.846	71.593.352.457	16.160.977.323	87.754.329.780	37.596.459.066
2.8.1	Alat Kedokteran	74.340.336.943	3.061.154.610	77.401.491.553	57.615.419.665	7.308.544.810	64.923.964.475	12.477.527.078
	1 Alat Kedokteran umum	58.484.263.206	3.061.154.610	61.545.417.816	42.528.806.347	6.712.520.112	49.241.326.459	12.304.091.357
	2 Alat kedokteran Bagian penyakit dalam	1.635.782.988	-	1.635.782.988	1.635.782.988	-	1.635.782.988	0
	3 Alat Kedokteran Anak	1.820.580.354	-	1.820.580.354	1.749.505.354	71.075.000	1.820.580.354	(0)
	4 Poliklinik Set	16.790.000	-	16.790.000	16.790.000	-	16.790.000	-
	5 Penderita Cacat Tubuh	7.287.000	-	7.287.000	7.287.000	-	7.287.000	-
	6 Alat kedokteran Jantung	626.146.700	-	626.146.700	626.146.700	-	626.146.700	-
	7 Alat kedokteran gigi	577.713.207	-	577.713.207	577.713.207	-	577.713.207	-
	8 Alat kedokteran gawat Darurat	112.000.000	-	112.000.000	112.000.000	-	112.000.000	-
	9 Alat kedokteran keluarga bencana	100.313.804	-	100.313.804	100.313.804	-	100.313.804	-
	10 Alat kedokteran mata	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
	11 Alat kedokteran THT	321.840.674	-	321.840.674	321.840.674	-	321.840.674	(0)
	12 Alat Farmasi	284.627.500	-	284.627.500	247.810.500	36.817.000	284.627.500	0

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2024
		sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	
	13 Alat kedokteran bedah	8.827.694.409	-	8.827.694.409	8.209.218.596	445.040.091	8.654.258.688	173.435.721
	14 Alat kesehatan kebidanan dan penyakit k	1.524.797.101	-	1.524.797.101	1.481.704.494	43.092.607	1.524.797.101	-
2.8.2	Alat Kesehatan	46.791.949.917	1.157.347.376	47.949.297.293	13.977.932.792	8.852.432.513	22.830.365.305	25.118.931.988
	1 Alat kesehatan perawatan	46.791.949.917	1.157.347.376	47.949.297.293	13.977.932.792	8.852.432.513	22.830.365.305	25.118.931.988
	2 Cenral Oksigen	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Alat laboratorium	688.744.010	-	688.744.010	684.821.619	-	684.821.619	3.922.391
2.9.1	Unit-Unit Labororium	666.244.010	-	666.244.010	662.321.619	-	662.321.619	3.922.391
	1 Alat labororium Microbiologi	10.500.000	-	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-
	2 Alat labororium patologi	127.000.000	-	127.000.000	127.000.000	-	127.000.000	-
	3 Alat labororium Microbiologi lainnya	344.361.760	-	344.361.760	344.361.760	-	344.361.760	-
	4 Alat Labororium Hematologi	14.500.000	-	14.500.000	14.500.000	-	14.500.000	-
	5 Alat labororium Bahan bangunan kons	2.575.000	-	2.575.000	2.575.000	-	2.575.000	-
	6 Alat Labororium Mekanik Tanah dan ba	167.307.250	-	167.307.250	163.384.859	-	163.384.859	3.922.391
2.9.2	Alat peraga/praktek sekolah	22.500.000	-	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	-
	Bidang studi: IPA Menengah	22.500.000	-	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	-
2.10	Alat-alat persenjataan keamanan	273.167.000	-	273.167.000	56.453.126	16.599.810	73.052.936	200.114.064
2.10.5	Alat keamanan dan perlindungan	273.167.000	-	273.167.000	56.453.126	16.599.810	73.052.936	200.114.064
	Alat Bantu keamanan	273.167.000	-	273.167.000	56.453.126	16.599.810	73.052.936	200.114.064
	Cctv	273.167.000	-	273.167.000	56.453.126	16.599.810	73.052.936	200.114.064
3	Gedung dan Bangunan	119.279.283.719	-	119.279.283.719	17.430.643.444	3.715.641.414	21.146.284.858	98.132.998.861
3.11	Bangunan Gedung	117.990.558.519	-	117.990.558.519	17.148.399.353	3.689.866.910	20.838.266.263	97.152.292.256
3.11.1	Bangunan Gedung Tempat kerja	117.474.608.219	-	117.474.608.219	17.046.349.375	3.679.547.904	20.725.897.279	96.748.710.940
3.11.1.1	Bangunan Gedung Kantor	1.919.182.677	-	1.919.182.677	312.135.854	38.383.654	350.519.508	1.568.663.169
	Bangunan Gedung Kantor	63.318.670	-	63.318.670	16.567.840	1.266.373	17.834.214	45.484.456
	Bangunan gedung kantor permanen	1.186.364.007	-	1.186.364.007	191.795.514	23.727.280	215.522.794	970.841.213
	Bangunan gedung kantor permanen	669.500.000	-	669.500.000	103.772.500	13.390.000	117.162.500	552.337.500
3.11.1.2	Bangunan Gudang	128.300.000	-	128.300.000	23.307.833	2.566.000	25.873.833	102.426.167
	Bangunan Gudang (Gudang Logistik)	128.300.000	-	128.300.000	23.307.833	2.566.000	25.873.833	102.426.167

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2024
		sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	
3.11.1.3	Bangunan Gudang untuk bengkel	1.489.610.000	-	1.489.610.000	151.787.684	29.792.200	181.579.884	1.308.030.116
	Bangunan Ruang Oksigen	75.960.000	-	75.960.000	30.510.600	1.519.200	32.029.800	43.930.200
	Bangunan IPRS/bengkel	100.300.000	-	100.300.000	40.287.167	2.006.000	42.293.167	58.006.833
	Bangunan Genset	1.313.350.000	-	1.313.350.000	80.989.917	26.267.000	107.256.917	1.206.093.083
3.11.1.4	Bangunan Gedung Instalasi	2.666.646.000	-	2.666.646.000	530.982.356	53.332.920	584.325.276	2.082.320.724
	Bangunan gedung IPAL	1.969.730.000	-	1.969.730.000	397.228.883	39.394.600	436.623.483	1.533.106.517
	Bangunan gedung Instalasi Apotik	408.378.000	-	408.378.000	98.691.350	8.167.560	106.858.910	301.519.090
	Bangunan gedung Instalasi sampah	288.538.000	-	288.538.000	35.072.123	5.770.760	40.842.883	247.695.117
3.11.1.5	Bangunan Gedung Laboratorium	116.050.067	-	116.050.067	47.408.758	1.677.588	49.086.346	66.963.721
	Laboratorium RSUD	32.170.667	-	32.170.667	32.170.667	-	32.170.667	-
	Laboratorium IPAL	83.879.400	-	83.879.400	15.238.091	1.677.588	16.915.679	66.963.721
3.11.1.6	Bangunan kesehatan	110.477.212.885	-	110.477.212.885	15.774.322.943	3.540.243.411	19.314.566.354	91.162.646.531
	Bangunan Laundry	184.850.000	-	184.850.000	74.248.083	3.697.000	77.945.083	106.904.917
	Bangunan kesehatan lainnya	294.280.000	-	294.280.000	118.202.467	5.885.600	124.088.067	170.191.933
	Ruang pertemuan lama	53.690.000	-	53.690.000	21.565.483	1.073.800	22.639.283	31.050.717
	Bangunan Tanki BBM	9.010.000	-	9.010.000	3.619.017	180.200	3.799.217	5.210.783
	Kamar operasi	319.470.000	-	319.470.000	128.320.450	6.389.400	134.709.850	184.760.150
	Ruang isolasi kelas I	277.770.000	-	277.770.000	100.304.283	5.555.400	105.859.683	171.910.317
	Bangunan dapur lama	48.135.167	-	48.135.167	48.135.167	-	48.135.167	-
	Bangunan VIP A	563.052.048	-	563.052.048	160.507.358	11.261.041	171.768.399	391.283.649
	Bangunan Logistik	127.520.000	-	127.520.000	51.220.533	2.550.400	53.770.933	73.749.067
	Ruang Angrek	384.846.920	-	384.846.920	131.393.539	7.696.938	139.090.478	245.756.442
	Ruang Bedah	311.540.000	-	311.540.000	125.135.233	6.230.800	131.366.033	180.173.967
	Ruang Teratai	239.256.645	-	239.256.645	93.755.800	4.785.133	98.540.933	140.715.712
	Ruang ICU	245.721.883	-	245.721.883	97.905.997	4.914.438	102.820.435	142.901.448
	Rumah Mesin/Genzet	750.000.000	-	750.000.000	256.250.000	15.000.000	271.250.000	478.750.000
	Ruang VIP B	1.014.420.148	-	1.014.420.148	290.566.168	20.288.403	310.854.571	703.565.577
	Selasar UTD &VCT	45.700.000	-	45.700.000	14.700.167	914.000	15.614.167	30.085.833

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2024
		sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	
	Ruang Bayl	455.264.000	-	455.264.000	137.337.973	9.105.280	146.443.253	308.820.747
	Dapur Baru	71.298.000	-	71.298.000	71.298.000	-	71.298.000	-
	Gedung kantor RSUD	145.360.000	-	145.360.000	40.943.067	2.907.200	43.850.267	101.509.733
	Gudang obat	333.444.298	-	333.444.298	67.244.600	6.668.886	73.913.486	259.530.812
	IGD	3.582.304.572	-	3.582.304.572	702.220.859	71.646.091	773.866.950	2.808.437.622
	Perluasan gedung Rekam medik	71.573.000	-	71.573.000	13.002.428	1.431.460	14.433.888	57.139.112
	poli Rawat jalan	7.856.035.400	-	7.856.035.400	7.424.302.336	1.532.275.786	8.956.578.122	(1.100.542.722)
	Kanopi Kamar jenasah	228.490.695	-	228.490.695	206.858.045	45.698.139	252.556.184	(24.065.489)
	Kamar jenasah	697.700.500	-	697.700.500	84.888.894	13.954.010	98.840.904	598.859.596
	Bilik batuk	5.000.000	-	5.000.000	2.225.000	500.000	2.725.000	2.275.000
	Gedung Nifas	7.690.958.693	-	7.690.958.693	628.094.960	153.819.174	781.914.134	6.909.044.559
	Gedung OK	11.799.622.495	-	11.799.622.495	963.635.837	235.992.450	1.199.628.287	10.599.994.208
	Gedung Rawat Jalan	434.296.000	-	434.296.000	26.781.587	8.685.920	35.467.507	398.828.493
	Kanopi	200.000.000	-	200.000.000	12.333.333	4.000.000	16.333.333	183.666.667
	Rehab Gerbang	76.184.000	-	76.184.000	4.698.013	1.523.680	6.221.693	69.962.307
	Ruangan Covid-19	214.000.000	-	214.000.000	13.196.667	4.280.000	17.476.667	196.523.333
	Ruang Kamar Mandi	53.500.000	-	53.500.000	3.299.167	1.070.000	4.369.167	49.130.833
	Gedung Rawat Anak	11.704.723.250	-	11.704.723.250	721.791.267	234.094.465	955.885.732	10.748.837.518
	Gedung Radiologi	9.685.159.046	-	9.685.159.046	597.251.475	193.703.181	790.954.655	8.894.204.391
	Gedung Farmasi	10.361.657.612	-	10.361.657.612	646.520.586	207.233.152	853.753.738	9.507.903.874
	Gedung Rawat Inap	9.751.810.621	-	9.751.810.621	607.475.906	195.036.212	802.512.118	8.949.298.503
	Renovasi Ruang Lab	195.989.700	-	195.989.700	8.166.238	3.919.794	12.086.032	183.903.669
	Bangunan Kesehatan	348.540.000	-	348.540.000	14.522.500	6.970.800	21.493.300	327.046.700
	Bangunan Kesehatan	12.524.713.050	-	12.524.713.050	521.863.044	250.494.261	772.357.305	11.752.355.745
	Bangunan Kesehatan	12.546.963.600	-	12.546.963.600	522.790.150	250.939.272	773.729.422	11.773.234.178
	Bangunan kesehatan NICU	3.884.126.542	-	3.884.126.542	12.957.068	6.473.544	19.430.612	3.864.695.930
	Rehab Ruangan ICU Lama	344.610.000	-	344.610.000	1.148.700	574.350	1.723.050	342.886.950
	Penambahan Aset Ruangan VIP A dan	60.000.000	-	60.000.000	200.000	100.000	300.000	59.700.000
	Pemasangan Karet Selasar	149.625.000	-	149.625.000	997.500	498.750	1.496.250	148.128.750
	Drainase	135.000.000	-	135.000.000	450.000	225.000	675.000	134.325.000
3.11.1.9	Bangunan Gedung Tempat pertemuan	434.601.590	-	434.601.590	165.872.940	8.692.032	174.564.972	260.036.618
	Ruang Pertemuan	434.601.590	-	434.601.590	165.872.940	8.692.032	174.564.972	260.036.618
3.11.1.13	Bangunan Gedung untuk pos jaga	20.000.000	-	20.000.000	4.433.333	400.000	4.833.333	15.166.667
	Pos Satpam	20.000.000	-	20.000.000	4.433.333	400.000	4.833.333	15.166.667

Kode	Nama Barang	Nilai Perolehan			Akm Penyusutan			Nilai Buku per 31-12-2024
		sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	sd 31-12 2023	2024	sd.31-12-2024	
3.11.1.14	Bangunan Gedung Garasi/pool	38.647.000	-	38.647.000	7.020.872	772.940	7.793.812	30.853.188
	Tembok penahan dan lantai rabat	38.647.000	-	38.647.000	7.020.872	772.940	7.793.812	30.853.188
3.11.1.27	Bangunan Gedung kerja Lainnya	139.359.000	-	139.359.000	25.316.885	2.787.180	28.104.065	111.254.935
	Konstruksi Pagar	139.359.000	-	139.359.000	25.316.885	2.787.180	28.104.065	111.254.935
3.11.1.29	Bangunan tempat pembakaran	44.999.000	-	44.999.000	3.749.917	899.980	4.649.897	40.349.103
	Bangunan Pembakaran sampah	44.999.000	-	44.999.000	3.749.917	899.980	4.649.897	40.349.103
3.11.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	515.950.300	-	515.950.300	102.049.978	10.319.006	112.368.984	403.581.316
3.11.2.3	Rumah Negara Gol III	515.950.300	-	515.950.300	102.049.978	10.319.006	112.368.984	403.581.316
	Rumah dinas	415.950.300	-	415.950.300	83.883.311	8.319.006	92.202.317	323.747.983
	Ruang praktek dokter spesialis bedah	100.000.000	-	100.000.000	18.166.667	2.000.000	20.166.667	79.833.333
3.12	Monumen	1.288.725.200	-	1.288.725.200	282.244.091	25.774.504	308.018.595	980.706.605
3.12.1	Bangunan Bersejarah	1.288.725.200	-	1.288.725.200	282.244.091	25.774.504	308.018.595	980.706.605
3.12.1.1	Istana Peringatan	694.085.000	-	694.085.000	233.681.808	13.881.700	247.563.508	446.521.492
3.12.1.2	Patung dr.Ben Mboi	594.640.200	-	594.640.200	48.562.283	11.892.804	60.455.087	534.185.113
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	4.705.352.864	-	4.705.352.864	1.203.713.610	270.911.821	1.474.625.431	3.230.727.433
4.14	Bangunan Air/Irigasi	199.972.476	-	199.972.476	97.069.973	16.664.366	113.734.339	86.238.137
4.14.8	Bangunan Air	199.972.476	-	199.972.476	97.069.973	16.664.366	113.734.339	86.238.137
4.14.8.2	Bangunan Air Tawar	199.972.476	-	199.972.476	97.069.973	16.664.366	113.734.339	86.238.137
4.15	Instalasi	4.505.380.388	-	4.505.380.388	1.106.643.637	254.247.455	1.360.891.092	3.144.489.296
4.15.7	Instalasi pertanahan	4.505.380.388	-	4.505.380.388	1.106.643.637	254.247.455	1.360.891.092	3.144.489.296
4.15.7.1	Instalasi Radar	2.082.978.488	-	2.082.978.488	938.582.777	173.581.471	1.112.164.249	970.814.239
	Instalasi jaringan listrik	2.422.401.900	-	2.422.401.900	168.060.860	80.665.983	248.726.843	2.173.675.057
5	Konstruksi dalam pelaksanaan	10.467.114.422	-	10.467.114.422	-	-	-	10.467.114.422
	JUMLAH ASET TETAP	276.786.626.323	5.363.016.130	282.149.642.453	100.268.745.928	22.002.191.385	122.270.937.313	159.878.705.140

Rincian Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024

No	Satuan Pendidikan	No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	SD	1	UPTD SDI CUNCA LAWIR	66,00
		2	UPTD SDI DONGANG	1.595.000,00
		3	UPTD SDI KONGGANG	1.037.270,00
		4	UPTD SDI LAO	215.432,00
		5	UPTD SDI LEDA	400.623,00
		6	UPTD SDI WOANG	2.717.811,44
		7	UPTD SDI BEA KAKOR	351.157,00
		8	UPTD SDI KUSU	378.407,00
		9	UPTD SDI LAJA	484.872,00
		10	UPTD SDI LUMU	315.945,37
		11	UPTD SDI MELER	403.848,00
		12	UPTD SDI RANDONG	2.285.967,00
		13	UPTD SDI WASE WENGKE	485.400,00
		14	UPTD SDN ANAM	339.598,00
		15	UPTD SDN GULUNG	672.083,00
		16	UPTD SDN SAMA JAYA	27,00
		17	UPTD SDI GELONG	135.052,00
		18	UPTD SDI GONGGONG	994.474,00
		19	UPTD SDI NATI	62.198,00
		20	UPTD SDI WATU WERI	1.635.369,00
		21	UPTD SDI WERI PATENG	361.619,00
		22	UPTD SDN SUBU	58.009.495,00
		23	UPTD SDI DIMPONG	4.986,00
		24	UPTD SDI GOLO TEBO	820.000,00
		25	UPTD SDI LENTENG	422.000,00
		26	UPTD SDI MUWUR	2.181.760,00
		27	UPTD SDI NTALA	568.551,00
		28	UPTD SDI PAU	100.000,00
		29	UPTD SDI RANGKANGKALO	1.110.778,00
		30	UPTD SDN WUNIS	250.000,00
		31	UPTD SDN WATU LANDO	89.478,00
		32	UPTD SDI KENDA	1.728.068,02
		33	UPTD SDI LIDANG	191,00
		34	UPTD SDI LING	231.127,00
		35	UPTD SDI MBONGOS	39.162,00
		36	UPTD SDI MENDO	229.822,00
		37	UPTD SDI METI	19.357,00
		38	UPTD SDI NORANG	347.629,00
		39	UPTD SDI RANGGI	7.450,00
		40	UPTD SDI ROBO	136.297,00
		41	UPTD SDI TIMUNG	1.211.305,00
		42	UPTD SDI WELONG	1.131.188,00
		43	UPTD SDN WETOK	1.545,00
		44	UPTD SDN WADE	3.600.000,00
		45	UPTD SDN BENGKANG	820.518,00
		46	UPTD SDI JATI	1.334,00
		47	UPTD SDI MAHIMA	50.200,00
		48	UPTD SDI NGGORANG	488.467,00
		49	UPTD SDI WAE BELANG	2.213.513,00
		50	UPTD SDI WATU BAUR	14.283,00

Rincian Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024

No	Satuan Pendidikan	No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
		51	UPTD SDN REO II	866.617,00
		52	UPTD SDN OJANG	58.836,00
		53	UPTD SDN GOLO WETIK	648.873,00
		54	UPTD SDI BAJAK RANA	490.048,00
		55	UPTD SDI NGGALAK	760.557,96
		56	UPTD SDI TURENG	6.526.195,00
		57	UPTD SDI WAE WUA	13.812.356,00
		58	UPTD SDI WANGKAL	3.601.355,00
		59	UPTD SDI WONTONG	30.000,00
		60	UPTD SDN RABOK	1.061,00
		61	UPTD SDI BEA NONING	3.468.437,36
		62	UPTD SDI KUWU	900.000,00
		63	UPTD SDI LANDO	417,00
		64	UPTD SDI LEMPIS	592,00
		65	UPTD SDI LONGKO	38.202.168,00
		66	UPTD SDI LUJANG	7.914,00
		67	UPTD SDI NIMBONG	1.843.924,00
		68	UPTD SDI PERAK	122.153,00
		69	UPTD SDI RAKAS	1.336.475,00
		70	UPTD SDN GUMBANG	73.491,00
		71	UPTD SDN CUMPE	27.253,00
		72	UPTD SDI LIANG WAKAL	0,37
		73	UPTD SDI BEA DENGGER	176.527,00
		74	UPTD SDI HESO	325.863,00
		75	UPTD SDI WAE NAMUT	20.800,00
		76	UPTD SDI WAE PAKU	5.099.375,00
		77	UPTD SDI WAE RENCA	510.720,00
		78	UPTD SDN GOLO MONDO	103.464,00
		79	UPTD SDN CEKOK	126.541,00
		80	UPTD SDN MEDA	498.212,00
		81	UPTD SDN MADONA	6.986,00
		82	UPTD SDI GOLO LAMBO	3.663.567,00
		83	UPTD SDI ITENG II	148.461,00
		84	UPTD SDI KEKA	14.272,00
		85	UPTD SDI LOLANG	1.369.033,00
		86	UPTD SDI MOCOK	378.980,00
		87	UPTD SDI NAMPONG	25.385,00
		88	UPTD SDI PONGMELENG	1.120.537,00
		89	UPTD SDI POPOK	9.668,01
		90	UPTD SDI RAPAS	82.100,00
		91	UPTD SDI RUA	356.401,00
		92	UPTD SDI TADO	1.608.655,00
		93	UPTD SDI TAL	645.719,00
		94	UPTD SDI WUKULAKU	664.087,00
		95	UPTD SDI LADA	3.558.757,00
		96	UPTD SDN ULU BELANG	131.622,00
		97	UPTD SDN WEJANG KALO	377.939,00
		98	UPTD SDN ARA	1.000,00
		99	UPTD SDN ULU KOAK	826.547,00
		100	UPTD SDN TADO KEMBO	170.000,00
		101	UPTD SDN MANO	337.126,00

Rincian Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024

No	Satuan Pendidikan	No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
		102	UPTD SDI BANGKAKELI	14.169.994,00
		103	UPTD SDI BEA TENGA	102,00
		104	UPTD SDI BORIK	29.683,00
		105	UPTD SDI KEKA REJO	9.304.288,00
		106	UPTD SDI KEMBUR	113.007,00
		107	UPTD SDI LABUAN TAUR	1.209.348,00
		108	UPTD SDI LELIT	86.620,00
		109	UPTD SDI LENGGOS	1.734.549,00
		110	UPTD SDI PONGPAHAR	200.209,00
		111	UPTD SDI WAE CEPANG	3.305.164,00
		112	UPTD SDI WATU DALI	4.853.051,00
		113	UPTD SDI WONGKA	129.726,00
		114	UPTD SDN PULAU MULES	1.512.000,00
		115	UPTD SDI SATAR LEGANG	119.950,00
		116	UPTD SDI LOKOM	2.837.239,00
		117	UPTD SDI DANTAR	417.994,00
		118	UPTD SDI KENGGU	30.939,00
		119	UPTD SDI RUANG	32.126,00
		120	UPTD SDI PONGWAKAR	3.000.725,00
		121	UPTD SDI WATU WOHE	38.683,00
		122	UPTD SDI MOWOL	1.680.000,00
		123	UPTD SDI MANDA	55.560,00
		124	UPTD SDI WEJANG RACI	6.087.000,00
		125	UPTD SDI BEA SUHANG	178.804,18
		126	UPTD SDN RANGING	72.283,00
		127	UPTD SDN SINGKUL	761.558,31
			Total SD	237.798.393,02
II	SMP	1	SMP NEGERI 3 SATAR MESE	100,00
		2	SMP NEGERI 1 SATAR MESE	19.502,00
		3	SMP NEGERI 5 SATARMESE	2.105.597,00
		4	SMP NEGERI 10 SATARMESE	11.390,00
		5	SMP NEGERI 12 SATARMESE	38.000,00
		6	SMP NEGERI 11 SATARMESE	309.666,00
		7	SD-SMPN SATAP PONG MELENG	10.150.909,00
		8	SMPN 14 SATARMESE	200.000,00
		9	SMP NEGERI 17 SATARMESE	200.002,59
		10	SMP NEGERI 20 SATARMESE	4.204,30
		11	SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG	1.227.447,00
		12	SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG	18.251.444,00
		13	SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG	50.000,00
		14	SMP NEGERI 3 LANGKE REMBONG	3.793.879,00
		15	SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG	551.900,00
		16	SMPN 6 LANGKE REMBONG	6.046.054,00
		17	SMP NEGERI 1 RUTENG CANCAR	1.620.000,00
		18	SMP NEGERI 7 RUTENG	2.211.770,00
		19	SMP NEGERI 6 RUTENG	1.532.000,00
		20	SMP NEGERI 10 RUTENG	1.154.506,00
		21	SMP NEGERI 11 RUTENG	8.660.000,55
		22	SMP NEGERI 3 CIBAL	1.614.878,31
		23	SMP NEGERI 1 CIBAL	14.750.000,00
		24	SMP NEGERI 7 CIBAL	1.816.000,00

Rincian Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024

No	Satuan Pendidikan	No	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
		25	SMP NEGERI 5 CIBAL	196.479,00
		26	SMP NEGERI 8 CIBAL LADUR	33.236,00
		27	SMP NEGERI 10 CIBAL	848.925,64
		28	SMP NEGERI 1 REOK	9.580.602,00
		29	SMP NEGERI 4 REOK	288.657,00
		30	SMP NEGERI 3 REOK	29.970,00
		31	SD-SMPN SATAP WAE BELANG	42.532,00
		32	SMP NEGERI 7 REOK	188.975,00
		33	SMP NEGERI 1 WAE RII	76.080,00
		34	SMP NEGERI 2 WAE RII	262.404,00
		35	SMP NEGERI 3 WAE RII	992.999,00
		36	SMP NEGERI SATU ATAP ROBO	1.800.000,00
		37	SMP NEGERI 2 SATAR MESE	5.647.061,00
		38	SMP NEGERI 4 SATARMESE	693.356,00
		39	SMP NEGERI 6 SATARMESE	60.386,00
		40	SMP NEGERI SATAP NUCA MOLAS	208,00
		41	SMP NEGERI 8 SATARMESE	1.439.370,00
		42	SMP NEGERI 9 SATARMESE	2.454.982,00
		43	SMPN 13 SATAR MESE	646,00
		44	SMP NEGERI 18 SATARMESE	9.477,00
		45	SMP NEGERI 19 SATARMESE	1.631,10
		46	SMP NEGERI 2 RUTENG-BEOKINA	2.154.947,00
		47	SMP NEGERI 3 RUTENG WATU BENTA/BUAR	358.492,00
		48	SMP NEGERI 4 RUTENG	6.170.623,00
		49	SMP NEGERI SATAP RANGKANG KALO	1.175.475,00
		50	SMP NEGERI 8 RUTENG	404.896,00
		51	SMP NEGERI 12 RUTENG	330.000,00
		52	SMP NEGERI 5 RUTENG	117.397,00
		53	SMP NEGERI 2 REOK	14.591.799,00
		54	SMP NEGERI SATAP LEMARANG	1.810.000,00
		55	SMP NEGERI 5 REOK KILIT	142.746,00
		56	SMP NEGERI 6 REOK	123.641,00
		57	SMP NEGERI 2 CIBAL	636.324,00
		58	SMP NEGERI 6 CIBAL	60.000,00
		59	SMP NEGERI 9 CIBAL GOLO MONDO	66.923,00
		60	SMP NEGERI 9 REOK	721.000,00
			Total SMP	129.831.489,49
III	BOP PAUD	1	TK NEGERI CIBAL	8.436,25
		2	TK NEGERI REO	17.337,06
		3	TK NEGERI CIBAL BARAT	30.912,10
		4	TK NEGERI GOLO JAMBU	6.000,00
		5	TK NEGERI KAJONG	40.000,00
		6	TK NEGERI SATARMESE UTARA	3.289,68
		7	TK NEGERI PAKA	11.140,70
		8	TK NEGERI RAHONG UTARA	44.045,81
			Total BOP PAUD	161.161,60
IV	BOP Kesetaraan	1	KESETARAAN SKB RANDONG	33.000,00
			Total BOP Kesetaraan	33.000,00
TOTAL DANA BOS				367.824.044,11

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penyisihan 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
A. PIUTANG PAJAK		
	Piutang Pajak Hotel	(22.184.474,50)
1	1 Kualitas lancar	(11.675,00)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(2.685.100,00)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(13.187.699,50)
	4 Kualitas Macet	(6.300.000,00)
	Piutang Pajak Restoran	(21.289.326,60)
2	1 Kualitas lancar	(19.875,00)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(5.461.701,60)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(8.782.750,00)
	4 Macet	(7.025.000,00)
3	Piutang Hiburan	(410.250,00)
	1 Diragukan	(410.250,00)
	Piutang Pajak Reklame	(83.705.050,00)
4	1 Kualitas lancar	(13.500,00)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(1.501.300,00)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(31.155.000,00)
	4 Kualitas Macet	(51.035.250,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	(3.081.455,81)
	1 Kualitas lancar	(3.081.455,81)
6	Piutang Pajak Air Tanah	(3.568.322,26)
	1 Kualitas Lancar	(37.941,26)
	2 Kurang Lancar	(3.530.381,00)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(533.740.640,47)
	1 Kualitas lancar	(295.804,87)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(15.160.932,20)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(11.520.000,00)
	4 Kualitas Macet	(506.763.903,40)
8	Piutang PBB-P2	(10.009.474.997,38)
	1 Kualitas lancar	(6.629.455,64)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(312.873.573,00)
	3 Kualitas Ragu-ragu	(2.498.731.297,50)
	4 Kualitas Macet	(7.191.240.671,24)
JUMLAH A		(10.677.454.517,01)
B. Piutang Retribusi		
	Piutang Retribusi Rumah Dinas	(223.780.900,00)
1	1 Kualitas Diragukan	(19.939.950,00)
	2 Kualitas Macet	(203.840.950,00)
2	Piutang Retribusi Shopping Center	(11.254.725,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(2.054.100,00)
	2 Kualitas Macet	(9.200.625,00)
3	Piutang Retribusi Pasar	(2.210.373.766,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(25.092.348,00)
	2 Kualitas Diragukan	(244.926.000,00)
	3 Kualitas Macet	(1.940.355.418,00)
4	Piutang Retribusi Ruko	(86.253.300,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(5.083.800,00)
	2 Kualitas Diragukan	(24.328.500,00)
	3 Kualitas Macet	(56.841.000,00)
5	Piutang Retribusi Pasar Rakyat	(25.497.500,00)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(1.410.000,00)
	2 Kualitas Diragukan	(8.400.000,00)
	3 Kualitas Macet	(15.687.500,00)
JUMLAH B		(2.557.160.191,00)
C. PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH		
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(298.565.913,00)
	1 Kualitas Macet	(298.565.913,00)
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(155.403.920,00)
	1 Kualitas Macet	(155.403.920,00)
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(200.950.297,00)
	1 Kualitas Macet	(200.950.297,00)
4	Dinas Perikanan	(14.883.552,00)
	1 Kualitas Macet	(14.883.552,00)
5	Bagian Umum	(21.244.273,00)
	1 Kualitas Macet	(21.244.273,00)
6	Piutang Bunga Deposito TA. 2012 Dan TA. 2023 Badan Pendapatan	(5.515.068,00)
	1 Kualitas Macet	(5.515.068,00)
7	Piutang Dari Penjualan Kendaraan Badan Pendapatan	(57.078.410,00)
	1 Kualitas Macet	(57.078.410,00)
8	Piutang Sisa Hasil Likuidasi Pd Komodo Jaya	(339.494.500,00)
	1 Kualitas Macet	(339.494.500,00)
9	Piutang BLUD	(254.876.761,00)
	1 Kualitas Lancar	(18.234.523,00)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(1.598.550,00)
	3 Kualitas Macet	(235.043.688,00)
10	Piutang Atas Kelebihan Pembayaran Pph 21 Akibat Selisih Perhitungan PTKP	(450.126,49)
	1 Kualitas Lancar	(450.126,49)
11	Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	(4.865.364,42)
	1 Kualitas Kurang Lancar	(946.323,12)

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024

No	Uraian	Penyisihan 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
	2 Kualitas Kurang Lancar	(3.919.041,30)
12	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	(5.140.412,57)
	1 Kualitas lancar	(5.140.412,57)
13	Piutang Pendapatan Bunga	(12,25)
	1 Kualitas lancar	(12,25)
	Jumlah C	(1.358.468.609,72)
D.	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH	
1	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(67.671,31)
	1 Kualitas Lancar	(67.671,31)
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(7.163.696,17)
	1 Kualitas lancar	(7.163.696,17)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.871.421,43
	1 Kualitas lancar	2.871.421,43
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	585.269,68
	1 Kualitas Lancar	585.269,68
	Jumlah D	(3.774.676,37)
E.	PIUTANG LAINNYA	
1	Piutang Klaim BPJS	(2.052.746,00)
	1 Kualitas Lancar	(2.052.746,00)
	Jumlah E	(2.052.746,00)
	TOTAL	(14.598.910.740,10)

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KOMODO KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 16



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KOMODO

Jalan Pelita No.17 Ruteng, Flores, NTT



(0385) 21295



pdamruteng@yahoo.com



0822.35710425



**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KOMODO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARSELUS SUDIRMAN, SH.
Alamat Kantor : Jl. Pelita No.17 Ruteng, Flores - NTT
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Komodo;
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Komodo telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Komodo telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Komodo tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada Perumda Air Minum Tirta Komodo.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Ruteng, 03 Maret 2025

MARSELUS SUDIRMAN, SH.

Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00029/3.0410/AU.2/04/1624-3/1/III/2025

Yth.

Dewan Pengawas dan Direksi

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Halaman 2

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan



Danang Rahmat Sutono, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.1624

3 Maret 2025



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	3	33.475.189.391	28.400.298.277
Piutang usaha - bersih	2c,4	4.807.526.015	5.150.807.790
Persediaan	2d,5	2.052.644.972	2.730.391.182
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	6	52.937.479	112.718.434
Jumlah aset lancar		40.388.297.857	36.394.215.683
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	2e,7		
Nilai perolehan aset tetap		101.627.903.164	99.793.925.960
Akumulasi penyusutan		(52.222.525.582)	(47.345.689.733)
Aset tetap - bersih		49.405.377.582	52.448.236.227
Aset tak berwujud	8	12.500.000	18.750.000
Jumlah aset tidak lancar		49.417.877.582	52.466.986.227
Jumlah aset		89.806.175.439	88.861.201.910
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pajak	2g,9	99.913.221	367.648.586
Beban masih harus dibayar	10	-	531.069.195
Jumlah kewajiban jangka pendek		99.913.221	898.717.781
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban imbalan pasca kerja	2h,11	1.147.951.605	1.062.189.469
Cadangan dana	12	280.166.173	824.257.613
Jumlah kewajiban jangka panjang		1.428.117.778	1.886.447.082
Jumlah kewajiban		1.528.030.999	2.785.164.863
Ekuitas			
Modal	13	83.667.047.372	83.667.047.372
Cadangan umum		292.220.486	292.220.486
Saldo laba (rugi)		4.318.876.582	2.116.769.189
Jumlah ekuitas		88.278.144.440	86.076.037.047
Jumlah kewajiban dan ekuitas		89.806.175.439	88.861.201.910

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan			
Pendapatan air	2b,14	21.910.612.781	22.298.303.798
Pendapatan non-air	2b,14	2.302.165.158	2.490.905.024
Jumlah pendapatan		24.212.777.939	24.789.208.822
Beban Usaha			
Beban sumber air	2b,15	592.819.742	576.105.228
Beban pegawai	2b,16	12.138.442.803	10.914.773.495
Beban pemeliharaan	2b,17	2.088.120.029	3.564.744.522
Beban penyisihan/ amortisasi/ penyusutan	2b,18	4.883.085.883	5.518.008.497
Beban operasi lainnya	2b,19	3.112.596.903	3.074.446.669
Jumlah beban usaha		22.815.065.360	23.648.078.411
Laba usaha		1.397.712.579	1.141.130.411
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan lain-lain	20	661.713.511	721.374.945
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain		661.713.511	721.374.945
Laba bersih sebelum pajak		2.059.426.090	1.862.505.356
Pajak penghasilan		(354.630.871)	(343.115.252)
Laba bersih setelah pajak		1.704.795.219	1.519.390.104

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai	Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditentukan Statusnya	Modal Hibah	Cadangan Umum	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2023	56.438.465.396	729.977.987	22.673.603.989	292.220.486	102.775.035	80.237.042.893
Koreksi aktuarial	-	-	-	-	113.817.948	113.817.948
Koreksi saldo awal 2023	-	-	-	-	380.786.102	380.786.102
Laba tahun 2023	-	-	-	-	1.519.390.104	1.519.390.104
Penyertaan modal pemda	3.825.000.000	-	-	-	-	3.825.000.000
Saldo Akhir						
31 Desember 2023	60.263.465.396	729.977.987	22.673.603.989	292.220.486	2.116.769.189	86.076.037.047
Koreksi aktuarial	-	-	-	-	103.187.450	103.187.450
Koreksi saldo laba	-	-	-	-	394.124.724	394.124.724
Laba tahun 2024	-	-	-	-	1.704.795.219	1.704.795.219
Penyertaan modal pemda	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir						
31 Desember 2024	60.263.465.396	729.977.987	22.673.603.989	292.220.486	4.318.876.582	88.278.144.440

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2024	2023
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi		
Laba bersih	1.704.795.219	1.519.390.104
Penyesuaian untuk:		
Beban penyusutan dan amortisasi	4.883.085.849	5.074.364.942
Beban penyisihan (pemulihan) piutang	-	(130.883.006)
Selisih laba tahun lalu	394.124.724	380.786.107
Koreksi aktuarial	103.187.450	113.817.948
Perubahan atas aktiva dan kewajiban operasional:		
Penurunan (peningkatan) piutang usaha	343.281.775	(516.598.450)
Penurunan (peningkatan) persediaan	677.746.210	(1.513.889.789)
Penurunan (peningkatan) biaya dibayar dimuka	59.780.955	(74.637.724)
Peningkatan (penurunan) biaya masih harus dibayar	(531.069.195)	(323.930.805)
Peningkatan (penurunan) utang pajak	(267.735.365)	(13.137.515)
Peningkatan (penurunan) kewajiban pasca kerja	85.762.136	57.722.286
Peningkatan (penurunan) cadangan dana	(544.091.440)	(314.311.974)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	6.908.868.318	4.258.692.124
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Peningkatan aset tetap	(1.833.977.204)	(5.765.806.935)
Penurunan (peningkatan) aset lain-lain	-	14.783.750
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(1.833.977.204)	(5.751.023.185)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penyertaan modal	-	3.825.000.000
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	3.825.000.000
Peningkatan (penurunan) kas dan setara kas	5.074.891.114	2.332.668.939
Kas dan setara kas awal tahun	28.400.298.277	26.067.629.338
Kas dan setara kas akhir tahun	33.475.189.391	28.400.298.277

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Komodo Kabupaten Manggarai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 5 April 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai dilaksanakan melalui proses alih status dari bentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang didirikan pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, menjadi bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai Berita Acara Alih Status BPAM menjadi PDAM pada tanggal 5 November 1991. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 tahun 2019 tanggal 2 April 2019, PDAM beralih status menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai dan masih dibidang Usaha Air Minum bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai.

b. Tujuan Perusahaan

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tirta Komodo adalah untuk pelayanan umum kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum yang sehat serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan daerah.

c. Tempat Kedudukan

Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai berkedudukan di Jl. Pelita No. 17 Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan uraian tugas perusahaan didasarkan pada Peraturan Bupati Manggarai Nomor: 38 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Kuasa Pemilik Modal

Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53.370 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-267 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2021-2026, dan Wakil KPM ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/5/2024 periode 2024-2027.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

d. Struktur Organisasi (Lanjutan)

1. Kuasa Pemilik Modal (Lanjutan)

Dengan itu, ditetapkanlah Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, M.A yang menjabat sebagai Bupati Manggarai Kuasa Pemilik Modal.

2. Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: HK/5/2024 Periode 2024-2027 dengan susunan sebagai berikut, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai sebagai Ketua Dewan Pengawas, Kepala Bagian Adm. Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Manggarai sebagai Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota Dewan Pengawas.

3. Direktur

Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai Marselus Sudirman, S.H. ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/273/2021 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Manggarai Periode Tahun 2021 - 2026.

4. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Lingkup Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Komodo Kab. Manggarai dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Natalia Kresensiana Bom, S.E	Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan
Bernadeta Juita, S.E	Kepala Bagian Administrasi & Keuangan
Wilibrodus D. Jeneo, Amd	Kepala Bagian Teknik
Fransiskus R. Lendo	PLt .Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern

5. Data Pegawai

Jumlah pegawai Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2024 adalah 86 orang dengan status karyawan tetap dan karyawan honor masing-masing berjumlah 96 orang.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

1. UMUM (LANJUTAN)

e. Data Pelanggan

Jumlah pelanggan air bersih yang terlayani oleh Perumda Tirta Komodo Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2024 sebanyak 36.278 sambungan langganan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai disusun oleh Manajemen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran Laporan Keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali persediaan yang dinyatakan sebesar nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan atau menjual. Laporan Keuangan disusun menggunakan metode Akruwal kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*Indirect Method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, Investasi, Pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Rupiah.

b. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis akrual).

c. Penilaian Piutang

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah bersihnya, yaitu jumlah keseluruhan setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih yang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan individual masing-masing saldo piutang pada akhir periode. Untuk Piutang Usaha dari rekening air, penyisihan ditentukan dengan mengelompokkan tiap pelanggan berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

c. Penilaian Piutang (Lanjutan)

Besarnya penyisihan piutang usaha ditetapkan berdasarkan Daftar Saldo Rata-rata piutang tak tertagih untuk 2 (dua) tahun yang berakhir pada masing-masing kelompok. Piutang usaha yang berumur di atas dua tahun dapat diusulkan kepada Dewan Pengawas untuk dihapuskan yang selanjutnya dicatat secara ekstrakomptabel.

d. Persediaan

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehannya, penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat penurunan nilai persediaan. Besarnya penyisihan penurunan persediaan ditentukan berdasarkan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO). Pencatatan persediaan bahan kimia / alat tulis kantor dilakukan dengan metode "*Physical Inventory Method*", sedangkan persediaan bahan instalasi dan persediaan suku cadang menganut metode "*Perpetual Method*".

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran setelah perolehan awal (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan daya guna aset tetap harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tersebut (dikapitalisir).

Aset tetap, selain hak atas tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan sesuai Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009.

f. Pencatatan Utang/Kewajiban

Pada dasarnya seluruh utang/kewajiban dicatat tanpa memperhatikan apakah jumlahnya sudah dapat ditentukan secara tepat atau tidak. Namun, atas kewajiban yang timbul dan jumlahnya belum dapat ditentukan secara pasti, dicatat berdasarkan jumlah taksiran yang wajar.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

g. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila jumlah pembayaran melebihi dari jumlah yang terutang, maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset. Perusahaan tidak menganut adanya pajak tangguhan.

h. Kewajiban Imbalan Kerja

Perusahaan membukukan program manfaat karyawan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan Nomor: 13 Tahun 2003. Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected Benefit Cost Method (Attained Age Normal)* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Kewajiban transisi yang timbul diakui sesuai jatuh tempo pada periode berjalan.

3. KAS DAN BANK

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kas		
Kas kecil	500.000	500.000
Bank		
BPD NTT cabang Ruteng - 00602020029151	13.129.007.092	14.534.121.305
Bank BRI cabang Ruteng - 027301001993308	8.280.611.417	496.842.979
Bank BNI cabang Ende Pembantu Ruteng - 0117544892	609.133.067	750.000
Bank Mandiri cabang Ruteng	70.358.347	225.000
Bank BRI unit Motang Rua Ruteng - 0000472601003603530	1.497.964	552.105.666
Jumlah kas dan bank	<u>22.090.607.887</u>	<u>15.584.044.950</u>
Deposito		
BRI unit Motang Rua - 472601000077405	-	1.500.000.000
Bank BRI cabang Ruteng - 027301003495403	4.500.000.000	4.500.000.000
Bank BPD cabang Ruteng - 2503869058	6.884.081.504	6.815.753.327
Jumlah deposito	<u>11.384.081.504</u>	<u>12.815.753.327</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>33.475.189.391</u>	<u>28.400.298.277</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

4. PIUTANG USAHA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang rekening air	5.077.729.400	5.561.967.550
Akumulasi penyisihan piutang usaha	(270.203.385)	(411.159.760)
Jumlah piutang usaha	<u>4.807.526.015</u>	<u>5.150.807.790</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang usaha tersebut cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

5. PERSEDIAAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Persediaan bahan instalasi	2.052.644.972	2.730.391.182
Jumlah persediaan	<u>2.052.644.972</u>	<u>2.730.391.182</u>

6. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Uang muka sewa RD. Direktur	16.666.600	40.000.000
Uang muka sewa kantor IKK Langke Majok	7.791.669	1.666.680
Uang muka sewa kantor Pong Umpu	5.416.668	2.236.313
Uang muka sewa kantor unit Poco Leok	1.833.336	5.500.000
Uang muka sewa kantor unit Kenda	1.458.370	3.499.992
Uang muka sewa kantor unit Dintor	-	6.000.000
Uang muka sewa lainnya	19.770.836	53.815.449
Jumlah uang muka dan biaya dibayar dimuka	<u>52.937.479</u>	<u>112.718.434</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

7. ASET TETAP

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	1.717.732.850	87.000.000	-	1.804.732.850
Instalasi sumber air	6.519.777.039	156.737.027	-	6.676.514.066
Instalasi pompa	1.305.114.750	38.950.000	-	1.344.064.750
Pengolahan	19.164.546	-	-	19.164.546
Transmisi distribusi	79.958.366.980	1.191.251.477	-	81.149.618.457
Bangunan gedung	4.896.743.280	54.000.000	-	4.950.743.280
Peralatan/perengkapan	457.393.071	144.355.500	-	601.748.571
Kendaraan dinas	3.754.347.694	-	-	3.754.347.694
Inventaris/perabot kantor	1.165.285.750	161.683.200	-	1.326.968.950
Jumlah	99.793.925.960	1.833.977.204	-	101.627.903.164
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(2.149.652.824)	(61.739.184)	-	(2.211.392.008)
Instalasi pompa	(644.158.244)	(76.062.266)	-	(720.220.510)
Pengolahan	(19.164.540)	-	-	(19.164.540)
Transmisi distribusi	(39.736.194.407)	(3.938.455.685)	-	(43.674.650.092)
Bangunan gedung	(1.017.906.074)	(237.333.242)	-	(1.255.239.316)
Peralatan/perengkapan	(393.012.023)	(76.501.151)	-	(469.513.174)
Kendaraan dinas	(2.521.789.135)	(320.443.148)	-	(2.842.232.283)
Inventaris/perabot kantor	(863.812.486)	(166.301.173)	-	(1.030.113.659)
Jumlah	(47.345.689.733)	(4.876.835.849)	-	(52.222.525.582)
Nilai Buku Bersih	52.448.236.227			49.405.377.582

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

7. ASET TETAP (LANJUTAN)

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	1.512.282.850	205.450.000	-	1.717.732.850
Instalasi sumber air	5.251.927.374	1.267.849.665	-	6.519.777.039
Instalasi pompa	1.297.330.750	7.784.000	-	1.305.114.750
Pengolahan	19.164.546	-	-	19.164.546
Transmisi distribusi	76.142.041.710	3.816.325.270	-	79.958.366.980
Bangunan gedung	4.651.210.780	245.532.500	-	4.896.743.280
Peralatan/perlengkapan	457.393.071	-	-	457.393.071
Kendaraan dinas	3.735.156.194	19.191.500	-	3.754.347.694
Inventaris/perabot kantor	961.611.750	203.674.000	-	1.165.285.750
Jumlah	94.028.119.025	5.765.806.935	-	99.793.925.960
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(1.842.550.936)	(307.101.888)	-	(2.149.652.824)
Instalasi pompa	(568.298.845)	(75.859.399)	-	(644.158.244)
Pengolahan	(19.164.540)	-	-	(19.164.540)
Transmisi distribusi	(35.785.479.119)	(3.950.715.288)	-	(39.736.194.407)
Bangunan Gedung	(789.181.458)	(228.724.616)	-	(1.017.906.074)
Peralatan/perlengkapan	(336.695.523)	(56.316.500)	-	(393.012.023)
Kendaraan dinas	(2.201.345.987)	(320.443.148)	-	(2.521.789.135)
Inventaris/perabot kantor	(720.074.628)	(143.737.858)	-	(863.812.486)
Jumlah	(42.262.791.036)	(5.082.898.697)	-	(47.345.689.733)
Nilai Buku Bersih	51.765.327.989			52.448.236.227

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

8. ASET TIDAK BERWUJUD

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Harga perolehan	25.000.000	25.000.000
Akumulasi amortisasi	(12.500.000)	(6.250.000)
Jumlah aset tidak berwujud	<u>12.500.000</u>	<u>18.750.000</u>

Nilai tersebut merupakan biaya instalasi dan pelatihan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (SIM-PDAM) *under windows*.

9. UTANG PAJAK

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Utang pajak badan	99.913.221	367.648.586
Jumlah utang pajak	<u>99.913.221</u>	<u>367.648.586</u>

10. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Berbagai beban masih harus dibayar	-	531.069.195
Jumlah beban masih harus dibayar	<u>-</u>	<u>531.069.195</u>

11. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Kewajiban Imbalan pasca kerja	1.147.951.605	1.062.189.469
Jumlah kewajiban imbalan pasca kerja	<u>1.147.951.605</u>	<u>1.062.189.469</u>

Laporan Aktuaria dihitung oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

12. CADANGAN DANA PEMBAGIAN LABA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Cadangan dana	280.166.173	824.257.616
Jumlah cadangan dana	<u>280.166.173</u>	<u>824.257.616</u>

Sesuai dengan Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Komodo Tahun 2019 Nomor: HK/168/2021 maka dicadangkan dana untuk pembagian laba dengan nilai tersebut.

13. MODAL

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Penyertaan modal Pemda Kab. Manggarai	22.673.603.989	22.673.603.989
Penyertaan pemerintah pusat YBDS	729.977.987	729.977.987
Modal hibah untuk MBR	60.263.465.396	60.263.465.396
Jumlah penyertaan modal pemerintah	<u>83.667.047.372</u>	<u>83.667.047.372</u>

14. PENDAPATAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan air	21.910.612.781	22.298.303.798
Pendapatan non-air	2.302.165.158	2.490.905.024
Jumlah pendapatan	<u>24.212.777.939</u>	<u>24.789.208.822</u>

15. BEBAN SUMBER AIR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban operasional sumber air	535.677.875	507.341.607
Beban air baku	57.141.867	68.763.621
Jumlah beban sumber air	<u>592.819.742</u>	<u>576.105.228</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

16. BEBAN PEGAWAI

	2024	2023
Beban operasi transmisi dan distribusi	6.336.745.534	4.487.025.654
Beban pegawai	5.300.866.719	5.971.656.759
Beban direksi	500.830.550	456.091.082
Jumlah beban pegawai	12.138.442.803	10.914.773.495

17. BEBAN PEMELIHARAAN

	2024	2023
Beban pemeliharaan transmisi dan distribusi	1.313.726.328	3.002.449.294
Beban pemeliharaan instalasi NPA	658.728.521	433.608.483
Beban pemeliharaan sumber	115.665.180	128.686.745
Jumlah beban pemeliharaan	2.088.120.029	3.564.744.522

18. BEBAN PENYISIHAN/AMORTISASI/PENYUSUTAN

	2024	2023
Beban penyusutan transmisi dan distribusi	3.938.455.684	3.950.715.289
Beban penyusutan kendaraan/alat angkutan	323.672.532	320.443.150
Beban penyusutan bangunan/gedung	234.103.892	228.724.616
Beban penyusutan inventarisasi perabot kantor	166.301.176	143.737.855
Beban penyusutan perlengkapan	76.501.151	56.316.504
Beban penyusutan pompa dan pengolahan air	76.062.265	75.859.394
Beban penyusutan sumber air	61.739.183	307.101.889
Beban amortisasi	6.250.000	6.250.000
Beban penyisihan dan penghapusan piutang	-	428.859.800
Jumlah beban penyisihan/amortisasi/penyusutan	4.883.085.883	5.518.008.497

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

19. BEBAN OPERASI LAINNYA

	2024	2023
Beban kantor	1.141.363.430	1.106.185.665
Beban hubungan langganan	441.138.770	411.694.194
Beban penelitian dan pengembangan	33.939.100	60.695.154
Beban lain - lain	23.193.201	4.028.373
Rupa-rupa beban umum	1.472.962.402	1.491.843.283
Jumlah beban operasi lainnya	3.112.596.903	3.074.446.669

20. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2024	2023
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan deposito bunga tabungan bank BRI	319.769.436	284.733.304
Pendapatan giro bank BRI	313.162.735	223.135.275
Pendapatan lainnya	28.781.340	213.506.366
Jumlah pendapatan lain-lain	661.713.511	721.374.945
Beban lain-lain		
Beban lain-lain	-	-
Jumlah beban lain-lain	-	-
Total pendapatan (beban) lain-lain - bersih	661.713.511	721.374.945

21. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2024 yang telah diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2025.



BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI

Jl. Soekarno-Ruteng, Kelurahan Pau, Kode Pos 86516, email : manggaraimultiinvestasi@yahoo.co.id

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

AUDITED

Laporan Auditor Independen

Nomor: 00057/2.0925/AU.2/05/1881-1/1/IV/2025

Tanggal: 11 April 2025



DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Keuangan	
Neraca	1
Laporan Laba/Rugi.....	2
Laporan Perubahan Ekuitas.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	5
1. Umum	5
2. Kebijakan Akuntansi.....	8
3. Penjelasan Pos-Pos Neraca	15
4. Penjelasan Pos-Pos Laba/(Rugi)	21
5. Kelangsungan Usaha	24
6. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca.....	24
7. Penyelesaian Atas Laporan Keuangan	24
Laporan Auditor Independen	





**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT.
MANGGARAI MULTI INVESTASI KABUPATEN MANGGARAI
UNTUK PERIODE DUA BELAS BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Jahang Fansi Aldus
Alamat Kantor : Jalan Sukarno, Kelurahan Pau, Kee. tangke Rembong, Ruteng
Alamat Rumah : Jalan Sukarno, Kelurahan Pau, Kee. tangke Rembong, Ruteng
Nomor Identitas : -
Jabatan : Direktur Utama (Pit)
Jabatan : Direktur Utama (Pit)

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2024;
2. Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai tahun buku 2024 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan;
5. Tidak ada lagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk selain Kantor Akuntan Publik and a.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ruteng, 11 April 2025

PT. Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai

METERAI TEMPEL
10000
FDALX201851074

Drs. Jahang Fansi Aldus
Direktur Utama (Pit)

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI
N E R A C A

Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2A.1.1, 4a	40.820.095	378.991.622
Piutang Usaha	2A.1.3, 4b	927.383.216	1.463.097.225
Sewa Dibayar Dimuka		3.956.000	19.778.000
Persediaan	2A.1.8, 4d	616.631.721	830.065.357
Jumlah Aset Lancar		1.588.791.032	2.691.932.204
ASET TETAP			
	2A.2, 4e		
Tanah		-	-
Bangunan Gedung		26.002.500	26.002.500
Mesin dan Peralatan		260.245.859	260.245.859
Kendaraan		195.000.000	195.000.000
Perabot Kantor		155.171.100	155.171.100
Nilai Perolehan Aset Tetap		636.419.459	636.419.459
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(536.842.699)	(507.117.449)
Nilai Buku Aset Tetap		99.576.760	129.302.010
ASET LAIN-LAIN			
	2A.3, 4f		
Biaya Organisasi		130.680.000	130.680.000
Amortisasi Biaya Organisasi		(130.680.000)	(130.680.000)
Biaya Franchise Fee Primagama		201.776.585	201.776.585
Amortisasi Biaya Franchise		(201.776.585)	(201.776.585)
Piutang Usaha Macet		6.811.955.964	6.565.505.068
Cad. Kerugian Piutang Usaha Macet		(1.362.391.193)	(513.101.013)
		5.449.564.771	6.052.404.055
JUMLAH ASET		7.137.932.563	8.873.638.269
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	2A.4		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		2.738.700	-
Utang Lain-Lain		235.527.561	247.751.561
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		238.266.261	247.751.561
EKUITAS			
Modal Saham Disetor		10.200.000.000	10.200.000.000
Saldo Laba Ditahan		(1.724.414.114)	457.463.696
Saldo Laba Tahun Berjalan		(1.575.919.584)	(2.031.576.988)
Jumlah Ekuitas		6.899.666.302	8.625.886.708
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.137.932.563	8.873.638.269

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN LABA/RUGI

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
PENDAPATAN	2B, 1		
- Pendapatan Hasil Penjualan		439.705.500	2.154.802.966
- Pendapatan Jasa		1.595.000	31.494.482
Jumlah Pendapatan		441.300.500	2.186.297.448
BEBAN HARGA POKOK PENJUALAN		688.769.886	2.847.972.977
LABA KOTOR		(247.469.386)	(661.675.529)
BEBAN USAHA	2B, 2		
- Beban Penjualan		471.000	18.253.000
- Beban Umum dan Administrasi		1.333.852.317	1.350.923.705
Jumlah Beban Operasional		1.334.323.317	1.369.176.705
LABA USAHA		(1.581.792.703)	(2.030.852.234)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
- Pendapatan Lain-Lain		6.273.141	304.944
- Beban Lain-Lain		(400.022)	(1.029.697)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		5.873.119	(724.753)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(1.575.919.584)	(2.031.576.988)
TAKSIRAN PPH BADAN		-	-
LABA (RUGI) SETELAH PPH BADAN		(1.575.919.584)	(2.031.576.988)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan



PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN ARUS KAS
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
a Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak	(1.575.919.584)	(2.031.576.988)
Penyesuaian untuk:		
- Beban Cadangan Penurunan Nilai Persediaan	(17.111.250)	
- Beban Penyusutan Aset Tetap	29.725.250	37.008.673
- Beban Penyisihan Piutang	(11.613.406)	37.189.482
- Beban Amortisasi	-	18.337
- Koreksi Saldo Laba (Rugi)	-	-
b Laba/(Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	1.000.594	74.216.492
Penurunan (Peningkatan) Modal Kerja Selain Kas :		
- Piutang Usaha Netto	547.327.416	(147.315.809)
- Sewa Dibayar Dimuka	15.822.000	15.822.000
- Persediaan	213.433.635	982.688.882
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.738.700	(16.724.499)
- Utang Lain-Lain	(12.224.000)	74.774.064
c Penurunan Modal Kerja Selain Kas	767.097.751	909.244.638
Arus Kas Netto untuk Aktivitas Operasi	(807.821.239)	(1.048.115.857)
2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pengadaan Aset tetap	-	-
- Penambahan Aset Lain-Lain	-	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-
3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Pembayaran Dividen	(150.300.822)	-
- Penurunan Aset Lain-Lain	602.839.284	924.762.581
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	452.538.462	924.762.581
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	(355.282.777)	(123.353.276)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	378.991.622	502.344.898
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	23.708.845	378.991.622
Terdiri dari :		
- Kas Tunai	(0)	35.000.000
- Bank	40.820.095	343.991.622
SALDO KAS DAN SETARA KAS	40.820.095	378.991.622

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan
 Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan



PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham	Modal Hibah	Laba/(Rugi) sd. Tahun Lalu	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022	10.200.000.000	-	265.755.424	187.589.494	10.653.344.918
Koreksi Laba/ (Rugi) Tahun Lalu	-	-	4.118.778	-	4.118.778
Mutasi Tahun 2023 :					
Laba/(Rugi) Tahun 2023	-	-	-	(2.031.576.988)	(2.031.576.988)
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal	-	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	10.200.000.000	-	457.463.696	(2.031.576.988)	8.625.886.708
Pembayaran Dividen	-	-	(150.300.822)	-	(150.300.822)
Mutasi Tahun 2024:					
Laba/(Rugi) Tahun 2024	-	-	-	(1.575.919.584)	(1.575.919.584)
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal	-	-	-	-	-
Cadangan Dana	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	10.200.000.000	-	(1.724.414.114)	(1.575.919.584)	6.899.666.302

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan



PT. MANGGARAI MULTI INVESTASI
KABUPATEN MANGGARAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN POKOK
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM

1.1. Sejarah Berdiri dan Tempat Kedudukan

PT. Manggarai Multi Investasi (Perseroan) adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Manggarai, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 yang kemudian didaftarkan sesuai akta Nomor 2 tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris J. Mambaitfeto, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-47882.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, dan mengalami perubahan dengan akta perubahan Nomor 01 tanggal 04 Maret 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0047616.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.

Perseroan telah memiliki beberapa perijinan antara lain sebagai berikut:

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas dari Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan Nomor TDP 24.05.3.46.00601 tertanggal 10 Oktober 2013 dan berlaku sampai dengan 10 Oktober 2018.
- NPWP dengan Nomor 03.110.738.6-924.000 terdaftar tanggal 23 April 2013.
- Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/KPPTSP/212/SIUP/SB/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- Surat Izin Usaha Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 503/KPPTSP/0100/SITU/SB/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

Perseroan berkedudukan di Jl. Soekarno, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1.2 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Manggarai Multi Investasi No. 05 tertanggal 30 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Theresia Sunita Nurak, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Ruteng, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat nomor : AHU-AH.01.03-0468822 Tahun 2021 tanggal 03 November 2021 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, menyetujui antara lain :

- Pengunduran diri Bapak Hilarius Mantara dari komisaris pertanggal 6 Januari 2021;
- Pemberhentian Bapak Viktor Madur sebagai Komisaris Utama dan pemberhentian bapak Hilarius Mantara sebagai Komisaris dan pengangkatan Bapak Heribertus Ngabut, Sarjana Hukum sebagai Komisaris Utama dan Monika Ambang sebagai Komisaris.
- Pemberhentian Bapak Heribertus Junaidi dan pemberhentian Bapak Leonardus Candra dari Pemegang Saham.

Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Manggarai Multi Investasi terakhir berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Heribertus Ngabut, Sarjana Hukum
- Komisaris : Drs. Fany Aldus Jahang
- Komisaris : Moni Ambang

Dewan Direksi:

- Direksi Utama : Drs. Yustinus Mahu, MM.
- Direktur Keuangan : Maksimus Man, SE
- Direktur Operasional : Maksimilianus Haryatman, SE

Sehubungan dengan pengunduran diri Drs. Yustinus Mahu, MM. sebagai Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi, melalui surat Bupati Manggarai nomor Ek.019.1/127/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Direktur

Keuangan PT. MMI dan tembusan Komisaris Utama, maka dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi, Maksimus Man, SE ditunjuk untuk melaksanakan tugas (Plt) Direktur Utama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai ditetapkannya Direktur Utama yang defenitif.

Pada tahun 2024 Maksimus Man, SE sebagai Plt. Direktur meninggal dunia. Jabatan Direktur Utama selanjutnya diemban Drs. Jahang Fansi Aldus, sebagai Pelaksana Tugas berdasarkan Surat Bupati Manggarai nomor 117/500.4.4.10/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 perihal Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT. MMI, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.

1.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah pendirian perusahaan, adalah:

a. Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah.

b. Tujuan

- Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menanamkan modalnya
- Meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan
- Mencari laba dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

1.4. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

RUPS Luar Biasa tanggal 30-10-2021 menetapkan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan serta Direktur Operasional, namun sejak tahun 2021 jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Operasional lowong dan tidak terisi.

Direktur Keuangan membawahi Bagian Keuangan dan Bagian Administrasi Kepegawaian, sedangkan Direktur Operasional membawahi Bagian Perdagangan Pupuk, Bagian Perdagangan Umum, Niang Coffe dan Pemasaran.

Sumberdaya manusia pada PT. Manggarai Multi Investasi per 31 Desember 2024 sebanyak 16 orang. Sebanyak 10 orang berstatus pegawai tetap dan 6 orang berstatus

pegawai kontrak. Ke-10 orang pegawai tetap dengan tingkat pendidikan: S₁ 4 orang, D₃ 1 orang dan SMA 5 orang.

1.5. Aktivitas Pengendalian Internal

Perusahaan mengelola administrasi dan keuangan secara manual menggunakan beberapa unit personal komputer, tidak terintegrasi dalam satu jaringan layanan. Masing-masing bagian mengolah datanya, dan kemudian diverifikasi oleh bagian akuntansi sebelum dituangkan dalam laporan keuangan perusahaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT. Manggarai Multi Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disusun oleh manajemen berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

2.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional. Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan perumda, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Arus Kas disusun dengan metode tidak langsung, mencerminkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas investasi dan pendanaan.

2.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

2.3. Penetapan Kebijakan Akuntansi Yang Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. POSISI KEUANGAN

1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

1.1 *Kas dan Setara Kas*

Kas mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas bendahara berupa uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara. Kas di Bendahara dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (BI) pada tanggal neraca.

Setara kas mencakup saldo uang di bank yang siap setiap saat digunakan, dan tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan perusahaan. Setara Kas juga meliputi deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan, dan tidak dijamin atas utang.

1.2 *Investasi Jangka Pendek*

Merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam satu periode akuntansi. Investasi jangka pendek ini merupakan investasi non permanen seperti investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Depisoto.

1.3 *Piutang Usaha*

Piutang usaha merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari penjualan yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan penjualan. Perkiraan piutang usaha dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari layanan yang belum dilunasi.



1.4 Penyisihan Piutang Usaha

Perusahaan membentuk cadangan penyisihan kerugian piutang untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha, khususnya piutang usaha tidak dijamin dengan jaminan memadai, dengan persentasi dan kelompok umur sebagai berikut:

<u>Umur</u>	<u>Kategori</u>	<u>Persentase</u>
- 0 sd 12 bulan	Lancar	0 %
- 12 sd 24 bulan	Tidak Lancar	5 %
- 24 sd 36 bulan	Diragukan	10 %
- Di atas 36 bulan	Macet	20 %

Semua piutang usaha berumur di atas 36 bulan, baik dengan jaminan maupun tidak, dikategorikan sebagai piutang macet dan disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain.

1.5 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaan aktivitya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

1.6 Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang telah dibayar.

1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan antara lain untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pinjaman pegawai, pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal

neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Perkiraan (Akun) aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Mesin dan Peralatan, Kendaraan/Alat Angkut, dan Inventaris/Perabot serta Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung kantor, gudang dan bangunan lainnya. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset perusahaan pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan

baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

2.3 Mesin dan Peralatan, Kendaraan/Alat Angkut dan Inventaris/Perabot

Aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap ini di neraca antara lain meliputi peralatan perlengkapan kerja, kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan inventaris/perabot kantor. Aset tetap ini dicatat sebagai aset perusahaan pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap ini dicatat dengan harga perolehan. Harga perolehan aset tetap ini yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap ini dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

2.4 Akumulasi Penyusutan

Aset tetap disusutkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang secara rinci diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.03/2009 tanggal 21 Mei 2009 secara garis lurus (*straight line method*) dengan persentase dan penggolongan aset tetap, sebagai berikut :

Uraian	Umur	Persentase
Bukan Bangunan		
– Kelompok 1	< 4 tahun	25%
– Kelompok 2	4 – 8 tahun	12,50%
– Kelompok 3	8 – 16 tahun	6,25%
– Kelompok 4	> 16 tahun	5%
Bangunan Permanen	20 tahun	5%
Bangunan Semi Permanen	10 tahun	10%

3. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lain-lain antara lain terdiri dari aktiva tidak berwujud, biaya organisasi, franchise, software dan piutang macet.

Untuk aset yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya dan nilai amortisasinya.

4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Usaha/Rekanan, Utang Bunga, Beban Yang Masih Harus Dibayar dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.1 Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang yang timbul akibat adanya pembelian barang dan atau jasa yang terkait langsung dengan pengadaan barang/jasa oleh perusahaan seperti utang untuk pembelian barang persediaan dan bahan habis pakai.

4.2 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Merupakan kewajiban yang timbul dari adanya beban/jasa yang diberikan oleh pihak internal maupun pihak eksternal namun belum dilakukan pembayaran oleh perusahaan.

4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan, dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban jangka panjang perusahaan kepada pihak pemberi pinjaman, yang sesuai perjanjian akan dikembalikan

setelah masa tenggang (*grace period*) yang lamanya lebih dari 12 bulan, baik secara angsuran maupun sekaligus.

6. EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca, yang menampung selisih antara aset dan kewajiban perusahaan pada akhir tahun. Komponen utama dari kenaikan atau penurunan nilai ekuitas adalah laba/(rugi) perusahaan pada tahun yang bersangkutan.

B. LAPORAN LABA/(RUGI)

1) PENDAPATAN

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh perusahaan tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

2) BEBAN

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke perusahaan tanpa diikuti keluarnya kas.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional perusahaan.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 DAN 2023

Laporan Keuangan Komparatif PT. Manggarai Multi Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

4. PENJELASAN POS-POS NERACA

a. Kas dan Setara Kas

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Kas	Rp 0	Rp 35.000.000
- Bank	Rp 40.820.095	Rp 343.991.622
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp 40.820.095	Rp 378.991.622
Rincian Saldo Bank, terdiri dari:		
- Giro Bank NTT Ruteng Rek. No. 00601090000999	Rp 34.413.366	Rp 318.091.563
- Giro BRI Ruteng Rek. No. 027301002041308	Rp 6.406.729	Rp 25.900.059
Jumlah Bank	Rp 40.820.095	Rp 343.991.622

Saldo kas sesuai dengan administrasi.

Saldo rekening Tabungan dan Giro Bank telah sesuai dengan rekening koran dari masing-masing bank per 31 Desember 2024.

b. Piutang Usaha

Piutang usaha timbul dari penjualan barang dagangan secara kredit. Saldo piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Piutang Usaha Lancar (bruto)	Rp 993.509.642	Rp 1.540.837.058
<u>Dikurangi:</u>		
- Cadangan Kerugian Piutang Lancar	(Rp 66.126.426)	(Rp 77.739.832)
Jumlah Piutang Usaha (neto)	<u>Rp 927.383.216</u>	<u>Rp 1.463.097.226</u>

Berdasarkan umurnya, piutang berumur sampai dengan 1 tahun dikategorikan sebagai piutang "lancar", 2 tahun sebagai "tidak lancar" dan 3 tahun sebagai "diragukan". Ketiganya disajikan pada kelompok Aset Lancar, sedangkan berumur di atas 3 tahun dikategorikan sebagai piutang "macet" dan disajikan pada kelompok Aset Lain-Lain.

Berdasarkan kelompok umur, piutang usaha per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Kelompok (Umur)	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Lancar (0 sd. 1 tahun)	Rp 159.698.781	Rp 500.684.411
- Tidak Lancar (1 sd. 2 tahun)	Rp 345.093.211	Rp 525.508.650
- Diragukan (2 sd. 3 tahun)	Rp 488.717.650	Rp 514.643.997
Jumlah Piutang Usaha (bruto)	<u>Rp 993.509.642</u>	<u>Rp 1.540.837.058</u>

Perusahaan meyakini jumlah cadangan kerugian yang disisihkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 66.126.426,- dan 2023 sebesar Rp 77.739.832,- dapat menutupi kemungkinan kerugian piutang usaha.

c. Sewa Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Sewa kantor beban Tahun 2025	Rp 3.956.000	Rp 19.778.000
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	Rp 3.956.000	Rp 19.778.000

d. Persediaan

Merupakan persediaan barang dagangan per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 130.622.829	Rp 182.873.303
- Persediaan Bahan Bangunan	Rp 425.381.892	Rp 534.049.693
- Persediaan Kopi	Rp 42.540.000	Rp 59.345.000
- Persediaan Pupuk	Rp 0	Rp 5.078.861
- Persediaan Bibit	Rp 0	Rp 34.222.500
- Persediaan Barang Covid-19	Rp 18.087.000	Rp 31.607.250
Jumlah Persediaan Bruto	Rp 616.631.721	Rp 847.176.607
- Cadangan Penurunan Nilai	(Rp 0)	(Rp 17.111.250)
Jumlah Persediaan Netto	Rp 616.631.721	Rp 830.065.357

Persediaan barang dagangan perusahaan diamankan di 3 (tiga) gudang yaitu di Cancar (pupuk/kopi), Gereja Redong (bahan bangunan) dan kantor (ATK, bibit dan bahan Covid-19).

Perusahaan tidak membentuk cadangan penurunan nilai persediaan per 31 Desember 2024, dianggap persediaan yang ada siap dijual dengan harga wajar.

e. Aktiva Tetap

Rincian aktiva tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
Nilai Perolehan:		
- Gedung dan Bangunan	Rp 26.002.500	Rp 26.002.500
- Mesin dan Peralatan	Rp 260.245.859	Rp 260.245.859
- Kendaraan	Rp 195.000.000	Rp 195.000.000
- Perabot Kantor	Rp 155.171.100	Rp 155.171.100
Jumlah Nilai Perolehan	Rp 636.419.459	Rp 636.419.459
Akumulasi Penyusutan:		
- Gedung dan Bangunan	Rp 7.800.750	Rp 5.200.500
- Mesin dan Peralatan	Rp 251.995.849	Rp 249.245.849
- Kendaraan	Rp 121.875.000	Rp 97.500.000
- Perabot Kantor	Rp 155.171.100	Rp 155.171.100
Jumlah Akumulasi Penyusutan	Rp 536.842.699	Rp 507.117.449
Nilai Buku	Rp 99.576.760	Rp 129.302.010

Rincian aset tetap lihat lampiran.

f. Aktiva Lain-Lain

Saldo aktiva lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Biaya Organisasi	Rp 130.680.000	Rp 130.680.000
- Ak. Amortisasi Biaya Organisasi	(Rp 130.680.000)	(Rp 130.680.000)
- Biaya Franchise Fee Primagama	Rp 201.776.585	Rp 201.776.585
- Ak. Amortisasi Biaya Organisasi	(Rp 201.776.585)	(Rp 201.776.585)
- Piutang Usaha Macet	Rp 6.811.955.964	Rp 6.565.505.068
- Cad. Kerugian Piutang Macet	(Rp 1.362.391.193)	(Rp 513.101.013)
Jumlah Aktiva Lain-Lain	Rp 5.449.564.771	Rp 6.052.404.055

Perusahaan memiliki piutang usaha sulit ditagih (macet) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sejumlah Rp 6.811.955.964,-- dan Rp.6.565.505.068,-- atas 116 debitur. Beberapa debitur, menyerahkan jaminan berupa tanah/lahan dan BPKB kendaraan. Dokumen kepemilikannya dikuasai perusahaan.

Selain jaminan berupa BPKB kendaraan, penyerahan jaminan juga antara lain berupa tanah SHM Nomor 25/Gorontalo tanggal 13-12-2002 seluas 7.630 m² di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, yang diperkuat dengan pernyataan melalui akte Nomor 15 tanggal 12-4-2022 dari Notaris Theresia Sunita Nurah, SH. M.Kn. Jumlah piutang yang dijamin oleh tanah tersebut sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan nilai NJOP saat itu sebesar Rp 7.630.000.000,- (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah). Pernyataan melalui notaris tersebut dilanjutkan dengan Kuasa Menjual melalui akte Nomor 16 tanggal 12-4-2022 dari notaris yang sama, oleh pemilik tanah kepada Maksimus Man, SE, jabatan Plt. Direktur Utama PT. Manggarai Multi Investasi.

Pada saat ini Maksimus Man, SE telah meninggal dunia, perusahaan dalam proses menindaklanjuti surat kuasa menjual.

g. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Jumlah Rp 2.738.700,- merupakan utang iuran asuransi kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang belum dibayar untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2024.

h. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Utang Dana Sosial	Rp 19.283.419	Rp 19.283.419
- Utang Dana Pendidikan	Rp 29.483.419	Rp 29.483.419
- Utang Dana Purnabakti	Rp 39.730.580	Rp 39.730.580
- Utang Dana CSR	Rp 12.480.028	Rp 12.480.028
- Utang Dividen	Rp 59.776.051	Rp 72.000.051
- Utang Penerimaan Uang Belum Jelas Debitur	Rp 74.774.064	Rp 74.774.064
Jumlah Utang Lain-Lain	<u>Rp 235.527.561</u>	<u>Rp 247.751.561</u>

i. Modal

Berdasarkan Akta No.05 tertanggal 30 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Theresia Sunita Nurak, Sarjana Hukum, Magister Kenotarian, Notaris di Kabupaten Manggarai, modal saham terdiri dari 80.000 lembar saham @Rp 250.000,- = Rp.20.000.000.000,- dan telah ditempatkan sebanyak 40.800 lembar @Rp.250.000,-. = Rp 10.200.000.000,-

Saham yang telah ditempatkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:.

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan	Modal Disetor
- Pemerintah Kab. Manggarai	98,04%	Rp 10.000.000.000
- Ibu Monika Ambang	1,47%	Rp 150.000.000
- Bapak Hilarius Mantara	0,49%	Rp 50.000.000
Jumlah	100%	Rp 10.200.000.000

j. Laba/(rugi) Ditahan

Jumlah tersebut merupakan saldo laba/(rugi) ditahan per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Saldo awal tahun	Rp 464.188.196	Rp 265.755.425
- Koreksi L/(R) Tahun Lalu	(Rp 6.724.500)	(Rp 16.724.500)
- Pembayaran Dividen	(Rp 150.300.822)	Rp 0
- Laba/(Rugi) Tahun Lalu	(Rp2.031.576.988)	Rp 208.432.771
Jumlah Laba/(Rugi) Ditahan	(Rp1.724.414.114)	Rp 457.463.696

k. Laba/(rugi) Tahun Berjalan

Jumlah tersebut merupakan saldo laba (rugi) bersih sebelum pajak penghasilan badan tahun 2024 dan 2023, masing-masing sebesar (Rp 1.575.919.584,-) dan (Rp.2.031.576.988,-).

5. PENJELASAN POS-POS LABA/(RUGI)

a. Pendapatan

Merupakan pendapatan penjualan tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Penjualan ATK	Rp 0	Rp 64.669.333
- Penjualan Bahan Bangunan	Rp 4.663.000	Rp 1.358.715.633
- Penjualan Kopi	Rp 1.600.000	Rp 150.334.000
- Penjualan Pupuk	Rp 433.442.500	Rp 581.084.000
- Pendapatan Jasa Angkut	Rp 0	Rp 650.000
- Pendapatan Niang Coffee	Rp 1.595.000	Rp 20.424.000
- Pendapatan Sipla On-line	Rp 0	Rp 10.420.482
Jumlah Pendapatan	Rp 441.300.500	Rp 2.186.297.448

b. Beban Harga Pokok Penjualan

Merupakan perhitungan harga pokok penjualan atas produk-produk yang dijual tahun 2024 dan 2023, sebagai berikut:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Persediaan awal	Rp 847.176.607	Rp 1.812.754.239
<u>Ditambah:</u>		
- Pembelian	Rp 458.225.000	Rp 1.882.395.345
- Tersedia untuk dijual	Rp 1.305.401.607	Rp 3.695.149.584
<u>Dikurang:</u>		
- Persediaan akhir	Rp 616.631.721	Rp 847.176.607
Harga Pokok Penjualan	Rp 688.769.886	Rp 2.847.972.977

Rincian perhitungan harga pokok penjualan per produk, terlampir. Lihat Lampiran 4.

c. Beban Penjualan

Jumlah tersebut merupakan beban penjualan dan pemasaran tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
- Beban Promosi	Rp 0	Rp 8.600.000
- Baban Transportasi	Rp 471.000	Rp 9.653.000
Jumlah Beban Penjualan	Rp 471.000	Rp 18.253.000

d. Beban Umum dan Administrasi

Jumlah tersebut merupakan beban umum dan administrasi tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023 (Direklass)
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp 305.700.559	Rp 394.196.883
- Beban THR	Rp 0	Rp 46.558.073
- Beban Lembur	Rp 354.000	Rp 2.770.000
- Beban Pengobatan Pegawai	Rp 9.000.000	Rp 0
- Beban BPJS Tenaga Kerja	Rp 10.589.310	Rp 27.980.460
- Beban BPJS Kesehatan	Rp 2.738.700	Rp 9.623.880
- Beban Pajak PPh 21	Rp 0	Rp 1.080.000
- Beban Pajak PPh 23	Rp 540.541	Rp 1.177.501
- Beban Pajak PPh Badan	Rp 0	Rp 27.931.012
- Beban Pajak PPN	Rp 0	Rp 3.540.000
- Beban Pajak Kendaraan	Rp 0	Rp 5.825.530
- Beban ATK dan Perleng. Kantor	Rp 1.861.500	Rp 4.750.000
- Beban Rumah Tangga Kantor	Rp 420.000	Rp 990.000
- Beban Pos dan Pengiriman	Rp 0	Rp 11.000
- Beban Wifi/Inernet	Rp 2.395.700	Rp 7.249.881
- Beban Air dan Listrik	Rp 1.120.375	Rp 4.774.100
- Beban Rapat dan Tamu	Rp 3.220.000	Rp 8.274.000
- Beban Makan-Minum	Rp 8.495.000	Rp 27.037.000
- Beban Sewa	Rp 26.072.000	Rp 48.822.000

- Beban Upah Buruh	Rp	73.000	Rp	550.000
- Beban Perjalanan Dinas	Rp	2.500.000	Rp	9.222.000
- Beban Sumbangan	Rp	2.000.000	Rp	0
- Beban Jasa Profesional	Rp	50.000.000	Rp	21.805.000
- Beban Kopi Niang	Rp	1.027.200	Rp	7.865.980
- Beban BBM Kendaraan	Rp	28.347.508	Rp	21.439.676
- Beban Pemelih. Gedung	Rp	0	Rp	753.000
- Beban Pemelih. Alat Kantor	Rp	1.300.000	Rp	1.900.000
- Beban Pemelih. Kendaraan	Rp	7.393.000	Rp	29.065.000
- Beban Penyusutan	Rp	29.725.250	Rp	37.008.672
- Beban Penyisihan Rugi Piutang	Rp	837.676.773	Rp	550.290.496
- Beban Kerugian Piutang	Rp	1.301.901	Rp	0
- Beban Penurunan Nilai Persediaan	Rp	0	Rp	17.111.250
- Beban Amortisasi	Rp	0	Rp	18.337
- Beban Lain2 Umum & Adm.	Rp	0	Rp	31.302.974
Jumlah Beban Umum dan Adm.	Rp	1.333.852.317	Rp	1.350.923.705

e. Pendapatan/(Beban) Lain-Lain

Jumlah tersebut merupakan pendapatan/(beban) lain-lain tahun 2024 dan 2023, terdiri dari:

	Per 31-12-2024	Per 31-12-2023
<u>Pendapatan Lain-Lain:</u>		
- Jasa Giro	Rp 447.140	Rp 304.944
- Selisih Kas	Rp 5.826.001	Rp 0
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	Rp 6.273.141	Rp 304.944
<u>Beban Lain-Lain:</u>		
- Biaya Bank	Rp 310.813	Rp 1.029.697
- PPH Jasa giro/bunga deposito	Rp 89.209	Rp 0
Jumlah Beban Lain-Lain	Rp 400.022	Rp 1.029.697
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain2	Rp 5.873.119	(Rp 724.753)

6. KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.300.333.698,- atau negatif 32,36% dari modal yang disetor sebesar Rp.10.200.000.000,-. Perusahaan juga mempunyai piutang macet yang sulit ditagih per 31 Desember 2024 sejumlah Rp.6.811.955.964,- atau 66,78% dari modal yang disetor sebesar Rp.10.200.000.000,-. Sebagaimana telah diungkap pada penjelasan pos Aset Lain-lain, piutang macet senilai Rp 4.000.000.000,- dijamin dengan tanah seluas 7.630 m² di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, yang diperkuat dengan Kuasa Menjual dari pemilik tanah kepada mantan Plt. Direktur Utama, namun penjualannya belum berhasil hingga penerima kuasa meninggal dunia tahun 2024 lalu.

Dalam tahun buku 2024, penjualan perusahaan rendah, hanya mencapai sebesar Rp.441.300.500,- atau 20,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.2.186.297.448,-.

Kondisi di atas menempatkan perusahaan pada posisi kesulitan likuiditas yang dapat mengancam keberlangsungan usaha (*going concern*) di masa mendatang.

Tidak nampak upaya nyata dari pemegang saham untuk menekan saldo piutang macet dan mengatasi tren penurunan penjualan.

7. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan.

8. PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi pada tanggal 11 April 2025.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.: 00057/2.0925/AU.2/05/1881-1/1/IV/2025

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Manggarai Multi Investasi Kabupaten Manggarai ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca per 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan per 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan nomor: 00137/2.0938/AU.2/05/0789-2/1/V/202 tanggal 02 Mei 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Tangerang, 11 April 2025


Pande Putu Agus Eka Pertama, AK., M.Acc., CA., CPA.
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 1881

Rincian Aset Tanah SKPD per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Sekretariat Daerah	22.147.302.671,00
2	Sekretariat DPRD	2.963.880.000,00
3	Inspektorat Daerah	101.250.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	4.223.234.008,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	465.260.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	190.340.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.750.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.409.651.952,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	80.114.890.548,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.729.618.000,00
12	Dinas Perhubungan	4.790.451.552,00
13	Dinas Kesehatan	4.154.573.080,00
14	Dinas Peternakan	2.313.350.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.169.788.783,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	1.313.886.142,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	982.429.999,67
18	Dinas Sosial	753.290.001,00
19	Dinas Kominikasi dan Informatika	589.320.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	497.710.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	409.250.000,00
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	248.310.000,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	212.703.718,00
24	Dinas Perikanan	183.220.001,00
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.676.000,00
26	Kecamatan Ruteng	1.000.000.000,00
27	Kecamatan Cibal	621.340.000,00
28	Kecamatan Wae Rii	501.230.000,00
29	Kecamatan Langke Rembong	244.066.003,00
30	Kecamatan Satar Mese Utara	220.850.000,00
31	Kecamatan Satar Mese Barat	213.101.001,00
32	Kecamatan Reok	200.040.000,00
33	Kelurahan Pagal	96.700.000,00
34	Kecamatan Lelak	96.113.501,00
35	Kecamatan Rahong Utara	32.883.901,00
36	Kelurahan Wangkung	15.000.000,00
37	Kelurahan Wae Belang	6.650.001,00
38	Kecamatan Reok Barat	5.675.350,00
39	Kecamatan Cibal Barat	3.900.350,00
40	Kecamatan Satar Mese	2.360.000,00
41	Kelurahan Reo	1.830.000,00
42	Kelurahan Mata Air	630.000,00
43	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	6.711.250.000,00
JUMLAH		257.675.756.562,67

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.805.663.573,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	102.880.449.158,73
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.756.718.287,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.063.227.993,00
5	Dinas Perhubungan	9.355.371.737,08
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.073.435.012,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.295.699.560,00
8	Dinas Peternakan	1.904.564.376,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.922.391.381,00
10	Dinas Perikanan	1.869.344.067,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.818.390.175,00
12	Dinas Sosial	890.231.000,00
13	Dinas Kesehatan	163.263.744.528,33
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	880.995.338,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.825.886.178,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.923.295.435,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	9.812.088.410,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.791.824.541,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.184.119.275,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.659.629.836,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.153.099.275,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	1.123.347.583,00
23	Inspektorat Daerah	1.296.209.010,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	117.256.948.175,00
25	Sekretariat DPRD	3.397.812.155,99
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.495.249.478,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	679.466.449,00
28	Kecamatan Wae Rii	608.894.304,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	429.235.394,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	563.398.879,00
31	Kecamatan Satar Mese	456.940.682,00
32	Kecamatan Ruteng	665.321.634,00
33	Kecamatan Reok	943.910.533,00
34	Kecamatan Reok Barat	593.608.660,00
35	Kecamatan Langke Rembong	3.036.433.819,00
36	Kecamatan Rahong Utara	485.881.878,00
37	Kecamatan Lelak	613.145.182,00
38	Kecamatan Cibai	678.341.788,00
39	Kecamatan Cibai Barat	588.384.207,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79.871.920,00
41	Badan Pendapatan Daerah	1.149.853.331,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	883.687.293,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	203.682.570,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	250.337.000,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	3.069.470.880,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	148.915.906,00
	- Bagian Kesra	198.421.667,00
	- Bagian Hukum	424.545.000,00
	- Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	726.840.137,00
	- Bagian Umum	11.063.599.823,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	785.169.419,00
	- Bagian Kerja Sama	24.660.088,00
	TOTAL	501.051.753.981,13

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.805.663.573,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	102.880.449.158,73
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.756.718.287,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.063.227.993,00
5	Dinas Perhubungan	9.355.371.737,08
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.073.435.012,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.295.699.560,00
8	Dinas Peternakan	1.904.564.376,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.922.391.381,00
10	Dinas Perikanan	1.869.344.067,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.818.390.175,00
12	Dinas Sosial	890.231.000,00
13	Dinas Kesehatan	163.263.744.528,33
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	880.995.338,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.825.886.178,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.923.295.435,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	9.812.088.410,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.791.824.541,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.184.119.275,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.659.629.836,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.153.099.275,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	1.123.347.583,00
23	Inspektorat Daerah	1.296.209.010,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	117.256.948.175,00
25	Sekretariat DPRD	3.397.812.155,99
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.495.249.478,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	679.466.449,00
28	Kecamatan Wae Rii	608.894.304,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	429.235.394,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	563.398.879,00
31	Kecamatan Satar Mese	456.940.682,00
32	Kecamatan Ruteng	665.321.634,00
33	Kecamatan Reok	943.910.533,00
34	Kecamatan Reok Barat	593.608.660,00
35	Kecamatan Langke Rembong	3.036.433.819,00
36	Kecamatan Rahong Utara	485.881.878,00
37	Kecamatan Lelak	613.145.182,00
38	Kecamatan Cibai	678.341.788,00
39	Kecamatan Cibai Barat	588.384.207,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79.871.920,00
41	Badan Pendapatan Daerah	1.149.853.331,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	883.687.293,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	203.682.570,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	250.337.000,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	3.069.470.880,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	148.915.906,00
	- Bagian Kesra	198.421.667,00
	- Bagian Hukum	424.545.000,00
	- Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	726.840.137,00
	- Bagian Umum	11.063.599.823,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	785.169.419,00
	- Bagian Kerja Sama	24.660.088,00
	TOTAL	501.051.753.981,13

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.018.257.405,65
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	401.234.545.166,20
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.686.295.995,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.042.772.735,82
5	Dinas Perhubungan	17.454.254.535,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.259.263.261,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.994.403.250,66
8	Dinas Peternakan	14.804.154.558,50
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	867.924.910,00
10	Dinas Perikanan	10.765.772.379,29
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.487.815.441,00
12	Dinas Sosial	715.760.954,00
13	Dinas Kesehatan	225.866.490.747,39
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	671.604.500,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	591.532.777,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	415.587.570,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	3.736.894.700,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.311.105.035,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.450.789.943,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.212.218.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.896.014.114,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	255.026.000,00
23	Inspektorat Daerah	1.282.072.602,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	116.081.543.201,19
25	Sekretariat DPRD	5.742.727.458,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Peadam Kebakaran	513.770.000,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
28	Kecamatan Wae Rii	605.270.000,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	2.403.928.000,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	1.753.651.553,00
31	Kecamatan Satar Mese	1.080.830.000,00
32	Kecamatan Ruteng	483.230.000,00
33	Kecamatan Reok	2.301.915.886,00
34	Kecamatan Reok Barat	2.214.753.509,00
35	Kecamatan Langke Rembong	3.139.761.776,00
36	Kecamatan Rahong Utara	1.652.507.500,00
37	Kecamatan Lelak	1.672.741.000,00
38	Kecamatan Cibai	2.209.812.840,00
39	Kecamatan Cibai Barat	2.248.707.848,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	5.520.758.906,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tk	5.258.760.876,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	0,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	194.763.000,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	4.172.080.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
	- Bagian Kesra	0,00
	- Bagian Hukum	0,00
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
	- Bagian Umum	31.155.480.231,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00
	- Bagian Kerja Sama	0,00
	Jumlah	920.427.550.164,70

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD per 31 Desember 2024

No (1)	SKPD (2)	Nilai (Rp) (3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.999.131.473.802,04
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	24.528.063.846,85
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.867.474.029,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.272.736.025,00
5	Dinas Perhubungan	17.703.585.768,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.419.411.347,00
8	Dinas Peternakan	4.350.630.038,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
10	Dinas Perikanan	10.359.876.675,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
12	Dinas Sosial	128.744.451,00
13	Dinas Kesehatan	19.304.918.413,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.185.000.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	18.771.670.020,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.528.800,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.494.608,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	0,00
23	Inspektorat Daerah	30.000.000,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	5.045.217.864,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
28	Kecamatan Wae Rii	1.057.228.033,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	14.000.000,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	1.222.542.947,00
31	Kecamatan Satar Mese	1.167.112.000,00
32	Kecamatan Ruteng	2.124.963.018,00
33	Kecamatan Reok	3.820.641.321,00
34	Kecamatan Reok Barat	1.175.383.600,00
35	Kecamatan Langke Rembong	8.400.675.720,00
36	Kecamatan Rahong Utara	1.241.341.000,00
37	Kecamatan Lelak	1.241.663.000,00
38	Kecamatan Cibal	2.431.338.752,00
39	Kecamatan Cibal Barat	18.020.580,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	424.862.618,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tk	22.499.988,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	0,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00
	- Bagian Adm Pemerintahan	211.630.000,00
	- Bagian Adm Pembangunan	0,00
	- Bagian Kesra	0,00
	- Bagian Hukum	0,00
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
	- Bagian Umum	2.350.162.600,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00
	- Bagian Kerja Sama	0,00
	Jumlah	2.147.104.890.863,89

Rincian Aset Tetap Lainnya pada SKPD per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	53.927.040.092,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	15.554.232.694,68
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	572.156.500,00
8	Dinas Peternakan	578.150.000,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
10	Dinas Perikanan	3.495.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
12	Dinas Sosial	0,00
13	Dinas Kesehatan	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	77.900.000,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	788.959.864,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	0,00
23	Inspektorat Daerah	4.365.800,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	296.110.188,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	573.700,00
28	Kecamatan Wae Rii	0,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	0,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	0,00
31	Kecamatan Satar Mese	0,00
32	Kecamatan Ruteng	0,00
33	Kecamatan Reok	0,00
34	Kecamatan Reok Barat	0,00
35	Kecamatan Langke Rembong	0,00
36	Kecamatan Rahong Utara	0,00
37	Kecamatan Lelak	0,00
38	Kecamatan Cibal	0,00
39	Kecamatan Cibal Barat	0,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	0,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tk	0,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	0,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	33.000.000,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	0,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
	- Bagian Kesra	300.000,00
	- Bagian Hukum	19.164.100,00
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
	- Bagian Umum	0,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00
	- Bagian Kerja Sama	0,00
	Jumlah	71.857.448.438,68

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD per 31 Desember 2024

No (1)	SKPD (2)	Nilai (Rp) (3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.033.719.184,19
2	Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga	339.955.952,52
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00
5	Dinas Perhubungan	51.220.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	29.031.760,00
8	Dinas Peternakan	109.577.712,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
10	Dinas Perikanan	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
12	Dinas Sosial	0,00
13	Dinas Kesehatan	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	0,00
23	Inspektorat Daerah	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	10.467.114.422,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
28	Kecamatan Wae Rii	0,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	0,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	0,00
31	Kecamatan Satar Mese	0,00
32	Kecamatan Ruteng	0,00
33	Kecamatan Reok	0,00
34	Kecamatan Reok Barat	0,00
35	Kecamatan Langke Rembong	0,00
36	Kecamatan Rahong Utara	0,00
37	Kecamatan Lelak	0,00
38	Kecamatan Cibal	0,00
39	Kecamatan Cibal Barat	0,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	0,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	0,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	0,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
	- Bagian Kesra	0,00
	- Bagian Hukum	0,00
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
	- Bagian Umum	0,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00
	- Bagian Kerja Sama	0,00
	Jumlah	18.030.619.030,71

Rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD per 31 Desember 2024

No (1)	SKPD (2)	Nilai (Rp) (3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.153.851.286,00
2	Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga	0,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	472.325.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	390.500.600,00
8	Dinas Peternakan	0,00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	49.995.000,00
10	Dinas Perikanan	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
12	Dinas Sosial	0,00
13	Dinas Kesehatan	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	0,00
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	852.881.600,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
22	Badan Kesbangpol Linmas	0,00
23	Inspektorat Daerah	0,00
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
28	Kecamatan Wae Rii	0,00
29	Kecamatan Satar Mese Utara	0,00
30	Kecamatan Satar Mese Barat	0,00
31	Kecamatan Satar Mese	0,00
32	Kecamatan Ruteng	0,00
33	Kecamatan Reok	0,00
34	Kecamatan Reok Barat	0,00
35	Kecamatan Langke Rembong	0,00
36	Kecamatan Rahong Utara	0,00
37	Kecamatan Lelak	0,00
38	Kecamatan Cibal	0,00
39	Kecamatan Cibal Barat	0,00
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	169.400.000,00
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00
43	Sekretariat Daerah:	
	- Bagian Organisasi	0,00
	- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan	0,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	0,00
	- Bagian Kesra	0,00
	- Bagian Hukum	0,00
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00
	- Bagian Umum	0,00
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00
	- Bagian Kerja Sama	0,00
	Jumlah	3.088.953.486,00